

BUKU I

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI** **RKPD
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2020**



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR **546** TAHUN 2020
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR **31** TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Cimahi;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan atas KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun

rencana pembangunan daerah;

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa;
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, dan pendanaannya untuk Periode 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022, RKP, dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

- (1) RPKD terdiri dari :
 - a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RPKD Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021; dan
 - b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021.
- (2) Bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RPKD Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RPKD.
- (2) Selain melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RPKD, Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil RPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal **30 Juli 2020**

WALI KOTA CIMAHI,

TTD.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal **30 Juli 2020**

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR **546**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2021

I. UMUM

Maksud penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan periode Tahun 2021 yang dimulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Tujuan penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 adalah untuk :

- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- e. mencapai hasil pelaksanaan pembangunan yang optimal, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPKD terdiri dari :

- a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021; dan
- b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021.

Bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sejalan dengan hal ini pemerintah daerah wajib menyusun RKPD. Secara substansi dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Maksud penyusunan dokumen RKPD 2021 ini adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya KUA - PPAS ini setelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA Perangkat Daerah ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Dokumen RKPD ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2021.

Tim penyusunan RKPD Tahun 2021 menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen RKPD ini tidak dapat terwujud.

Dokumen ini merupakan *living document* yang perlu disempurnakan, oleh karena itu mohon kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan dokumen RKPD di masa yang akan datang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan Nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 (satu) tahun. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing Perangkat Daerah memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Cimahi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, yang dilakukan melalui Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Salah satu dokumen perencanaan yang harus dilakukan setiap tahun adalah Penyusunan RKPD Tahun 2021.

Pembangunan daerah Kota Cimahi dilakukan secara terencana dalam upaya menuju perkembangan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Cimahi. Upaya tersebut disusun dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam RKPD.

RKPD merupakan salah satu tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 disusun melalui tahap penyelarasan dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional yang sedang disusun dengan mempertimbangkan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, serta RKPD Provinsi Jawa barat Tahun 2020, serta dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Selain itu dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 sudah harus melaksanakan amanat yang ada dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)*, yang merupakan kelanjutan dari program *Milenium development Goals (MDG's)*.

RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2021 juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021.

Dilihat dari pentahapan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, maka RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan bagian periode Pembangunan Jangka Menengah tahap IV yang merupakan Tahapan "**PENCAPAIAN**", yang berarti pada kurun waktu itu diharapkan terjadi Pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.

Dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD digunakan pendekatan sebagai berikut :

1. **Pendekatan politik**, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 telah mengakomodir hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD Kota Cimahi;
2. **Pendekatan teknokratik**, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
3. **Pendekatan partisipatif**, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;
4. **Pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*)**, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Sebagai bentuk pelaksanaan pendekatan partisipatif maka penyusunan RKPD perlu melibatkan partisipatif masyarakat, yang dilakukan melalui mekanisme Musrenbang mulai dari Forum Dialog RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan Hingga Musrenbang tingkat Kota. Sedangkan pendekatan Teknokratik dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Perangkat Daerah Kota Cimahi lainnya melalui penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Dalam Pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlukan adanya ketersediaan data dan informasi makro tentang :

1. Prinsip dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Data Indikator Makro dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
4. Prioritas dan arah perencanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021.

Dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Perencanaan tahun ke 3 (tiga) RPPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, maka disusun Dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Pra-Musyawarah pembangunan bersama seluruh *stakeholder* tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Kota Cimahi.

Dokumen ini memuat gambaran umum, hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2019, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sesuai dengan tema pada RPJMD

Kota Cimahi Tahun 2017-2022, tema pembangunan Kota Cimahi adalah **“Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas”**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017, tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilaksanakan melalui kaidah :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja;
2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan Nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

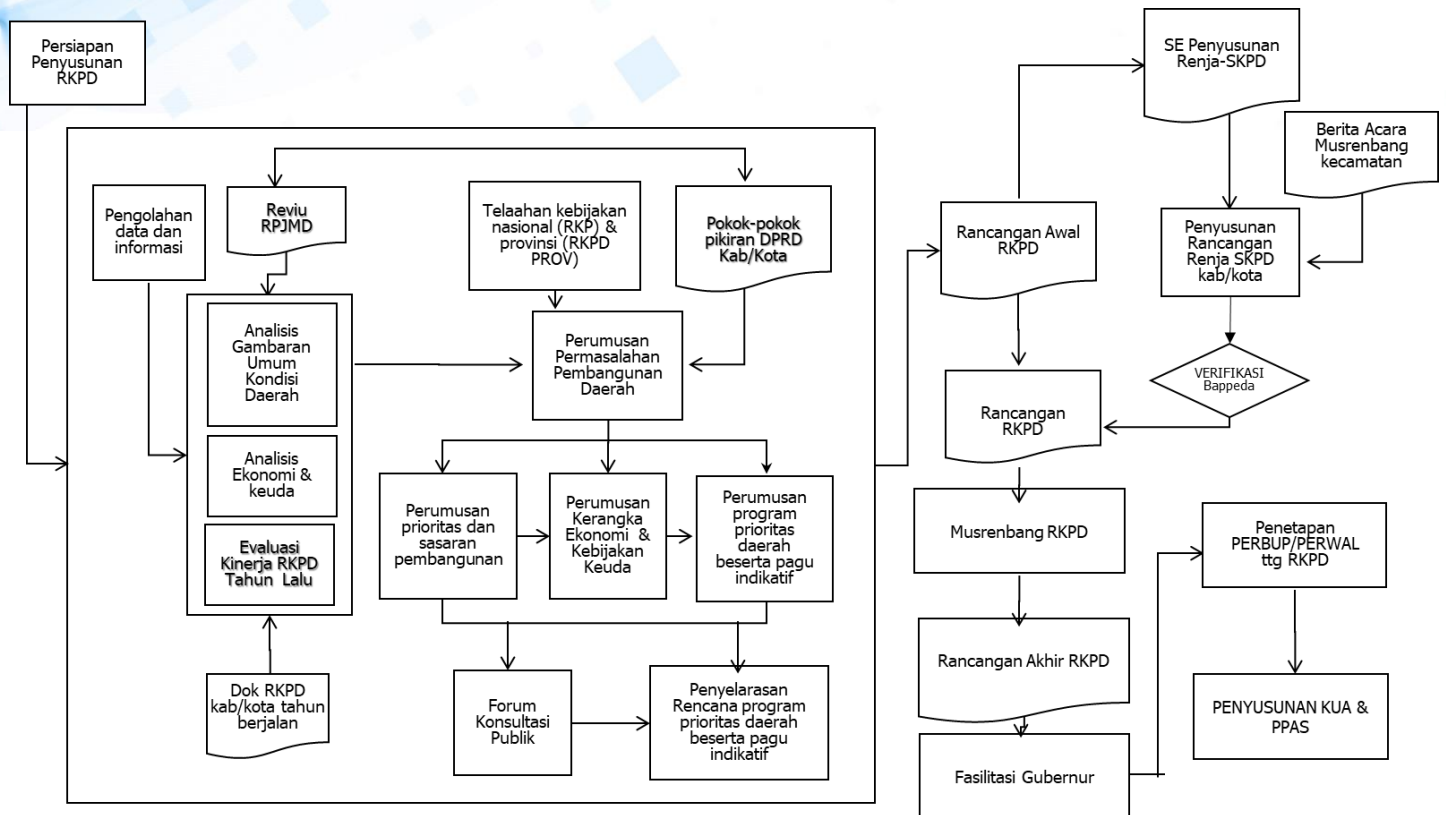
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah;
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional;
5. Rencana pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
6. Rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan kepada pemilihan strategi dan program serta kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
7. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dilaksanakan dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah, yang mana dalam proses penyusunannya didahului oleh berbagai aktivitas lainnya seperti : Forum dialog RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang

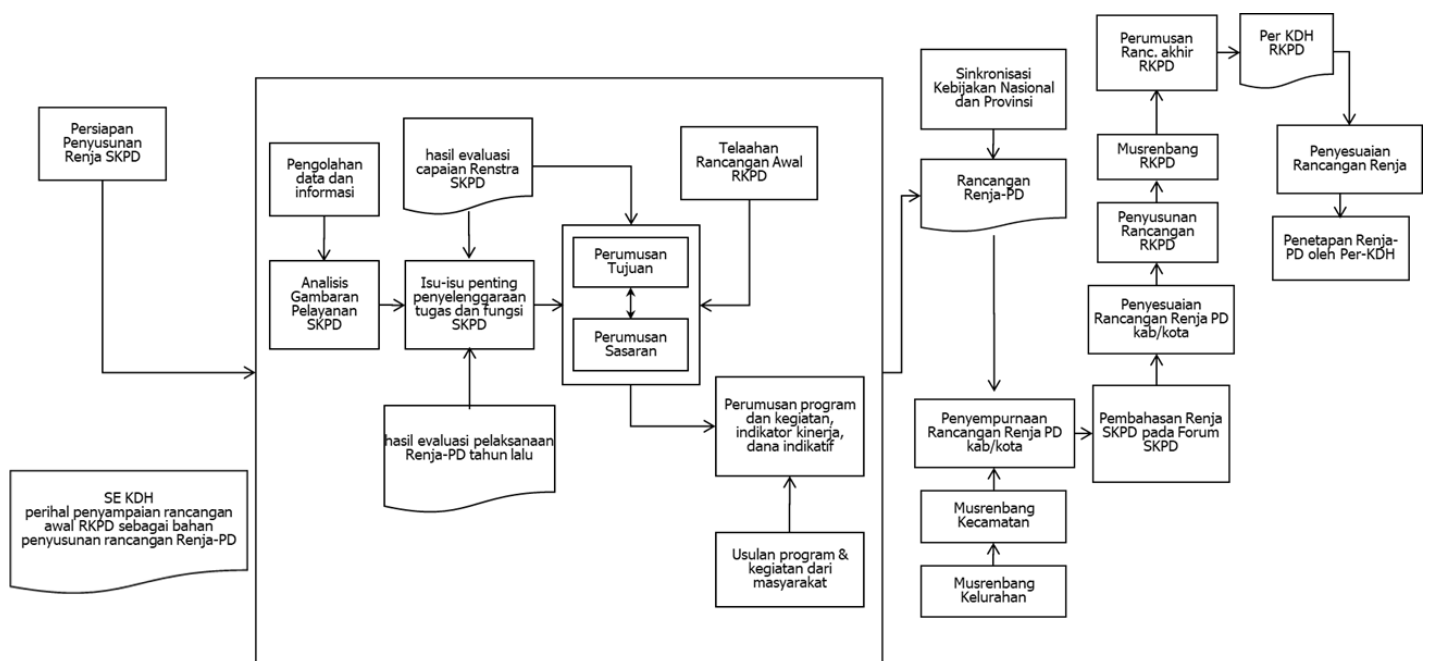
Kecamatan dan Musrenbang Kota. Selain itu juga memperhatikan Renja Perangkat Daerah, Arahan Wali Kota Cimahi dan aspirasi Legislatif melalui mekanisme Reses dan Pokok Pikiran. Hal ini merupakan implementasi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, *Top Down* dan *Bottom Up*. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sedangkan Bagan Alur Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlihatkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017

Gambar 1.2. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

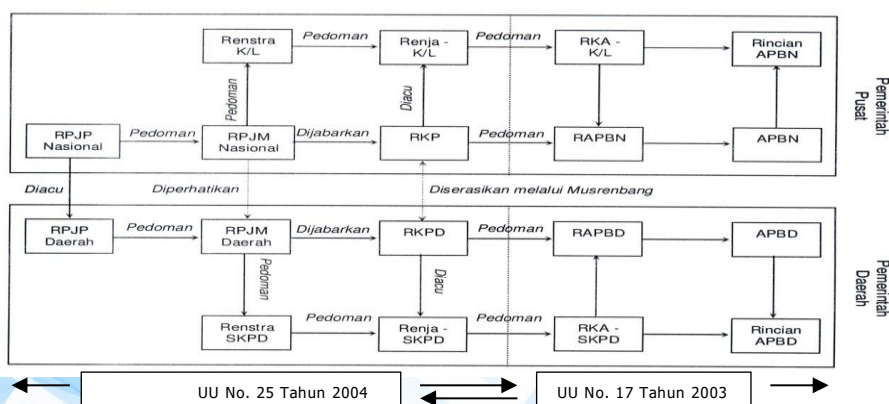
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

1.3 HUBUNGAN RKPD KOTA CIMAHI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan dokumen teknis operasional dimana, keberadaan RKPD Kota Cimahi sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Cimahi dan RPJPD Kota Cimahi merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan baik yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD, maupun RTRW Kota Cimahi.

Selanjutnya RKPD Kota Cimahi merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi. Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Cimahi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut :

Gambar 1.3.
Bagan Hubungan RKPD Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen Rancangan Awal Rencana Tahunan yang akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi dalam menyusun dokumen penganggaran (KUA, PPAS, dan RAPBD TA. 2021), sehingga dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 adalah :

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui musrenbang, serta implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs);
4. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. Pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;
6. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat dan menjelaskan Maksud, Tujuan, dan Gambaran Umum penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Tahun 2021 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut dapat menginformasikan sejauh mana kemajuan dan keberhasilan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam mendukung tujuan pembangunan.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Kota Cimahi terletak antara 1070 30' 30" - 1070 34' 30" BT dan 60 50' 00" - 60 56' 00" LS. Wilayah ini secara topografis merupakan bagian dari kawasan Lembah Cekungan Bandung dengan ketinggian tertinggi di wilayah utara $\pm$ 1.050 M dpl dan di bagian selatan $\pm$ 920 M dpl, sedangkan di bagian tengah tepatnya di wilayah sekitar stasiun kereta api $\pm$ 737 M dpl. Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi-Padalarang-Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung-Jakarta.

Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Selain itu, Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia.

Secara administrasi, luas wilayah Kota Cimahi adalah 40,2km² yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Kecamatan Cimahi Selatan	16,94
2	Kecamatan Cimahi Tengah	10,11
3	Kecamatan Cimahi Utara	13,32
	Total (Km²)	40,37

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2019

Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, dan Andir Kota Bandung.

Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 m hingga +1.000 m diatas permukaan laut. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah yang memiliki kemiringan lereng 0–8% di wilayah Kota Cimahi adalah 3.601,75 ha, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan, daerah yang memiliki kemiringan lereng 8–15% ini di

wilayah Kota Cimahi adalah 216,07 ha, terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Utara, daerah yang memiliki kemiringan lereng 15–25% ini di wilayah Kota Cimahi adalah 144,15 ha dan daerah yang memiliki kemiringan lereng ini di wilayah Kota Cimahi adalah 22.68 ha. Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (%)					Total (km ²)
		0-8	8-15	15-25	25-40	>40	
1	Cimahi Selatan	14,58	0,63	0,81	0,67	0,20	16,9
2	Cimahi Tengah	9,85	0,06	0,049	0,03	0,002	10,0
3	Cimahi Utara	11,76	0,71	0,47	0,29	0,07	13,3
	Total (Km²)	36,20	1,40	1,33	0,99	0,28	40,2

Sumber : Bappeda Kota Cimahi

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, morfologi wilayah Kota Cimahi dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Satuan Morfologi

Dataran Satuan morfologi dataran ini adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar dengan kisaran kemiringan lereng antara 0–8%. Bentuk bentang alam ini mendominasi wilayah Kota Cimahi dengan luas sekitar 3.601,75 ha.

2. Satuan Morfologi

Perbukitan Bentang alam perbukitan di wilayah Kota Cimahi terdiri atas perbukitan landai dengan kemiringan berkisar antara 8–15% seluas 216,07 ha, perbukitan sedang dengan kemiringan berkisar antara 15–40% seluas 233,22 ha, dan perbukitan terjal dengan kisaran kemiringan lebih dari 40% seluas 22,68%.

Kondisi hidrogeologi Kota Cimahi secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu air permukaan dan air tanah. Kondisi air permukaan/sungai yang melalui Kota Cimahi yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibaligo dan Sungai Cibeureum seperti diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Inventarisasi Sungai Kota Cimahi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Cisangkan Hulu-Hilir	16.91	-	-	-		0,49
	Cisangkan Hulu	-	2	2	0.20	0.75	-

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
	Cisangkan Tengah	-	3	3	0.30	1.16	-
	Cisangkan Hilir	-	6	6	0.70	0.9	-
2	Cibaligo Hulu-Hilir	35.04	-	-	-		0,20
	Cibaligo Hulu	-	3	3	1.20	1.64	-
	Cibaligo Tengah	-	2.5	2.5	0.5	1.54	-
	Cibaligo Hilir	-	3	3	0.65	1.14	-
3	Cibabat Hulu-Hilir	35.04	-	-	-		0,20
	Cibabat Hulu	-	1.5	1.5	0.20	1,77	-
	Cibabat Tengah	-	4	4	0.60	1.12	-
	Cibabat Hilir	-	2	2	0.30	1.19	-
4	Cibeureum Hulu-Hilir	24.66	-	-	-		0,20
	Cibeureum Hulu	-	4	4	0.75	1.19	-
	Cibeureum Tengah	-	6	6	0.50	1.32	-
	Cibeureum Hilir	-	8	8	0.50	1	-
5	Cimahi Hulu-Hilir	18.61	-	-	-		0,38
	Cimahi Hulu	-	6	6	0.3	1.13	-
	Cimahi Tengah	-	4	4	0.5	1.21	-
	Cimahi Hilir	-	7	7	1	1.18	-

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2016

Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat, Baros, Utama dan Karang Mekar. Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama. Sungai melintasi Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong. Sungai Cibeureum berasal dari bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong.

Menurut perhitungan Metode Storet terhadap data pemantauan kualitas air (2009) menunjukkan bahwa hampir seluruh anak sungai di Kota Cimahi terindikasi sebagai sungai dengan kategori cemar berat. Hanya satu, dari 10 lokasi titik pemantauan yang masuk ke dalam kategori cemar sedang (Cimahi Hulu). Beberapa parameter yang melebihi baku mutu dari kelas air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan anak-anak sungainya di Jawa Barat adalah : Residu Terlarut, pH, BOD5, COD, DO, Total Fosfat sebagai P, Crom (IV), H2S, Fecal dan Total Coliform.

Kota Cimahi telah memiliki Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah. Kota Cimahi terletak di sebelah selatan Sesar

Lembang. Sesar Lembang memiliki pergerakan menurun (sesar normal), dimana bagian utara lebih rendah dari pada bagian selatan. Hal ini menyebabkan air tanah di bagian utara Sesar Lembang tidak mengalir ke sebelah selatan. Oleh karena itu, air tanah di Kota Cimahi berasal dari air tanah di sebelah selatan Sesar Lembang. Berdasarkan pembagian Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Barat oleh DGTL (1983), wilayah Kota Cimahi termasuk ke dalam CAT wilayah Bandung-Soreang. CAT Bandung-Soreang ini berbatasan dengan CAT Lembang di sebelah utara dan CAT Batujajar disebelah barat.

Menurut Kantor Lingkungan Hidup (2010), aliran air tanah Kota Cimahi dikontrol oleh topografi yang sebagian besar semakin rendah ke arah selatan sehingga secara morfologi Kecamatan Cimahi Utara berperan sebagai daerah resapan Kota Cimahi. Oleh karena itu, perlu dilakukan konservasi di daerah Cimahi Utara untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah Kota Cimahi.

Kondisi hidrogeologi air tanah Kota Cimahi ditandai dengan adanya daerah aliran langka. Potensi mata air langka ini tersebar di Kecamatan Cimahi Selatan seluas 553,02 ha dan di sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Tengah seluas 3,73 ha. Disamping itu terdapat akuifer produktif di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 855,12 ha. Potensi air tanah di Kota Cimahi secara hidrogeologis dapat dibagi menjadi 3 wilayah air tanah :

1. Wilayah akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada pori-pori antar butir dari endapan kipas vulkanik muda, yang terdiri dari tufa pasir dan tufa berbatu apung. Berdasarkan data hasil pemboran sumur bor PDAM (kedalaman 150-180 m), debit sumur berkisar 13-34 Liter/detik, harga transmissivity (keterusan) berkisar 100-1.000 m²/hari. Kedalaman muka air tanah statik berkisar 0.6-50 m bmt (bawah muka tanah). Penyebaran wilayah air tanah ini meliputi bagian timur Kecamatan Cimahi selatan serta sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Tengah;
2. Wilayah akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada celah dan ruang antar butir dari endapan tufa pasir dan breksi. Debit sumur bor umumnya kurang dari 7 Liter/detik, harga *transmissivity* (keterusan) kurang dari 100 m²/hari. Kedalaman muka air tanah statik berkisar 20-50 m bmt (bawah muka tanah). Wilayah ini dijumpai dibagian selatan Kecamatan Cimahi Selatan serta pada sebagian besar wilayah kecamatan Cimahi Utara. Air tanah dangkal umumnya dijumpai pada kedalaman > 10 meter;
3. Wilayah akuifer setempat
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada celah endapan breksi vulkanik dan lava. Wilayah ini dijumpai terutama dibagian barat kecamatan Cimahi Selatan yang berbatasan dengan Batujajar;

4. Penggunaan lahan di Kota Cimahi terdiri dari 2 (dua) jenis penggunaan lahan, yaitu: penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan tidak terbangun. Penggunaan lahan terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2013 didominasi oleh penggunaan lahan sebagai perumahan teratur (456,531 ha), perumahan tidak teratur (1500,848 ha) dan industri (500,365 ha). Sedangkan luas penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2013 didominasi oleh penggunaan lahan sebagai pertanian lahan kering seluas 1.901,773 ha.

Penggunaan lahan Kota Cimahi dirinci menurut kawasan-kawasan fungsional yang meliputi kawasan lindung atau berfungsi lindung dan kawasan budidaya, yang dalam hal ini adalah kawasan budidaya perkotaan. Dengan demikian, pola penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung (Kuburan, Taman Kota, Kebun Campuran, Rawa, Sungai, dsb) dan kawasan budidaya (Perumahan, Pasar, Toko, Perkantoran Barang dan Jasa, Perkantoran Pemerintahan, Militer, Industri, dan Fasilitas umum lainnya) dalam wilayah Kota Cimahi.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kota Cimahi Tahun 2011 – 2015 (Ha)

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Perumahan Teratur	474,630	480,000	456,531	465,541	465,541
Perumahan Tidak Teratur	797,250	802,300	1.500,850	1.501,928	1.501,928
Kuburan	20,110	23,110	18,814	18,814	18,814
Pasar	3,980	3,980	26,335	26,335	26,335
Toko, Warung, Kios	19,600	16,600			
Rumah Makan	2,670	2,670			
Bank	1,940	1,940	4,892	4,892	4,892
Stasiun KA	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Industri	504,250	504,250	500,365	500,575	500,575
Kantor Pemerintah	14,150	14,150	4,895	5,972	5,972
Bangunan Militer	153,400	153,400	143,123	143,123	143,123
Jasa Pendidikan	76,750	76,750	54,739	54,739	54,739
Jasa Kesehatan	21,250	21,250	17,669	-	-
Tempat Peribadatan	4,250	4,250	3,645	3,645	3,645
Jasa Pelayanan Umum	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
Tanah Kosong	99,030	98,650	122,329	133,509	133,509
Pertanian Tanah Basah (sawah)	458,000	458,000	568,720	568,720	568,720
Pertanian Tanah Kering (tegalan)	1.094,400	1.094,400	1.901,770	1.901,773	1.901,773
Perikanan Kolam	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130
Kebun Campur	150,670	141,670	96,744	96,894	96,894
Taman Kota	24,250	24,250	21,250	21,250	21,250
Rawa	1,780	1,780	8,540	8,540	8,540

Jalan Tol	27,470	27,470	269,628	269,628	269,628
Sungai	15,340	15,340	14,306	14,306	14,306
Lain-lain	45,140	45,140	94,029	94,029	94,029

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya kota adalah kawasan wilayah kota yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pengembangan wilayah di Kota Cimahi diarahkan berorientasi *Green Building* dengan proses pembangunan dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berpegang kepada kaidah bersinambungan. Hal ini tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi 2012 - 2032 meliputi :

1. Kawasan Perumahan
 - a. Pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya, meliputi perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Karangmekar; perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros dan sebagian Kelurahan Setiamanah; dan perumahan Kepadatan rendah diarahkan di sebagian Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, sebagian Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Setiamanah;
 - b. Pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan sebagian Kecamatan Cimahi Utara;
 - c. Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai di Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern, dan perdagangan dan jasa lainnya.
3. Kawasan Peruntukkan Industri
 - a. Pengembangan kawasan industri menengah dan besar, adalah pengembangan kawasan industri di Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan serta Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan prasarana pengelolaan limbah industri terpadu;

- b. Pengembangan kawasan industri kreatif adalah kawasan industri kreatif berbasis teknologi informasi di Baros, Kecamatan Cimahi Tengah;
 - c. Rencana pengembangan industri kecil dan rumah tangga dengan prinsip ramah lingkungan.
4. Pengembangan Kawasan Peruntukaan Pariwisata
 - a. Pengembangan Wisata Budaya, Agroeduwisata di Kelurahan Cipageran dan Desa Wisata Ketahanan Pangan (DEWITAPA) Kampung Cireunde di Kelurahan Leuwigajah;
 - b. Pengembangan Wisata Heritage dan Militer di Kecamatan Cimahi Tengah.
5. Pengembangan Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Sosial
 - a. Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi : peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Cimahi di Jalan Raden Demang Hardjakusumah, peningkatan kawasan perkantoran skala kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi di Jalan Julaeha Karmita, Kelurahan Cimahi dengan penyediaan ruang terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial, peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, Baros *Information Technology Center* (BITC) di Jalan HMS. Mintaredja Kelurahan Baros, pengembangan kawasan Cimahi *Techopark* di Kecamatan Cimahi Selatan dan pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Kawasan perkantoran swasta mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta berlokasi di kawasan yang diperuntukkan bagi fungsi perdagangan dan jasa.
6. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Cimahi meliputi: Markas Brigif – 15 Kujang II yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarhanud yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikpal yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikhub yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikpom yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikjas yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikbekang yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikpengmilum yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kodim 0609/Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Yonarmed – 4/105 GS yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kiban Yonzipur-3/Yudha Wirograha yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Rumkit TK. II 03.05.01 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Denbekang III-44-02.A yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Benglap-A-03-43-02 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Domatzi yang terletak di Kecamatan

Cimahi Tengah, Koramil 0609-22 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Koramil 0609-25 yang terletak di Kecamatan Cimahi Utara.

7. Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau
Pengembangan RTNH di kawasan komersial dan perkantoran di Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros dan perumahan tersebar di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.
8. Kawasan peruntukan Ruang untuk Sektor Informal
Merupakan sektor yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal di lokasi yang direncanakan dengan membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan fungsi pasar, dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal.
9. Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana
Pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana gunung berapi diarahkan di bagian utara Kota serta di bagian selatan kota untuk mengantisipasi bahaya banjir dan gunung berapi.
10. Pengembangan kawasan peruntukkan perikanan
Pengembangan kawasan peruntukkan budidaya perikanan air tawar melalui optimalisasi produksi benih ikan air tawar.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

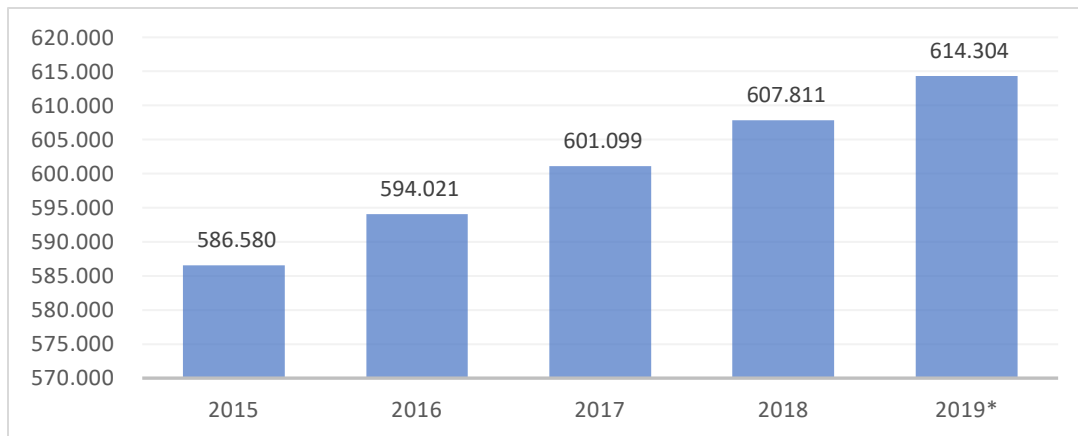
Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah longsor, rawan banjir, dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan rawan tanah longsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kelerengan diatas 15%. Kawasan rawan banjir adalah wilayah yang berpotensi banjir. Sedangkan Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu seluas 98% ha.

Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan longsor dilakukan dengan menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan aliran gunung berapi dengan menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi serta mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

2.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2019 adalah 614.304 jiwa (proyeksi BPS). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,07 persen atau sebanyak 6.493 jiwa.

Gambar 2.1.
Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

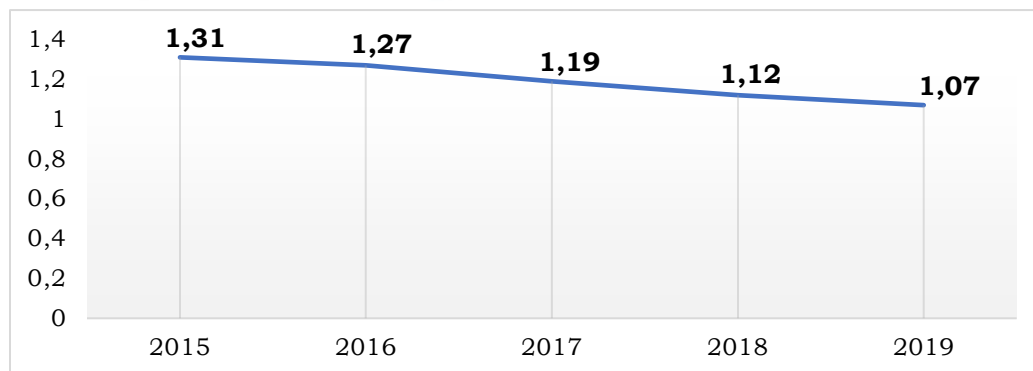


Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2016, 2017, 2018 2019 dan 2020, BPS, diolah

Keterangan: *Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 (pertengahan tahun/ Juni)

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,07 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

Gambar 2.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020

Laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dan diantisipasi supaya tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yang ada di Jawa Barat maka laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi tergolong sedang. Sebagai perbandingan laju penduduk, maka berikut ini disajikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan laju pertumbuhan penduduk rendah.

Tabel 2.1.
Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Cianjur	0,38	0,32	0,25	0,18	0,11
Kabupaten Tasikmalaya	0,43	0,36	0,29	0,23	0,16
Kota Bandung	0,43	0,37	0,29	0,23	0,17
Kota Tasikmalaya	0,41	0,32	0,27	0,20	0,12
Kota Banjar	0,50	0,28	0,27	0,24	0,16

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun, 2020, diolah

Jumlah penduduk Cimahi sebanyak 614.304 jiwa pada Tahun 2019 tersebar di 3 (tiga) kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 269.072 jiwa. Walau Kecamatan Cimahi Selatan memiliki penduduk terbanyak, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 17.594 jiwa/km². Kepadatan ini bahkan berada diatas kepadatan penduduk Kota Cimahi yaitu 15.281 jiwa/km².

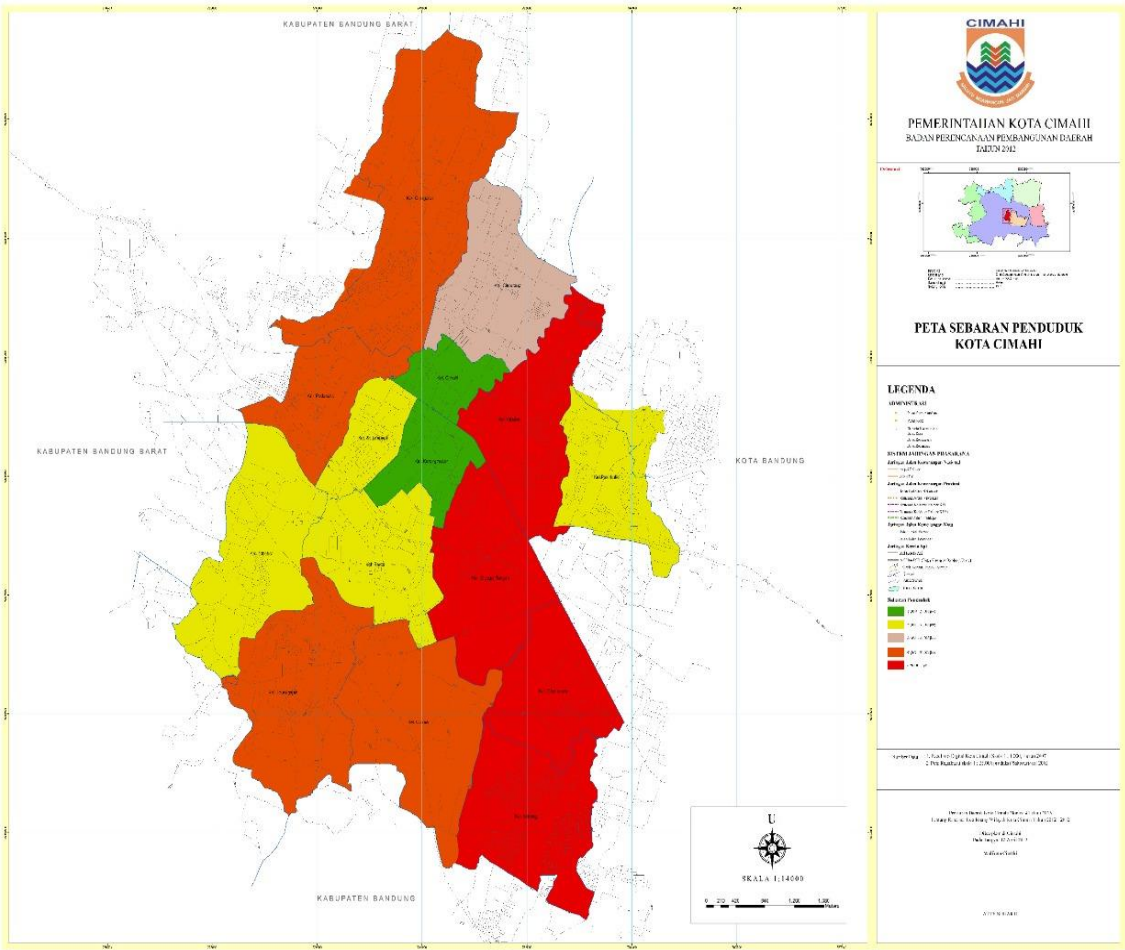
Tabel 2.2.
Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2018 dan 2019

No	Kecamatan	2018		2019	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Cimahi Selatan	265.854	15.731	269.072	15.921
2.	Cimahi Tengah	174.457	17.446	175.945	17.594
3.	Cimahi Utara	167.500	12.594	169.287	12.728
	Kota Cimahi	607.811	15.120	614.304	15.281

Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2019 dan 2020, BPS, diolah

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Gambar 2.3.
Peta Sebaran Penduduk Kota Cimahi



Sumber: Bappeda Kota Cimahi

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Kinerja perekonomian Kota Cimahi secara makro ditunjukkan oleh pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto Nilai PDRB. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cimahi.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan. PDRB ADHB Cimahi Tahun 2019 mencapai Rp 32.226,02 miliar, berarti meningkat sebesar 10,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.986,02 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 29.240,00 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Lebih rinci mengenai nilai PDRB ADHB Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.3.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015 (Juta Rupiah)	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018* (Miliar Rupiah)	2019** (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55.191,70	56.678,44	58.533,77	60,60	65,07
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	10.594.327,71	11.449.021,68	12.199.201,27	13.639,67	15.048,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	61.433,31	73.928,13	84.634,73	96,17	106,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.009,49	13.739,10	16.093,81	18,29	17,98
F	Konstruksi	2.830.125,47	3.030.124,37	3.366.031,43	3.777,64	4.086,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.971.962,98	4.274.509,74	4.571.454,73	4.838,01	5.170,27
H	Transportasi dan Pergudangan	884.841,31	976.057,23	1.059.736,86	1.143,21	1.262,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	303.376,66	323.315,32	357.225,24	394,86	434,28
J	Informasi dan Komunikasi	1.008.763,07	1.153.803,45	1.312.679,70	1.429,52	1.515,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	677.229,65	752.630,51	842.443,70	922,50	962,56
L	Real Estate	204.521,30	219.146,27	238.555,29	262,20	286,18
M.N	Jasa Perusahaan	38.893,22	42.697,26	47.005,04	52,19	59,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	607.451,51	639.472,95	692.283,71	725,98	749,95
P	Jasa Pendidikan	831.806,93	931.434,60	1.053.928,40	1.122,81	1.274,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	210.301,11	238.848,76	266.216,16	293,17	319,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	354.386,31	387.701,93	424.435,97	463,22	508,10
Produk Domestik Regional Bruto		22.646.621,73	24.563.109,76	26.590.459,82	29.240,03	32.226,02

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

Keterangan:

* Angka Sementara



RANCANGAN AKHIR RKPD KOTA CIMAHI TAHUN 2021

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4.
Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	46,78	46,61	45,88	45,69	47,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,30	0,32	0,33	0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	12,50	12,34	12,66	13,10	12,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,54	17,40	17,19	16,86	16,04
H	Transportasi dan Pergudangan	3,91	3,97	3,99	3,94	3,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,32	1,34	1,36	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	4,45	4,70	4,94	4,93	4,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	3,06	3,17	3,18	2,99
L	Real Estate	0,90	0,89	0,90	0,90	0,89
M.N	Jasa Perusahaan	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,68	2,60	2,60	2,56	2,33
P	Jasa Pendidikan	3,67	3,79	3,96	4,08	3,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,97	1,00	1,01	0,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,56	1,58	1,60	1,60	1,58
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

* Angka Sementara

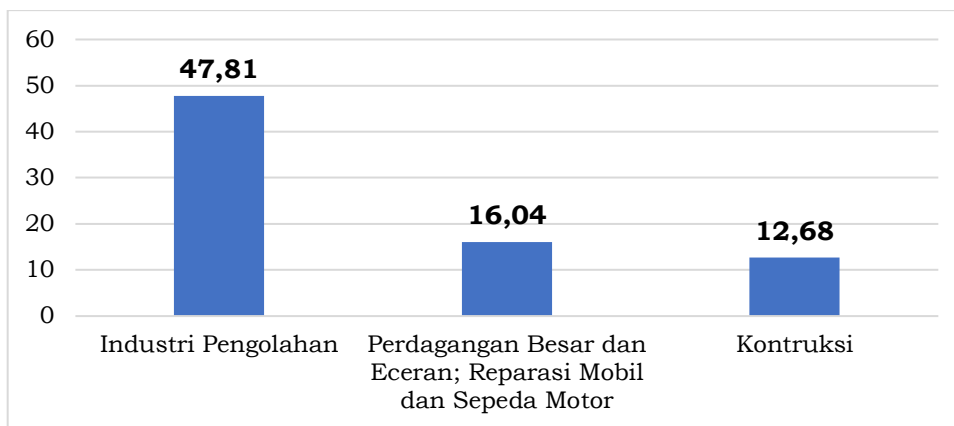
** Angka Sangat Sementara

Pergeseran struktur lapangan usaha sebagian penduduk Kota Cimahi, dapat terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan. Lapangan usaha yang terus mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi selama periode 2015-2019 adalah Pengadaan Listrik dan Gas, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa Perusahaan. Sementara lapangan usaha lainnya fluktuatif cenderung menurun. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya cenderung menurun. Salah satu penyebab utama menurunnya peranan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan adalah terbatasnya luas lahan di daerah perkotaan.

Ketersediaan lahan merupakan modal utama untuk pengembangan lapangan usaha tersebut.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 47,81 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,04 persen, dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,68 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Gambar 2.4.
Kontribusi Sektor Dominan Terhadap Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2019



Sumber: BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan data tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,84 persen. Hal ini meningkat sebesar 0,38 persen dibanding tahun 2018. Percepatan laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di lapangan usaha Industri Pengolahan, terutama industri tekstil. Meningkatnya produksi ini disebabkan oleh permintaan ekspor yang naik selama dua tahun terakhir.



Tabel 2.5.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015 (Juta Rupiah)	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018* (Miliar Rupiah)	2019** (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.136,81	32.366,21	32.632,75	32,81	33,59
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	8.270.654,42	8.626.401,50	8.983.519,08	9.675,44	10.584,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47.503,24	50.785,72	52.217,88	55,20	56,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.966,48	10.542,89	11.230,07	11,81	10,87
F	Konstruksi	2.318.046,31	2.431.021,28	2.601.749,62	2.786,35	2.913,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.166.136,83	3.345.759,70	3.490.134,21	3.591,57	3.722,03
H	Transportasi dan Pergudangan	610.423,59	662.305,37	696.741,29	733,66	782,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	222.942,22	233.377,32	248.355,14	264,67	282,31
J	Informasi dan Komunikasi	1.063.886,57	1.215.106,31	1.358.466,48	1.482,69	1.587,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	534.241,26	577.640,44	616.995,05	661,02	677,72
L	Real Estate	157.799,92	166.928,07	179.072,42	194,18	210,60
M.N	Jasa Perusahaan	29.773,37	32.071,87	34.678,38	37,46	40,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	394.041,50	405.235,18	421.466,17	427,17	439,46
P	Jasa Pendidikan	617.436,23	668.251,23	724.215,38	754,44	785,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.634,98	154.854,14	166.574,77	178,63	190,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	257.817,33	269.006,97	289.081,60	305,51	324,71
Produk Domestik Regional Bruto		17.876.441,07	18.881.654,21	19.893.683,43	21.192,60	22.641,83

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Cimahi pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Cimahi tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 22.641,83 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.449,23 miliar dari 21.192,60 miliar rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,84 persen, lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,67 persen.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 didorong oleh pertumbuhan beberapa lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan; Real Estate; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Industri Pengolahan tumbuh sebesar 9,40 persen, disusul oleh Real Estate sebesar 8,46 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,06 persen. Sementara lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan negatif yaitu -7,93 persen.

Tabel 2.6.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(4,70)	(2,23)	0,82	1,86	2,38
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,00	4,31	4,13	5,34	9,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,64	6,91	2,82	5,72	2,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,94	5,78	6,52	5,16	-7,93
F	Konstruksi	4,42	4,87	7,02	7,63	4,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,28	5,67	4,32	3,95	3,63
H	Transportasi dan Pergudangan	5,46	8,50	5,20	5,30	6,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,88	4,68	6,42	6,57	6,67
J	Informasi dan Komunikasi	17,59	14,21	11,80	9,14	7,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,05	8,12	6,81	7,13	2,51
L	Real Estate	4,68	5,78	7,28	8,44	8,46
M,N	Jasa Perusahaan	7,59	7,72	8,13	8,01	6,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06	2,84	4,01	1,35	2,88
P	Jasa Pendidikan	8,44	8,23	8,37	5,23	4,14

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,52	8,57	7,57	7,24	6,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,45	4,34	7,46	5,68	6,29
Produk Domestik Regional Bruto		5,43	5,63	5,43	5,68	6,84

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

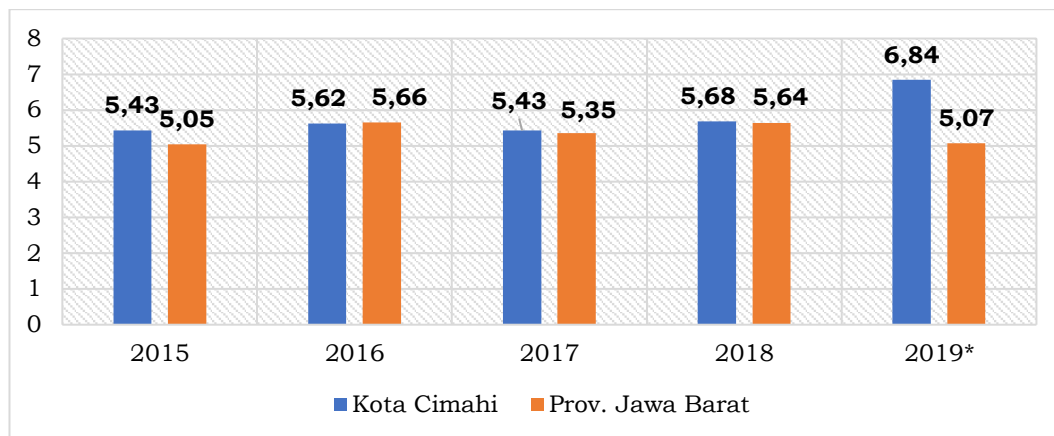
Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dalam kurun waktu 2015-2019 LPE Kota Cimahi stabil berada pada kisaran angka 5% per tahun dan mencapai 6,84% pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat, maka LPE Kota Cimahi Tahun 2019 berada diatas nilai LPE Provinsi Jawa Barat yaitu 5,07%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

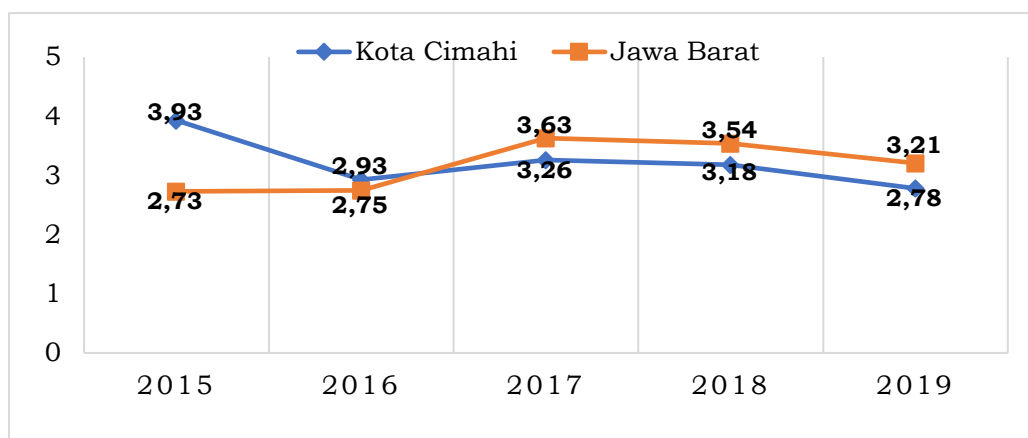
Keterangan: *Angka sangat sementara

2.2.2. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan suatu cerminan interaksi antar *supply* dan *demand* yang dapat menggambarkan kinerja moneter pada suatu daerah. Kota Cimahi tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.

Nilai inflasi di Kota Cimahi mengacu kepada kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Perkembangan Laju inflasi Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil di angka rata-rata 3,22 persen dengan rata-rata penurunan 7,30 persen/tahun seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.6.
Perkembangan Inflasi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019



Sumber:

- Analisis Aspek dan Indikator Kinerja Sektor Ekonomi 2020 Kota Cimahi, BPS, diolah
- Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2020, BSP, diolah

2.2.3. PDRB Perkapita

Selanjutnya, salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Cimahi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,60 juta rupiah dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019

mencapai 52,46 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.11.

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
PDRB (miliar rupiah):					
ADHB	22.646,62	24.563,81	26.590,46	29.240,03	32.226,02
ADHK	17.876,44	18.882,16	19.907,13	21.192,60	22.641,83
PDRB per Kapita (Juta Rupiah):					
ADHB	38,6	41,35	44,24	48,11	52,46
ADHK	30,48	31,79	33,12	34,87	36,86
Jumlah Penduduk	586.580	594.021	601.099	607.811	614.304
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,31	1,27	1,19	1,12	1,07

Sumber: BPS - PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Keterangan:

* Angka Sementara

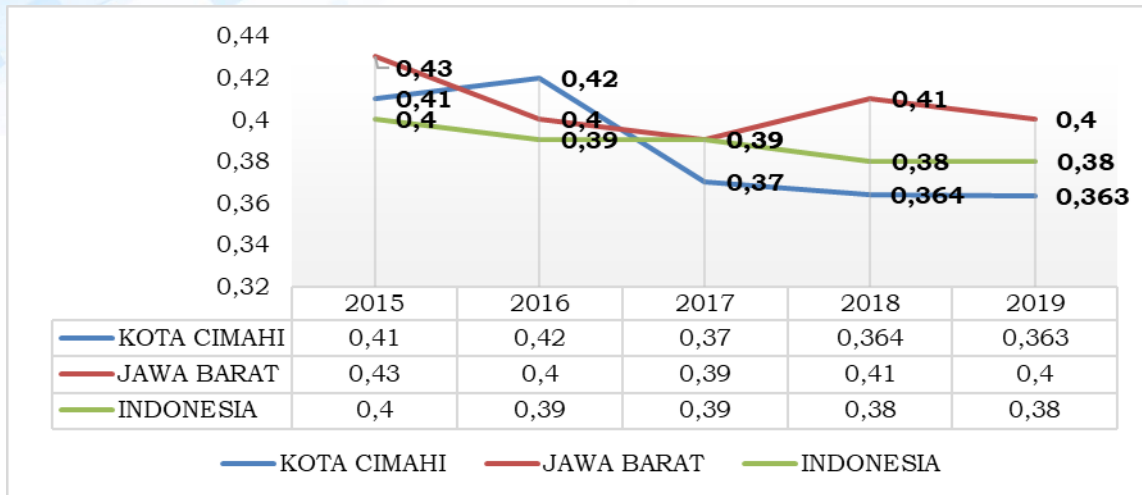
** Angka Sangat Sementara

2.2.4. Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dalam bagian ini dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data pada tabel di bawah terlihat bahwa Indeks Gini yang merepresentasikan ketimpangan dalam pendapatan antar golongan pendapatan di Kota Cimahi memiliki kecenderungan meningkat.

Gambar 2.10.

Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2019



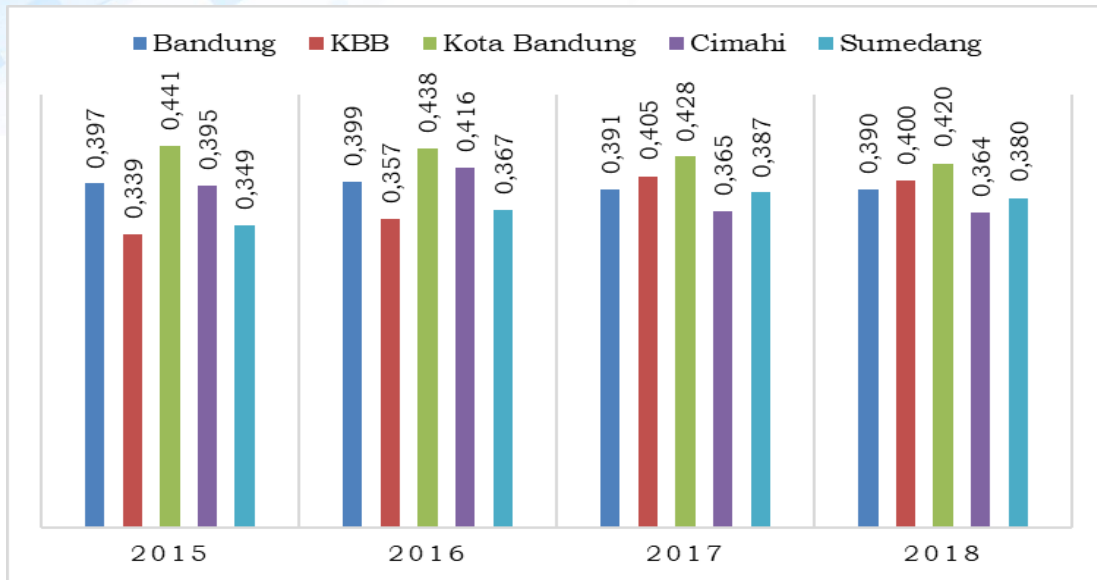
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2019, BPS, diolah

Selama periode 2015-2016 indeks gini Kota Cimahi menurun sebesar 0,021 poin, yang semula 0,41 di tahun 2015 menjadi 0,42 di tahun 2016. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan 2019 indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,363 di tahun 2019. Dengan kecenderungan penurunan indeks gini ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin di Cimahi yang beberapa tahun terakhir cenderung menurun.

Bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa Cimahi memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih kecil dibanding Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Gambar 2.11.

Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/Kabupaten Sekitar Tahun 2015-2018



Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2018 dan 2019, BPS

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa nilai indeks gini Kota Cimahi pada tahun 2017 dan 2018 selalu paling rendah bila dibandingkan dengan nilai indeks gini kabupaten/kota di sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Cimahi relarif lebih kecil dibandingkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang diukur dalam keberhasilan pembangunan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu indikator dalam mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 2.5
Perkembangan IPM Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jawa Barat	68,80	69,50	70,05	70,69	71,30
Kota Cimahi	76,06	76,42	76,69	76,95	77,56

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

IPM Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 77,56 poin angka ini sudah masuk dalam kategori tinggi dan secara posisi sudah berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Barat yaitu 71,30 poin. IPM Kota Cimahi

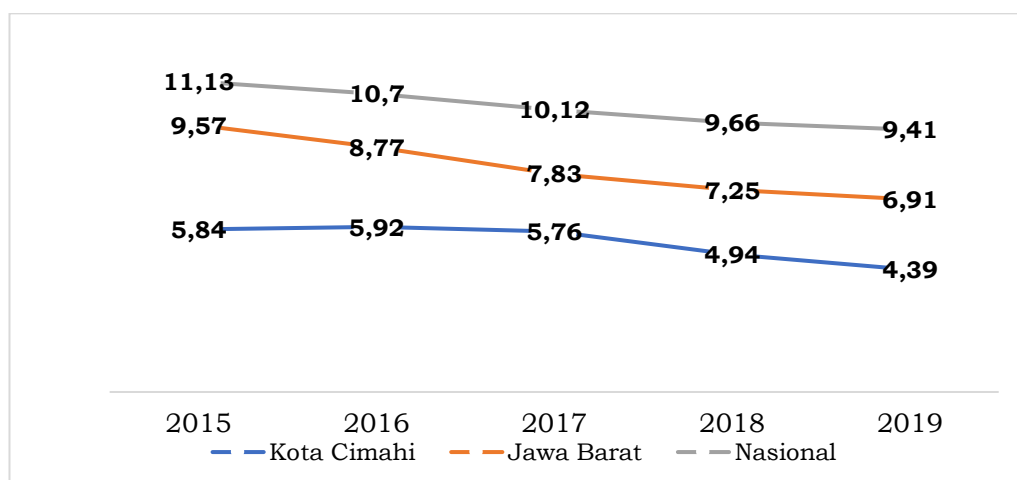
sudah masuk dalam kategori tinggi, meskipun demikian secara pertumbuhan masih berada di bawah posisi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2014-2018 IPM Kota Cimahi meningkat 1,50 poin sedangkan Provinsi Jawa Barat naik menjadi 2,50 poin.

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih baik sejak pemekaran. Seluruh dimensi pembangunan mengalami kemajuan yang cukup pesat.

2.2.6. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2015-2019. Pada Tahun 2015 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi sebesar 5,84 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 5,92 persen. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan 2019 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi terus mengalami penurunan dari 5,92 persen pada tahun 2016 menjadi 4,39 persen pada tahun 2019.

Gambar 2.7.
Persentase Penduduk Miskin
Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kota Cimahi, 2019

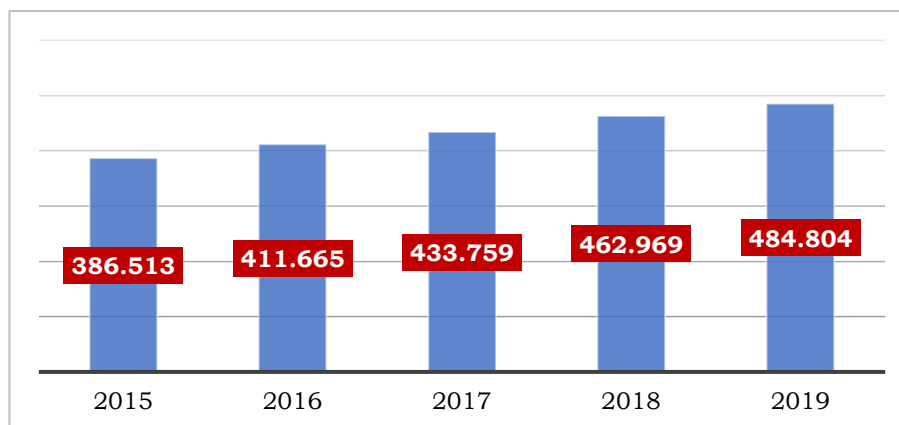
Penurunan kemiskinan tidak hanya diupayakan oleh pemerintah daerah, namun juga didukung oleh seluruh masyarakat serta dunia usaha di Kota Cimahi. Dari gambar diatas, diketahui

bahwa persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2015 sampai dengan 2019 selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kota Cimahi sebesar 4,39 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya sebesar 6,82 persen.

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2015-2019, tahun 2015 sebesar Rp 386.513 dan di tahun 2019 sebesar Rp 484.804.

Gambar 2.8.
Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2015-2019
(Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber: BPS Kota Cimahi

Kondisi kemiskinan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) indikasi yaitu meningkatnya garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang. Tercatat selama periode 2015–2019 Garis kemiskinan Kota Cimahi meningkat dari 386.513 Rp/Kapita/bulan menjadi 484.804 Rp/kapita/bulan. Kenaikan garis kemiskinan yang terjadi setiap tahun di Kota Cimahi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya inflasi, meningkatnya rata-rata pengeluaran per

kapita per bulan, dan adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

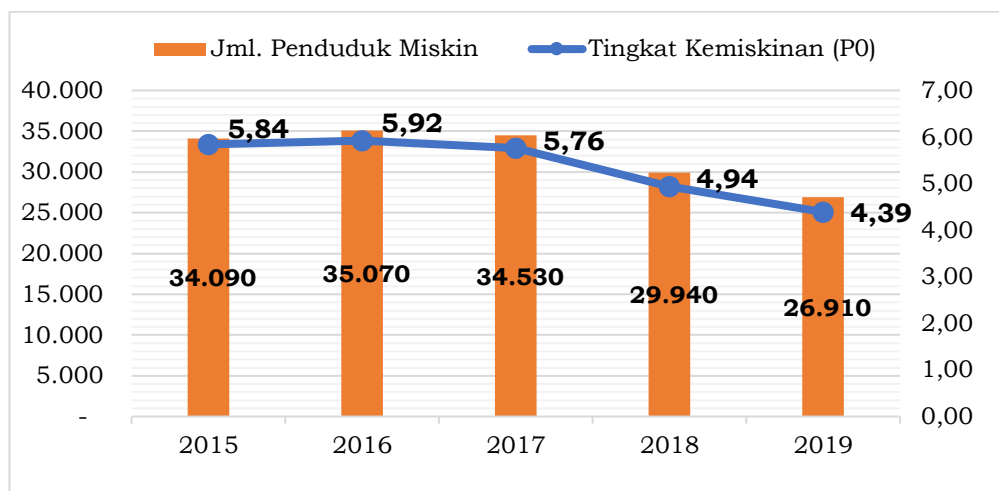
Tabel 2.7.
Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	386.513	411.665	433.759	462.969	484.804
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	34.090	35.070	34.530	29.940	26.910
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,84	5,92	5,76	4,94	4,39

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2019

Seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi, tingkat kemiskinan pun mengalami tren penurunan. Selama periode Tahun 2015–2019 jumlah penduduk miskin Kota Cimahi berkurang dari 34.090 jiwa pada Tahun 2015 menjadi 26.910 jiwa di tahun 2019. Sementara tingkat kemiskinan Kota Cimahi berkurang 1,45 poin dari 5,84 persen menjadi 4,39 persen.

Gambar 2.9.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi Tahun 2015–2019

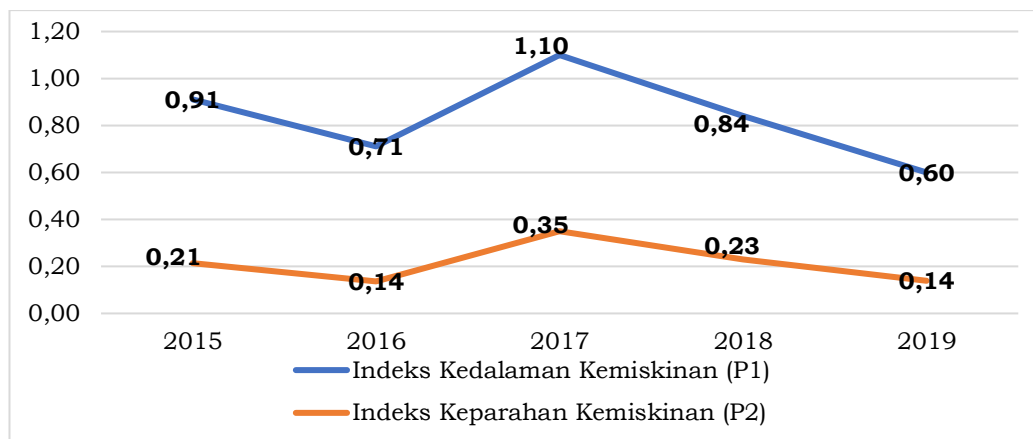


Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2020, diolah

Selain garis kemiskinan dan jumlah serta persentase penduduk miskin, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan adalah Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap*

Index/P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2015–2019 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2015 sebesar 0,91, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,71, lalu ada kenaikan di tahun 2017 menjadi 1,10. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 0,84 dan 0,60. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Gambar 2.10.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparah an Kemiskinan (P2) Kota Cimahi 2015-2019



Sumber: BPS Kota Cimahi

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada periode tahun 2015 sebesar 0,21, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 menjadi 0,35. Selanjutnya pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,14 pada tahun 2019. Penurunan dan kenaikan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pandemi Virus Corona pada awal tahun 2020 telah memporakporandakan perekonomian dunia dan dirasakan oleh semua kalangan terutama masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan meningkatkan kembali angka kemiskinan dan pihak yang akan sangat teras a dampaknya adalah anggota masyarakat yang bekerja disektor informal dan kelompok masyarakat yang sebelumnya rentan

untuk jatuh ke dalam garis kemiskinan. Fokus terhadap penanganan Corona tahun 2020 dan 2021 serta antisipasi berulangnya (munculnya) wabah menjadi perhatian yang sangat mendesak baru kemudian pemulihan perekonomian.

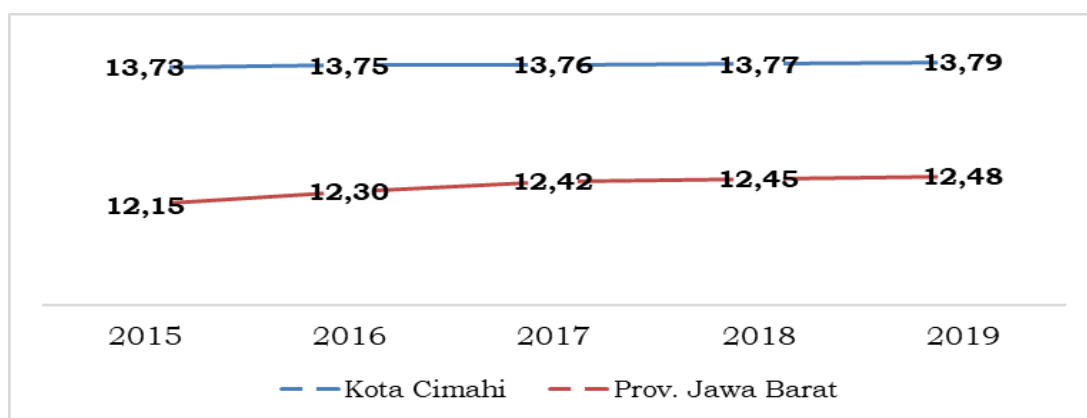
Pelayanan kesehatan untuk mencegah meluasnya virus Corona dinilai sangat penting saat ini. Demikian juga bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kelompok rentan jatuh kedalam garis kemiskinan. Perlu dilakukan perbaikan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan juga perlu diimbangi dengan kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, khususnya pangan.

2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Selama periode 2015 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,79 yang berarti naik 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian Harapan Lama Sekolah 2019 memberikan gambaran bahwa anak-anak usia 7 tahun di Cimahi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2. Berikut disajikan data Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2019.

Gambar 2.17.

Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019



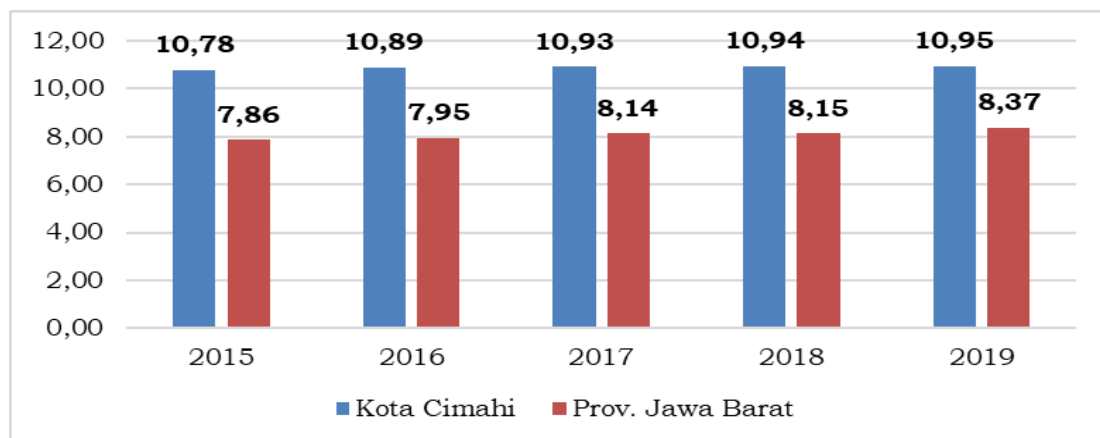
Sumber: BPS Tahun 2019

Dari gambar diatas diketahui bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu berada diatas angka harapan lama sekolah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019 harapan lama sekolah Kota Cimahi sebesar 13,79 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya hanya sebesar 12,48 tahun.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2015 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Cimahi yang lebih baik. Hingga tahun 2019, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMA. Berikut disajikan angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015-2019.

Gambar 2.18.

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020, diolah

Sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 juga selalu berada diatas rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi sebesar 10,95 persen, sedangkan di Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama sebesar 8,37 persen.

2.2.8. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Indikator pengeluaran perkapita disesuaikan (*Purchasing Power Parity- PPP*) merupakan indikator untuk mengukur Standar hidup layak (*decent standard of living*) pada perhitungan IPM. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Tabel 2.6
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Keterangan	Tahun					Naik/ Turun
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kota Cimahi	10.681	11.012	11.141	11.353	11.921	672
Provinsi Jawa Barat	9.447	9.778	10.035	10.285	10.790	838

Sumber : BPS indonesia

Pada tahun 2019 nilai PPP Kota Cimahi sebesar Rp.11.921,- ribu lebih tinggi dibandingkan dengan PPP Jawa Barat sebesar Rp.10.790,-. Secara tren nilai PPP Kota Cimahi terus menunjukkan peningkatan secara presisten, artinya daya beli masyarakat Kota Cimahi terus menunjukkan perbaikan.

2.2.9. APM dan APK

Angka Partisipasi Sekolah yang dilihat melalui kelompok umur, Angka Partisipas Murni atau APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, SD, SMP maupun SMA. Secara umum di Kota Cimahi APM SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMP dan SMA, hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD.

APK atau gross merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Berikut ini APK Kota Cimahi pada jenjang SD dan SMP sederajat.

Tabel 2.7
Perkembangan APK SD dan SMP Sederajat Kota Cimahi
Tahun 2014-2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
APK SD/MI Sederajat	109,05	107,96	106,40	105,89	103,54
APK SMP/MTs Sederajat	100,51	100,72	101,05	102,08	103,54

Sumber : Kemendikbud

APK pada jenjang SD Kota Cimahi menunjukkan penurunan secara presisten sedangkan pada jenjang pendidikan SMP sederajat meningkat secara presisten. Hal ini menandakan bahwa partisipasi anak suntuk sekolah di SD sudah cenderung lebih tepat waktu atau sesuai dengan kelompok umurnya.

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Berikut ini kondisi APM Kota Cimahi pada jenjang pendidikan dasar.

Tabel 2.8
Perkembangan APM Jenjang SD dan SMP Sederajat Kota Cimahi
tahun 2014-2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
APM SD/MI Sederajat	93,53	93,38	93,73	93,02	91,94
APM SMP/MTs Sederajat	80,76	81,01	76,29	76,99	75,57

Sumber : Kemendikbud

APM jenjang SD sederajat Kota Cimahi pada tahun 2014-2018 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dengan kecenderungan menurun meskipun secara angka sudah di atas 90%. Hal yang serupa juga terjadi pada jenjang SMP sederajat yang cenderung mengalami penurunan.

2.2.10. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pengelompokan penduduk usia 10 tahun keatas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan menghasilkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) pada setiap kecamatan yang terlihat dalam table berikut :

Tabel 2.9
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Cimahi
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tidak Tamat SD	8,09	9,80	10,65	6,81	8,60
2	SD	16,88	21,60	19,35	17,81	20,55
3	SLTP	18,87	23,20	22,65	23,59	21,91
4	SLTA	26,88	33,50	34,47	38,52	34,82
5	Perguruan Tinggi	10,70	11,90	12,88	13,28	14,12

Sumber : BPS 2010-2015

Dilihat dari data di atas, angka pendidikan yang ditamatkan (APT) untuk setiap jenjang di Kota Cimahi bervariasi, hal ini terjadi karena mobilitas penduduk yang tinggi (migrasi) masuk dengan pendidikan yang rendah serta kesadaran masyarakat yang kurang untuk pendidikan dasar sementara untuk menengah dan tinggi faktor ekonomi.

2.2.11. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy - e0*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur dimensi Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) dalam IPM. Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Pada tahun 2018, AHH Kota Cimahi berada pada angka 73,75 tahun meningkat 0,05 tahun pada kondisi tahun 2014 sebesar 73,56 tahun. Pada periode 2014-2018 AHH Kota Cimahi terus meningkat secara konsisten dan sudah berada di atas nilai AHH Provinsi Jawa Barat.

2.2.12. Jumlah Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang menjadi masalah utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hasil capaian terakhir pelaksanaan MDGs di tahun 2015 jumlah AKI di Indonesia sebesar 305 per 100.000 KH, sedangkan untuk Kota Cimahi sebesar 166.78 per 1000.000 KH, jauh di atas target yang telah ditetapkan yaitu 102 per 100.000 KH.

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2014-2018

NO	IKU	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kematian Ibu (AKI) (/100.000 KH)	94,89	166,80	77,36	113,98	102,16
2	Angka Kematian Bayi (AKB) (/1.000 KH)	7,40	8,73	6,38	7,14	4,18
3	Prevalensi kurang gizi	8,01	7,27	6,16	6,94	6,29

Sumber : Profil Kesehatan Kota Cimahi

Pada tahun 2018, AKI Kota Cimahi sebesar 102,16 per 100.000 KH atau ada 11 kasus kematian ibu dari 10.767 Kelahiran Hidup yang terjadi di Kota Cimahi. Capaian ini bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 77,36 per 100.000 KH, jauh lebih tinggi sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2017 hasil capain AKI ini lebih rendah yaitu 113.98 per 100.000 KH. Kemudian bila dibandingkan dengan target RPJMD, Nasional maupun SDGs, capaian AKI tahun 2018 sedikit melebihi target 102.16 per 100.000 KH.

Ada beberapa penyebab langsung kematian ibu di tahun 2018. Penyebab langsung tersebut antara lain karena kasus hipertensi (3 kasus), perdarahan (2 kasus), gangguan peredaran darah (3 kasus) dan penyakit jantung (3 kasus). Penurunan AKI pada tahun 2018 disebabkan karena adanya peningkatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), Bidan Praktek Mandiri, Pelaksanaan Kelas Ibu yang dilakukan oleh Puskesmas dan kunjungan terhadap kasus ibu hamil risiko tinggi, peningkatan jejaring rujukan ke RS dan sistem rujukan on line (call center), penata laksanaan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir di puskesmas PONE D melalui pengembangan program EMAS, kerja sama lintas sektor, adanya peningkatan koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan antara puskesmas dan bidan praktek mandiri, serta adanya hasil dari pendataan PIS-PK yang berfungsi sebagai baseline data untuk pendataan ibu hamil.

2.2.13. Angka Kematian Bayi

Jumlah kematian pada bayi di Kota Cimahi tahun 2018 yang dilaporkan sebanyak 50 kasus dari 10.767 KH atau bila di konversikan maka Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4.18 per 1000 KH. Angka Kematian Bayi tahun 2018 berada di bawah target SDGs yaitu 23/1000 KH. Jumlah kasus kematian bayi ditahun 2018 mengalami penurunan, jauh lebih rendah dari jumlah kematian bayi yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun penyebab kematian bayi yang terjadi di tahun 2018 antara lain karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 13 kasus, Asfiksia 12 kasus, Kelainan kongenital 10 kasus, Aspirasi 2 kasus, Infeksi 7 kasus, diare 2 kasus, dan kasus lainnya seperti kejang 1 kasus, immature 1 kasus, icterus 1 kasus dan TB paru 1 kasus. Berikut grafik penyebab kematian bayi tahun 2018.

2.2.14. Prevalensi Kurang Gizi

Balita kurang gizi (underweight) merupakan suatu kondisi status gizi balita kurang dan sangat kurang dengan indikator status gizi BB/U. Capaian untuk indikator prevalensi kurang gizi di tahun 2018 sebesar 6.29 % atau ada 2.302 balita kurang gizi dari 36.777 balita yang datang dan di timbang di posyandu pada saat Bulan Penimbangan Balita (BPB) serta hasil sweeping yang dilakukan oleh kader. Bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 sebesar 6.94%, hasil capaian indikator prevalensi kurang gizi tahun 2018 ini mengalami penurunan.

Penurunan prevalensi kurang gizi ini terjadi antara lain karena adanya peningkatan kegiatan surveilans gizi aktif yang dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) puskesmas dan kader kesehatan di setiap RW, sehingga jumlah penemuan kasus/ masalah gizi menjadi lebih cepat ditemukan dan ditangani. Selain itu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah gizi tersebut antara lain pelaksanaan konseling dan penyuluhan Gizi di PKM dan Posyandu, Kunjungan rumah terhadap balita 2T dan gizi buruk, pengaktifan kembali pos gizi di beberapa RW, pelaksanaan kelas Balita BGM, kegiatan pemberian Makanan Tambahan (PMT/PMT-P).

2.2.15. Keluarga Pra Sejahtera

Keberhasilan program Keluarga Berencana tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu : Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II, Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus.

Tabel 2.11
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I dan II Tahun 2017

Keterangan	Wilayah		Persentase dari Total Jawa Barat
	Kota Cimahi	Jawa Barat	

Pra Sejahtera	6.800	1.114.337	0,61
Sejahtera I	89.439	6.442.293	1,39
Sejahtera II	49.456	4.957.539	1,00

Sumber : BPS Jawa Barat 2018

Jumlah keluarga pra sejahtera di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 6.800 keluarga 0,61% dari total keluarga pra sejahtera di Provinsi Jawa Barat dengan 1.114.337 keluarga. Sedangkan untuk keluarga sejahtera I sebanyak 89.439 keluarga dan keluarga sejahtera II sebanyak 49.456 keluarga.

2.2.16.Opini BPK

Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan, hal ini terlihat dari diperolehnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai berikut.

Tabel 2.12

Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kota Cimahi Tahun 2013-2017

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : IHPS Tahun 2016, 2017 dan 2018 BPK-RI

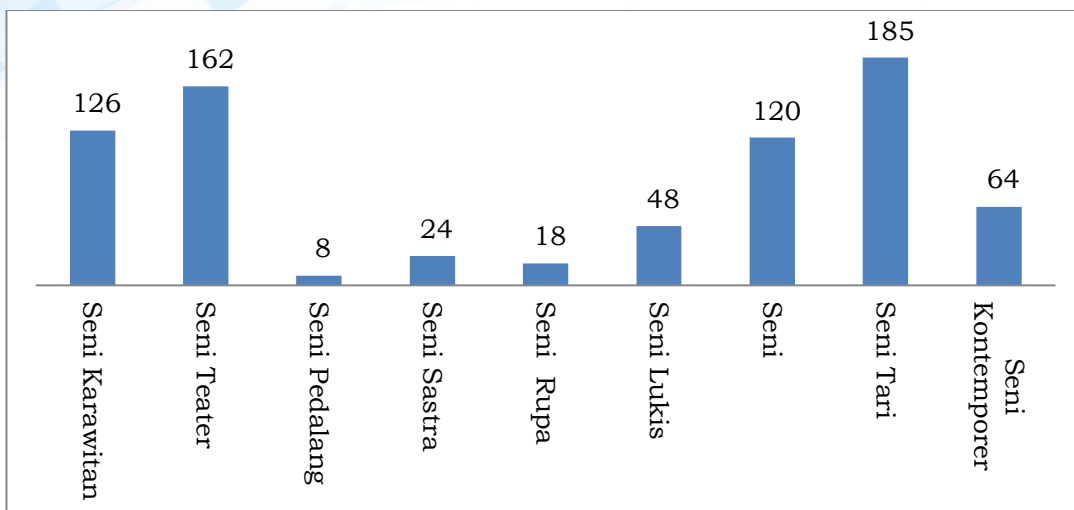
Kota Cimahi telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Artinya semua informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sudah bebas dari salah saji material, dan menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan sudah sangat baik.

2.2.17.Seni Budaya dan Olahraga

Pencapaian pembangunan dalam bidang seni budaya dan olahraga dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Gambar 2.2

Perkembangan Grup Kesenian Kota Cimahi Tahun 2017



Sumber : Dinas Budparpora Kota Cimahi 2018 (diolah)

Tabel 2.13
Jumlah Gedung dan Lapangan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Gelanggang / Balai Remaja	Jumlah Lapangan Sepak Bola & Futsal	Jumlah Lapangan & Gedung Bulutangkis	Jumlah Lapangan & Gedung Tennis	Jumlah Lapangan & Gedung Bola Volley
1	Cimahi Utara	16	6	50	9	43
2	Cimahi Tengah	20	26	49	12	83
3	Cimahi Selatan	13	17	14		12
	Kota Cimahi	49	49	114	21	138

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014

Tabel 2.14
Perbandingan Jumlah Gedung dan Lapangan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2010-2014

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Gelanggang / Balai Remaja	49	49	49	49	49
2	Jumlah Lapangan Sepak Bola & Futsal				23	23
3	Jumlah Lapangan & Gedung Bulutangkis				40	40
4	Jumlah Lapangan & Gedung Tennis				32	32
5	Jumlah Lapangan & Gedung Bola Volley				58	58

Sumber : BPS Kota Cimahi (Profil Pemerintahan Kota Cimahi 2007 – 2011)

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintah Wajib

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fokus layanan urusan pemerintah wajib dapat

dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

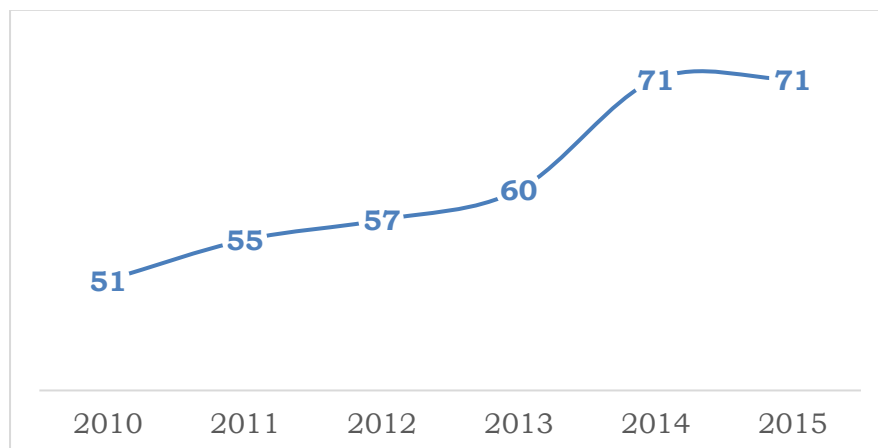
2.3.2.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan prioritas anak usia 4 - 6 tahun. Capaian APK PAUD selama kurun waktu 2013 – 2017 terus meningkat, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6 Tahun Kota Cimahi
Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2016

Nilai APK PAUD Kota Cimahi pada tahun 2010-2015 menunjukkan kondisi yang terus meningkat, artinya partisipasi pendidikan pada era keemasan masa tumbuh anak sudah semakin baik.

b. Aksesibilitas Sarana Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah

Salah satu hal terpenting dalam suatu daerah adalah pelayanan sosial yang menjadi kebutuhan dasar. Jangkauan pelayanan (akses) fasilitas pendidikan di Kota Cimahi yang meliputi pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA. Sarana fasilitas pendidikan di Kota Cimahi, terdiri dari 125 SD dan 21 MI, 38 SMP dan 16 MTs serta 16 SMA, 9 MA dan 24 SMK. Pola sebaran fasilitas pendidikan setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.15
Sebaran Fasilitas Pendidikan Tiap Kelurahan

No	Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah sekolah										Jumlah total
		SD	MI	JML	SMP	MTS	JML	SMA	MA	SMK	JML	
1	Cibeber	6	1	7	1	2	3	1	0	1	2	12
2	Cibeureum	9	4	13	5	1	6	0	0	0	0	19
3	Leuwigajah	10	2	12	3	1	4	1	2	1	4	20
4	Melong	14	1	15	2	1	3	2	0	1	3	21
5	Utama	10	1	11	3	1	4	0	0	5	5	20
	Cimahi Selatan	49	9	58	14	6	20	4	2	8	14	92
6	Baros	11	1	12	4	0	4	2	1	1	4	20
7	Cigugur Tengah	12	2	14	3	3	6	0	0	0	0	20
8	Cimahi	7	0	7	1	0	1	3	0	2	5	13
9	Karangmekar	3	0	3	4	0	4	2	0	1	3	10
10	Padasuka	7	4	11	0	0	0	0	0	0	0	11
11	Setiamanah	3	1	4	2	1	3	1	0	0	1	8
	Cimahi Tengah	43	8	51	14	4	18	8	1	4	13	82
12	Cibabat	10	2	12	2	2	4	1	3	0	4	20
13	Cipageran	6	2	8	4	3	7	1	2	5	8	23
14	Citeureup	10	0	10	3	1	4	2	1	7	10	24
15	Pasirkaliki	7	0	7	1	0	1	0	0	0	0	8
	Cimahi Utara	33	4	37	10	6	16	4	6	12	22	75
	KOTA CIMAH I	125	21	146	38	16	54	16	9	24	49	249

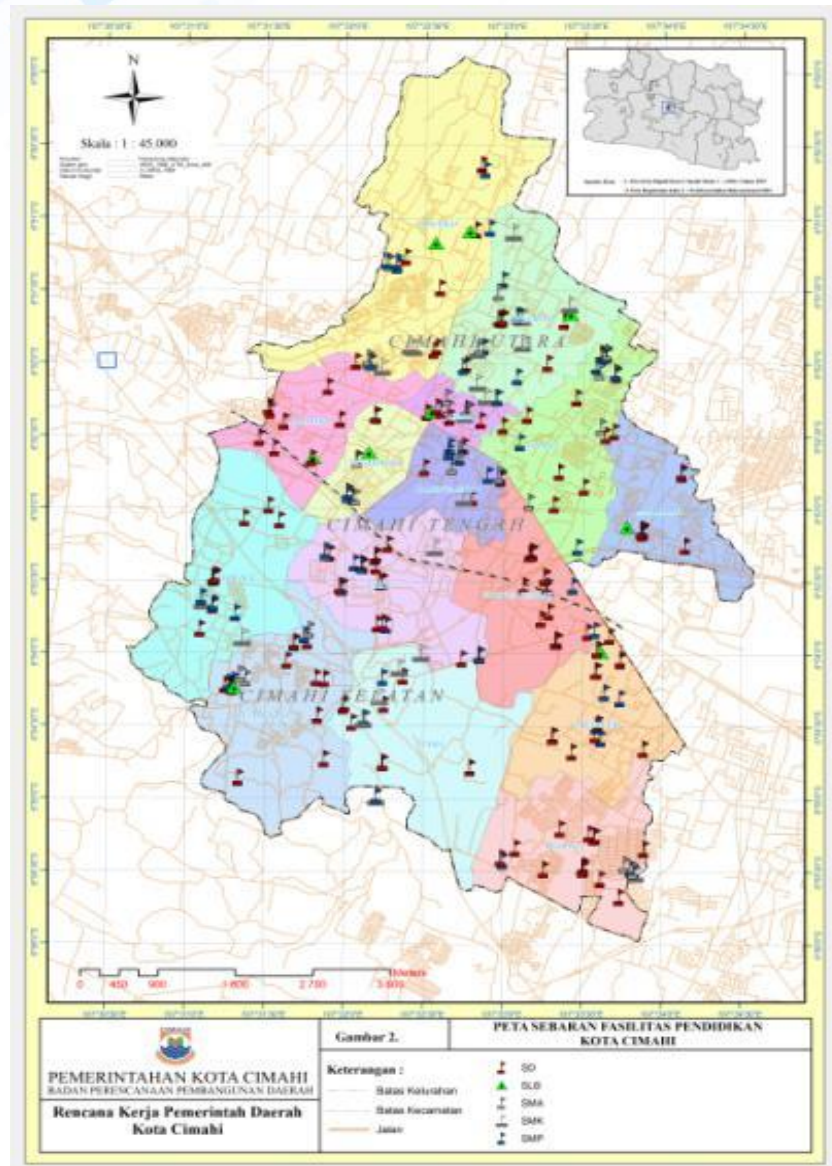
Masyarakat dalam suatu wilayah sekolah umumnya tidak hanya mengakses sekolah di wilayah tempat tinggalnya, namun terkadang menuju ke sekolah ditempat lain yang dekat ataupun dengan pertimbangan lain. Kondisi ini didukung dengan bahwa di Kota Cimahi tidak menerapkan rayonisasi artinya masyarakat baik dari kelurahan atau kecamatan tertentu tidak harus bersekolah di kelurahan atau kecamatan dimana tempat tinggalnya. Masyarakat bebas menentukan sekolah bagi anak-anaknya untuk bersekolah di luar wilayah kelurahan atau kecamatannya. Kondisi dengan tidak adanya rayonisasi ini menimbulkan distribusi peserta didik tidak menyebar secara rata. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang mereka yakini lebih baik. Dari Kondisi ini ada satu permasalahan yang cukup serius dimana dengan animo masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tertentu sehingga ada masalah dalam pemerataan kualitas pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar atau di tingkat pendidikan menengah.

Akses menuju ke pusat pelayanan pendidikan merupakan aspek yang penting dalam sistem pendidikan secara luas. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang menitikberatkan pada aspek pemerataan dan tingkat kebutuhan masyarakat

memerlukan strategi yang baik agar kebutuhan pelayanan pendidikan terpenuhi.

Pengukuran aksesibilitas dalam rangka memperoleh layanan pendidikan mempunyai peran yang besar untuk memahami kinerja sistem pendidikan dan pengembangan kebijakan bidang pendidikan. Aksesibilitas menuju pusat layanan pendidikan difokuskan pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh serangkaian pelayanan pendidikan secara spesifik. Dalam konteks ini aksesibilitas secara geografis (fisik dan keruangan) difokuskan pada kompleksitas masalah hubungan antara perbedaan keruangan masing-masing wilayah pemukiman masyarakat.

Gambar 2.4
Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan Kota Cimahi



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2016

Pengukuran akses atas dasar wilayah didasarkan bahwa setiap masyarakat di suatu wilayah membutuhkan pelayanan pendidikan. Untuk mengukur akses secara geografis (keruangan) ke pelayanan pendidikan dapat dilakukan berdasarkan wilayah, jarak, dan sarana transportasi. Kondisi sarana transportasi menjadi sangat penting dalam aksesibilitas karena berhubungan erat dengan jarak dan waktu tempuh, sarana transportasi dapat digantikan dengan adanya sarana transport lain, seperti mobil/kendaraan pribadi, ataupun jalan kaki. Dalam standar jarak fasilitas pendidikan dapat diidentikkan dengan sarana sekolah lanjutan pertama ataupun pusat kota, dimana ukuran standar waktu adalah 20 – 30 menit. Untuk aksesibilitas pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Pendidikan) dimana jarak lokasi sekolah dengan pemukiman untuk SD maksimal 3 km dan untuk SMP, SMA dan SMK maksimal 6 km. dengan

hasil analisis perhitungan jarak terjauh lokasi pelayanan pendidikan di Kota Cimahi adalah 3 km, dengan asumsi kecepatan jalan kaki adalah 1km/12 menit maka fasilitas tersebut dapat ditempuh dalam waktu antara 30 menit. Tabel di bawah ini menggambarkan jarak terdekat dan terjauh dan waktu tempuh yang dibutuhkan dengan jalan kaki dari pemukiman penduduk ke pusat layanan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

Tabel 2.16
Jarak Antara Fasilitas Pendidikan dengan Pemukiman Penduduk

No	Fasilitas	Jarak		Waktu tempuh dari jarak terjauh
		Terdekat	Terjauh	
1	SD	5m	959 m	12 menit
2	SMP	7m	1.846 m	22 menit
3	SMA	11m	2.991.m	36 menit
4	SMK	8m	3.044.m	37 menit

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2015

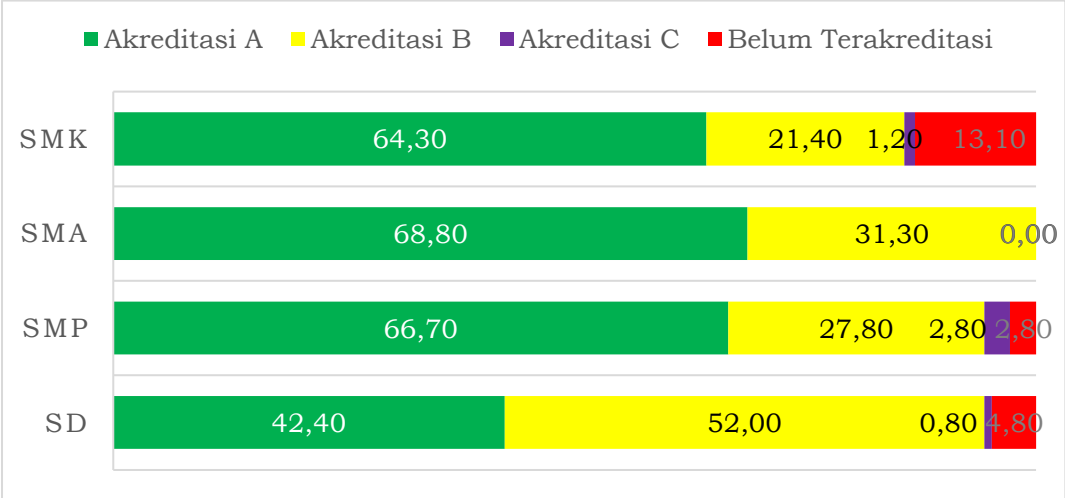
Pola sebaran SD, SLTP dan SLTA dari hasil perhitungan menggunakan rumus analisis tetangga terdekat diperoleh nilai hitung yang menggambarkan tingkat persebarannya adalah SD 0,809691 ($R = 0,81$), SMP 0,7509 ($R= 0,75$), SMA 0,7226 dan SMK 0,7137. Tingkat persebaran fasilitas pendidikan di Kota Cimahi menunjukkan bahwa distribusi sekolah mengelompok (*cluster*), karena nilai indeks I sebesar 0,81 kurang dari 1 ($R<1$).

Pelayanan pendidikan di Kota Cimahi secara lokasi pola sebarannya berkelompok (*cluster*). Hal ini terjadi karena fasilitas pendidikan berkumpul ditengah Kota atau di kelurahan-kelurahan Cimahi Tengah, sementara wilayah kelurahan di Cimahi Utara merupakan kawasan KBU (kawasan Bandung Utara) yang membatasi pembangunan dan di wilayah selatan merupakan daerah industri.

c. Mutu dan Daya Saing Pendidikan

Selain partisipasi, yang perlu diperhatikan dalam bidang pendidikan adalah bagaimana mutu dan daya saing baik murid, guru maupun lembaga sekolah. Berikut ini mutu sekolah yang tercermin dari nilai akreditasi sekolah di Kota Cimahi.

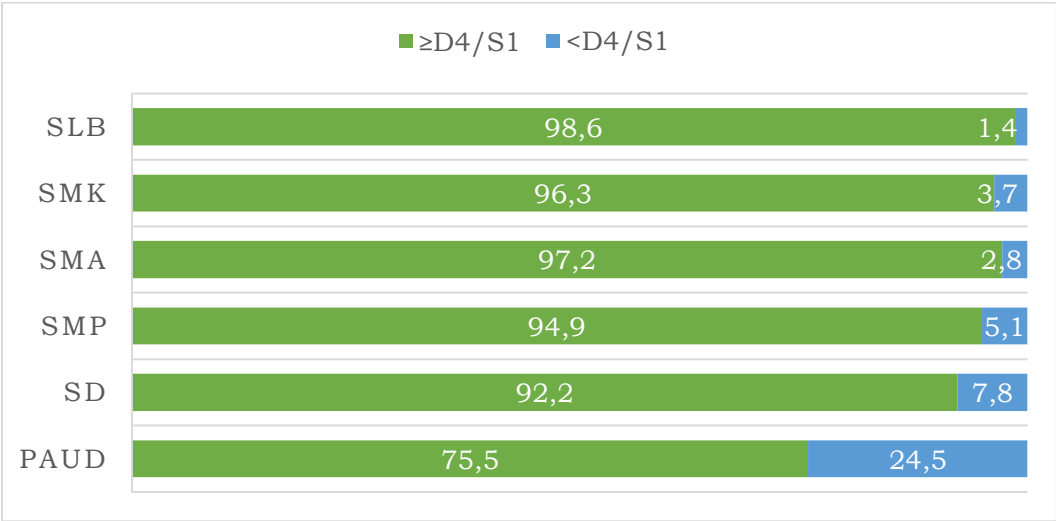
Gambar 2.5
Persentase Nilai Akreditasi Sekolah Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi Tahun 2018



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud

Mutu sekolah yang tercermin dari nilai akreditasi sekolah masih belum optimal, pada jenjang SD mayoritas masih terakreditasi B sedangkan pada jenjang yang lain mayoritas sudah terakreditasi A. meskipun demikian, masih ada sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMK yang masih terakreditasi C bahkan belum terakreditasi. Nilai akreditasi untuk pendidikan anak usia dini lebih mengkhawatirkan, baik PAUD maupun LKP mayoritas masih belum terakreditasi.

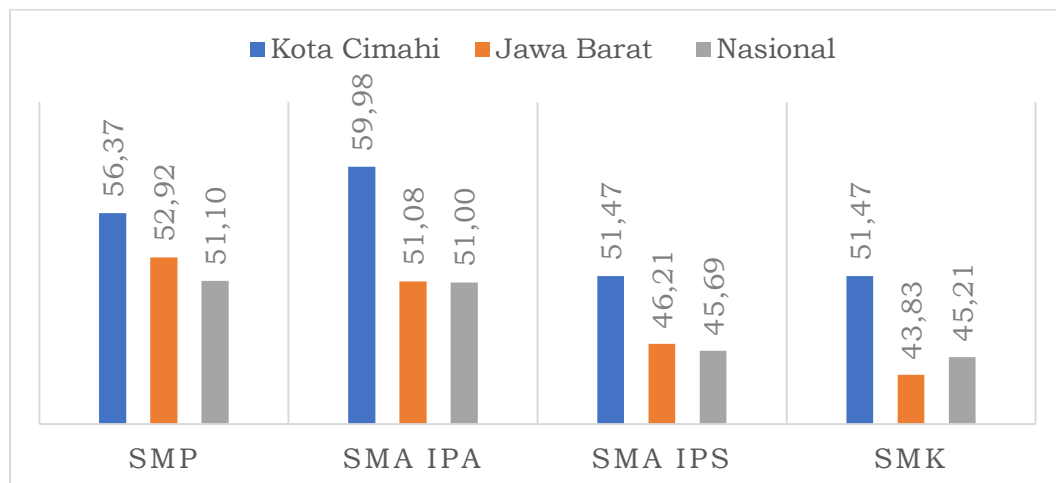
Gambar 2.6
Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi Tahun 2018



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud

Berdasarkan kualifikasi, mutu guru di Kota Cimahi sudah sangat baik dimana mayoritas guru pada setiap jenjang sudah memiliki pendidikan di atas D4 atau sarjana. Oleh karena itu diharapkan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat berjalan dengan optimal.

Gambar 2.7
Hasil Ujian Nasional Jenjang Tahun 2018



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud

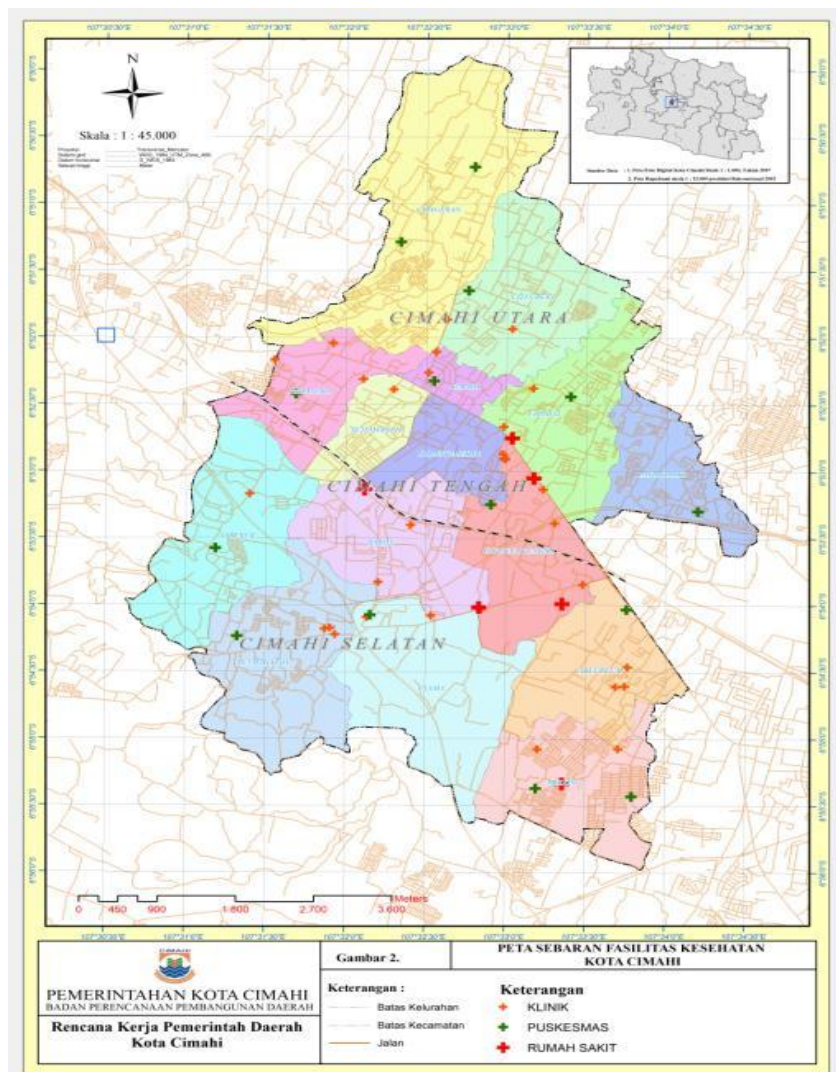
Mutu siswa pada jenjang SMP, SMA IPA maupun IPS dan SMK di Kota Cimahi sudah cukup baik, hal ini terlihat dari nilai ujian nasional Kota Cimahi pada setiap jenjang berada di atas nilai ujian nasional Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2. Urusan Kesehatan

Kondisi kesehatan penduduk Kota Cimahi juga dipengaruhi oleh kualitas layanan kesehatan yang ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain faktor aksesibilitas sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Faktor aksesibilitas sarana kesehatan meliputi ketersediaan tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Poliklinik.

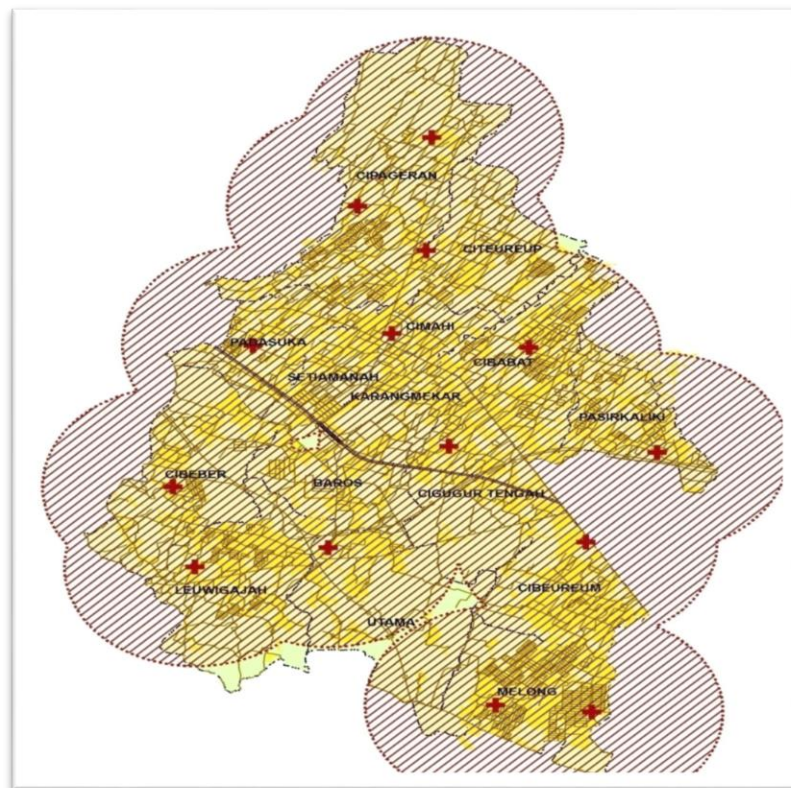
Bila dilihat dari sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Cimahi maka terdapat beragam sarana pelayanan yang terdiri dari 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah, 1 (satu) Rumah Sakit AD, dan 4 (empat) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas di Kota Cimahi berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2015 adalah sebanyak 14 unit, kemudian setelah dilakukan kajian menjadi 13 puskesmas, Puskesmas Cimenteng Sehat berubah status menjadi puskesmas pembantu. Tiga puskesmas dari 13 puskesmas yang ada di Kota Cimahi adalah Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), yaitu Puskesmas Cimahi Selatan, Puskesmas Melong Asih dan Puskesmas Melong Tengah.

Gambar 2.8
Peta Sebaran fasilitas kesehatan di Kota Cimahi



Sebagai upaya untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pelayanan diberikan pula di Puskesmas Pembantu yaitu sebanyak 3 unit, dan diberikan pula pelayanan kesehatan oleh pihak swasta yaitu berupa klinik sebanyak 57 unit serta 146 praktek bidan. Walaupun pada saat ini Kota Cimahi telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang relatif banyak tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat perlu adanya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

Gambar 2.9
Cakupan Puskesmas di Kota Cimahi



Pada tahun 2015 terdapat 330 industri dan perkantoran pemerintah di Kota Cimahi, pembinaan telah dilakukan terhadap 65 perkantoran dan industri. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2015 cakupan pembinaan PHBS perkantoran sudah mencapai 42,42 persen (target 30 persen). Pembinaan PHBS pelayanan kesehatan telah dilakukan terhadap 15 puskesmas dan Pustu, 6 RS dan sarana pelayanan kesehatan swasta lainnya. Jumlah keseluruhan sarana pelayanan kesehatan di Kota Cimahi adalah sebanyak 62. Jadi sampai tahun 2015 sebesar 48,39 persen sarana pelayanan kesehatan sudah memperoleh pembinaan (target 30 persen).

Berdasarkan data yang tersedia di kota Cimahi terdapat 382 sarana tempat umum (TTU), terdiri dari pasar tradisional, pasar modern, terminal, stasiun, mesjid besar kecamatan dan kelurahan. Sampai tahun 2015 telah dilakukan 50 pembinaan TTU (29,84 persen), dari target 30 persen.

Terkait dengan pemanfaatan sistem informasi dalam menunjang pelaksanaan *e-Governance* di Kota Cimahi di bidang kesehatan telah terdapat sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan yang meliputi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) di RSUD Cibabat dan Sistem Informasi Manajemen pelayanan Kesehatan Puskesmas di Puskesmas-puskesmas yang terhubung dengan Dinas Kesehatan. Sistem informasi tersebut mencakup menu-menu yang terkait dengan Pendaftaran pasien, Rekam Medis rawat jalan dan rawat inap, *Billing* rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, IGD, farmasi dan penunjang. Pengelolaan pembagian jasa medik, Pengolahan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik, Inventori farmasi dan non medis, Manajemen Utang dan Piutang, Manajemen Aktiva Tetap, dan Akuntansi Manajemen.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan Pekerjaan Umum yang menjadi salah satu urusan wajib daerah dapat dibagi kedalam beberapa bidang yaitu Bina Marga, sumberdaya air dan penyehatan lingkungan. Indikator keberhasilan penanganan bidang kebinamargaan salah satunya adalah tingkat kemantapan jalan. Jaringan jalan di Kota Cimahi sepanjang 118,873 Km, terdiri dari jalan Nasional 4,320 Km, Jalan Provinsi 9,360 Km, jalan kota 105,193 Km. Tingkat kemantapan jalan sampai tahun 2016 adalah sebesar 95,17 persen (menunjukkan kualitas jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional eksisting yang berada pada kondisi baik dan sedang), sisanya sebesar 4,83 persen berada pada kondisi rusak dan rusak berat. (Sumber : Data leger Jalan, DPU 2016).

Permasalahan lainnya adalah kapasitas jalan-jalan di Kota Cimahi yang sudah mendekati titik jenuh dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding dengan kapasitas jalan sehingga sudah tidak mampu menampung kendaraan yang melintas. Hal ini merupakan faktor penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kota Cimahi. Ruas jalan Amir Machmud mempunyai Tingkat Pelayanan Jalan atau *Level of Service* (LOS) F (*lockstep*), jalan Mahar Martanegara LOS, jalan HMS. Mintaredja mempunyai nilai LOS C, D, dan F di beberapa titik. Ruas-ruas jalan lain seperti Gatot Subroto, Encep Kartawiria dan Kolonel Masturi mempunyai LOS F. Ruas-ruas jalan yang memiliki LOS F menunjukkan bahwa ruas-ruas jalan tersebut mempunyai tingkat kemacetan yang sangat tinggi. Ruas-ruas

jalan di atas merupakan jalur penghubung Kabupaten Bandung Barat–Kota Cimahi–Kota Bandung dan Kabupaten Bandung–Kota Cimahi–Kota Bandung.

Bidang selanjutnya adalah sumberdaya air. Sumberdaya air yang ada di Kota Cimahi selain sungai yang sudah diuraikan pada sub bab hidrologi, adalah embung. Embung atau cekungan penampung (*retention basin*) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau). Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau. Di Kota Cimahi terdapat 7 (tujuh) buah Embung yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, dan di Kelurahan Setiamanah. Embung terbesar dengan luas 1.080 m² dan kedalaman 6 m terletak di Kelurahan Leuwigajah.

Bidang lain yang juga berhubungan dengan air adalah pelayanan air bersih/minum. Kebutuhan pelayanan air bersih/minum di Kota Cimahi dipenuhi melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung, pelayanan UPT Air Minum, dan sumur-sumur artesis yang dikelola oleh KP2A (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air) sedangkan sistem non perpipaan berupa sumur penduduk yang terlindungi, mata air yang dikelola oleh masyarakat, dan sumur artesis dari industri sebagai bentuk CSR ke masyarakat.

Kinerja penataan ruang di Kota Cimahi belum optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis.

Alih fungsi lahan produktif yang tinggi karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya umumnya belum sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang. Respon penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang seringkali lebih lambat dari pada perkembangan kondisi yang terjadi. Melalui perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu dengan di undangkannya UU No. 26/2007 diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang. Untuk dapat menangani permasalahan tata ruang di Kota Cimahi, Pemerintah Kota menyusun peraturan rencana penataan ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi 2012-2032. Sedangkan peraturan

turunannya yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cimahi beserta peraturan zonasi yang terbagi kedalam 5 (lima) SWK yaitu A, B, C, D dan E yang statusnya sedang dalam penyusunan Perda.

Disamping itu, untuk wilayah Kota Cimahi yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara (KBU), kegiatan pembangunan di kawasan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut. Sebagai salah satu upaya pengendalian pembangunan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian melalui sebuah instrumen badan yang bernama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dibentuk berdasarkan SK Wali Kota.

Pencapaian target SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2012 yang didasarkan ketersediaan informasi penataan ruang berupa peta analog dan peta digital yang sudah mencapai yaitu 65 persen dari target SPM sebesar 100 persen pada tahun 2019.

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan ruang terbuka hijau Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 30 persen dari luas wilayah kota. Sampai saat ini RTH di Kota Cimahi ada seluas 547.22 ha atau 13,60 persen dari luas kota (Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Cimahi, 2013). Sementara menurut RTRW Kota Cimahi, target RTH Publik untuk 21 tahun ke depan adalah 21,09 persen dan target RTH Privat adalah 10,89.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur dan perumahan yang tidak teratur. Secara umum perumahan yang tidak teratur identik dengan kepadatan dan/atau kekumuhan, sehingga sering dijumpai rumah atau lingkungan/kawasan permukiman yang tidak layak huni.

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Kota Cimahi, perumahan di Kota Cimahi diarahkan melalui hunian vertikal dengan konsep rumah susun. Kota Cimahi hingga saat ini telah memiliki 3 (tiga) rusunawa yang disediakan oleh Pemerintah Kota yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Leuwigajah. Disamping itu, di Kota Cimahi terdapat pula rumah susun yang disediakan oleh swasta dan militer.

Kawasan perumahan yang belum tertata dengan baik di Kota Cimahi pada umumnya adalah perumahan yang dibangun oleh individu di lahan yang belum dipersiapkan dan belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, penataan bangunan yang tidak teratur dan pada lokasi tertentu cenderung menjadi perumahan yang kumuh.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 653/Kep.68.PU/2015 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2015, terdapat 15 titik kawasan permukiman kumuh di Kota Cimahi, dengan luasan 176,77 Ha. Sebagian besar permukiman kumuh tersebut berada di Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan kawasan permukiman yang bercampur dengan kegiatan industri. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan yang tinggi berdampak terhadap tingginya jumlah kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan. Luasan kawasan kumuh tersebut, sampai dengan tahun 2018 sudah ditangani seluas 70,96 Ha atau sebesar 38,5 persen dari luasan pada tahun 2015.

Kondisi pelayanan air limbah di Kota Cimahi dari tahun 2011 hinggatahun 2015 mengalami peningkatan cakupan pelayanan, pada tahun 2011 cakupan pelayanan air limbah mencapai 64,13 persen sedangkan pada tahun 2015 mampu melayani 68,17 persen dan pada tahun 2017 sebesar 70,27 persen. Cakupan pelayanan air limbah domestik tersebut mencakup IPAL Komunal sebanyak 83 unit (melayani 7.487 KK) dan MCK komunal 225 unit (melayani 2.240 KK). Cakupan pelayanan tangki septik individual mampu melayani 99.938 KK. Untuk memenuhi cakupan layanan air limbah kepada masyarakat, Kota Cimahi telah memiliki UPTD Air Limbah. Bidang lainnya yang menjadi sektor unggulan adalah drainase, sampai tahun 2017 luas genangan Kota Cimahi menurun hingga 15,42 ha.

Tabel 2.17
Luas Genangan di Kota Cimahi

No	Lokasi Genangan	Wilayah Administrasi		Luas Genangan (Ha)
		Kelurahan	Kecamatan	
G1	Jalan Kolonel Masturi RW.03	Cipageran	Cimahi Utara	0,05
G2	RW.29	Cipageran	Cimahi Utara	0,113
G3	RW.04	Cipageran	Cimahi Utara	0,134
G4	RW 15	Cipageran	Cimahi Utara	0,672
G5	RW 28	Cipageran	Cimahi Utara	0,75
G6	RW 13 (depan BJB)	Cibabat	Cimahi Utara	1,59
G7	RW 12	Cibabat	Cimahi Utara	8,33
G8	RW 01	Baros	Cimahi Tengah	0,1
G9	RW 24 (Asrama Brigif-Jl.Kebon rumput)	Baros	Cimahi Tengah	0,66
G10	RW 01	Cimahi	Cimahi Tengah	0,1
G11	RW 02	Leuwigajah	Cimahi Selatan	0,214
G12	RW 30 (Jl. Dieng Raya)	Melong	Cimahi Selatan	0,92
G13	RW 03	Cibeber	Cimahi Selatan	1,79
TOTAL				15,423

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2017

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data dari kepolisian resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi. Ada sepuluh titik rawan kriminalitas di Kota Cimahi, dimana semuanya berada di wilayah kecamatan Cimahi Utara.

Tabel 2.18
Lokasi Rawan Konflik di Kota Cimahi

No	Lokasi Titik Rawan Kriminalitas
1.	Jalan pesantrean, Cimahi Utara
2.	Jalan Sentral, Cimahi Utara
3.	Jalan Permana, Cimahi Utara
4.	Jalan Cipageran, Cimahi Utara
5.	Jalan Setiamah, Cimahi Utara
6.	Jalan Padasuka, Cimahi Utara
7.	Jalan Leuwigajah, Cimahi Selatan
8.	Jalan Cimindi, Cimahi Tengah
9.	Jalan Contong, Cimahi Tengah
10.	Jalan Nanjung, Cimahi Selatan

Sumber : Pemerintah Kota Cimahi, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih berpotensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminalitas. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kesiapsiagaan dan pengawasan dari aparat keamanan Kota Cimahi, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang di Kota Cimahi adalah konflik antar buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

6. Sosial

Dalam bidang sosial, Pemerintah Kota Cimahi berupaya keras dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Cimahi terdiri dari 26 macam dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.19
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Cimahi Tahun 2017

Jenis PMKS	Total
Anak Bayi Terlantar	34
Anak Terlantar	635
Anak yang berhadapan dengan Hukum	29
Anak Jalanan	128
Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	264
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5
Lanjut usia terlantar	3.071
Penyandang disabilitas	1.151
Tuna susila	27
Gelandangan	33
Pengemis	5
Pemulung	66
Kelompok Minoritas	49
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	19
Korban Penyalahgunaan NAPZA	75
Korban Trafficking	3
Korban tindak kekerasan	7
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	2.035
Fakir Miskin	10.814
Keluarga bermasalah sosial psikologis	139

Sumber : DinsosP2KBP3A TAHUN 2017

Penanganan PMKS di Kota Cimahi belum optimal karena masalah teknis dan non teknis serta permasalahan penanganan PMKS lintas batas antara Kota Cimahi dengan Kabupaten/Kota sekitarnya. Selanjutnya kedepan perlu di upayakan adanya fasilitasi rumah singgah untuk mengatasi PMKS tersebut, kemudian koordinasi dengan lintas wilayah perbatas menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan PMKS yang ada di wilayah Kota Cimahi.

2.3.2.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pada bidang ketenagakerjaan adalah terkait dengan partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja di Kota Cimahi tercatat sebanyak 297.539 orang, dari jumlah tersebut 273.955 orang bekerja dan 23.584 merupakan pengangguran terbuka. TPAK Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 64,49% lebih tinggi dari TPAK Jawa Barat sebesar 62,92 persen. TPT Kota Cimahi sebesar 7,93% sudah berada di bawah nilai TPT Jawa Barat yang masih berada pada angka 8,17 persen.

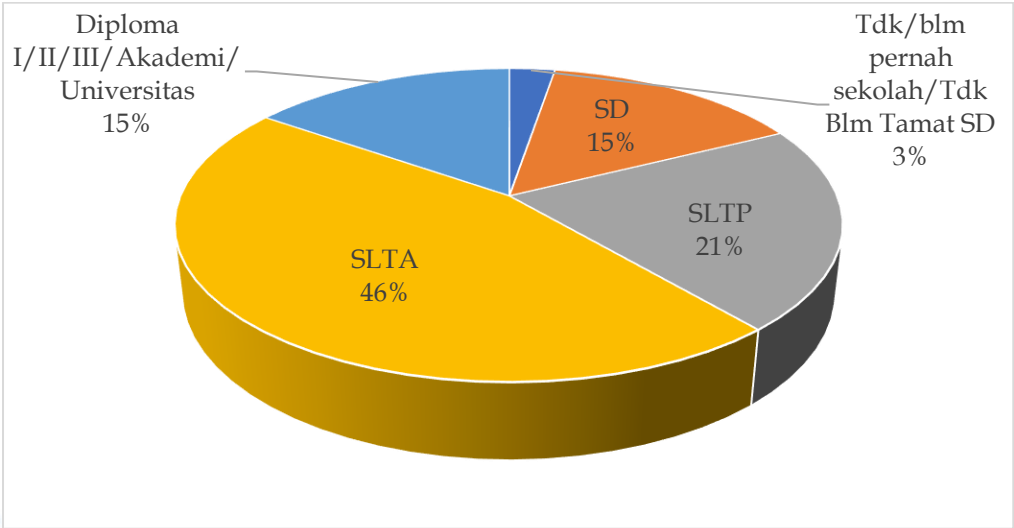
Tabel 2.20
TPT dan TPAK Kota Cimahi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Indikator	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
TPAK	82,79	46,13	64,49
TPT	9,11	5,80	7,93

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov Jawa Barat 2018, BPS

TPAK penduduk laki-laki perempuan masih lebih rendah (46,13) dibandingkan dengan penduduk laki-laki (82,79 persen), hal ini disebabkan perempuan lebih banyak masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja dengan mayoritas kegiatan mengurus rumah tangga. Rendahnya TPAK berpengaruh terhadap TPT yang juga rendah. TPT penduduk perempuan Kota Cimahi hanya 5,80 persen sedangkan laki-laki sebesar 9,11 persen.

Gambar 2.10
Persentase Angkatan Kerja Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2018

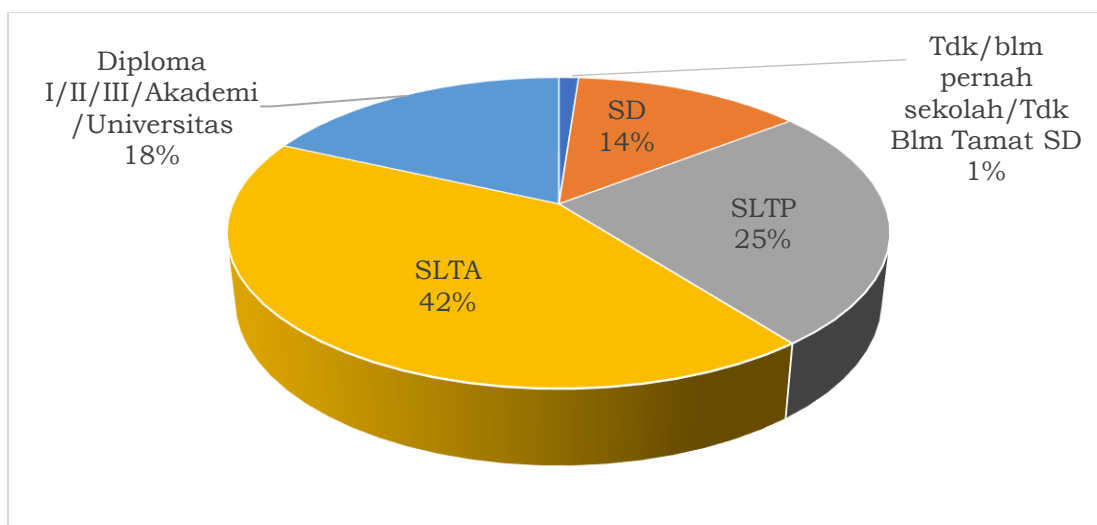


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Jawa Barat 2018, BPS (diolah)

Mayoritas angkatan kerja di Kota Cimahi tahun 2018 masih memiliki pendidikan SLTA (46 persen) diikuti dengan SLTP (21 persen), SD (15 persen), Diploma/Akademi/Universitas (15 persen) bahkan tidak tamat SD (3 persen). Angka ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga dan calon tenaga kerja di Kota Cimahi masih relatif berpendidikan rendah.

Tidak terserapnya tenaga kerja pada lapangan pekerjaan alah satunya karena pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Tingkat pendidikan pengangguran terbuka di Kota Cimahi mayoritas masih berpendidikan SLTA yaitu 9.974 orang (42 persen) sedangkan sarjana hanya 4.278 orang (18 persen). Selain itu 8.173 orang pengangguran terbuka merupakan pencari kerja yang tidak memiliki pengalaman atau tidak pernah bekerja.

Gambar 2.11
Persentase Pengangguran Terbuka Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2018



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Jawa Barat 2018, BPS (diolah)

Rendahnya etos kerja dan ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja menjadi alasan lain tidak terserapnya tenaga kerja oleh perusahaan. Selain itu, banyak tenaga kerja yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai sertifikat keahlian sehingga kalah dengan tenaga kerja dari daerah lain yang bersertifikat. Rendahnya angka serapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh rendahnya daya saing tenaga kerja

Kota Cimahi sehingga banyak tenaga kerja berasal kan dari daerah lain. Regulasi yang ada tidak bisa mengatur prosentasi minimal penyerapan tenaga kerja penduduk Kota Cimahi.

Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah melaksanakan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kerja bagi pencari kerja baik untuk ditemap tkan di perusahaan-perusahaan maupun untuk memberikan keterampilan kerja sebagai bekal para pencari kerja.

Selain berupaya dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi para pencari kerja di Kota Cimahi melalui peningkatan kualitas angkatan kerja dan kompetensi tenaga kerja yang ada, pemerintah kota juga telah berupaya untuk memberikan perhatian kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan. Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK), pemberian fasilitasi penyelesaian perselisihan kerja dan fasilitasi pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya pemerintah dalam meningktkan kesejahteraan para pekerja.

Upah Minimum Kota (UMK) selama periode Tahun 2013 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2017 penentuan UMK dilakukan berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Pemerintah Kota, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja.

Tabel 2.21
Upah Minimum Kota Tahun 2013 – 3017

Tahun	UMK	Persentase Kenaikan	Persentase UMK terhadap KHL
2013	1.569.353	125,0	110,6
2014	1.725.168	117,6	118,3
2015	1.955.384	111,5	116,4
2016	2.032.412	108,7	121,2
2017	2.303.073	107,0	116,3

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

Dalam penyelesaian perselisihan kerja antara pekerja dan perusahaan, pemerintah memfasilitasi dalam pelaksanaan mediasi sampai dilakukannya Perjanjian Bersama. Capaian penyelesaian perselisihan kerja sampai dengan tahap Perjanjian Bersama rata-rata terlaksana sebesar 70 persen. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama, ketersediaan mediator yang hanya ada 1 (satu) orang menyebabkan target penyelesaian belum bisa optimal.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi cukup strategis, baik perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Sampai dengan tahun 2017 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada kepada 2.250 orang PEKKA dan 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Pembinaan Posyandu dan Pokjanal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu dan penyelenggaraan lomba posyandu serta pembinaan kepada kader PKK.

Dalam bidang perlindungan anak, sampai dengan tahun 2017 Kota Cimahi telah terbentuk 15 forum anak tingkat kelurahan dan 3 forum anak tingkat kecamatan. Adapun dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap perempuan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mengaktifkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi.

Indeks pembangunan gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 2017 IPG Kota Cimahi sebesar 92,33 poin lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Barat dengan 89,18 poin. Nilai IPG Kota Cimahi terus menunjukkan peningkatan secara presisten, pada tahun 2012 IPG Kota Cimahi sebesar 89,67 poin.

Tabel 2.22
Perkembangan IPG Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012-2017

Keterangan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2017
Kota Cimahi	89,67	90,63	92,11	92,23	92,33
Provinsi Jawa Barat	87,79	88,21	88,35	89,11	89,18

Sumber : Buku PMBG Tahun 2018

Selain IPG, indikator lain yang digunakan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2.23
IDG Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Keterangan	Keterlibatan Perempu an di Parlemen	Perempu an sebagai Pekerja Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempu an	IDG
Kota Cimahi	31,11	49,32	29,82	76,97
Provinsi Jawa Barat	22,00	41,60	29,45	70,04

Sumber : Buku PMBG Tahun 2018

IDG Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 76,97 poin lebih tinggi dari IDG Provinsi Jawa Barat dengan 70,04 poin. Perempu an Kota Cimahi secara umum lebih aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dibandingkan dengan perempu an di Jawa Barat, hal ini terlihat dari komponen pembentuk IDG yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari Jawa Barat.

3. Pangan

Dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk Kota Cimahi, maka dalam Renstra dan Renja Dispangan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dicantumkan bahwa peningkatan skor PPH menjadi indikator sasaran dalam penyusunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Kegiatan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kota Cimahi. Adapun Indikator kinerja terkait pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan PPH Ketersediaan, dengan output berupa penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Penyusunan Pola Konsumsi dan suplai pangan dilaksanakan dengan tujuan :

- Menganalisis situasi konsumsi pangan, baik pada aspek kuantitas maupun kualitas di Kota Cimahi pada tahun 2018;
- Menyusun perencanaan kebutuhan pangan Kota Cimahi Tahun 2018-2022.

Berdasarkan data didapatkan bahwa Pola konsumsi Masyarakat Kota Cimahi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24
Pola Konsumsi Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017

Kelompok Pangan	Jenis Pangan
Sumber Karbohidrat	Beras (81,76 kg/kap/tahun), Terigu (15,84 kg/kap/tahun)
Sumber Protein	Daging Unggas (12,33 kg/kap/tahun), Kacang Kedelai (18,7 kg/kap/tahun), Ikan (16,96 kg/kap/tahun), Susu (3,72 kg/kap/tahun), Daging Ruminansia, (4,68 kg/kap/tahun) Telur (10.31 kg/kap/tahun)

Sumber Vitamin dan Mineral	Sayur (36,1 kg/kap/tahun), Buah (24,4 kg/kap/tahun)
Sumber Minyak dan Lemak	Minyak Sawit (9,59 kg/kap/tahun)
Sumber Gula	Gula Pasir (6,07 kg/kap/tahun), Gula Merah (1,69 kg/kap/tahun)

Sumber : Dispangtan (2018)

Berdasarkan hasil diatas maka Perencanaan Kebutuhan Pangan Kota Cimahi Tahun 2018-2022 dipetakan sebagai berikut :

Tabel 2.25
Perencanaan Kebutuhan Pangan Kota Cimahi Tahun 2018-2022

KELOMPOK/JENIS PANGAN	KEBUTUHAN PANGAN (KG/KAPITA/TAHUN)					
	Tahun Dasar 2017	Sasaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Padi-Padian						
Beras	89,9	76,1	77,3	78,4	79,5	80,6
Jagung	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Terigu	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
2. Umbi-Umbian						
Singkong	11,1	13,0	13,2	13,4	13,7	13,9
Ubi Jalar	2,4	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0
Sagu	4,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
Kentang	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Umbi Lainnya	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
3. Pangan Hewani						
Daging Ruminansia	5,1	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6
Daging Unggas	13,6	20,1	20,6	21,1	21,6	22,2
Telur	11,3	7,6	7,8	8,0	8,2	8,3
Susu	4,1	9,2	9,5	9,7	9,9	10,2
Ikan	18,7	9,4	9,7	9,9	10,1	10,4
4. Minyak dan Lemak						
Minyak Kelapa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Minyak Sawit	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8
5. Buah/Biji Berminyak						
Kelapa	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0
Kemiri	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
6. Kacang-kacangan						
Kacang Kedelai	11,3	10,9	10,7	10,4	10,1	9,9
Kacang Tanah	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7. Gula						
Gula Pasir	6,7	6,8	7,0	7,2	7,3	7,5
Gula Merah	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
8. Sayur dan Buah						
Sayur	39,7	31,4	30,8	30,2	29,7	29,1
Buah	26,8	34,0	33,3	32,7	32,1	31,5

Arah Kebijakan Pola konsumsi (untuk penganekaragaman dan keamanan pangan) di Kota Cimahi berdasarkan kondisi eksisting 2017 yang dihitung tahun 2018, direkomendasikan seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2.26
Arah Kebijakan Pola konsumsi

No	Kelompok Pangan	Arah Penganekaragaman Konsumsi Pangan
1	Sumber Karbohidrat	- Menurunkan konsumsi beras dan jagung. - Meningkatkan konsumsi aneka umbi-umbian sebagai substitusi tepung terigu - Penerapan teknologi pengolahan umbi-umbian menjadi aneka produk seperti mie, cake, kue basah, kue kering, dan lain-lain untuk menciptakan pasar pangan lokal umbi-umbian
2	Sumber Protein hewani	Meningkatkan konsumsi daging unggas daging ruminansia, susu dan olahannya.
3	Sumber Protein Nabati	Meningkatkan konsumsi kacang-kacangan dan olahannya seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah
4	Sumber Vitamin dan Mineral	- Meningkatkan konsumsi buah. - Mempertahankan konsumsi sayuran

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pencapaian PPH konsumsi ideal berdasarkan hasil evaluasi program ketahanan pangan di tahun 2018 di kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

- Bappeda agar mulai mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pentingnya pencapaian PPH konsumsi kepada Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pencapaian target PPH konsumsi ideal Kota Cimahi;
- Dispangtan agar melakukan revisi renstra terkait target dan realisasi pencapaian PPH Konsumsi, karena relisasi angka PPH konsumsi 2017 (skor =79,1) berada di bawah target yang telah dituliskan (skor =82,1). Selanjutnya untuk mendukung target pencapaian angka PPH pada tahun-tahun berikutnya dapat mempertimbangkan angka proyeksi yang lebih sesuai;
- Apabila Kota Cimahi hendak mensinkronkan target pencapaian PPH Konsumsi yang terdapat pada RAN PG 2015-2019 yaitu di angka skor 92,50 di tahun 2019, maka Dispangtan beserta dinas-dinas terkait perlu melakukan percepatan melalui program dan kegiatan yang bersinergi antar dinas terkait yang diperkuat dengan kebijakan dan regulasi yang mengikat untuk pencapaian target tersebut secara berkelanjutan.

Pada tahun 2018 kota Cimahi juga telah memiliki Perda tentang cadangan pangan daerah yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018. Di tahun 2018 kota Cimahi telah mulai

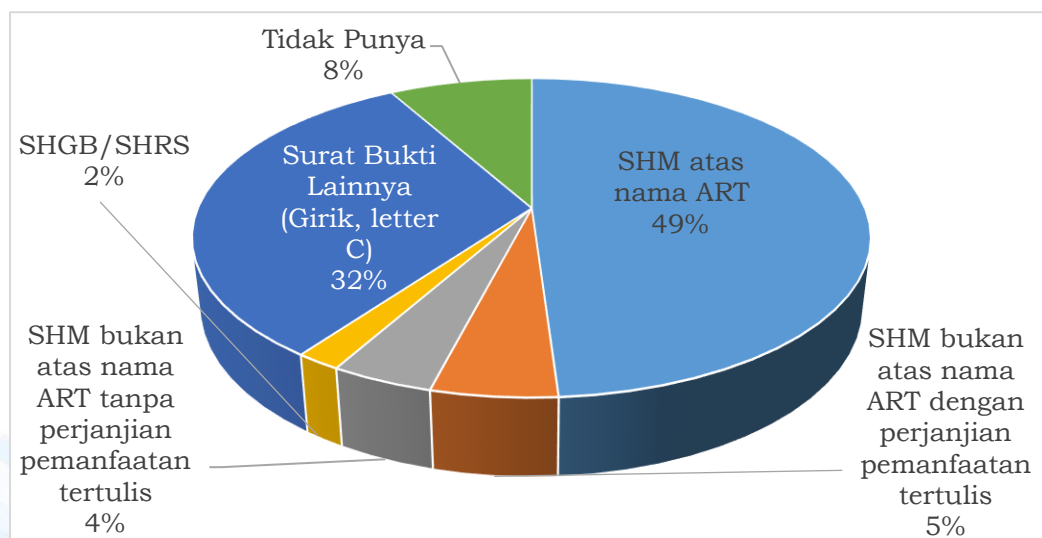
melaksanakan pencapaian target IKK sesuai RPJMD terkait cadangan pangan. Cadangan pangan Kota Cimahi di tahun 2018 ditargetkan sebesar 10 ton, namun karena terjadi kenaikan harga beras BULOG maka yang terealisasi menjadi sebesar 9,7 ton. Cadangan pangan sepanjang tahun 2018 tidak digunakan karena tidak terjadi kejadian rawan pangan.

4. Pertanian

Tanah yang merupakan barang milik daerah Kota Cimahi yang dipergunakan untuk kepentingan umum berupa fasilitas-fasilitas sosial. Sejak Kota Cimahi berdiri tahun 2001 aset yang semula dari kabupaten induk (kabupaten Bandung) diserahkan ke Pemerintah Kota Cimahi di tambah dari hasil pembelian tanah berjumlah 259 bidang yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Pada tahun 2015 dari 259 bidang tanah semuanya telah dinilai dan yang baru tersertifikasi mencapai 137 bidang tanah dan sisanya yang berjumlah 122 bidang tanah dalam proses sertifikasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum direncanakan akan dilaksanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam lima tahun ke depan. Permasalahan yang timbul dari urusan pertanahan adalah keterbatasan lahan Kota Cimahi sehingga untuk pembelian lahan terutama dengan luasan yang besar sulit untuk terealisasi ditambah lagi dengan faktor lain seperti harga tanah, kesesuaian dengan tata ruang dan kepemilikan lahan yang sering terjadi sengketa antar beberapa pihak.

Gambar 2.12
Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Status Kepemilikan Lahan 2017



Sumber : Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, BPS

Mayoritas rumah tangga memiliki lahan dengan SHM atas nama ART (49%), meskipun demikian terkait dengan kepemilikan masih ada 8% rumah tangga yang tidak memiliki status atas kepemilikan lahan dan 32% dengan surat bukti lainnya (girik, leter c). Kepemilikan status atas lahan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan bidang pertanahan.

5. Lingkungan hidup

Sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Akan tetapi dengan adanya aktivitas manusia yang cukup tinggi dalam pembangunan, terjadinya pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari.

Pencemaran lingkungan di Kota Cimahi terjadi pada lingkungan air dan udara. Pencemaran air ditunjukkan dengan menurunnya kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga. Pencemaran udara berasal dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian guna mengontrol kualitas lingkungan air dan udara tersebut. Isu lain yang berpengaruh terhadap lingkungan adalah adanya perubahan iklim yang ekstrem sehingga diperlukan program penanganan terhadap hal tersebut sehingga kota dapat beradaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan. Kota Cimahi termasuk ke dalam zona kritis muka air tanah yang dikategorikan ke zona merah oleh provinsi, disini dibutuhkan program pemulihan air baku dengan salah satunya adalah program biopori dan sumur resapan.

Pengelolaan sampah di Kota Cimahi sejak tahun 2017 sudah mengarah pada prinsip Zero Waste. Sistem ini mengembangkan siklus pengelolaan timbulan sampah yang tidak hanya mengandalkan aktifitas kumpul, angkut, buang tapi mengedepankan prinsip pengurangan dari sumber. Beberapa kegiatan yang dikembangkan dalam rangkaian pengelolaan sampah di Kota Cimahi antara lain adalah melalui 3R, komposting dan pembuatan bio gas. Data tahun 2017 menunjukkan timbulan sampah di Kota Cimahi sebanyak 262,49 m³/hari. Dari jumlah itu, yang tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sebanyak 238,51 m³/hari atau sekitar 90,8 persen yang terdiri dari penanganan pada skala rumah tangga 0,22 m³/hari, tereduksi dengan kegiatan 3R sebanyak 40,68 m³/hari, diangkut ke TPA 197,6 m³/hari, sehingga yang belum

tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sebanyak 23, 99 m3/hari.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen Kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang bersangkutan dan diakui secara legal oleh negara. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial bidang kependudukan kepada masyarakat. Kartu Keluarga merupakan kartu identitas yang menunjukkan hubungan kekerabatan dalam keluarga dan yang dimaksud dengan keluarga disini tidak selalu identik dengan rumah atau tempat tinggal, dalam satu rumah bisa terdiri dari lebih satu Kepala Keluarga. Pada Tahun 2016, jumlah keluarga di Kota Cimahi sebesar 183.477 kepala keluarga dengan jumlah kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 183.477 sehingga mencapai 100 persen.

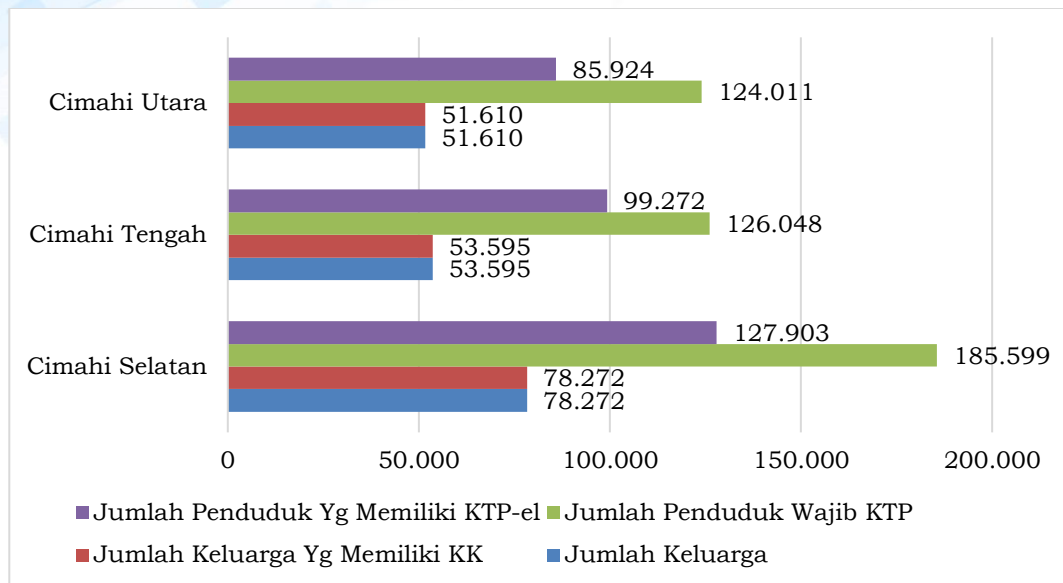
Tabel 2.27
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP-el Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Memiliki KK	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el
Cimahi Selatan	78.272	78.272	185.599	127.903
Cimahi Tengah	53.595	53.595	126.048	99.272
Cimahi Utara	51.610	51.610	124.011	85.924

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Tahun 2016

Terkait KTP-el berlaku seumur hidup pada 29 Januari 2016, Menteri Dalam Negeri membuat Surat Edaran yang isinya menyatakan semua e-KTP berlaku seumur hidup, walaupun ada yang tertulis masa berlaku seperti Tahun 2016 dan Tahun 2017 tetapi berlakunya seumur hidup, kecuali ada perubahan elemen datanya. Dari jumlah total penduduk yang wajib KTP sebesar 435.658 jiwa, baru 313.099 jiwa penduduk atau 71,87 persen yang memiliki KTP-el.

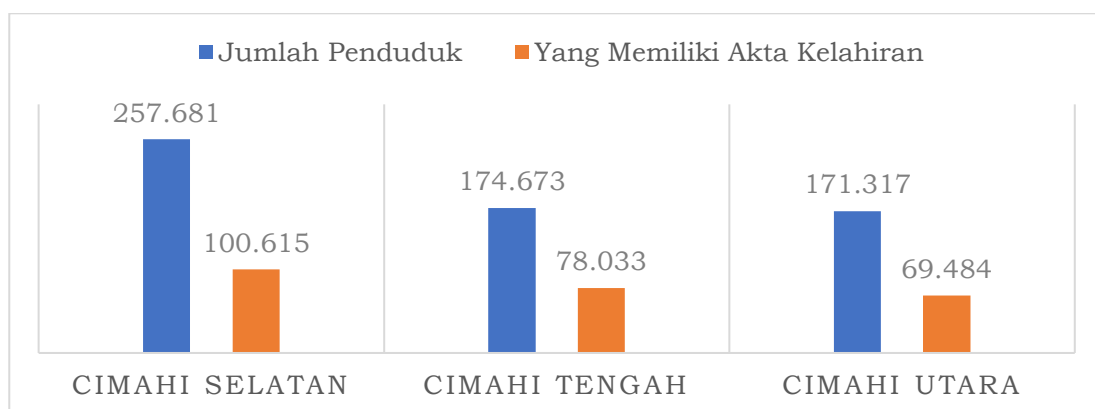
Gambar 2.13
Perbandingan Jumlah Kepemilikan KK dan KTP-el Terhadap Jumlah Keluarga dan Penduduk Wajib KTP-el Tahun 2016



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Tahun 2016

Kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Cimahi terhadap total penduduk Kota Cimahi berdasarkan data SIAK, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran di Kota Cimahi tahun 2016 hanya 41,10 persen atau total 248.132 jiwa. Perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Cimahi adalah penduduk sebesar 355.539 jiwa tidak mempunyai akta kelahiran. Sehingga terlihat pada data kecamatan jumlah atau persentase kepemilikan akta kelahiran berada dibawah 50 persen.

Gambar 2.14
Perbandingan Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Tahun 2016

Dengan menurun atau rendahnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu adanya kebijakan yang berkaitan dengan sosialisasi akan pentingnya pemutakhiran data penduduk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui optimalisasi institusi/organisasi masyarakat ditingkat kelurahan seperti LPM, PKK, Posyandu, serta melalui sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, pengelolaan kebersihan lingkungan dan kegiatan EKPM serta lomba-lomba. Setiap kelurahan di Kota Cimahi memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Berikut ini gambaran tentang keberdayaan masyarakat Kota Cimahi :

Tabel 2.28
Jumlah Lembaga dan Kader Pembangunan di Kota Cimahi
Tahun 2012-2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	LPM	19	19	19	19	19
2	PKK	19	19	19	19	19
3	Posyandu	386	388	388	388	388
4	Kader Pembangunan	150	150	175	175	325
5	Swadaya masyarakat dalam pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Cimahi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai sejak tahun 2004 silam serta terus dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar partisipasi dan gotong royong masyarakat terus tumbuh berkembang sehingga masyarakat akan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan di dorong dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pengawasan.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kinerja pemerintah dalam bidang Keluarga Berencana (KB) cukup baik. Pasangan usia subur (PUS) di Kota Cimahi yang telah mengikuti program KB baik melalui jalur pemerintah maupun jalur swasta dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Indikator keluarga Berencana

Uraian	2014	2015	2016
--------	------	------	------

TFR	1,43	1,31	1,31
Pasangan Usia Subur	90.415	91.242	90.072
Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	76,4	77,1	78,2
Cakupan akseptor KB	88,95	87,36	78,2
Peserta KB Aktif	76,8	77,7	78,2

Sumber : DinsosP2KBP3A Tahun 2016

Dari data di atas cakupan peserta KB mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2016. Hal ini perlu di menjadi perhatian mengingat angka PUS yang tinggi, sehingga kalau tidak diperhatikan akan mengakibatkan laju pertumbuhan menjadi tidak terkontrol.

9. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan di Kota Cimahi hanya melayani perhubungan darat. Pada infrastruktur perhubungan darat, terminal yang ada merupakan terminal tipe C yang melayani 24 trayek, yang terdiri dari trayek internal dalam Kota Cimahi yaitu sebanyak 3 (tiga) trayek yang beroperasi, dan selebihnya adalah trayek yang melintas serta trayek yang hanya asal dan tujuannya di Kota Cimahi. Di Kota Cimahi terdapat 4 terminal yaitu sub terminal Pasar Antri Baru, sub terminal pasar atas, sub terminal Sangkuriang Cipageran dan sub terminal Cimindi.

Dalam upaya meningkatkan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan telah dilakukan uji kelayakan kendaraan yang laik jalan dan laik operasi terhadap transportasi publik di Kota Cimahi, dilakukan sosialisasi kebijakan dalam bidang perhubungan terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang disiplin berlalu lintas, serta meningkatkan jumlah fasilitas perlengkapan jalan dan jumlah penerangan jalan beserta pemeliharanya.

Hasil laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program tahun 2018 oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kondisi fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada tahun 2018 (indikator : Rasio PJU pada jalan kota) 100 persen. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi masih diperlukan penggantian armatur PJU agar lebih hemat energi, serta peningkatan jumlah penerangan lampu Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan PJU Gang. Pada tahun 2018, telah terbangun penerangan lampu PJU sebanyak 71 titik, Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) sebanyak 120 titik, PJU Gang sebanyak 2.220 titik;
- Kondisi fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) pada jalan Kota (indikator : Rasio fasilitas perlengkapan jalan

- (rambu, marka, dan *guardrill*) pada jalan Kota telah mencapai 100 persen. Pada tahun 2018 telah dilakukan pemasangan 125 Buah Rambu Lalu lintas Ukuran 75x75 cm, 10 buah RPPJ 120 x 240 cm, 3 buah warning light solar cell, 25 buah cermin tikung, 20 buah rambu tiang F *double* daun uk 75 x 75 cm dan 1 buah RPPJ layar monitor LED, 1 Paket Portal Pembatas Jalan, 7.837 m² marka jalan, 1.090 m² marka ZOSS (Zona Selamat Sekolah), 1.270 m² marka kuning, dan 348 unit *speed bumper*, dan 189 m pagar pengaman (*guardrill*);
- Kondisi Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di Jalan Kota Cimahi mencapai 25 km/jam;
 - Kondisi prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun dan kondisi operasi penegakan ketertiban parkir mencapai 100 persen. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Terlaksananya TC *flyover* padasuka, 4x Pembahasan kajian analisis dampak lalu lintas, penyusunan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan, Terlaksananya 10x kegiatan gakum parkir, Terlaksananya 12x monitoring parkir, Terlaksananya 2x sosialisasi petugas parkir, Terlaksananya penertiban Parkir kegiatan insidentil, Pemasangan rambu papan tarif parkir 12 buah, Penyediaan marka parkir 450 m², Pemeliharaan Papan Tarif Parkir;
 - Kondisi terminal angkutan penumpang pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, pada tahun 2018 telah mencapai 100 persen. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan 2 (dua) unit shelter dan pemeliharaan 11 (sebelas) unit *shelter*/halte;
 - Kondisi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota telah mencapai 100 persen. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan 3x penyuluhan pengemudi angkutan umum, 3x cek kesehatan pengemudi angkutan umum, dan pengadaan Plang Tanda Razia 4 buah;
 - Kondisi Angkutan yang Layak jalan telah mencapai 65 persen. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Terpeliharanya 10 peralatan uji PKB Tahun 2018 (*Brake Tester, Head Light Tester, Joint Play Detector, Co/Hc Tester (Gaz Analyzer), Smoke Tester, Side Slip, Speedo Meter, Sound Level, Compressor, Genset*), Pengadaan Alat Uji Side Slip dan pemeliharaan gedung PKB.

Tabel 2.30
Kualitas Jalan Kota Cimahi Tahun 2017

Keterangan	Kualitas Jalan			Total
	Baik	Sedang	Rusak	
Pajang (km)	52,89	44,81	7,49	105,19
Persentase	50,28	42,60	7,12	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2017, panjang jalan dengan status jalan kabupaten/kota di Kota Cimahi tercatat sepanjang 105,19 km dengan kualitas baik sepanjang 52,89 persen dan sedang sepanjang 44,81 km atau 2,60 persen namun masih ada 7,49 km atau 7,12 persen jalan yang masih rusak.

10. Komunikasi dan informatika

Pembangunan komunikasi dan informasi diterapkan pada jaringan dan Sistem Informasi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu pembangunan jaringan komunikasi informasi berbasis internet, pembangunan SIAK untuk pelayanan kependudukan, pembangunan jaringan SIK di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta pembangunan Baros *Information Technology Creative* (BITC) sebagai sentral pengembangan pengelolaan kawasan klaster industri telematika. Pembangunan sistem informasi ditingkatkan dan diperluas, serta diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi berbasis IT, diantaranya melalui kegiatan pengembangan dan operasi *website* www.cimahikota.go.id, pesan penduduk (pesduk), siaran radio, televisi, jumpa pers, *release* berita, serta pembangunan *techknopark*.

Pemerintah Kota Cimahi telah mengembangkan *e-Government* Kota Cimahi yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Pembangunan Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan seluruh SOPD baik di lingkungan Internal Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun SOPD yang ada di luar Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi (DPRD, RSUD Cibabat, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan serta pembuatan Aplikasi-*Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota meliputi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMM) Pelayanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan antara lain :

- a. SIM PPTSP (Pelayanan Publik bidang Perizinan);
- b. SIM Kelurahan (Pelayanan Publik di Kelurahan);
- c. SIM Puskesmas (Pelayanan Publik di Puskesmas);
- d. SIM-RS Cibabat (Pelayanan Publik di RS. Cibabat);
- e. SIM PKB (Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor);
- f. SIMPada (Pelayanan Publik di bidang Pendapatan Daerah);
- g. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- h. SIM Perpustakaan/ *e-Library* (Pelayanan Perpustakaan);
- i. SIM Kearsipan / *e-Arsip* (Pelayanan di bidang Kearsipan);
- j. *Website* www.cimahikota.go.id;
- k. SIM PESDUK (Pesan Singkat Penduduk) melalui SMS ke 081221700800;
- l. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah);
- m. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);

- n. BPHTB online SAPK JDIH (Jaringan dan Informasi Hukum) bisa diakses melalui <http://jdih.cimahikota.go.id>);
- o. E-reporting E-PAD SIM PENDIDIKAN;
- p. SIMREND A (Sistem Perencanaan Daerah);
- q. Simpus;
- r. PMKS;
- s. Sirup;
- t. Sipinter;
- u. UPT Pasar;
- v. *Open Data*;
- w. *Smart City*.

Pembangunan Aplikasi SIM terintegrasi dan Integrasi Database diantaranya :

- a. SIM terintegrasi/Portal Kota Cimahi yang dapat diakses melalui <http://portal.cimahikota.go.id>;
- b. Data *warehouse* SIM Terintegrasi (Data Kependudukan, Data Kepegawaian, Data Siswa, Data Rumah Tangga Sasaran, Data Kesehatan, Data Kependidikan, dll);
- c. Aplikasi *Executive Dashboard* (<http://dashboard.cimahikota.go.id>) yang merupakan Aplikasi untuk menyajikan informasi berupa analisis dari SIM terintegrasi yang ditujukan untuk Pemangku Kepentingan.

Dalam bidang komunikasi dan informasi masih terdapat kendala dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain :

- a. Terbatasnya sarana prasarana komunikasi dan informasi untuk proses transaksi dan penyaluran informasi antar instansi/lembaga dan masyarakat;
- b. Pembangunannya masih bersifat parsial sehingga sulit dalam mengintegrasikan data dan informasi;
- c. Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknologi informasi;
- d. Unit organisasi pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi informasi belum berperan secara optimal;
- e. Belum membudayanya pemanfaatan teknologi informasi di beberapa kalangan birokrat.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Pada tahun 2018 jumlah koperasi yang aktif di Kota Cimahi mencapai 202 unit, sedangkan koperasi yang tidak aktif berjumlah 121 unit. Persoalan ini disebabkan oleh banyaknya koperasi yang tidak melakukan pelaporan, sehingga banyak koperasi yang masuk ke dalam kategori tidak aktif. Pendataan kembali koperasi diperlukan karena potensi jumlah penduduk yang semakin padat, sehingga keberadaan

koperasi strategis dibutuhkan. Selain itu peran koperasi di Kota Cimahi memegang peranan yang penting sebagai pendukung kelangsungan UMKM.

Pada sektor UMKM, berdasarkan data Direktori Bisnis Kota Cimahi tahun 2014 jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan besar adalah sebanyak 2790 buah. Adapun dengan sebaran datanya sebagai berikut :

Tabel 2.31
Distribusi Pelaku Usaha Produksi di Kota Cimahi Tahun 2014

Skala Ekonomi	Jumlah Pelaku Usaha	%	Jumlah tenaga Kerja	%
Usaha Mikro	2.037	73	4.047	12
Usaha Kecil	107	4	5.123	15
Usaha Menengah	586	21	4.176	12
Usaha Besar	60	2	21.681	62
Jumlah	2.790	100	35.027	100

Sumber : Bappeda Kota Cimahi 2014.

Sebaran terbesar usaha produksi skala mikro berada di Kecamatan Cimahi Selatan yaitu sebanyak 45,9 persen; Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 32 persen; dan Kecamatan Cimahi Tengah sebesar 22,1 persen, sedangkan untuk usaha produksi skala ekonomi kecil sebarannya adalah yang tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 50,3 persen; Kecamatan Cimahi Utara sebesar 27,5 persen dan Cimahi Tengah sebesar 22,2 persen. Usaha produksi skala menengah sebaran tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan sebesar 56,1 persen; Kecamatan Cimahi Tengah sebesar 29 persen dan terkecil berada di Kecamatan Cimahi Utara sebesar 15 persen. Usaha produksi skala ekonomi besar sebaran tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan sebesar 68,3 persen; Kecamatan Cimahi Tengah sebesar 25 persen dan Kecamatan Cimahi Utara sebesar 6,7 persen.

Wilayah Kota Cimahi Utara didominasi oleh UMKM yang memproduksi mamin, sebab aktivitas pertanian di Kota Cimahi cenderung untuk terdistribusi di wilayah bagian utara, kondisi ini didukung oleh faktor kondisi alam yang cocok dengan pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan kebijakan tata ruang Kota Cimahi, wilayah utara Kota Cimahi ditetapkan sebagai daerah kawasan strategis ruang terbuka hijau (karena termasuk kedalam wilayah kawasan lindung), sehingga aktivitas sosial dan ekonomi yang diperbolehkan di daerah tersebut adalah aktivitas perumahan dengan kepadatan rendah dan aktivitas pertanian. Daerah bagian selatan didominasi oleh UMKM yang bergerak di tekstil. Masifnya industri tekstil di bagian selatan disebabkan oleh adanya kebijakan pada tahun 1969 yang menetapkan Kota Cimahi sebagai zona industri, mengingat

daerah tersebut merupakan daerah pertanian tadah hujan yang kurang produktif.

Walaupun jumlah UMKM di Kota Cimahi mencapai ribuan, tetapi kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian daerah masih belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, antara lain :

- a. Rendahnya kapasitas managerial koperasi dan UKM yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM, rendahnya kualitas tenaga pendamping, terbatasnya akses terhadap bantuan permodalan dan kurangnya investasi pengembangan koperasi dan UKM;
- b. Rendahnya kapasitas pemasaran UKM yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan pemasaran UKM ke luar daerah, masih banyak UKM yang belum memiliki standarisasi produk untuk ekspor, belum adanya jejaring komunitas UKM yang kuat, kurangnya fasilitas trading on line hasil UKM, masih perlu ditingkatkannya kerjasama antara UKM dengan toko ritel modern dan kurangnya kerjasama UKM hulu dan hilir;
- c. Rendahnya inovasi khususnya proses produksi dikalangan UMKM produksi di Kota Cimahi.

Pengembangan UMKM ini kedepannya akan dilakukan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Klaster dan Sentra Bisnis. Dari data Sensus Ekonomi tahun 2015 terdapat potensi 4 (empat) klaster industri unggulan di Kota Cimahi yaitu :

- a. Klaster industri makanan dan minuman;
- b. Klaster industri tekstil dan produk tekstil;
- c. Klaster industri kerajinan;
- d. Klaster industri Telematika.

Sebagai strategi dari pengembangan klaster-klaster tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra UKM yang diharapkan dapat menghasilkan produk-produk unggulan di Kota Cimahi. Adapun sesuai Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM Nomor 25 tahun 2005 syarat dari dibentuknya sebuah sentra adalah terdapat minimal 20 pelaku usaha yang memiliki usaha sejenis atau menggunakan bahan baku yang sejenis pada satu wilayah yang sama. Sentra-sentra UMKM ini merupakan prasyarat dikembangkannya klaster-klaster dengan mengintergrasikan aktifitas hulu-hilir. Diharapkan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) ini akan mampu mendorong usaha masyarakat dan mampu menjadi pusat pengembangan produk-produk unggulan tiap wilayah di Kota Cimahi.

Berdasarkan data kewirausahaan Kota Cimahi menggunakan data *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) wirausahaan dibagi kedalam 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. Mereka yang berniat berusaha (*Nascent Entrepreneurs*);
- b. Pengusaha awal kurang dari satu tahun;
- c. Wirausahawan dengan umur usaha antara 1 sampai dengan 3 tahun;
- d. Wirausahawan mapan (lebih dari 3 tahun).

Hasil analisis data GEM menunjukkan bahwa setiap tipe kewirausahaan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Secara umum pengusaha pemula (*start ups*) biasanya menghadapi kendala berupa iklim usaha yang kondusif seperti perizinan usaha, bahan baku dan pemasaran. Pengusaha pemula sebetulnya belum memiliki kendala permodalan karena seringkali kewirausahaan muncul karena modal sosial ataupun melalui sub kontrak. Berbeda dengan wirausahawan yang telah mapan, mereka yang telah berusaha lebih dari 4 tahun biasanya akan menghadapi kendala permodalan karena memerlukan perluasan pasar dan memenuhi permintaan yang lebih besar lagi. Melihat hasil analisis data GEM ini maka strategi pembinaan UMKM tidak bisa disamaratakan dan diperlukan *road map* pengembangan kewirausahaan di Kota Cimahi.

Lebih lanjut lagi melalui data *Global Entrepreneurship Monitor* ini diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan turun jika kewirausahaan pemula bertambah hal ini dikarenakan mekanisme *crowding out* akibat persaingan yang keras dimana tingkat bertahan (*survival*) *start ups* relatif kecil. Hal ini terlihat juga dari sangat besarnya pengusaha mikro di Kota Cimahi tetapi memiliki tingkat inovasi yang rendah. Akibatnya adalah kinerja usaha sebagaimana ditunjukkan oleh keuntungan, kenaikan tenaga kerja dan penjualan yang rendah menyebabkan kontribusi UMKM di Kota Cimahi terhadap PDRB Kota relatif kecil (18 persen). Akan tetapi jika peningkatan kewirausahaan ini didampingi dengan peningkatan inovasi maka akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan kewirausahaan tidak bisa dipisahkan dari upaya peningkatan inovasi di kalangan UMKM.

12. Penanaman modal

Potensi unggulan Kota Cimahi yang dapat dikembangkan untuk menarik investor adalah sektor industri khususnya tekstil dan manufaktur. Pada saat ini, selain sektor industri, sektor perdagangan dan jasa terutama jasa pendidikan memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Kota Cimahi. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah industri kreatif dan telematika. Gedung BITC (*Baros Information Technology and Creative Center*) dan dan Cimahi *Technopark* (CTP) yang terletak di Kawasan Baros diharapkan dapat memicu bangkitnya aktifitas ekonomi kota.

Selain itu letak kota yang strategis menjadi potensi tambahan yaitu Gerbang Tol Baros merupakan gerbang masuk ke Kota Cimahi. Sebagai bagian dari Koridor Telematika dalam *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menghubungkan Serang-Jakarta-Bandung, Kota Cimahi berada pada posisi yang sangat strategis dan mudah diakses baik melalui jalan tol dan maupun jalur kereta api.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM di tahun 2017 adalah sebanyak 125 perusahaan, sedangkan realisasi Investasi Kota Cimahi pada tahun 2018 adalah Rp. 8.953.319.609.542,00 terjadi kenaikan sebesar 24,11 % dari tahun sebelumnya.

13. Kepemudaan dan olah raga

Dalam urusan pemuda dan olahraga muncul beberapa permasalahan diantaranya kurangnya sumberdaya dan sarana olahraga sebagai tempat aktivitas masyarakat untuk berolahraga, dan belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan di Kota Cimahi.

Tabel 2.32
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2014

No	Uraian	Jumlah
1.	Organisasi Pemuda	44
2.	Organisasi Olahraga	24
3.	Kegiatan kepemudaan	5
4.	Kegiatan Keolahragaan	6
5.	Grup Keolahragaan	42

14. Statistik

Untuk penyediaan data statistik dasar Bappeda Kota Cimahi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi seperti penyediaan dan penyusunan data dan indikator pembangunan, seperti dalam bentuk Kota Cimahi Dalam Angka (KCDA), Profil Pemerintahan Kota Cimahi, dan penyusunan Indikator Ekonomi Daerah dalam bentuk dokumen PDRB Kota Cimahi, survey dan analisis IPM dan dokumen lainnya. Selain penyusunan dokumen data statistik daerah, pelaksanaan urusan statistik sektoral dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah dengan melakukan pengambilan data lapangan seperti pengambilan data sekunder yang bersumber dari perangkat daerah Kota Cimahi.

15. Persandian

Keamanan Sistem Informasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menjamin ketepatan dan keakuratan penyampaian informasi. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, online, dan real time, SIPD menjadi penting karena merupakan media akuntabilitas public yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam mengevaluasi kinerja, program pembangunan, serta mengevaluasi capaian-capaian pembangunan.

16. Kebudayaan

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan. Kesenian yang berkembang di Kota Cimahi sangat beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya grup-grup kesenian mulai dari seni wayang golek, seni calung, singa depok, seni degung dan jaipong sampai grup dangdut dan grup band. Dalam rangka pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, pemerintah Kota Cimahi mengirimkan duta seni ke TMII, Binojakrama padalangan purwa, kemilau nusantara dan pertunjukan seni canghegar di objek wisata cireundeu.

Di Kota Cimahi terdapat dua komunitas adat yang memiliki budaya dan kearifan lokal, komunitas adat yang berada di Cireunde Leuwigajah dimana cara hidup mereka yang memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan yang non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan dan komunitas yang satunya lagi adalah komunitas yang berada di kelurahan Cipageran. Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik terutama menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi seninya, hal ini timbul karena keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung kesenian dimaksud. Pengembangan budaya lokal (tradisional) berupa kesenian/tarian dan sastra dapat menjadi potensi wisata di Kota Cimahi.

Tabel 2.33
Jumlah Grup Kesenian dan Organisasi Kesenian Kota Cimahi
Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah grup kesenian	283
2.	Jumlah organisasi kesenian	69
3.	Komunitas Adat	2

17. Perpustakaan

Perpustakaan Daerah Kota Cimahi sebagai pembina perpustakaan yang ada di Cimahi, baik perpustakaan umum

maupun perpustakaan khusus. Pemerintah Daerah Kota Cimahi terus mengupayakan peningkatan minat baca dan pelayanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling 2 (dua) unit, 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah dan sudut baca tersebar di kelurahan. Sejak tahun 2014 Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi beroperasi dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka secara signifikan.

Secara umum dalam pelaksanaan pemberian pelayanan terdapat beberapa kendala antara lain adalah adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dibidang perpustakaan, sarana prasarana yang memadai baik yang berupa bahan bacaan maupun ruang layanan yang ada. Pada tahun 2018 Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi telah mengembangkan melalui pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (*e-library*).

18. Kearsipan

Pembangunan pengelolaan pengelolaan arsip di setiap organisasi perangkat daerah akan menjadi sumber informasi bagi para pengambil kebijakan. Untuk mewujudkan pendayagunaan arsip secara efektif dan efisien, diantaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana terutama untuk pengadaan depo arsip, penyusunan pedoman kearsipan berupa jadwal retensi arsip di setiap Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk melakukan penyusutan arsip sehingga perkembangan fisik dan informasi arsip yang dihasilkan dapat dikendalikan, peningkatan pemahaman dan pengetahuan tata kearsipan termasuk tentang penyusunan jadwal retensi arsip.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga profesional di bidang kearsipan; Secara kualitatif, arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal, serta belum dimilikinya sarana depo arsip yang memadai untuk menampung dokumen dokumen pemerintah daerah.

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Perikanan

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian di Kota Cimahi sangat kecil. Persoalan tersebut dikarenakan secara topografi wilayah yang bukan daerah pantai serta terbatasnya lahan untuk budidaya ikan hias. Produksi perikanan hanya disumbang dari perairan umum dan budidaya kolam. Jika dibandingkan dengan daerah lain atau di Provinsi Jawa Barat, tingkat produksi perikanan tergolong rendah. Rincian jumlah produksi perikanan tahun 2011-2016 sebagai berikut :

Tabel 2.34
Jumlah Produksi Perikanan Kota Cimahi Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Lahan Perikanan (Ha)	Total Lahan (Ha)	% Luas Penggunaan Lahan Perikanan terhadap Total Penggunaan Lahan
2011	171,18	9,13	4.022,75	0,0023
2012	206,56			
2013	301,40	9,13	4.041,97	0,0023
2014	314,98			
2015		9,13	5.848,61	0,0016
2016	324,00			

Sumber : Dinas Perikanan provinsi Jabar (2018)

Pertumbuhan hasil produksi perikanan dalam rentang waktu empat tahun tergolong rendah dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 0,29 persen. Tiap tahunnya luas penggunaan lahan untuk perikanan tidak bertambah, hal ini yang membuat pertumbuhan produksi perikanan tidak signifikan tumbuh. Peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan strategi lain.

Terdapat potensi usaha perikanan yang memiliki nilai tambah (*added value*) yang besar dan tidak terlalu memakan lahan dan akan cocok bila dikembangkan di wilayah perkotaan yaitu pengembangan ikan hias. Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan sangat dekat dengan ibu kota provinsi maka target pasar ikan hias masih sangat terbuka. Saat ini usaha tersebut sudah mulai dirintis melalui Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) untuk membantu masalah bibit. Akan tetapi strategi tersebut belum optimal karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Kedepannya Kota Cimahi diharapkan dapat mulai melirik usaha ikan hias berbasis kerakyatan berupa sentra ikan hias.

2.3.2.2. Pariwisata

Kota Cimahi menjadi salah satu kota yang belum memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata potensial yang memiliki daya Tarik untuk mendatangkan wisatawan. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota sekitar masih sangat jauh tertinggal. Dengan segala keterbatasan sumber daya alam maka potensi terbesar bagi sektor pariwisata di Kota Cimahi adalah wisata buatan. Berbagai potensi yang ada dan sangat mungkin dikembangkan adalah kampung adat cireundeu dan wisata heritage.

Wisata *heritage* merupakan sebuah perjalanan yang dikemas dengan mengunjungi tempat yang dianggap mempunyai sejarah yang

penting bagi sebuah daerah atau Kota yang dapat menjadi daya tarik wisata. Di Kota Cimahi wisata heritage sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan karena banyak tempat-tempat yang dinilai sebagai potensi wisata tersebut.

Kampung Adat Cireunde u terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Terdiri dari 50 kepala keluarga atau 800 jiwa, yang sebaga i besar bermata pencaharian bertani ketela. Kampung Adat Cireunde u sendiri memiliki luas 64 ha terdiri dari 60 ha untuk pertanian dan 4 ha untuk pemukiman. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Maka pemerintah menetapkan Kampung Adat Cireunde u sebagai kampung adat yang sejajar dengan Kampung Naga (Tasikmalaya), Kaepuhan Cipta Gelar (Banten, Kidul, Sukabumi), Kampung Dukuh (Garut), Kampung Urug (Bogor), Kampung Mahmud (Bandung), dan kampung adat lainnya.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mengalami peningkatan dari semula sebanyak 496 kunjungan pada tahun 2016 menjadi 546 kunjungan pada tahun 2017. Adapun Jumlah wisatawan nusantara (Wisnus) mengalami peningkatan dari semula sebanyak 3.383 kunjungan pada tahun 2016 menjadi 3.525 pada tahun 2017. Demikian pula halnya dengan Jumlah pekerja pada industri pariwisata yang semula sebanyak 72.353 orang pada tahun 2016 meningkat menjadi 75.833 orang pda tahun 2017.

Tabel 2.35
Jumlah Destinasi Wisata, Kunjungan Wisata dan Pekerja Sektor Pariwisata, Kota Cimahi Tahun 2013-2017

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola dengan Baik	3	3	3	4	5
Jumlah Wisatawan Mancanegara	412		451	496	546
Jumlah Wisatawan Nusantara	3.312	3.325	3.600	3.383	3.525
Jumlah pekerja pada Industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	65.773	67.535	67.833	723.533	76.833

2.3.2.3. Pertanian

Sektor pertanian di Kota Cimahi bukanlah sektor utama yang diandalkan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian, dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Cimahi yang

masih rendah, persoalan tersebut disebabkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki. Melihat luas lahan yang ada di Kota Cimahi, Berdasarkan data dari Badan Pusat Stastisti (BPS) Kota Cimahi Tahun 2018, terdapat 106,42 hektar lahan sawah yang menggunakan irigasi setengah teknis dan beberapa hektar lahan kering.

Tabel 2.36
Luas Lahan sawah dan Lahan kering di Kota Cimahi Tahun 2016

Tahun	Luas Lahan Sawah dengan Irigasi Setengah Teknis	Luas lahan Sawah tadah hujan	Luas Lahan Kering		
			Lahan digunakan bangunan	Lahan digunakan kebun	Lahan digunakan Kolam
2014	190 Ha		702 Ha	214 Ha (22,96%)	16 Ha (0,42%)
2015	134,42 Ha		Na	Na	Na
2016	106,42	28	714	279	

Sumber : BPS Kota Cimahi 2018

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kota Cimahi memiliki ketersediaan lahan yang terbatas, dengan tren yang terus menurun. Luas lahan sawah dengan irigasi setengah teknis di kota Cimahi pada tahun 2016 menurun 28 ha dari tahun 2015 yang semula 134,42 ha menjadi 106,42 ha, sedangkan sisanya sekitar 28 ha merupakan lahan sawah tadah hujan. Terbatasnya lahan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap produktifitas hasil pertanian. Oleh karenanya kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) di Kota Cimahi perlu menjadi salah satu isu permasalahan yang diangkat dalam perencanaan kedepan apabila.

Kota Cimahi akan mempertahankan peningkatan produksi pertanian dan menjaga keberlangsungan aktivitas sektor pertanian yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, mejaga aktivitas hulu di sektor pertanian, serta menjadi salah satu urusan yang menunjang urusan wajib ketahanan pangan di Kota Cimahi.

Angka produktifitas pertanian di Kota Cimahi pun terbilang cukup rendah, selain itu capaian hasil pertanian Kota Cimahi pun mengalami tren penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Luas tanam padi adalah 254 ha, sedangkan luas panen padi adalah 262 ha. Produksi padi sawah Kota Cimahi tahun 2016 adalah sebanyak 7135 kwintal dengan rata-rata produksi sebesar 27,23 kwt /Ha. Jika melihat jumlah produksi padi tahun 2016, maka terjadi penurunan dibandingkan jumlah produksi tahun sebelumnya.

Komoditas ubi kayu yang merupakan komoditas pertanian yang dikembangkan di Kota Cimahi juga mengalami penurunan, dimana produksi ubi kayu pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.944 ton dengan rata-rata produksi mencapai 17,2 ton/Ha. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Produk-produk pertanian pangan seperti padi, palawija dan hortikultura masih menjadi produk dominan yang dihasilkan Kota Cimahi, namun demikian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ketiganya mengalami tren penurunan hasil produksi. Rendahnya hasil produksi pertanian Kota Cimahi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah adanya alih fungsi lahan pertanian di Kota Cimahi, rendahnya kapasitas SDM petani, terbatasnya penerapan teknologi pertanian, masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung produksi hasil pertanian di Kota Cimahi serta manajemen pengelolaan hasil pertanian yang masih kurang.

Tabel 2.37
Peranan PDRB Sektor Pertanian Kota Cimahi (persen)

Kategori	2013	2014*	2015*	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan perikanan	0,25	0,26	0,24	0,23	0,22

Sumber : BPS 2013-2017

Selain tingkat produktifitas yang rendah, sektor pertanian Kota Cimahi juga tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi tahun 2017. Sektor pertanian sendiri hanya menyumbangkan sekitar 0,22 persen dari total PDRB Kota Cimahi yang mencapai 26,53 triliun rupiah pada tahun 2017.

Namun berdasarkan data BPS (2018) pada tabel 2.47, laju pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB ADHK Kota Cimahi, trennya selama 5 tahun terakhir adalah cenderung menurun, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 0,82 persen dari tahun sebelumnya hanya -2,23%.

Tabel 2.38
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Cimahi menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Cimahi menurut Lapangan Usaha (%)	2,94	1,97	-4,7	-2,23	0,82

Sumber : BPS, diolah

Pada tahun 2016 berdasarkan data BPS (2018), jumlah dan jenis komoditas ternak ruminansia besar di Kota Cimahi umumnya terjadi peningkatan, terkesuali untuk ternak kerbau mengalami penurunan.

Tabel 2.39
Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak di Kota Cimahi (ekor)

No	Jenis Ternak	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sapi Potong	100	110	121	109	125
2	Kerbau	30	32	27	24	21
3	Domba	13.821	17.967	15.912	13.487	13.757
4	Kambing	208	218	189	158	162
5	Sapi Perah	853	896	940	850	867

Sumber : BPS (2018)

Pada sub-sektor peternakan, unggas merupakan ternak yang paling banyak dibudidayakan di Kota Cimahi, beberapa komoditi unggas yang dibudidayakan di Kota Cimahi diantaranya adalah ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Selain itu terdapat hewan ternak lain yang juga dibudidayakan seperti sapi potong, kerbau, domba, kambing, sapi perah dan kuda.

Tabel 2.40
Jumlah dan jenis Komoditas Unggas di Kota Cimahi (ekor)

No	Jenis Unggas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ayam Buras	35.624	35.699	37.984	35.381	36.088
2	Ayam Pedaging	98.500	100.470	90.300	82.122	106.759
3	Ayam Petelur	-	100	-	-	1.130
4	Itik	14.520	10.961	10.743	11.719	11.953

Sumber : BPS (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan lahan yang menjadi kendala sektor pertanian di Kota Cimahi, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan dari sub sektor peternakan terutama di Kecamatan Cimahi Utara yang merupakan wilayah paling potensial untuk dapat dioptimalkan sub sektor peternakannya terkllihat bahwa berdasarkan tabel tersebut. Terjadi peningkatan jumlah dan komoditas unggas di Kota Cimahi pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan data 2015, sehingga Pemerintah perlu menjaga keberlangsungan aktivitas usaha di sektor tersebut.

Kedepannya diharapkan Kota Cimahi mengembangkan model pertanian perkotaan atau yang disebut sebagai urban *farming*, selain

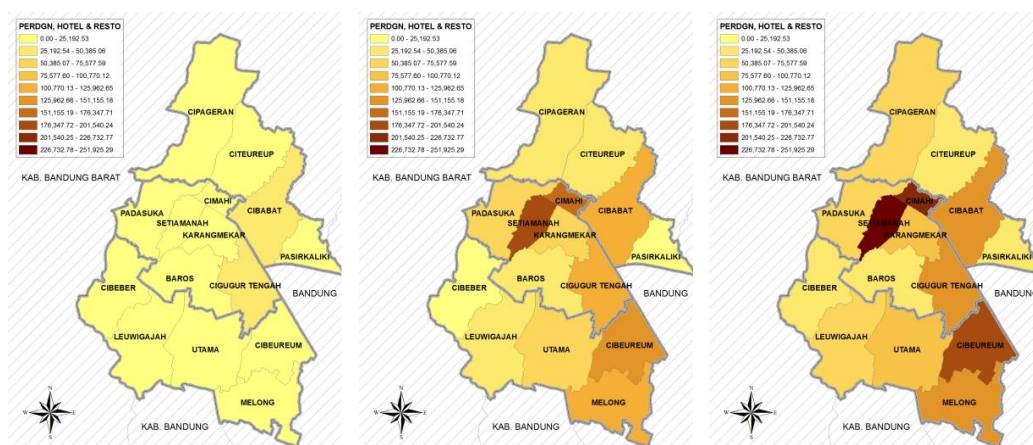
mengembangkan sentra-sentra pertanian maka pengembangan ternak hewan-hewan *fancy* juga dapat menjadi sumber potensial untuk sumber peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kota Cimahi yang memiliki keterbatasan lahan. Ternak *fancy* tersebut misalnya hewan-hewan peliharaan manusia yang budidayanya dapat dilakukan dalam keterbatasan lahan seperti : kucing hias, anjing, burung berkicau, dan ikan hias.

2.3.2.4. Perdagangan

Proses deindustrialisasi di Kota Cimahi pada dasarnya termasuk ke dalam kategori deindustrialisasi yang positif, dimana penurunan share industri pengolahan dalam perekonomian, ditandai dengan adanya peningkatan nilai tambah secara riil. Adanya penurunan share industri pengolahan dalam perekonomian lebih disebabkan karena laju pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur masih lebih rendah di dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan dari sektor perdagangan.

Gejala seperti ini lebih tepat dikatakan bahwa Kota Cimahi sedang mengalami perubahan struktur dari sektor industri pengolahan ke arah sektor jasa, yaitu sektor perdagangan (dimana dicirikan bahwa *share* perdagangan terus meningkat dengan pertumbuhan sektor perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan ekonominya).

Gambar 2.15
Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan Kota Cimahi



Kontribusi sektor perdagangan dan jasa menempati posisi ketiga sekaligus juga mendukung sektor utama perekonomian yaitu sektor industri pengolahan. Keberadaan beberapa *mall* dan supermarket menjadi determinasi kinerja sektor ini. Berdasarkan data Profil Diskopindagtan (2015), Pasar tradisional di Kota Cimahi berjumlah 7

(tujuh) dengan kepemilikan oleh pemerintah 4 pasar, dan swasta 3 pasar, sedangkan pasar modern berjumlah 210. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pasar dan *mall* yang ada di Kota Cimahi masih sedikit. Hal tersebut terkendala oleh terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan sarana sektor perdagangan. Secara proporsi pasar tradisional yang ada masih kurang ditambah dengan revitalisasi pasar yang terbakar. Peningkatan sarana perdagangan dibutuhkan agar mampu menjadi basis perdagangan tradisional dengan penataan dan pengelolaan yang rapi.

Kondisi eksisting perdagangan yang ada menunjukkan belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap sektor perekonomian. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama adalah kurangnya revitalisasi pasar tradisional. Faktor ini disebabkan penyebab turunan lainnya yaitu rendahnya kualitas sarana prasarana pendukung distribusi, kurangnya penataan dan relokasi PKL, terbatasnya luas lahan perdagangan akibat kebijakan tata ruang, dan kurang optimalnya kebijakan tentang pembangunan dan pengelolaan pasar modern. Kedua, menurunnya omzet pedagang yang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas SDM pedagang dan rendahnya akses pemodal bagi pedagang.

2.3.2.5. Perindustrian

Sektor industri menjadi leading sektor ekonomi Kota Cimahi. Sektor ini mampu menyumbang lebih dari 45 persen terhadap total PDRB. Pertumbuhan sektor industri terbesar terdapat pada industri pengolahan, terutama industri tekstil. Sumber data sektor industri ini diperoleh dari hasil survei tahunan perusahaan industri besar/ sedang. Dalam pengumpulan data statistik industri, yang dimaksud dengan industri besar adalah perusahaan dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih, industri sedang dengan jumlah pekerja antara 20 sampai dengan 99 orang, sedangkan Industri kecil mempunyai pekerja antara 5 sampai dengan 19 orang dan perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 5 orang disebut usaha rumah tangga. Jumlah perusahaan industri pada tahun 2014 terdiri dari industri besar sebanyak 63 perusahaan dan industri sedang sebanyak 67 perusahaan. Jumlah perusahaan industri besar/ sedang paling banyak berada di wilayah kecamatan Cimahi Selatan, yaitu 95 perusahaan (73,08 persen). Sedangkan yang paling sedikit berada di wilayah kecamatan Cimahi Utara, yaitu 15 perusahaan (9,2 persen).

Walaupun menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah data tentang pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB :

Tabel 2.41
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	46,91	46,28	46,28	45,71	45,73

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha

2.3.2.6. Transmigrasi.

Selama periode Tahun 2012–2017 Kota Cimahi melakukan kerja sama dalam Bidang ketransmigrasian dengan beberapa Kabupaten. Tahun 2012 Kota mengadakan perjanjian kerja sama dengan Kabupaten Ketapang dan kegiatan pembinaan kepada transmigran asal Kota Cimahi di lokasi penempatan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2013 dilakukan Pembinaan Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Dusun Kokobuka Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk pengiriman transmigran adalah ke Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5 KK, karena dari 8 KK yang menjadi target pengiriman transmigran terdapat 2 KK yang terseleksi pernah mengikuti transmigrasi pada tahun 2010.

Pelaksanaan Pembinaan kepada masyarakat transmigran di lokasi penempatan transmigrasi, yaitu Desa Sungai Bulan C Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kepedulian pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi terhadap masyarakat Kota Cimahi yang telah berpindah domisili menjadi transmigran di daerah lokasi transmigrasi. Tahun 2018 merupakan tahun kelima evaluasi terhadap transmigran. Akan tetapi tahun 2018 tidak dilakukan pemberian bantuan terhadap para transmigran karena proposal permintaan bantuannya terlambat dikirimkan.

2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.3.3.1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2018, Kota Cimahi telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah daerah. RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 sedangkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

2.3.3.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan Kota Cimahi sudah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini tercermin dari opini BPK atas LKPD Kota Cimahi dengan opini WTP dalam 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun demikian APBD Kota Cimahi masih sangat tergantung kepada dana transfer yang dilihat dari porsi PAD terhadap pendapatan daerah yang rendah dan indeks kapasitas fiskal yang masih dalam kategori sedang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.07/2018 nilai indeks kapasitas fiskal Kota Cimahi sebesar 1,048 poin masih tertinggal dari indeks Provinsi Jawa Barat dengan 3,150 poin dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

2.3.3.3. Kepegawaian dan Pendidikan Latihan

Upaya untuk merealisasikan pembangunan harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi pemerintahan maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi. Penataan tersebut termasuk di dalamnya upaya pembinaan hukum, pengembangan sumber daya manusia aparatur (PNS), penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban. Peningkatan kuantitas PNS belum serta merta diikuti dengan peningkatan kualitas PNS itu sendiri, sehingga perlu adanya reformasi birokrasi. Jumlah PNS Daerah di Kota Cimahi berdasarkan golongan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan
Tahun 2012 – 2016

TAHUN	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
2012	107	1.422	1.924	2.460
2013	105	1.126	2.031	2.423

2014	100	1.144	2.127	2.348
2015	97	1.113	2.100	2.371
2016	100	1.144	2.127	2.348

Sumber : BPS tahun 2012-2016

Berdasarkan jumlah PNS Kota Cimahi baik secara kuantitas maupun kualitas belum merata, namun demikian kinerja aparatur sudah relatif baik yang dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Cimahi. Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah harus tetap diperhatikan mengingat kondisi dan persoalan pembangunan ke depan yang menuntut kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis.

2.3.3.4. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain : pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

2.3.3.5. Sekretariat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Nilai SAKIP Kota Cimahi pada tahun 2018 adalah B (baik) nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang masih mendapatkan nilai CC.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan. Skor LPPD Kota Cimahi pada tahun 2018 adalah sangat tinggi angka ini berhasil mencapai target RPJMD yang ditetapkan sebelumnya.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya Saing sebuah bangsa dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas daya pembangunan sebuah bangsa diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan wilayah. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan distribusi pendapatan dan pemerataan pertumbuhan antar wilayah. Indikator lain yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kemampuan daya beli, indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Akan tetapi indikator-indikator ini ternyata dinilai kurang mampu menjelaskan hubungandengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pun demikian strategi konvensional melalui kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal biasa ternyata tidak lah cukup dan oleh sebab itu maka dalam era globalisasi ini *the World Economic Forum* (WEF) menyampaikan perlunya dilakukan reformasi daya saing.

Untuk mengukur capaian peningkatan daya saing, *The World Economic Forum* setiap tahunnya telah menerbitkan sebuah indeks yang disebut Indeks Daya Saing. Indeks ini memiliki 114 indikator yang kemudian dikelompokkan menjadi 12 pilar. Lebih lanjut lagi, ke 12 pilar tersebut kemudian dikelompokkan lagi kedalam 3 (tiga) subindex yaitu kebutuhan dasar, peningkatan efisiensi dan inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha (*sophistication factors*). Pergerakan angka dari ke tiga sub indeks ini dapat menjelaskan tahapan pembangunan setiap negara dimana pada sub indeks ke tiga bisanya dicapai oleh negara-negara ekonomi maju/OECD (*World Economic Forum* : 2017). Indonesia berdasarkan *Global Competitiveness Index* tahun 2017-2018 mendapatkan posisi di peringkat ke-36 dari 137 negara atau naik 5 tingkat dari peringkat tahun 2016-2017 yang berada di posisi ke 41. Indonesia secara umum telah berada di sub indeks ke dua. Untuk dapat menjadi sebuah negara maju atau yang memiliki daya saing tinggi, strategi yang dilakukan adalah dengan menggerakkan daya saing ke sub indkes ke tiga yaitu inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha (*business sophistication factors*).

Inovasi bisanya berkembang dalam klaster-klaster industri karena di dalam klaster industri ini lah akan terjadi penyebaran dan penyerapan pengetahuan dan inovasi (*knowledge spillover and innovation difusion*).

Di Kota Cimahi berdasarkan data Sensus Ekonomi tahun 2015 dan Tabel *Input-Output* (Tabel IO) tahun 2010 dan juga berdasarkan

aspirasi masyarakat telah teridentifikasi 4 (empat) klaster industri unggulan, yaitu :

1. Klaster Industri makanan dan Minuman;
2. Klaster Tekstil dan Produk tekstil;
3. Klaster Kerajinan;
4. Klaster Telematika.

Bahwa definisi klaster ini mengacu kepada konsentrasi geografis pelaku usaha yang membangun rantai nilai pada wilayah geografis tertentu dan sejalan dengan semangat desentralisasi daerah maka batasan geografis yang dimaksud tentunya masih berada di wilayah administrasi Kota Cimahi. Jika pun klaster tersebut membentuk koridor ekonomi yang lebih luas dan mencakup wilayah administrasi lainnya, maka strategi pengembangan klaster harus melibatkan kerjasama dan dengan demikian juga melibatkan pembagian wewenang dan tanggungjawab pembinaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 25 Tahun 2005 pengembangan klaster industri dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra bisnis. Adapun syarat dari penetapan sebuah sentra bisnis (UKM) adalah terdapat minimal 20 (dua puluh) pelaku usaha sejenis pada suatu wilayah. Pada sentra-sentra inilah inovasi akan tumbuh dan menghasilkan produk-produk unggulan yang inovatif. Jika saja pembangunan sentra-sentra ataupun klaster-klaster ini dipadukan dengan pembangunan sektor lainnya seperti fisik infrastruktur/lingkungan hidup, pendidikan (formal/informal), sosial, budaya dan kesehatan maka pembangunan sentra-sentra ini akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih berkesinambungan. Kolaborasi antara banyak sektor (*stakeholder*) dalam proses pembangunan klaster/sentra ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Inovasi dibagi menjadi dua macam yaitu inovasi yang radikal (*radical innovation*) dan inovasi yang bertahap (*incremental innovation*). Dikarenakan tingkat kesiapan dan penyerapan teknologi yang masih rendah dan banyaknya aktifitas kewirausahaan pada skala mikro, kecil dan menengah maka model inovasi yang cocok untuk dikembangkan di negara berkembang termasuk Indonesia dan juga tentunya Kota Cimahi adalah model inovasi yang incremental atau bertahap. Model inovasi yang incremental ini menekankan kepada pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam perbaikan dan peningkatan proses produksi dan pemasaran. Diharapkan dengan adanya kemudahan perizinan dan pembinaan koperasi produksi dengan demikian akan mempermudah akses pembiayaan akan memungkinkan UMKM untuk melakukan aktifitas peningkatan UMKM dan dampak selanjutnya adalah mendongkrak kinerja UMKM di Kota Cimahi.

Aktifitas inovasi tidak terlepas dari urusan penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sangat disayangkan bahwa urusan penelitian dan pengembangan ini belum ditata secara optimal terutama karena kendala terbatasnya sumber daya peneliti pada OPD yang mengelola Urusan Penelitian dan Pengembangan sehingga masih berada pada tingkat unit pelaksana teknis. Pun demikian dengan keberadaan *technopark* yang masih terpisah dari OPD yang mengelola urusan kelitbangan. Diharapkan terjadi perbaikan pengelolaan dan penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi sehingga mampu mendorong upaya peningkatan inovasi melalui program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang tepat guna (bukan berorientasi kepada penemuan ilmiah baru). Juga diharapkan Lembaga Litbang ini mampu memberikan masukan bagi proses penyusunan kebijakan publik (kebijakan pembangunan) berdasarkan data dan realitas yang diolah sesuai kaidah ilmiah. Melalui penyusunan kebijakan publik yang berbasis penelitian dan pengembangan (*scientific policy making process*) ini diharapkan dapat mewujudkan visi Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 yaitu Kota Cimahi yang Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya.

Gedung BITC (*Baros Information Technology Creative*) diharapkan dapat memicu bangkitnya aktifitas ekonomi kotakhususnya kalster industri telematika dan animasi Strategi pengembangan klaster industri telematika dan animasi berorientasi kepada lahirnya pelaku usaha-pelaku usaha baru (*start up firms*). Serta komunitas-komunitas wanita, anak muda dan pengguna internet (*women, youth, netizen*). Selain itu, pengembangan kawasan BITC diharapkan dapat menjadi *brand image* bagi identitas lokal kota. Lahirnya pelaku usaha – pelaku usaha baru ini akan menjadi cermin dari daya tarik investasi di Kota Cimahi. Khusus untuk klaster industri telematika dan animasi, sejak tahun 2011 pembinaan *start up-start up firms* dilakukan melalui kegiatan inkubasi industri dan pemberian kemudahan perizinan berusahadan sesuai dengan program Nawa Cita Presiden RI tahun 2014 – 2019 Kota Cimahi akan mengembangkan sebuah Taman Teknologi (Technopark).

Technopark merupakan ruang publik terbuka kreatif yang terdiri atas satu atau lebih sentra kegiatan IPTEKIN (Ilmu, Pengetahuan Teknologi Dan Inovasi), kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi. *Technopark* diarahkan berfungsi sebagai

pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; serta tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.

2.4.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pada tahun 2011 panjang jalan di Kota Cimahi adalah 141.136 km meter, terdiri dari jalan nasional sebesar 3,25 persen, jalan provinsi sebesar 7,05 persen, dan sisanya adalah jalan kota. Dari seluruh panjang jalan di Kota Cimahi, jalan yang di aspal mendekati 70-75 persen, sedangkan sisanya adalah jalan yang diperkeras, dan jalan tanah. Tingkat kemantapan jalan sampai akhir tahun 2011 adalah sebesar 88,09 persen. Pada tahun 2014 jaringan jalan di Kota Cimahi sepanjang 143,777 km, terdiri dari jalan tol sebesar 11.824 persen, jalan nasional/provinsi sebesar 9.515 persen, dan sisanya jalan kota. Tingkat kemantapan jalan sampai akhir tahun 2014 adalah sebesar 96,900 persen.

Pola jaringan jalan di Kota Cimahi membentuk pola tulang ikan (*fish bone*), karena memiliki jaringan jalan yang memusat ke Jalan Raya Cimahi/Nasional Kota Cimahi sebagai jalan utama. Jalan ini harus menampung muara pergerakan internal/lokal dan juga pergerakan menerus. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan beban penggunaan jalan di jalan protokol tersebut terutama pada jam puncak.

Jaringan jalan di Kota Cimahi sepanjang 118,873 Km, terdiri dari jalan Nasional 4,320 Km, Jalan Provinsi 9,360 Km, jalan kota 105,193 Km. Tingkat kemantapan jalan sampai tahun 2016 adalah sebesar 95,17 persen (menunjukkan kualitas jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional eksisting yang berada pada kondisi baik dan sedang), sisanya sebesar 4,83 persen berada pada kondisi rusak dan rusak berat (data ledger Jalan, DPU 2016).

2.4.2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah angkutan umum cenderung meningkat sejak tahun 2012 lalu. Pada tahun 2016 terdapat 9.714 angkutan umum yang harus diakomodasi. Oleh karena itu, kebutuhan prasarana perhubungan di Kota Cimahi juga mengacu pada rendahnya kapasitas terminal yang tersedia sehingga harus ditingkatkan agar dapat mengakomodasi perkembangan lalu-lintas di masa datang.

Tabel 2.43
Daftar Uji KIR Kota Cimahi, 2012 – 2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kendaraan	8.725	9.121	9.540	9.882	9.714

Sumber : Data Profil Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2017

Selain jumlah angkutan umum yang cenderung meningkat, persoalan lain yang masih dihadapi adalah belum optimalnya fasilitas perhubungan jalan. Beberapa radius tikung membutuhkan peningkatan kapasitas seperti memperjelas rambu-rambu, *speed-bumper* dan kelengkapan lainnya. Hal tersebut penting dibangun dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan serta meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di beberapa kawasan seperti di Jl. Cihanjuang, Jl. HMS Mintareja-Baros, serta radius tikung lainnya.

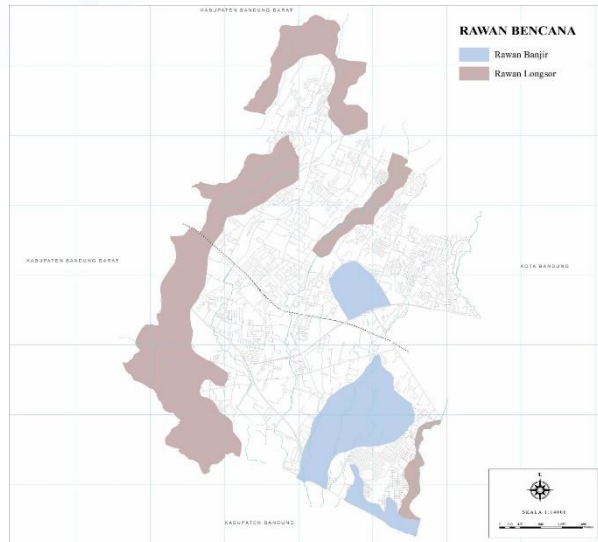
2.4.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Infrastruktur perhubungan di Kota Cimahi hanya melayani perhubungan darat yang memiliki fungsi utama untuk menyalurkan produk-produk industri ke berbagai daerah. Selain itu, perhubungan darat sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam menunjang pergerakan roda perekonomian. Salah satu infrastruktur penunjang perhubungan darat yang sangat penting adalah keberadaan terminal. Terminal yang ada di Kota Cimahi merupakan terminal tipe C yang sedikitnya melayani 24 trayek, yang terdiri dari trayek internal dalam Kota Cimahi yaitu sebanyak 3 (tiga) trayek yang beroperasi, dan selebihnya adalah trayek yang melintas serta trayek yang hanya asal dan tujuannya di Kota Cimahi. Di Kota Cimahi terdapat 4 terminal yaitu sub terminal pasar antri baru, sub terminal pasar atas, sub terminal sangkuriang Cipageran dan sub terminal Cimindi.

2.4.4. Luas Wilayah Kebanjiran

Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir. Kota Cimahi mengidentifikasi wilayah rawan bencana sebagaimana dijelaskan gambar berikut ini :

Gambar 2.16
Peta Rawan Bencana Kota Cimahi



Gambar peta rawan bencana Kota Cimahi menunjukkan bahwa wilayah Kota Cimahi mengalami rawan bencana tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah tanah longsor terjadi pada wilayah dengan kelereng an diatas 15 persen dengan luas mencapai 147 hektar. Sementara itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Bencana banjir dapat disebabkan adanya banjir bandang atau banjir akibat luapan sungai.

Di Kota Cimahi media tampungan air permukaan baik yang bersumber dari hulu sungai, mata air, hujan, dan buangan air domestik berupa jaringan dan beberapa aliran sungai. Namun demikian, jaringan drainase dan sungai yang ada tersebut belum mampu menampung dan berfungsi secara optimal. Adanya limpasan air hujan ditambah dengan adanya tumpukan sampah dan bangunan liar di atas saluran drainase menyebabkan terjadinya genangan air dan bahkan banjir di beberapa titik kawasan. Sepanjang tahun 2011, pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong/drainase dilaksanakan dengan target pengurangan luas genangan eksisting 53,07 Ha sehingga menjadi 50,57 Ha.

Tabel 2.44
Tingkat Layanan Sistem Jaringan Drainase

No	Jenis Data	Satuan	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Rumah Tangga yang dilayani saluran drainase depan rumah	KK	93.399	107.722	128.437	143.496
2.	Jumlah Rumah Tangga yang	KK	2.576	1.508	629	629

	rumahnya tergenang > 30 cm selama 2 jam					
3.	Luas genangan total	Ha	27,77	19,89	19,89	19,89

Tingkat layanan sistem jaringan drainase di Kota Cimahi mengalami peningkatan pelayanan rumah tangga dari tahun 2011 hingga 2014. Pada tahun 2012 melayani 93.399 KK sedangkan pada tahun 2014 telah melayani 143.496 KK. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga yang tergenang mengalami penurunan hingga tahun 2014 terdapat 629 KK. Luas genangan di Kota Cimahi berkurang dari 27,77 ha pada tahun 2011 menjadi 19,89 ha pada tahun 2014.

2.4.5. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel

Hingga saat ini Kota Cimahi belum memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata potensial untuk menarik kunjungan wisatawan. Kota Cimahi belum memiliki infrastruktur penunjang pariwisata yang baik, kondisi ini terlihat dari jumlah hotel dan penginapan yang tergolong masih sedikit. Kota Cimahi hanya memiliki 3 unit hotel melati dan sebuah *guesthouse* sebagai sarana penunjang pariwisata. Pada tahun 2009 jumlah tamu yang berkunjung ke Kota Cimahi berjumlah 24.142 orang, dengan jumlah rata-rata per bulan mencapai 2000 orang (BPS, 2016).

2.4.6. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Dalam aspek infrastruktur sumber daya air, pembangunan embung sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air alternatif untuk menampung air limpasan dan cadangan air baku. Sampai tahun 2011 telah dilaksanakan pembangunan embung di 6 (enam) lokasi yaitu di Kelurahan Citeureup, Setiamanah, Leuwigajah, Melong dan Cibabat. Selain itu juga untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih telah dibangun 2 (dua) sumur artesis dan penyempurnaan 2 (dua) sumur artesis yang sudah ada serta dibangunnya 30 unit sumur pompa.

Pelayanan air minum di Kota Cimahi dipenuhi melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung sedangkan sistem non perpipaan berupa pembangunan sumur artesis yang dilengkapi dengan sambungan-sambungan rumah. Sumber air PDAM yang digunakan untuk wilayah pelayanan Kota Cimahi adalah mata air Cikudapati, mata air Cisintok, Deep Well 11 dan 12 dan IPA Cipageran.

Kualitas air dari PDAM secara umum telah memenuhi standar kualitas air minum seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor907/Menkes/SK/VII/2002 tentang standar air minum pada IPA yang dimiliki. Untuk lebih jelaskan tentang kualitas air dari PDAM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.45
Kualitas Air Bersih dari PDAM di Kota Cimahi

Parameter	Satuan	Standar Air Minum	Hasil
Bau		Negatif	Negatif
Zat Padat Terlarut	Mg/l	1000	12
Kekeruhan	NTU	5	0,06
Rasa		Normal	Normal
Suhu	C	SU + 3C	21
Warna	TCU	15	1
Alumunium	Mg/l	0,2	-
Besi Total	Mg/l	0,3	TT
Kesadahan Total	Mg/l	500	48
Klorida (Cl)	Mg/l	250	32,9
Mangan (Mn)	Mg/l	0,1	TT
Nitrit (NO2)	Mg/l	1,0	-
PH		6,5-8,5	6,7
Tembaga (Cu)	Mg/l	1,0	-
Zat Organik (KMnO4)	Mg/l	10,0	8,2
CO2 bebas	Mg/l		3,1
Alkalinitas Total	Mg/l		36
Amonium (NH4)	Mg/l		TT
Daya Hantar Listrik	Mg/l		61,2
Sisa Khlor			0,15

Sumber : Master Plan Air Bersih Kota Cimahi, Tahun 2007

Kondisi kualitas air non perpipaan di Kota Cimahi berdasarkan hasil studi kondisi air tanah dan permukaan didapatkan data bahwa Kota Cimahi memiliki potensi air tanah dengan nilai run off sebesar 614,04 mm/tahun, infiltrasi sebesar 239,47 mm/tahun dan volume air yang tersimpan sebesar 5.948.788,93 m3/tahun. (Sumber : Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Cimahi, 2010).

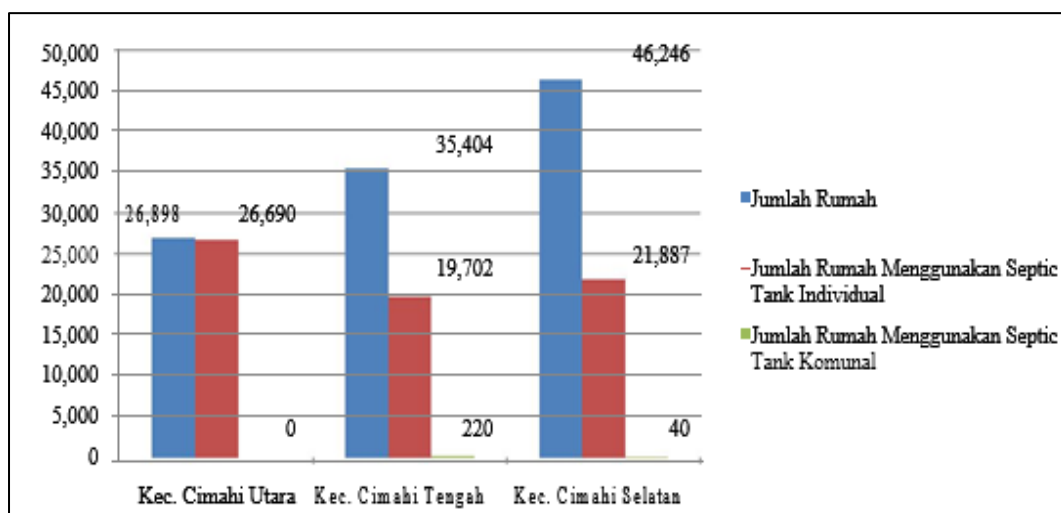
Pada infrastruktur prasarana dan sarana permukiman, penyediaan air bersih bagi masyarakat masih menjadi perhatian pemerintah Kota Cimahi. Sebagian besar kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cimahi didapat dari PDAM. Berdasarkan data dari PDAM tahun 2009, setiap bulan kebutuhan air bersih rata-rata mencapai 850.000 m3. Volume air yang disalurkan selama 2009 sebesar 10.630.708 m3, dan konsumen terbesar berada pada rumah tangga sebesar 8.509.265 m3 atau 80 persen. Penduduk dan kalangan industri yang belum bisa mendapatkan pelayanan air bersih dari

PDAM, memanfaatkan pompa/sumur bor/artesis untuk pengadaan air bersih.

Sementara itu, kondisi pelayanan air limbah di Kota Cimahi berdasarkan data sekunder penggunaan *septic tank* individual dan komunal yang didapatkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, di Kecamatan Cimahi Utara jumlah rumah yang menggunakan septic tank individual sebesar 99,23 persen dan yang menggunakan septic tank komunal 0 persen, sedangkan untuk kecamatan Cimahi Tengah sebesar 55,65 persen dan 0,62 persen serta untuk kecamatan Cimahi selatan sebesar 47,33 persen dan 0,09 persen.

Pada aspek persampahan, sistem yang digunakan adalah pengelolaan sampah dari sumber sampah, ditampung di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan selanjutnya diangkut oleh petugas ke TPA dengan sistem pembuangan open dumping. Sistem pengelolaan air limbah yang digunakan di wilayah Kota Cimahi masih menggunakan sistem setempat. Limbah rumah tangga berupa kotoran manusia (faekal) menggunakan sistem pembuangan dengan sistem cubluk dan septic tank pada masing-masing rumah atau bangunan. Persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septic sebesar 89,35 persen. Jumlah tangki septic yang ada di Kota Cimahi 48.675 unit dan jumlah cubluk adalah 11.087 unit. Sedangkan jumlah rumah tangga yang belum menggunakan tangki septic sebanyak 17.301 rumah tangga.

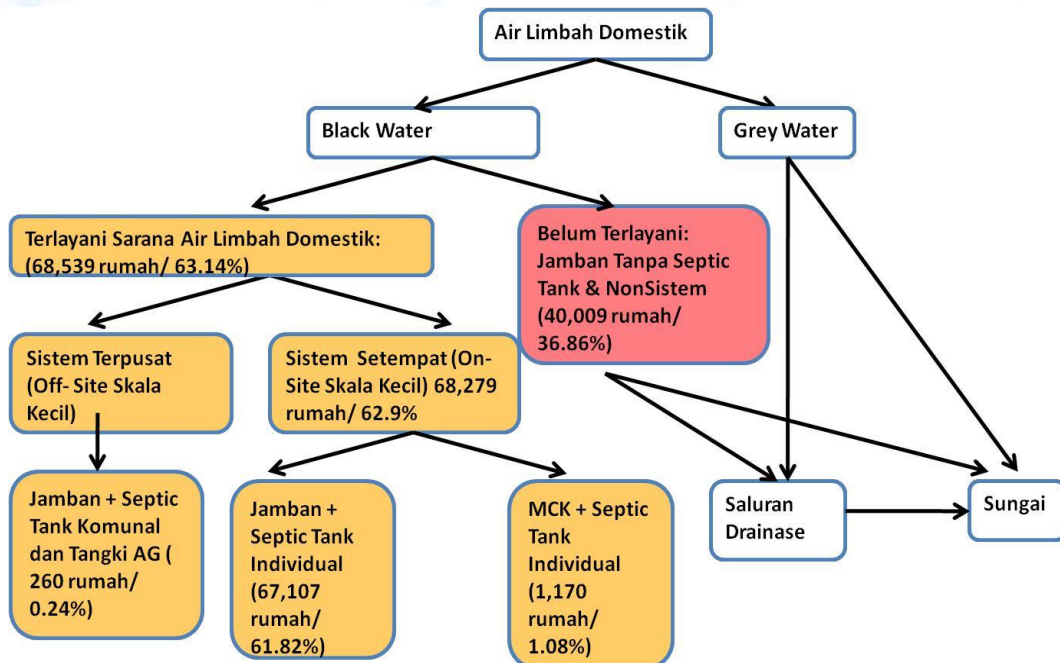
Gambar 2.17
Jenis Rumah yang Menggunakan Septictank Individual dan Komunal



Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Profil Kota Cimahi, 2010

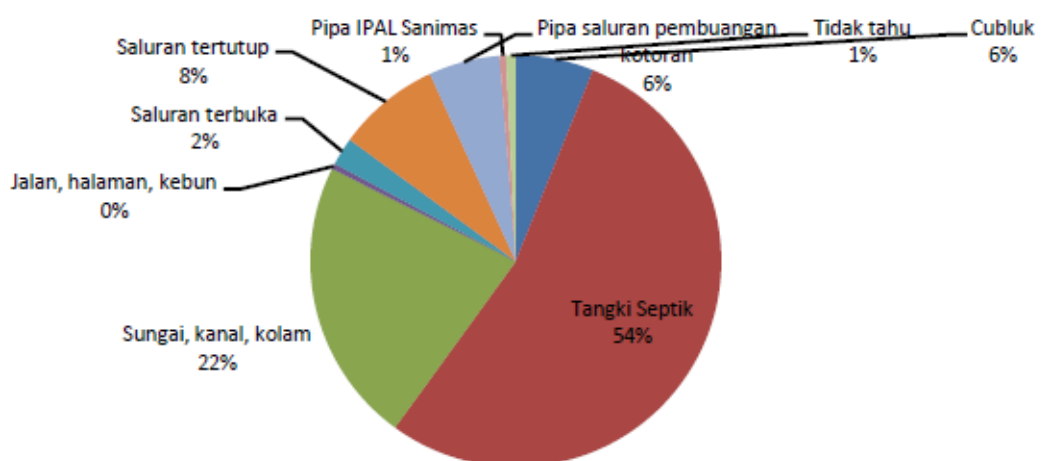
Gambar berikut merupakan gambaran pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Cimahi :

Gambar 2.18
Pengelolaan Air Limbah Domestik (*Black Water & Grey Water*) di Kota Cimahi



Berdasarkan hasil studi *Environment Health Risk Assessment* (EHRA) 2011 menunjukkan bahwa saluran pembuangan dari WC/jamban ke tangki septik sebesar 54 persen. Sementara responden yang membuang ke sungai/kanal/kolam sebesar 22 persen dan responden yang membuang ke cubluk sebesar 6persen. Sedangkan masyarakat yang membuang ke saluran terbuka sebesar 2 persen. Seperti terlihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.19
Saluran Pembuangan dari WC/jamban Disalurkan/Terhubungkan



Sumber : Hasil Study EHRA (pengamatan), Tahun 2011

2.4.7. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Pada aspek telekomunikasi, penggunaan telepon oleh masyarakat telah bergeser dari penggunaan telepon kabel menjadi telepon seluler. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas telepon terpasang dan fasilitas telepon yang dapat digunakan oleh masyarakat umum yang semakin kecil. Jumlah rumah tangga yang telah memiliki telepon di Kota Cimahi sebanyak 41.988 rumahtangga, sedangkan fasilitas telepon lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat terdiri dari 520 wartel/warnet dan telepon umum kartu/koin sebanyak 30 buah (Kota Cimahi Dalam Angka, tahun 2010). Untuk tahun 2014 kapasitas telepon terpasang dan fasilitas telepon yang dapat digunakan oleh masyarakat umum meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah rumah tangga yang telah memiliki telepon di Kota Cimahi sebanyak 53.726 rumahtangga, sedangkan fasilitas telepon lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat terdiri dari 448 wartel/warnet. (Kota Cimahi Dalam Angka, tahun 2014).

Dari aspek geografis (fisik alami), spasial dan infrastruktur wilayah yang telah dikemukakan di atas, dikemukakan beberapa indikator yang memperlihatkan posisi daya saing Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Pertama, secara geoekonomi/geostrategis, Kota Cimahi terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional Bandung Metropolitan Area yang sangat dinamis, namun secara geografis Kota Cimahi merupakan wilayah berbentuk lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara $\pm 1,040$ meter dpl (merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu) serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter. Kondisi seperti ini tentu saja membuat pemanfaatan ruang untuk aktivitas perekonomian, sosial dan lain-lain menjadi terbatas, sehingga pada gilirannya upaya memanfaatkan posisi geostrategis tadi demi menciptakan daya saing dan kohesi sosial juga terbatas;
2. Kedua, selama jangka waktu 2008-2010, panjang jalan di Kota Cimahi telah bertambah dari 99,475 km menjadi 118,956 km. Jalan sepanjang 118,956 km pada tahun 2010 terdiri dari jalan negara 3,25 persen (3,866 km), jalan provinsi 7,05 persen (8,386 km) dan sisanya 89,70 persen (106,704 km) merupakan jalan kota. Dari seluruh panjang jalan di Kota Cimahi, jalan yang diaspal mendekati 70-75 persen, sedangkan sisanya jalan yang diperkeras dan jalan tanah. Dari seluruh jalan yang dikelola Kota Cimahi, hanya 83,219 km (69,99 persen) dalam kondisi baik, sepanjang 21,299 km (17,90 persen) dalam kondisi sedang dan 14,438 km (11,91 persen) dalam kondisi rusak. Pada tahun 2014 jaringan jalan di Kota Cimahi bertambah menjadi sepanjang 143,777 km, terdiri dari jalan tol sebesar 11,824 persen, jalan nasional/provinsi

sebesar 9,515 persen, dan sisanya jalan kota. Tingkat kemantapan jalan sampai akhir tahun 2014 adalah sebesar 96,900 persen. Selain angkutan jalan raya, di Kota Cimahi juga terdapat prasarana dan sarana transportasi kereta api. Namun, Kota Cimahi tidak mempunyai prasarana dan sarana transportasi laut, transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta transportasi udara. Dengan kondisi seperti ini, maka transportasi di Kota Cimahi hanya bertumpu pada transportasi darat.

Secara umum, sarana dan prasarana pelayanan publik di Kota Cimahi pada saat ini cukup memadai, namun masih diperlukan adanya peningkatan. Untuk sarana perdagangan, pada tahun 2010 telah dilaksanakan penyempurnaan pembangunan Pasar Atas Baru, penataan dan pembangunan pasar-pasar tradisional. Sementara itu, gedung Baros *Information Technology Creative* (BITC) telah siap untuk dipergunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan IT dan industri kreatif dalam rangka perwujudan Cimahi *Cyber Creative City*.

2.4.8. Angka Kriminalitas

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data dari kepolisian resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi. Ada enam titik rawan kriminalitas di Kota Cimahi, dimana semuanya berada di wilayah kecamatan Cimahi Utara.

Tabel 2.46
Lokasi Rawan Konflik di Kota Cimahi

No	Lokasi Titik Rawan Kriminalitas
1.	Jalan pesantrean, Cimahi Utara
2.	Jalan Sentral, Cimahi Utara
3.	Jalan Permana, Cimahi Utara
4.	Jalan Cipageran, Cimahi Utara
5.	Jalan Setiamah, Cimahi Utara
6.	Jalan Padasuka, Cimahi Utara

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Cimahi, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih berpotensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminalitas. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kesiapsiagaan dan pengawasan dari aparat keamanan Kota Cimahi, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan

berpotensi berkembang di Kota Cimahi adalah konflik antar buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

2.4.9. Lama Proses Perizinan

Dalam rangka perkembangan iklim investasi di Kota Cimahi, maka dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Waktu penyelesaian izin ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi. BPMPTSP Kota Cimahi melayani 60 jenis izin. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah hanya diperkenankan menarik tiga jenis izin, yakni izin mendirikan bangunan, izin trayek dan izin gangguan, sedangkan untuk izin-izin lainnya tidak dipungut biaya retribusi.

Pada kurun waktu 2013-2016, tren realisasi investasi mengalami fluktuasi. Belum optimalnya investasi disebabkan kurang kondusifitas iklim investasinya. Hingga saat ini terdapat 14 peraturan daerah yang mendukung iklim usaha, tetapi belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang investasi. Selain itu, kurangnya kondusifitas iklim investasi disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA. Faktor determinan lain yang berpengaruh langsung adalah belum optimalnya investasi yang disebabkan oleh sulitnya proses perijinan investasi. Hambatan proses perijinan berkaitan dengan ijin bangunan. Kebijakan tata ruang tentang proporsi bangunan untuk usaha menyebabkan kesulitan para investor mendapatkan IMB.

Di dalam suatu pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa komponen pendukung, diantaranya komponen yang terpenting adalah adanya investasi. Dimana investasi ini diartikan sebagai bentuk penanaman modal terhadap aktivitas ekonomi yang dimaksudkan untuk menjalan sebuah usaha dan pada akhirnya dapat memberikan return yang cepat dan profit yang diharapkan oleh investor. Berikut ini data yang disajikan berupa penggunaan dana kredit yang disalurkan di Kota Cimahi pada tahun 2010. Penggunaan investasi yang bersumber dari kredit lebih banyak digunakan oleh pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari industri, perdagangan dan jasa untuk modal kerja dibandingkan untuk konsumsi ataupun investasi itu sendiri.

Tabel 2.47
Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Kota Cimahi
Tahun 2008 – 2010 (Juta Rp)

Jenis Penggunaan	2008	2009	2010
[1]	[2]	[3]	[4]
Modal Kerja	1.423.773	1.438.478	1.596.554
Investasi	255.805	237.354	245.112
Konsumsi	1.127.656	1.189.251	1.381.708
Jumlah	2.807.234	2.865.082	3.223.374

Sumber : Bank Indonesia Bandung

Kebutuhan investasi dalam pembangunan suatu daerah baik itu infrastruktur maupun ekonomi tentu membutuhkan dana yang begitu banyak. Namun kemampuan pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya keuangan, tentu membutuhkan pihak swasta. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan investasi yang dibutuhkan diharapkan akan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini sudah terbukti, dimana ada kenaikan kredit sebesar 10,99 persen untuk modal kerja, sedangkan 3,27 persen untuk investasi pada tahun 2010.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam penting dalam mendatangkan investasi dari pihak swasta ini. Ada beberapa faktor yang akan menarik para investor untuk menggelontorkan dananya. Pertama stabilitas keamanan daerah yang akan membuat para investor aman, dana yang diinvestasikan dalam kegiatan usahanya akan berjalan lancar tanpa adanya gangguan politik, kejahatan, ataupun sebagainya. Kedua, peraturan perburuhan yang tidak begitu membuat berat bagi para investor. Ketiga, ketersediaan infrastruktur, misal akses jalan ataupun instrumen-instrumen penting yang lainnya yang mendukung kegiatan usaha para investor. Keempat, transparansi atau kemudahan prosedur investor untuk dalam kegiatan berinvestasinya. Semua elemen ini yang harus disiapkan dalam menyambut para investor yang akan datang. Pada tahun 2009 Kota cimahi sudah bisa mewujudkan iklim investasi yang baik, terbukti dengan penghargaan yang telah diterima berupa *Investment Award* Terbaik Nasional ke-II.

Berikut disajikan data investasi Kota Cimahi 2006 – 2011 yang mengalami peningkatan yang signifikan sekali, Investasi yang bersumber dari luar negeri dari US\$32,3 juta menjadi US\$58.350,5 juta, sedangkan investasi yang bersumber dari dalam negeri Rp46,3

miliar menjadi Rp368,2 miliar. Hal ini tidak terlepas sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Cimahi yaitu Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan hal ini sudah diapresiasi dengan menduduki juara satu sedangkan Kota Bandung saja hanya memasuki 10 besar dalam bidang Penanaman Modal tahun 2010. Namun dibandingkan dengan perolehan investasi rata-rata hanya sebesar 0,76 persen dan 6,12 persen masih jauh dengan Kota Bandung.

Beberapa sisi daya saing yang dimiliki kota Cimahi dalam keuangan daerah dan iklim berinvestasi dalam lingkup Bandung Metropolitan Area (BMA), Provinsi dan Nasional sebagai berikut :

1. Kesatu, PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mampu digali dengan baik oleh pemerintah kota Cimahi dibandingkan dengan daerah BMA lainnya;
2. Kedua, Dana Perimbangan (transfer dari pemerintah pusat) yang cenderung menurun dan cukup signifikan, meskipun masih sedikit di atas rata-rata BMA. Intinya secara umum rata-rata rasio ketergantungan (*dependency ratio*) secara nilai turun dengan baik;
3. Ketiga, Adanya pemborosan dalam belanja rutin yaitu belanja pegawai yang rasionya terus melonjak naik terhadap total nilai belanja APBD, yang ini bertolak belakang dengan daerah BMA lainnya yang cenderung menurun. Hal ini harus menjadi perhatian khusus kedepannya yang bisa berdampak pada menurunnya investasi dari luar karena kurang nya pembangunan infrastruktur sebagai akibat dari penggunaan APBD yang lebih besar digunakan untuk belanja pegawai;
4. Keempat, pada tahun 2011 kapasitas fiskal Kota Cimahi mengalami penurunan padahal periode sebelumnya 2008-2011 mengalami kenaikan dari kategori rendah menjadi bergerak naik. Namun demikian indeks kapasitas Kota Cimahi masih lebih baik dengan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat;
5. Kelima, Di Provinsi Jawa Barat ataupun di BMA kecuali Kota Bandung, kapasitas penduduknya untuk menabung relative rendah, akan tetapi laju pertumbuhannya jauh lebih tinggi; Keenam, masih ada pekerjaan besar untuk menaikkan pangsa investasi agar menyaingi kota Bandung yang perolehan investasi yang cukup tinggi selama periode 2007, 2008, 2009, dan 2011. Meskipun demikian perkembangan investasi di Kota Cimahi sendiri sudah mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun.

2.4.10. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Fluktuasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Cimahi terjadi pada tahun 2011 hingga 2015. Pada tahun 2011 hingga 2012 terjadi penurunan TPT sebesar 1,65 persen, namun kembali

mengalami kenaikan sebesar 2,76 persen pada tahun 2012 hingga 2013. TPT Kota Cimahi secara bertahap kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2013-2014 dan 2014-2015, masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,81persen dan 0,62persen. Jika data seri itu dirunut, maka dapat terlihat adanya fluktuasi angka TPT. Berdasarkan hasil FDG, TPT paling banyak berasal dari penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/SMK. Rincian gambaran jenjang pendidikan TPT adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Banyaknya Pencarian Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi Tahun 2014-2010 (orang)

Tahun	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan						Jumlah	Jumlah Penduduk
	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	SI/S2		
2010	11	251	2487	72	1390	2587	6798	541177
2011	15	160	2703	38	257	429	3602	553592
2012	8	183	1885	16	317	443	2852	562297
2013	2	274	2163	138	1478	1491	5576	570991
2014	8	180	2288	15	235	587	3313	579015

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2011-2016.

Kota Cimahi termasuk kota yang memiliki angka TPAK yang sangat besar yang seharusnya menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena adanya ketidaksesuaian antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang tersedia. Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, Asosiasi Penguasa Indonesia (Apindo), Badan Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kebutuhan kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi faktor determinan yang berpengaruh terhadap fluktuasi TPT Kota Cimahi.

Rendahnya etos dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja juga menjadi penyebab bagi kurangnya serapan tenaga kerja. Persoalan ini juga berhubungan dengan banyaknya tenaga kerja yang belum mempunyai sertifikat, sehingga berimplikasi pada rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Regulasi yang ada belum bisa mengatur persentase minimal penyerapan tenaga kerja dari penduduk asli Kota Cimahi, sehingga banyaknya jumlah IKM di Kota Cimahi tidak diimbangi oleh daya serap tenaga kerja lokal.

2.4.11. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung

penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 41,67. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah setempat.

2.5. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD

2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2019

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD diperoleh dari hasil rekap evaluasi renja PD di lingkungan Kota Cimahi pada tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat capaian inerja program dan tingkat capaian penyerapan anggaran. Pada tahun 2019 dari 314 program dan 1.293 kegiatan terealisasi 312 program dan 1.274 kegiatan dengan total anggaran Rp 996.389.822.341 dan terealisasi Rp 872.571.611.332 atau 88,45%.

Tabel 2.49
Jumlah Program dan Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2018
Kota Cimahi

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2019		Jumlah Program/Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan Triwulan IV Thn 2019			
		Prog	Keg	Prog	%	Keg	%
1	Bag. Adbang	1	2	1	100,00	2	100,00
2	Bag. Adm. Kesra	2	7	2	100,00	7	100,00
3	Bag. Hukum	3	6	3	100,00	6	100,00
4	Bag. Organisasi	1	3	1	100,00	3	100,00
5	Bag. Pemerintahan	6	7	6	100,00	7	100,00
6	Bag. Pengadaan Barang Dan Jasa	1	3	1	100,00	3	100,00
7	Bag. Perekonomian	2	4	2	100,00	4	100,00
8	Bag. Tata Usaha	2	9	2	100,00	8	88,89
9	Bag. Umum Dan Protokol	4	23	4	100,00	23	100,00
10	BAPENDA	5	43	5	100,00	43	100,00
11	BAPPEDA	14	47	13	92,86	46	97,87
12	BKPSDMD	10	48	10	100,00	48	100,00
13	BPBD	7	37	7	100,00	37	100,00

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2019		Jumlah Program/Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan Triwulan IV Thn 2019			
		Prog	Keg	Prog	%	Keg	%
14	BPKAD	5	38	5	100,00	38	100,00
15	DINKES	14	68	14	100,00	67	98,53
16	DINSOSPP	17	44	17	100,00	44	100,00
17	DISBUDPARPORA	14	47	13	92,86	45	95,74
18	DISDIK	11	92	11	100,00	91	98,91
19	DISDUKCAPIL	6	31	6	100,00	31	100,00
20	DISHUB	10	48	10	100,00	48	100,00
21	DISKOMINFO	15	49	15	100,00	48	97,96
22	DISNAKER	9	30	9	100,00	29	96,67
23	DISPANGTAN	13	54	13	100,00	53	98,15
24	DISPENMOPTSP	8	32	8	100,00	32	100,00
25	DLH	10	47	10	100,00	47	100,00
26	DPKP	13	58	13	100,00	58	100,00
27	DPKUKMP	15	59	15	100,00	49	83,05
28	DPUPR	16	38	16	100,00	38	100,00
29	INSPEKTORAT	8	21	8	100,00	21	100,00
30	KEC CIMAHI SELATAN	16	68	16	100,00	68	100,00
31	Kec Cimahi Tengah	15	71	15	100,00	71	100,00
32	Kec Cimahi Utara	16	62	16	100,00	62	100,00
33	Kesatuan Bangsa	9	26	9	100,00	26	100,00
34	RSUD Cibabat	1	1	1	100,00	1	100,00
35	SATPOLPP DAMKAR	9	37	9	100,00	37	100,00
36	SETWAN	6	33	6	100,00	33	100,00
Jumlah		314	1293	312	99,36	1274	98,53

Sumber : Bappeda

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2019 pengolahan data, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada RKPD Kota Cimahi tahun 2019 sebesar 88,45 persen angka ini masuk dalam kategori tinggi.
2. Rata-rata capaian kinerja penyerapan anggaran pada RKPD Kota Cimahi pada tahun 2019 sebesar 98,98 persen dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Berikut ini rata-rata tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran menurut perangkat daerah.

Tabel 2.50
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019

NO	Perangkat Daerah	Kinerja		Anggaran	
		%	Kategori	%	Kategori
1	Bag. Adbang	97,96	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
2	Bag. Adm. Kesra	84,69	Tinggi	95,36	Sangat Tinggi
3	Bag. Hukum	82,28	Tinggi	169,95	Sangat Tinggi
4	Bag. Organisasi	87,69	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
5	Bag. Pemerintahan	83,90	Tinggi	97,02	Sangat Tinggi
6	Bag. Pengadaan Barang Dan Jasa	94,74	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
7	Bag. Perekonomian	83,82	Tinggi	71,32	Sedang
8	Bag. Tata Usaha	95,45	Sangat Tinggi	115,19	Sangat Tinggi
9	Bag. Umum Dan Protokol	89,79	Tinggi	98,76	Sangat Tinggi
10	BAPENDA	92,15	Sangat Tinggi	102,50	Sangat Tinggi
11	BAPPEDA	89,48	Tinggi	94,37	Sangat Tinggi
12	BKPSDMD	82,55	Tinggi	92,32	Sangat Tinggi
13	BPBD	77,93	Tinggi	95,46	Sangat Tinggi
14	BPKAD	87,01	Tinggi	99,28	Sangat Tinggi
15	DINKES	80,14	Tinggi	88,13	Tinggi
16	DINSOSPP	87,68	Tinggi	94,20	Sangat Tinggi
17	DISBUDPARPORA	89,63	Tinggi	95,32	Sangat Tinggi
18	DISDIK	94,83	Sangat Tinggi	97,98	Sangat Tinggi
19	DISDUKCAPIL	96,63	Sangat Tinggi	97,49	Sangat Tinggi
20	DISHUB	80,06	Tinggi	95,28	Sangat Tinggi
21	DISKOMINFO	91,45	Sangat Tinggi	101,11	Sangat Tinggi
22	DISNAKER	85,62	Tinggi	101,86	Sangat Tinggi
23	DISPANGTAN	88,96	Tinggi	91,38	Sangat Tinggi
24	DISPENMOPTSP	93,19	Sangat Tinggi	99,63	Sangat Tinggi
25	DLH	90,68	Tinggi	97,23	Sangat Tinggi
26	DPKP	55,35	Rendah	84,27	Tinggi
27	DPKUKMP	95,87	Sangat Tinggi	106,95	Sangat Tinggi
28	DPUPR	88,52	Tinggi	93,42	Sangat Tinggi
29	INSPEKTORAT	86,64	Tinggi	101,38	Sangat Tinggi
30	Kec Cimahi Selatan	88,38	Tinggi	97,42	Sangat Tinggi
31	Kec Cimahi Tengah	92,29	Sangat Tinggi	93,21	Sangat Tinggi
32	Kec Cimahi Utara	91,69	Sangat Tinggi	104,54	Sangat Tinggi
33	Kesatuan Bangsa	91,09	Sangat Tinggi	97,35	Sangat Tinggi
34	RSUD Cibabat	113,46	Sangat Tinggi	99,75	Sangat Tinggi
35	SATPOLPP DAMKAR	81,98	Tinggi	94,33	Sangat Tinggi
36	SETWAN	90,56	Tinggi	99,58	Sangat Tinggi
Rata-Rata		88,45	Tinggi	98,98	Sangat Tinggi

Sumber : hasil evaluasi Renja PD Tahun 2018 Kota Cimahi, diolah

Berdasarkan capaian realisasi anggaran, rata-rata Perangkat Daerah memiliki serapan anggaran tinggi kecuali pada DPKP dengan

kategori rendah akibat adanya gagal lelang dan gagal bayar pada beberapa kegiatan.

Berdasarkan capaian realisasi kinerja kegiatan, rata-rata Perangkat Daerah memiliki kinerja sangat tinggi, kecuali Bagian Perekonomian dengan kategori sedang akibat tingginya target kegiatan yang ditetapkan dan terdapat sub kegiatan yang tidak dilaksanakan.

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil pada tahun 2019 adalah program dan kegiatan yang capaiannya antara 0 persen sampai dengan 65 persen dengan predikat penilaian capaian kinerja sangat rendah sampai rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dapat dilihat pada tabel 2.63. Pada tabel tersebut dapat dilihat permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan realisasi program atau kegiatan tidak dapat memenuhi target kinerja.

Tabel 2.63
Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	KET	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	50%	Tidak Tercapai	BAG. ORGANISASI	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian	35%	Tidak Tercapai	BAG. PEREKONOMIAN	Terdapat satu sub kegiatan tentang kajian PDJM (Perusahaan Daerah Jati Mandiri) yang tidak dilaksanakan permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti di tahun 2019
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	50%	Tidak Tercapai	BAG. PEREKONOMIAN	Disebabkan target terlalu tinggi, isi kegiatan tentang monev dana bergulir tidak berjalan dengan lancar sehingga penyerapan rendah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45%	Tidak Tercapai	BAPENDA	Pelaksanaan kegiatan tergantung undangan dari Kementerian Keuangan sehingga capaian rendah
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kemampuan Teknis Kader Perencana	0%	Tidak Tercapai	BAPPEDA	
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	63%	Tidak Tercapai	BAPPEDA	

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	KET	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	0%	Tidak Tercapai	BAPPEDA	
Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0%	Tidak Tercapai	BAPPEDA	
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Penyelesaian Pensiun dan KPP PNS	50%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	10%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kegiatan Seleksi Penerimaan ASN	60%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Penempatan PNS	45%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	Penerimaan CPNS baru dilaksanakan di tahun 2018 sehingga penempatan dilaksanakan pada tahun 2019 mengikuti jadwal dari pusat
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	62%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	65%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pemindahan Tugas PNS	50%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	0%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pelayanan Sumber Daya Aparatur (Human Capital Care)	10%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	Penerimaan CPNS baru dilaksanakan di tahun 2018 sehingga penempatan dilaksanakan pada tahun 2019 mengikuti jadwal dari pusat karena kegiatan ini untuk prajabatan CPNS.
Program Pendidikan Kedinasan	Pendidikan dan pelatihan teknis	0%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	55%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	25%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Fasilitasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dan Penyuluhan Hukum	0%	Tidak Tercapai	BKPSDMD	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah pasca bencana	65%	Tidak Tercapai	BPBD	Pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kejadian bencana yang menyebabkan korban bencana alam
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	27%	Tidak Tercapai	BPBD	Pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan rumah.
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di	Bantuan Operasional Kesehatan	39%	Tidak Tercapai	DINKES	

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	KET	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN
Puskesmas dan Jaringannya					
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah	44%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara	45%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Padasuka	16%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah	49%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum	38%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan	42%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran	41%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih	28%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup	47%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeber	43%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Tengah	20%	Tidak Tercapai	DINKES	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki	15%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	59%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan HIV-AIDS	54%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	0%	Tidak Tercapai	DINKES	

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	KET	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	27%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	45%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pengembangan KIE Dampak Asap Rokok	0%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	25%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	18%	Tidak Tercapai	DINKES	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	0%	Tidak Tercapai	DINSOSPP	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	23%	Tidak Tercapai	DINSOSPP	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	0%	Tidak Tercapai	DISBUDPARPORA	Pemanfaatan anggaran jasa caraka tidak optimal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	0%	Tidak Tercapai	DISBUDPARPORA	
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	0%	Tidak Tercapai	DISDIK	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan beasiswa transisi jenjang SD	0%	Tidak Tercapai	DISDIK	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pengembangan data base kependudukan	30%	Tidak Tercapai	DISDUKCAPIL	Di dalamnya mencakup sub kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan yang mencakup kegiatan penyusunan profil kependudukan, penyusunan agregat dan pemutakhiran data kependudukan, namun dalam renja dan capaian kinerja dpa hanya mencantumkan outcomes untuk kegiatan pemutakhiran data kependudukan sehingga sub kegiatan lain tidak terukur
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan gedung terminal	0%	Tidak Tercapai	DISHUB	Karena kegiatan pengadaan lahan pada tahun 2017 tidak terealisasi sehingga kegiatan pembangunan gedung terminal di tahun 2018 tidak dapat direalisasikan.

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	KET	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Gudang	50%	Tidak Tercapai	DISHUB	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	50%	Tidak Tercapai	DISNAKER	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0%	Tidak Tercapai	DISNAKER	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	54%	Tidak Tercapai	DISNAKER	Karena metode kinerja (jemput bola) yang kurang tepat dengan terbatasnya SDM menyebabkan SDM tidak tercapai
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17%	Tidak Tercapai	DISPANGTAN	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pendataan masalah peternakan	63%	Tidak Tercapai	DISPANGTAN	Jumlah SDM yang dapat turun ke lapangan masih kurang.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	0%	Tidak Tercapai	DISPANGTAN	karena tidak ada kejadian luar biasa hewan yang terjangkit penyakit endemik
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pengembangan cadangan pangan daerah	10%	Tidak Tercapai	DISPANGTAN	Terdapat sub kegiatan penyaluran cadangan pangan daerah, karena tidak terjadi kerawanan pangan sehingga penyaluran beras tidak dilaksanakan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0%	Tidak Tercapai	DISPANGTAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0%	Tidak Tercapai	DISPANGTAN	Tidak cukup waktu untuk merealisasikan karena ada karoseri khusus untuk mobil TTIC (Toko Tani Indonesia Centre) yang dipesan.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	50%	Tidak Tercapai	DLH	Semula menargetkan sasaran pengawasan sebanyak 150 pelaku usaha namun yang terealisasi hanya 40.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	50%	Tidak Tercapai	DLH	Satu dari dua target output yaitu Perda RPPLH belum selesai disahkan hal ini menyangkut proses Prolegda yang belum tuntas
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengembangan produksi ramah lingkungan	50%	Tidak Tercapai	DLH	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	35%	Tidak Tercapai	DPKP	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana air limbah	61%	Tidak Tercapai	DPKP	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pembangunan sarana prasarana air limbah	41%	Tidak Tercapai	DPKP	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan	Perencanaan pembangunan reservoir	0%	Tidak Tercapai	DPKP	

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	KET	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya					
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	36%	Tidak Tercapai	DPKP	
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	3%	Tidak Tercapai	DPKP	
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya	0%	Tidak Tercapai	DPKP	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	8%	Tidak Tercapai	DPKUKMP	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengendalian Pertumbuhan Pasar Modern dan Pengawasan Persaingan Usaha	7%	Tidak Tercapai	DPKUKMP	
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Inspeksi kondisi jalan	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Inspeksi kondisi jembatan	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan logistik kantor	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pemanfaatan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program pembangunan jalan dan jembatan	Perencanaan pembangunan jalan	63%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pemberdayaan Pengguna Jasa konstruksi	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program pengembangan data/informasi	Penyusunan Profil Dinas	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rehabilitasi Infrastruktur	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	KET	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	25%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Perencanaan Tata Ruang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	63%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	14%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	0%	Tidak Tercapai	DPUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	61%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I SELATAN	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	46%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I SELATAN	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Padasuka	54%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I TENGAH	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Baros	0%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I TENGAH	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cigugur Tengah	0%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I TENGAH	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Setiamanah	0%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I TENGAH	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Karangmekar	30%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I TENGAH	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cimahi	0%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I TENGAH	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Cimahi Tengah	33%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I TENGAH	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	13%	Tidak Tercapai	KEC CIMAH I TENGAH	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0%	Tidak Tercapai	KESATUAN BANGSA	

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	KET	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	50%	Tidak Tercapai	SATPOLPP DAMKAR	Pemanfaatan anggaran jasa caraka tidak optimal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50%	Tidak Tercapai	SATPOLPP DAMKAR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	50%	Tidak Tercapai	SATPOLPP DAMKAR	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan pelayanan penganggulangan bahaya kebakaran	49%	Tidak Tercapai	SATPOLPP DAMKAR	

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil pada tahun 2018 adalah program dan kegiatan yang capaiannya antara 76 persen sampai dengan 100 persen dengan predikat penilaian realisasi kinerja tinggi dan sangat tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.64
Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan analisa standar belanja	100%	Tercapai	BAG. ADBANG
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	Tercapai	BAG. ADBANG
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Pelayanan Kegiatan Keagamaan	90%	Tercapai	BAG. ADM. KESRA
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	100%	Tercapai	BAG. ADM. KESRA
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan	100%	Tercapai	BAG. ADM. KESRA
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	89%	Tercapai	BAG. ADM. KESRA
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	100%	Tercapai	BAG. ADM. KESRA
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial kemasyarakatan	89%	Tercapai	BAG. ADM. KESRA
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	Tercapai	BAG. ADM. KESRA
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Publikasi peraturan perundang-undangan	100%	Tercapai	BAG. HUKUM
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	Tercapai	BAG. HUKUM
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih	100%	Tercapai	BAG. HUKUM

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
	tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah			
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	85%	Tercapai	BAG. ORGANISASI
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan	100%	Tercapai	BAG. ORGANISASI
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	100%	Tercapai	BAG. PEMERINTAHAN
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	100%	Tercapai	BAG. PEMERINTAHAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) dan BSMSS (Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa)	100%	Tercapai	BAG. PEMERINTAHAN
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	100%	Tercapai	BAG. PEMERINTAHAN
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik	79%	Tercapai	BAG. PEMERINTAHAN
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	100%	Tercapai	BAG. PEMERINTAHAN
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penataan Batas Wilayah	100%	Tercapai	BAG. PEMERINTAHAN
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Pelayanan Pengadaan	100%	Tercapai	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan	100%	Tercapai	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadaan	100%	Tercapai	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
Program Pengendalian Kebijakan Perberasan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Kebijakan Perberasan	100%	Tercapai	BAG. PEREKONOMIAN
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	100%	Tercapai	BAG. PEREKONOMIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Tercapai	BAG. TATA USAHA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	96%	Tercapai	BAG. TATA USAHA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Tercapai	BAG. TATA USAHA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tercapai	BAG. TATA USAHA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Tercapai	BAG. TATA USAHA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Tercapai	BAG. TATA USAHA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	88%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100%	Tercapai	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	99%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	99%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan Target Pendapatan	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Tercapai	BAPENDA

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan Pegawai	100%	Tercapai	BAPENDA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	100%	Tercapai	BAPENDA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Tercapai	BAPENDA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	Tercapai	BAPENDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Tercapai	BAPENDA
Optimalisasi Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Sumber Daya Penelitian, Pengembangan, Data dan Analisis	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	76%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Mandiri dan Terapan	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Analisis Kebijakan Pembangunan	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program pengembangan data/informasi	Pembangunan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis IT	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program pengembangan data/informasi	Penyusunan profile daerah	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan Pegawai	91%	Tercapai	BAPPEDA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Tercapai	BAPPEDA

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan rancangan RPJMD	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan rancangan RKPD	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RENJA	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RENSTRA	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penguatan Jaringan Inovasi Melalui Pengembangan Komunitas	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan indikator ekonomi daerah	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program Perencanaan Tata Ruang	Fasilitasi dan Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	100%	Tercapai	BAPPEDA
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	80%	Tercapai	BKPSDMD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Tercapai	BKPSDMD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Tercapai	BPBD

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Tercapai	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	88%	Tercapai	BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana	100%	Tercapai	BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kegiatan pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara	83%	Tercapai	BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparatur dan relawan	100%	Tercapai	BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pemantauan dan penyerbaluasan informasi potensi bencana alam	100%	Tercapai	BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kontijensi penyusunan rencana operasi darurat bencana	100%	Tercapai	BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kajian mitigasi kebencanaan	100%	Tercapai	BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Penerapan rancang bangun tahan bencana dan peralatan yang lebih baik	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Pegawai	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan Pegawai	100%	Tercapai	BPBD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Tercapai	BPBD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	Tercapai	BPBD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	100%	Tercapai	BPBD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Tercapai	BPBD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Gudang	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Tercapai	BPBD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Inventarisasi Barang Milik	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	Tercapai	BPKAD

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan dan Perbendaharaan	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Optimasi Aset Daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan standar satuan harga	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Pengendalian Anggaran	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tercapai	BPKAD
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	100%	Tercapai	BPKAD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Tercapai	BPKAD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Tercapai	BPKAD

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan mebeleur	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Tercapai	BPKAD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100%	Tercapai	BPKAD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	96%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	98%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	92%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	93%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	79%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	94%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	85%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	78%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	85%	Tercapai	DINKES
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan sunatan massal	100%	Tercapai	DINKES
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	100%	Tercapai	DINKES

Sumber : Bappeda

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil pada tahun 2018 adalah program dan kegiatan yang capaiannya lebih dari 100 persen.

Tabel 2.65
Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	168%	Melebihi	BAG. HUKUM
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	426%	Melebihi	BAG. HUKUM
Penguatan Hak Asasi Manusia	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	125%	Melebihi	BAG. HUKUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	165%	Melebihi	BAG. TATA USAHA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	161%	Melebihi	BAG. TATA USAHA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	333%	Melebihi	BAG. UMUM DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Verifikasi Data Wajib Pajak	103%	Melebihi	BAPENDA
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	184%	Melebihi	BAPENDA
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	132%	Melebihi	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	114%	Melebihi	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	102%	Melebihi	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	124%	Melebihi	BAPENDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	118%	Melebihi	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	200%	Melebihi	BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	130%	Melebihi	BKPSDMD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	200%	Melebihi	BKPSDMD
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Jaminan Kesehatan Nasional Kota Cimahi	251%	Melebihi	DINKES
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Jaminan Persalinan	253%	Melebihi	DINKES
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	242%	Melebihi	DINKES
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga	300%	Melebihi	DINKES
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	245%	Melebihi	DINKES
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Imunisasi	285%	Melebihi	DINKES
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Surveillance-Epidemiologi Penanggulangan Wabah	300%	Melebihi	DINKES
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kesehatan	117%	Melebihi	DINKES
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	116%	Melebihi	DINKES

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	200%	Melebihi	DINKES
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	234%	Melebihi	DINKES
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	137%	Melebihi	DINKES
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	400%	Melebihi	DINKES
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	204%	Melebihi	DINKES
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perbaikan gizi masyarakat	328%	Melebihi	DINKES
Program Pendidikan Non Formal	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	100%	Melebihi	DISDIK
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi Jenjang PAUD	100%	Melebihi	DISDIK
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Pengelolaan Penetapan Angka Kredit	100%	Tercapai	DISDIK
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Non PNS, dan Tunjangan Kualifikasi S1/D4 Jenjang SMP	100%	Tercapai	DISDIK
Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	109%	Melebihi	DISKOMINFO
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarnya luasan informasi bursa tenaga kerja	295%	Melebihi	DISNAKER
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	177%	Melebihi	DISNAKER
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	500%	Melebihi	DISPANGTAN
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	193%	Melebihi	DISPANGTAN
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kesehatan Masyarakat Veteriner	118%	Melebihi	DISPANGTAN
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	200%	Melebihi	DLH
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Promosi Sanitasi	122%	Melebihi	DPKP
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pengelolaan pelayanan air limbah domestik	140%	Melebihi	DPKP
Program pengelolaan areal pemakaman	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	100%	Melebihi	DPKP
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pemeliharaan dekorasi kota	250%	Melebihi	DPKP
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum	100%	Melebihi	DPKP
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	105%	Melebihi	DPKP
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	200%	Melebihi	DPKUKMP
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	131%	Melebihi	DPKUKMP
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	325%	Melebihi	DPKUKMP

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Ket	Perangkat Daerah
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	287%	Melebihi	DPKUKMP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	117%	Melebihi	INSPEKTORAT
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	105%	Melebihi	INSPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	136%	Melebihi	INSPEKTORAT
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	107%	Melebihi	KEC CIMAHI SELATAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	112%	Melebihi	KEC CIMAHI TENGAH
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	121%	Melebihi	KEC CIMAHI TENGAH
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	156%	Melebihi	KEC CIMAHI TENGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1200%	Melebihi	KEC CIMAHI UTARA
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	491%	Melebihi	KEC CIMAHI UTARA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	150%	Melebihi	KESATUAN BANGSA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	163%	Melebihi	KESATUAN BANGSA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	400%	Melebihi	KESATUAN BANGSA
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	115%	Melebihi	SETWAN
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rapat-rapat Paripurna	106%	Melebihi	SETWAN

Sumber : Bappeda

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan Secara umum, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tergantung dari pelaksanaan dari tingkat provinsi atau nasional atau berhubungan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia baik secara kualitas dan kuantitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama yang berhubungan dengan survei dan pekerjaan lapangan lainnya;
3. Terdapat kegiatan yang indikator kinerjanya kurang tepat sehingga mempengaruhi capaian kinerja; dan

4. Kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja adalah sebagai berikut : (1) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan (2) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi kinerja kegiatan melebihi target kinerja adalah sebagai berikut : (1) Target capaian kegiatan yang ditentukan terlalu rendah sehingga pada saat realisasi capaian kinerja akan melebihi target yang ditetapkan; dan (2) Adanya kesalahan perhitungan realisasi capaian kinerja.

2.5.2. Realisasi RPJMD

Tahun 2019 merupakan tahun kedua penyelenggaraan pemerintahan dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022. Kota Cimahi memiliki 24 buah indikator kota yang menjadi IKU Walikota terpilih. Nilai kinerja capaian IKU Walikota Kota Cimahi tahun 2019 sebesar 83,33 persen, dari 24 IKU ada empat IKU yang tidak berhasil mencapai target yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN; (2) LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi); (3) Persentase cakupan pelayanan air bersih dan (4) Persentase pengelolaan sampah.

Selain itu ada beberapa indikator yang belum menampilkan nilai capaian tahun 2019, sehingga perlu ada evaluasi kembali mengenai ketersediaan makro pembangunan. Berikut ini hasil evaluasi capaian IKU Wali Kota Cimahi tahun 2019.

Tabel 2.66
Nilai Capaian IKU Wali Kota Cimahi Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2019		Target 2020	Target 2021
				Target	Realisasi		
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul							
MisiMeningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	74,10	74,66	74,15	74,20
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,47	82,48	82,49	82,51
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,25	0,80 2017	1,20	1,15
Misi 2: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik							
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2019		Target 2020	Target 2021
				Target	Realisasi		
	Pemerintahan Daerah						
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	75	68	77	79
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	78	80,99	80	82
Misi 3: Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan							
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	Persen	0,0564	0,0536 2017	0,0566	0,0569
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Poin	0,40	0,37 2017	0,40	0,39
		Indeks Williamson	Poin	0,34	0,33 2017	0,33	0,32
	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	0,058	4,90	0,056	0,055
		TPT	Persen	8,26	7,93	7,52	6,78
Misi 4: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan							
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)		D	C	D	D
Meningkatkan kualitas permukiman	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Persen	98,00	95,00	100,00	100,00
	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	Persen	76,75	82,66	83,41	90,06
	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	Persen	0,31	0,14	0,23	0,15
	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air bersih	Persen	70,52	69,34	72,02	79,24
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	3,96	1,88	3,79	2,91
Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kelas Risiko	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	32,25	32,67	33,30	34,13
Misi 5: Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan							
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	80,00	95,10	80,00	80,00
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	73,63	76,97 2017	73,75	74,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92,30	92,33 2017	92,50	92,70

Tidak tercapainya empat IKU Kota Cimahi diakibatkan oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Tidak tercapainya LPE Kota Cimahi diakibatkan mulai melambatnya tiga sektor ekonomi terbesar di Kota Cimahi yaitu industri pengolahan,

perdagangan dan konstruksi. Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui : (1) Membuka akses berusaha seluas luasnya bagi usaha mikro dan kecil di semua sektor sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Cimahi; (2) Menyediakan tenaga kerja terlatih dan siap pakai untuk mengurangi pengangguran khususnya di sector sector yang menyerap tenaga kerja besar; (3) Menjaga kestabilan industri besar agar dapat tetap menyerap tenaga kerja khususnya untuk warga Cimahi; dan (4) Meningkatkan kesejahteraan buruh melalui K3.

Tidak tercapainya IKU cakupan air bersih disebabkan karena dua hal yaitu : (1) SPAM leuwilayung yang belum dapat terealisasi tahun ini karena ada kendala dalam pengadaan lahannya; insyaaAllah tahun ini lahan dapat di beli dan tahun depan dapat di bangun infrastrukturnya; dan (2) Gambung (kabupaten Bandung) yang sebelumnya akan di kelola oleh Provinsi, tetapi penguasaannya menjadi milik Kabupaten Bandung, solusinya sedang dilakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten Bandung untuk dapat sambungan dari sumber air gambung tersebut.

Belum tercapainya IKU layanan persampahan disebabkan karena belum optimalnya program *zero waste* karena : (1) Adanya keterbatasan SDM untuk mengedukasi masyarakat melalui *door to door*; dan (2) Jumlah armada kurang mencukupi untuk mengangkut jumlah timbulan sampah di Kota Cimahi.

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan dapat terjadi ketika target yang ditetapkan tidak tercapai atau terjadi penurunan kinerja pada jangka waktu tertentu atau secara posisi daerah masih tertinggal dengan daerah lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis berbeda dengan permasalahan pembangunan, tidak seluruh permasalahan dapat diangkat menjadi isu strategis

namun hanya permasalahan yang memiliki dampak yang signifikan dan dengan karakteristik tertentu yang dapat dijadikan isu strategis pembangunan.

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

RPKPD Kota Cimahi 2021 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, ada beberapa permasalahan yang ditemui setelah dilakukan identifikasi kinerja dua tahun terakhir.

Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan yang relevan, berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kota Cimahi, antar lain:

a. Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal

Meski kondisi kemiskinan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan, dilihat dari 2 (dua) indikasi yaitu meningkatnya garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang, namun jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi tahun 2019 masih tinggi yaitu sebanyak 26.910 jiwa. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih optimal untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi.

b. Masih terjadi ketimpangan pendapatan

Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan pendapatan menengah. Data Tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,363 di Tahun 2019. Dengan kecenderungan penurunan indeks gini ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Meskipun demikian, pemerintah daerah harus tetap mewaspadaikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, antara lain pengangguran yang ditandai dengan TPT di Cimahi yang meningkat pada Tahun 2019 dan adanya pandemi virus corona yang tidak hanya menyangkut

masalah kesehatan namun telah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Pandemi virus corona yang menyebar ke hampir seluruh negara telah menyebabkan kematian, pembatasan aktivitas masyarakat, masalah pengangguran dan masalah perekonomian lainnya, sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada awal Maret 2019.

c. Kurangnya penyerapan tenaga kerja

Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Cimahi mengalami penurunan hingga menjadi 63,39 persen, sebelumnya pada Tahun 2018 mencapai 64,49 persen. Penurunan angka TPAK tersebut juga diwarnai dengan kondisi kualitas tenaga kerja yang rendah sehingga belum terjadi peningkatan angka penyerapan tenaga kerja.

Kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan pencari kerja. Menurut data pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA/ SMK. Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, Apindo, Badan Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kota Cimahi.

d. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 9 persen dan pada tahun 2018 angkanya menjadi 7,93 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi sedikit mengalami peningkatan sehingga angkanya naik menjadi 8,08 persen.

e. Rendahnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bertransportasi

Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kota Cimahi adalah persoalan rendahnya *Level of Service* (LoS). Minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan menyebabkan arus lalu lintas terhambat dan tidak optimal. Kapasitas jalan yang ada

juga masih belum memadai untuk menampung jumlah kendaraan melintas yang semakin ramai termasuk limpahan dari luar daerah. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi juga masih perlu ditingkatkan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pelayanan transportasi umum.

f. Menurunnya Kualitas Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2019 adalah 118.873 KM. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 3,63 persen dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 7,87 persen merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 88,49 persen merupakan jalan kota. Jalan kota sepanjang 105,19 km menurut kondisi jalan terdiri dari 56,057 km atau 53,29 persen dalam kondisi baik 42,778 km atau 40,67 persen kondisi sedang, atau 6,058 km atau 5,76 persen kondisi rusak.

g. Tingginya tingkat kemacetan di Kota Cimahi

Tingkat Pelayanan Jalan atau Level of Service (LOS), kondisi jalan utama seperti ruas jalan Amir Machmud memiliki nilai LOS F, sedangkan untuk jalan Mahar Martanegara dan jalan HMS. Mintaredja mempunyai nilai LOS C, D, dan F di beberapa titik. Ruas-ruas jalan lain seperti Gatot Subroto, Encep Kartawiria dan Kolonel Masturi mempunyai LOS F. Ruas-ruas jalan yang memiliki LOS F menunjukkan bahwa ruas-ruas jalan tersebut mempunyai tingkat kemacetan yang sangat tinggi. Ruas-ruas jalan di atas merupakan jalur penghubung Kabupaten Bandung Barat – Kota Cimahi – Kota Bandung dan Kabupaten Bandung – Kota Cimahi – Kota Bandung.

h. Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat

secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang rendah menyebabkan banyaknya rumah atau lingkungan/kawasan permukiman yang tidak layak huni. Sebagian besar permukiman kumuh berada di Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan kawasan permukiman yang bercampur dengan kegiatan industri. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan yang tinggi berdampak terhadap tingginya jumlah kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan.

Kawasan perumahan yang belum tertata dengan baik di Kota Cimahi pada umumnya adalah perumahan yang dibangun oleh individu di lahan yang belum dipersiapkan dan belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, penataan bangunan yang tidak teratur dan pada lokasi tertentu cenderung menjadi perumahan yang kumuh.

i. Belum optimalnya akses terhadap air bersih

Rendahnya akses air bersih masyarakat di Kota Cimahi lebih disebabkan karena rendahnya ketersediaan infrastruktur air bersih. Hal tersebut menyebabkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih menjadi kurang terpenuhi. Indikasi penyebab kualitas air bersih di Kota Cimahi masih rendah yang pertama adalah karena pembuangan limbah industri ke sungai dan saluran air. indikasi penyebab rendahnya akses air bersih masyarakat yang selanjutnya adalah karena belum maksimalnya kerjasama antar daerah terkait pengelolaan air baku masyarakat. Kerjasama tersebut adalah berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber air baku alternatif untuk mencukupi kebutuhan air bersih, mengingat Kota Cimahi memiliki sumber air yang terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.

j. Rawan kriminalitas

Kota Cimahi memiliki potensi terjadi konflik dan rawan tindak kriminalitas. Berdasarkan data dari kepolisian resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota

Cimahi, yaitu: Pesantren, Cimahi Utara; Sentral, Cimahi Utara; Permana, Cimahi Utara; Cipageran, Cimahi Utara; Setiamanah, Cimahi Tengah; Padasuka, Cimahi Tengah; Leuwigajah, Cimahi Selatan; Cimindi, Cimahi Tengah; Contong, Cimahi Tengah; dan Nanjung, Cimahi Selatan.

Selain itu, potensi konflik lainnya disebabkan oleh masih rendahnya kesiapsiagaan dan pengawasan dari aparat keamanan Kota Cimahi, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang di Kota Cimahi adalah konflik internal antar buruh dan pengusaha.

k. Tingginya potensi bencana

Kota Cimahi termasuk wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir. Peta rawan bencana Kota Cimahi menunjukkan bahwa wilayah Kota Cimahi mengalami rawan bencana tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah tanah longsor terjadi pada wilayah dengan kelerengan diatas 15 persen dengan luas mencapai 147 hektar. Sementara itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Bencana banjir dapat disebabkan adanya banjir bandang atau banjir akibat luapan sungai. Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu dengan luas mencapai 98 hektar.

Sementara itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran.

1. Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam konteks lingkungan hidup, permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kota yang menyebabkan degradasi lingkungan dan masih belum tercapainya standar pelayanan minimal. Permasalahan-permasalahan tersebut terkait dengan kurangnya lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah kota; kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); kontradiksi

antara kebutuhan air bersih melalui pengambilan air tanah oleh masyarakat dengan daya dukung lingkungan yang terbatas; rendahnya kualitas air tanah akibat limbah industri; belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; belum memadainya keberadaan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Lebih lanjut, rendahnya kualitas lingkungan hidup ditandai dengan ada pencemaran lingkungan di Kota Cimahi yang terjadi pada lingkungan air dan udara. Pencemaran air ditunjukkan dengan menurunnya kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga. Kota Cimahi termasuk ke dalam zona kritis muka air tanah yang dikategorikan ke zona merah oleh provinsi, disini dibutuhkan program pemulihan air baku dengan salah satunya adalah program biopori dan sumur resapan.

m. Belum optimalnya kualitas pendidikan

Berdasarkan kondisi pendidikan yang ada di Cimahi, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

- Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah sebanyak 1.200 orang, selain disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, lingkungan, peran orang tua, juga disebabkan oleh aksesibilitas pendidikan yang berkumpul di tengah kota. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama SMA. Hal tersebut berdampak pada kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya.
- Kualitas lulusan pendidikan belum merata dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di dunia kerja. Hal ini dikarenakan fasilitas, sumber dan media pembelajaran khususnya untuk jenjang pendidikan menengah belum tersedia secara merata, juga ketersediaan pendidik yang mengajar pada

bidang bidang studi tertentu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

- Belum meratanya kualitas tenaga pendidik dan masih perlunya peningkatan kualitas belajar mengajar merupakan salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan.
- Masih terdapat angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Pada Tahun 2019 meski angka putus sekolah mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah angka putus sekolah masih ada untuk seluruh jenjang pendidikan.
- Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah cenderung memilih bekerja dari pada menciptakan pekerjaan. Selain itu, pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensi kejuruan belum optimal diakses secara luas oleh masyarakat.
- Pola pendidikan setelah adanya pandemi Covid-19 mengalami pergeseran, yang selama ini lekat dengan konsep belajar tatap muka dalam ruang kelas menjadi tatap muka secara online. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya kesiapan metode pembelajaran online yang standar, masih ditemui beberapa anak didik yang kesulitan dalam penyediaan infrastruktur *hardware* belajar online seperti HP atau komputer/laptop. Selain itu keterbatasan ekonomi menyebabkan beberapa orang tua murid sulit menyediakan biaya untuk koneksi internet secara kontinu setiap hari kerja.

n. Belum optimalnya kualitas kesehatan

Kondisi kesehatan di Kota Cimahi belum berada dalam kondisi yang ideal. Hal ini ditandai dengan beberapa permasalahan:

- Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Kota Cimahi.

Di Kota Cimahi berdasarkan data per 15 April 2020 yang cenderung masih terus bertambah, penderita dinyatakan positif Covid-19 dan pasien dalam perawatan/PDP yang dirawat sebanyak 37 orang, sedangkan orang dalam pengawasan/ODP sebanyak 692 orang. Angka ini kemungkinan dapat lebih besar lagi jumlahnya bila dilakukan tes dalam jumlah yang lebih besar. Dari 37 orang tersebut, terdapat 3 orang yang meninggal dan 1 orang sembuh.

Dengan kondisi sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksin Covid-19, maka kemungkinan besar persebaran virus ini dapat menyebabkan semakin bertambahnya orang yang terpapar dan bahkan meninggal. Untuk itu pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19, termasuk realokasi dan *refocusing* anggaran.

- Masih tingginya angka kematian ibu merupakan masalah yang cukup serius.

AKI di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 166,78, dan mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 77,36. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 113,98 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 hingga angkanya menjadi 102,16. Jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 120,26.

- Masih Tingginya Kasus Gizi Buruk di Kota Cimahi

Kasus gizi buruk di Kota Cimahi pada tahun 2018 sebanyak 31 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 30. Masih tingginya kasus gizi buruk di Kota Cimahi disebabkan oleh rendahnya faktor ekonomi dari keluarga miskin hingga tahun 2019 kondisinya masih tinggi, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan asupan gizi pada balita. Selain itu dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi yang baik bagi anak-anak.

- Masih tingginya kasus TB BTA Positif di Kota Cimahi, tahun 2019 penemuan pasien TB BTA Positif mencapai 100,24, angka

ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang belum mencerminkan hidup sehat.

- Meningkatnya Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS

Total kumulatif kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi mengalami tren peningkatan dimana tahun 2019 mencapai 493 kasus. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak tahun 2015. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi. Sebab yang mengindikasikan terjadinya kondisi tersebut adalah tingginya kesulitan yang dihadapi oleh penderita HIV/AIDS dari keluarga pra sejahtera dalam mengakses pelayanan kesehatan.

- Meningkatnya Cakupan Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi di Kota Cimahi cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 93,15 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 94,8 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan tata kelola penanganan kesehatan ibu dan anak belum optimal.

- Menurunnya Persentase Posyandu Aktif

Jumlah Posyandu Aktif di Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 88,8 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 84,82 persen. Hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kota Cimahi terutama dalam upaya kesehatan masyarakat di Kota Cimahi.

- Meningkatnya Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit

Berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan puskesmas yang semakin mengalami penurunan, Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 jumlah kunjungan sebesar 484.651 orang dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 822.939 orang.

- o. Masih Rendahnya Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 0,76

persen dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2019 hingga menjadi 37,93 persen.

p. Menurunnya Pola Pangan Harapan Ketersediaan

skor PPH Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 angkanya sebesar 96,2 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 93,4, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 92,9.

Terjadinya pandemi wabah Covid-19 yang belum diketahui sampai kapan akan berakhir, menyebabkan perlunya mewaspadai ketersediaan pangan. Hal ini sangat penting khususnya untuk penanggulangan bencana nonalam akibat Covid-19, mengingat jumlah penduduk Kota Cimahi yang padat dan bukan merupakan daerah penghasil/produksi bahan pangan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), *social distancing*, dan *work from home* untuk menghindari terjadinya penyebaran wabah Covid-19 lambat laun akan berdampak pada terganggunya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat. Pemerintah perlu memprioritaskan penganggaran untuk ketersediaan pangan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya paling terdampak akibat pandemi tersebut agar tidak terjadi gejolak sosial yang lebih besar.

q. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat

Di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal jumlah pemberdayaan lembaga yang tidak mengalami perkembangan; pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum sensitif pada isu-isu inklusif gender, outcome pemberdayaan belum dievaluasi secara optimal, kegiatan masih ceremonial dan perempuan belum mampu memahami dan mengaspirasikan isu-isu sensitif gender. Selain dari permasalahan pembangunan yang responsif gender dan pemberdayaan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat perlu juga diperhatikan permasalahan urusan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga karena urusan tersebut kalau diperhatikan bisa

memicu untuk meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan mengeliminir permasalahan sosial yang ada.

Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks. Urusan perempuan erat kaitannya dengan urusan perlindungan anak, yang masih menyisakan beberapa permasalahan yang berpengaruh pada kualitas tumbuh kembang anak yaitu:

- 1) Pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak masih rendah;
- 2) Peran orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak masih belum optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran orang tua dalam memperhatikan hak-hak anak; dan
- 3) Perkembangan teknologi mempengaruhi pola asuh orang tua yang menyebabkan orang tua cenderung membiarkan anak mereka sibuk dengan '*gadget*' daripada menghabiskan waktu dengan orang tua.

Sementara itu, dalam urusan pemuda dan olahraga muncul beberapa permasalahan diantaranya kurangnya sumberdaya dan sarana olahraga sebagai tempat aktivitas masyarakat untuk berolahraga, dan belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan di Kota Cimahi.

r. Menurunnya Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif

Jumlah Peserta KB baru dan KB aktif tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah peserta KB Baru mencapai 9,7% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 10,3%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,8%. Selanjutnya, untuk peserta KB Aktif tahun 2015 mencapai 77,7% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 78,2, namun pada tahun 2017 turun kembali hingga menjadi 75,9%.

s. Berkurangnya Jumlah Koperasi

Jumlah Koperasi di Kota Cimahi pada tahun 2015 dan 2016 berjumlah 420, selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan

tahun 2019 terus mengalami pengurangan hingga menjadi 259 ditahun 2019.

t. Menurunnya Jumlah Wirausaha Baru

Jumlah wirausaha baru di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 15 WUB dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2 WUB.

u. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian daerah masih belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, antara lain:

- 1) Rendahnya kapasitas *managerial* UMKM dan terbatasnya akses terhadap bantuan permodalan serta kurangnya investasi pengembangan koperasi dan UMKM;
- 2) Rendahnya kapasitas pemasaran UMKM yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan pemasaran UMKM ke luar daerah, masih banyak UMKM yang belum memiliki standarisasi produk untuk ekspor, kurangnya fasilitas *trading online* hasil UMKM, masih perlu ditingkatkannya kerjasama antara UMKM dengan toko ritel modern dan kurangnya kerjasama UMKM hulu dan hilir;
- 3) Rendahnya inovasi khususnya proses produksi dikalangan UMKM produksi.

v. Menurunnya Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan

Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Namun jumlah Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan.

w. Menurunnya Peranan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan

Selain tingkat produktifitas yang rendah, sektor pertanian Kota Cimahi juga tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi. Sektor pertanian sendiri hanya menyumbangkan sekitar 0,20 persen dari

total PDRB Kota Cimahi yang mencapai 32.226,02 miliar rupiah pada Tahun 2019.

x. Masih rendahnya Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi

Dari beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Cimahi, masih sedikit yang dinyatakan layak fungsi. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya Persentase pasar tradisional layak fungsi pada tahun 2018 yang hanya mencapai 30 persen.

y. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal

Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu: Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal; rendahnya kompetensi aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah dikarenakan jumlah pengawas yang masih terbatas untuk di lingkup Pemerintahan Kota Cimahi; belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah, tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; indeks kapasitas fiskal masih berkategori sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja perencanaan daerah yang belum optimal.

2.6.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis Kota Cimahi dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kota Cimahi yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan, isu internasional, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, dan isu/kebijakan Kota Cimahi, termasuk hasil KLHS. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan stakeholder, maka ditetapkan sejumlah isu strategis pembangunan Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022, meliputi:

1. Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, dampak Covid-19 di Jawa Barat diperkirakan melalui jalur perdagangan barang (ekspor dan impor) meskipun dampak yang lebih besar diperkirakan dari sisi impor. Berdasarkan data, ekspor Jawa Barat ke Tiongkok pada 2019 mencapai 1,67

miliar USD atau 5,65% dari total ekspor Jawa Barat dan menempati peringkat ke-5. Tiga komoditas ekspor utama ke Tiongkok adalah TPT, kertas dan alas kaki. Pada Januari 2020, ekspor Jabar ke Tiongkok masih tumbuh 8,5% (yoy). Dampak Covid-19 secara langsung pada ekspor Jawa Barat diperkirakan masih moderat dan manageable.

Di sisi lain, terdapat peluang bagi Jawa Barat melalui potensi peningkatan penjualan domestik dan potensi pengalihan permintaan dari negara lain khususnya pada industri TPT. Peluang berupa peningkatan penjualan pada industri TPT domestik yang sebelumnya banyak melakukan impor bahan baku dari Tiongkok, serta pengalihan permintaan rest of the world ke Tiongkok untuk industri TPT menjadi ke Indonesia sebagai salah satu negara penghasil TPT terbesar dengan integrasi produk dari hulu ke hilir.

Impor Jabar dari Tiongkok mencapai 23,50% dari total impor Jabar dan menempati ranking ke-1 dan didominasi oleh impor bahan baku (60%). Adapun tiga komoditas impor utama dari Tiongkok adalah TPT, furnitur dan electrical.

Pada Januari 2020, impor Jabar dari Tiongkok masih tumbuh 2,18% (yoy). Namun demikian, impor bahan baku komoditas TPT dan elektronik tercatat turun masing-masing 15,38% (yoy) dan 21,97% (yoy). Dampak Covid-19 pada impor diperkirakan akan lebih besar mengingat berbagai kendala sudah dihadapi oleh pelaku usaha di Jawa Barat. Melalui survei, liaison dan FGD yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Jawa Barat, diketahui beberapa kendala yang sudah mulai dirasakan oleh pelaku usaha antara lain: delay pengiriman barang impor dari Tiongkok, potensi kendala produksi akibat kelangkaan bahan baku, serta kendala Inventori bahan baku jika outbreak lebih panjang dari yang diperkirakan. Rata-rata inventori industri manufaktur di Jawa Barat adalah 3 bulan.

Namun demikian, mengingat impor bahan baku Jawa Barat cukup besar mencapai 60% dari total impor, maka kendala impor akan memberikan risiko pada kinerja produksi industri manufaktur di Jawa Barat. Industri Jawa Barat yang memiliki import context cukup tinggi diantaranya elektronik, TPT, alas kaki dan barang dari logam. Secara keseluruhan, dampak COVID-19 pada industri manufaktur Jawa Barat diperkirakan beragam.

Adapun industri yang rentan terdampak secara signifikan adalah industri elektronik mengingat rata-rata 50% bahan baku dipenuhi dari impor. Selain itu, minimnya alternatif sumber bahan baku selain dari Tiongkok. Industri lain yang juga berpotensi menerima dampak adalah TPT dan alas kaki terkait dengan delay pengiriman impor bahan baku dan cancel order.

Dampak Covid-19 melalui jalur investasi di Jawa Barat diperkirakan minim mengingat FDI dari Tiongkok hanya menempati urutan ke-9 dengan pangsa 1,76% dari total FDI Jawa Barat. Investasi terbanyak dilakukan pada sektor real estate dan industri pengolahan. Adapun pada industri pengolahan FDI terbanyak pada TPT dan elektronik. Potensi kendala yang terjadi baru berupa penundaan event investasi seperti Taiwan Expo (expo investasi Taiwan-Jawa Barat) diundur ke November 2020 dari semula Februari 2020. Kendala lainnya adalah tertahannya penggunaan tenaga asing dari Tiongkok pada beberapa proyek investasi strategis Jabar dikarenakan tidak dapat kembali ke Indonesia pasca Imlek di Tiongkok. Dampak Covid-19 melalui sektor jasa pariwisata juga diperkirakan minim. Hal ini didasarkan pada data jumlah kunjungan wisata di Jawa Barat pada 2019 didominasi oleh wisatawan nusantara yang mencapai 94,7%, sedangkan wisatawan asing hanya sebanyak 5,3% dari total wisatawan. Wisman yang paling banyak berkunjung adalah dari Malaysia dan Singapura. Jumlah wisman dari Tiongkok juga hanya sebesar 0,95% dari total wisman yang datang ke Jawa Barat. Di sisi lain, potensi risiko meningkatnya dampak pada pariwisata sejalan dengan travel warning yang diberlakukan berbagai negara tidak hanya Tiongkok, serta penurunan business event di daerah industri yang memiliki investasi tinggi dari Tiongkok, seperti Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

Dengan kondisi ini, Kota Cimahi sebagai salah satu daerah yang dekat dengan ibukota Provinsi Jawa Barat, tentu harus mengambil berbagai kebijakan untuk penanganan tidak hanya untuk pencegahan krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Penanganan dan pencegahan Covid-19 akan menyebabkan menurunnya kondisi ekonomi (PHK, konsumsi, dan investasi menurun; kemiskinan dan pengangguran naik; kredit macet, kondisi kesehatan perusahaan dan lembaga keuangan menurun dan potensi krisis).

Seiring dengan mewabahnya Covid-19 maka diperkirakan akan terjadi penurunan kinerja ekonomi secara global hingga ke tingkat lokal termasuk Kota Cimahi akibat menurunnya penurunan ekspor, investasi dan tertahannya konsumsi. Terlebih diperkirakan work from home dan social distancing sebagai salah satu upaya mengurangi penyebaran Covid-19 akan berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2020 akan turun sekitar 0,1-0,2 point atau sekitar 20% dari prediksi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan secara makro ekonomi struktur perekonomian kota sangat tergantung kepada kinerja sektor industri manufaktur khususnya tekstil.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kota Cimahi melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020. Kebijakan ini diambil untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.

Penanggulangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Cimahi pada Tahun 2019 dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada Tahun 2019 mencapai 4,39%, yang berarti turun sebanyak 20,42% dari tahun sebelumnya. Walau cenderung turun terus dalam 4 (empat) tahun terakhir, dan selalu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat, namun tetap diperlukan upaya yang tepat untuk penanganan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan.

- a. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.
- b. Penanggulangan Pengangguran
 2. Pengangguran merupakan salah satu isu utama di Kota Cimahi. Data menunjukkan pada Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Cimahi naik menjadi 8,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,93 persen. Ini berarti pada Tahun 2019 terdapat 8 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Kota Cimahi.
 - a. Adanya permasalahan dalam kesempatan kerja di Kota Cimahi disebabkan fokus pertumbuhan ekonomi hanya pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, akan tetapi lupa bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini mengingat Kota Cimahi termasuk daerah dengan angka TAPK yang cukup besar, seharusnya dapat menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi. TPAK Kota Cimahi terus mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu 64,49 persen Tahun 2018 dan kembali turun menjadi 63,39 persen pada tahun berikutnya, tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
 - b. Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (non matching) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Selain itu, iklim investasi dan penanaman modal di Indonesia selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terlalu menggairahkan, sehingga menyebabkan beberapa perusahaan menutup usahanya di Cimahi.
 - c. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan
 - d. Adanya disparitas antara yang kaya dan yang miskin karena pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi tidak langsung diikuti oleh meningkatnya perekonomian keluarga berpendapatan rendah sehingga pertumbuhan

ekonomi Kota Cimahi perlu ditingkatkan. Ketimpangan pendapatan di Cimahi sejak Tahun 2016 secara perlahan mulai menunjukkan penurunan. Walau demikian, upaya pemerataan pendapatan masih harus diupayakan secara optimal untuk mengantisipasi kemungkinan akan meningkatnya kembali ketimpangan pendapatan akibat meningkatnya pengangguran di Kota Cimahi Tahun 2019 dan dampak dari virus Corona/Covid-19 yang melanda dunia sejak awal Tahun 2020.

- e. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
- f. Bencana yang potensial terjadi di Kota Cimahi adalah bencana banjir yang menjadi isu strategis, mengingat kejadian tersebut terus berulang setiap tahun dan belum mampu terselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dimana kualitas resapan air yang semakin memburuk dengan turunnya daya dukung lingkungan sebagai eksekutif negatif dari perluasan area terbangun dan perlu dilakukan perbaikan kualitas sistem drainase di Kota Cimahi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan banjir juga turut memberikan kontribusi terhadap isu ini. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi bencana banjir adalah adanya limpahan air dari wilayah hulu di sekitar
- g. Kota Cimahi.
- h. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertansportasi
- i. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur kota dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Intervensi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan transportasi di Kota Cimahi adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan yang memadai.
- j. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- k. Peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur kota merupakan upaya penting dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat, pelayanan pengelolaan air limbah yang semula

banyak menggunakan septic tank individual atau komunal yang terbatas, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL (domestik) yang berskala kawasan.

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - m. Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Penataan ruang yang sinergis baik dalam konteks sinergi antar wilayah dan antar instansi serta bersifat berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih lanjut. Melalui upaya peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruang adalah point strategis yang sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan Kota Cimahi.
 - n. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini adalah dengan penguatan didalam implementasinya baik didalam pengendalian ijin dan juga pengawasan kesesuaian ijin dengan kenyataan dilapangan ini ditandai dengan adanya koordinasi yang diantara instansi terkait. Untuk kebutuhan air bersih akan dikaji dengan teknologi yang tepat guna agar dapat menjaga ketersediaan air bersih dalam tanah tapi tetap dapat dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cimahi.
 - o. Optimalisasi Kualitas Pendidikan
 - p. Peningkatan Kualitas pendidikan dilakukan melalui pemerataan kualitas tenaga pendididik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia
 - q. Kota Cimahi yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul, unggul dalam persaingan serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar.
 - r. Optimalisasi Kualitas Kesehatan
 - s. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita. Upaya tersebut dilakukan dilakukan untuk mengurangi

tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita di Kota Cimahi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); pengembangan mekanisme pelayanan kesehatan inklusif; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

- t. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- u. Peningkatan Penanganan PMKS dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial, dengan tujuan meningkatkan modal sosial di Kota Cimahi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pula pemberdayaan masyarakat.
- v. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat
- w. Untuk mewujudkan iklim pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu ditingkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pendekatan pemberdayaan yang berprespektif gender, peningkatan pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan pengawasan tumbuh kembang anak, peningkatan pengelolaan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- x. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
- y. Pengendalian penduduk merupakan usaha untuk mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan terutama keluarga berencana dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan.
- z. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
- aa. Tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama untuk membawa masyarakat Kota Cimahi menuju arah yang lebih maju.

EVALUASI TERHADAP HASIL
RENJA OPD
KOTA CIMAHI

Sasaran pembangunan tahunan Kota Cimai : Peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dengan didukung infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %	Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tin Pelaks RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab								
							I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13=6+12	14=(13/5)x100%	15												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		FUNGSI PENUNJANG URUSAN																									
		KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase ASN Yang Kompeten;	80;	Persen;	34.300.288.775																					
		PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	Jumlah PNS yang Izin Belajar	60	Orang	1.681.795.000		60	Orang	253.900.000	10	34.924.500	31	51.700.000	29	40.491.600	0	94.350.000	70	221.466.100	117%	87%	70	221.466.100	117%	13%	BKPSDMD
		PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	30	Orang	1.681.795.000		30	Orang	253.900.000	0	34.924.500	0	51.700.000	0	40.491.600	13	94.350.000	13	221.466.100	43%	87%	13	221.466.100	43%	13%	BKPSDMD
		PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas	75	Orang	1.681.795.000		75	Orang	253.900.000	0	34.924.500	21	51.700.000	0	40.491.600	21	94.350.000	42	221.466.100	56%	87%	42	221.466.100	56%	13%	BKPSDMD
		PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI	Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan	350	Orang	838.246.000		350	Orang	42.232.640	0	5.300.000	0	4.082.500	0	5.572.500	218	19.305.250	218	34.260.250	62%	81%	218	34.260.250	62%	4%	BKPSDMD
		PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT	Jumlah PNS yang Mengikuti Sosialisasi PAK	100	Orang	1.810.171.900		100	Orang	117.698.100	0	45.021.250	0	21.528.000	0	6.623.000	0	18.772.000	0	91.944.250	0%	78%	0	91.944.250	0%	5%	BKPSDMD
		PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT	Jumlah SK KP yang diterbitkan	1000	Surat Keputusan	1.810.171.900		1000	Surat Keputusan	117.698.100	251	45.021.250	124	21.528.000	0	6.623.000	274	18.772.000	649	91.944.250	65%	78%	649	91.944.250	65%	5%	BKPSDMD
		PENEMPATAN PNS	Jumlah PNS yang di Assesment	1	Kegiatan	3.358.901.000		1	Kegiatan	346.908.210	0	19.781.650	0	184.033.900	0	9.316.000	0	9.945.500	0	223.077.050	0%	64%	0	223.077.050	0%	7%	BKPSDMD
		PENEMPATAN PNS	Jumlah Baperjakat	1	Kegiatan	3.358.901.000		1	Kegiatan	346.908.210	1	19.781.650	0	184.033.900	0	9.316.000	1	9.945.500	2	223.077.050	200%	64%	2	223.077.050	200%	7%	BKPSDMD
		PENEMPATAN PNS	Jumlah Pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan dalam jabatan struktural/fungsional	4	Kegiatan	3.358.901.000		4	Kegiatan	346.908.210	2	19.781.650	2	184.033.900	0	9.316.000	1	9.945.500	5	223.077.050	125%	64%	5	223.077.050	125%	7%	BKPSDMD
		PENEMPATAN PNS	Jumlah seleksi Jabatan Tinggi Pratama	1	Kegiatan	3.358.901.000		1	Kegiatan	346.908.210	0	19.781.650	1	184.033.900	0	9.316.000	0	9.945.500	1	223.077.050	100%	64%	1	223.077.050	100%	7%	BKPSDMD
		PENGADAAN PNS	Jumlah pns pindah datang yang mengikuti seleksi	80	Orang	5.200.000.000		80	Orang	945.434.790	0	220.926.000	0	7.896.100	0	3.198.800	0	429.368.500	0	661.389.400	0%	70%	0	661.389.400	0%	13%	BKPSDMD
		PENGADAAN PNS	Terselenggaranya pelaksanaan rekrutmen PNS menggunakan Aplikasi CAT	100	Orang	5.200.000.000		100	Orang	945.434.790	24	220.926.000	0	7.896.100	0	3.198.800	0	429.368.500	24	661.389.400	24%	70%	24	661.389.400	24%	13%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN DATA KEPEGAWAIAN	Jumlah PNS yang datanya tersedia dan terpelihara dalam Program SAPK dan SIMPEG sesuai Kebutuhan,	4600	Orang	1.300.477.000		4600	Orang	203.250.000	1150	9.863.500	1150	7.917.000	1150	6.932.000	992	148.904.500	4.442	173.617.000	0%	85%	4.442	173.617.000	0%	13%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	100	orang	12.218.694.375		100	orang	3.536.033.450	52	544.837.750	186	1.834.028.000	0	998.309.000	0	130.373.250	238	3.507.548.000	238%	99%	238	3.507.548.000	238%	29%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	Jumlah PNS yang di Uji Kompetensi	60	Orang	12.218.694.375		30	Orang	3.536.033.450	0	544.837.750	0	1.834.028.000	0	998.309.000	0	130.373.250	0	3.507.548.000	0%	99%	0	3.507.548.000	0%	29%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	Jumlah PNS yang dikrim untuk diklat	50	Orang	12.218.694.375		50	Orang	3.536.033.450	0	544.837.750	0	1.834.028.000	0	998.309.000	0	130.373.250	0	3.507.548.000	0%	99%	0	3.507.548.000	0%	29%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	50	Orang	12.218.694.375		50	Orang	3.536.033.450	2	544.837.750	5	1.834.028.000	29	998.309.000	0	130.373.250	36	3.507.548.000	72%	99%	36	3.507.548.000	72%	29%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	160	Orang	12.218.694.375		80	Orang	3.536.033.450	0	544.837.750	0	1.834.028.000	0	998.309.000	0	130.373.250	0	3.507.548.000	0%	99%	0	3.507.548.000	0%	29%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	Jumlah PNS yang mengikuti kompetensi pemerintahan	10	Orang	12.218.694.375		10	Orang	3.536.033.450	0	544.837.750	0	1.834.028.000	0	998.309.000	0	130.373.250	0	3.507.548.000	0%	99%	0	3.507.548.000	0%	29%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai	40	Orang	12.218.694.375		40	Orang	3.536.033.450	0	544.837.750	0	1.834.028.000	0	998.309.000	0	130.373.250	0	3.507.548.000	0%	99%	0	3.507.548.000	0%	29%	BKPSDMD
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	Jumlah produk hukum tentang rencana pembinaan karir	1	Kegiatan	12.218.694.375		1	Kegiatan	3.536.033.450	0	544.837.750	0	1.834.028.000	0	998.309.000	0	130.373.250	0	3.507.548.000	0%	99%	0	3.507.548.000	0%	29%	BKPSDMD
		PENINGKATAN DAN PENGAMALAN AGAMA	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan (Pengajian Rutin)	15	Kegiatan	600.000.000		15	Kegiatan	115.000.000	3	18.875.000	5	40.935.000	4	19.595.600	2	18.635.000	14	98.040.600	93%	85%	14	98.040.600	93%	16%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Jumlah SK KGB yang diterbitkan.	2200	Suat Keputusan	1.824.583.000		2500	Suat Keputusan	439.337.570	810	7.517.000	600	228.177.500	71	6.600.000	580	165.202.500	2.061	407.497.000	0%	93%	2.061	407.497.000	0%	22%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	Jumlah pegawai yang mengajukan proses izin kawin cerai	0	0	1.550.000.000		0	0	283.993.400	0	92.334.000	0	80.193.000	0	29.137.700	0	7.415.000	0	209.079.700	0%	74%	0	209.079.700	0%	13%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	Jumlah PNS yang melakukan tes urine.	1	Kegiatan	1.550.000.000		1	Kegiatan	283.993.400	1	92.334.000	0	80.193.000	0	29.137.700	2	7.415.000	3	209.079.700	300%	74%	3	209.079.700	300%	13%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	Jumlah dokumen Rekapitulasi absensi SKPD HUT Kota Cimai dan HUT RI	2	Kegiatan	1.550.000.000		2	Kegiatan	283.993.400	0	92.334.000	1	80.193.000	1	29.137.700	0	7.415.000	2	209.079.700	100%	74%	2	209.079.700	100%	13%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan peningkatan disiplin pegawai	120	Orang	1.550.000.000		120	Orang	283.993.400	0	92.334.000	103	80.193.000	0	29.137.700	0	7.415.000	103	209.079.700	86%	74%	103	209.079.700	86%	13%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi LHKPN	75	Orang	1.550.000.000		75	Orang	283.993.400	0	92.334.000	0	80.193.000	0	29.137.700	0	7.415.000	0	209.079.700	0%	74%	0	209.079.700	0%	13%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	Jumlah waktu pelaksanaan fasilitas tes kelayakan kesehatan bagi PNS	12	Bulan	1.550.000.000		12	Bulan	283.993.400	3	92.334.000	3	80.193.000	3	29.137.700	3	7.415.000	12	209.079.700	100%	74%	12	209.079.700	100%	13%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	LHKPN bagi PNS di lingkungan Pemkot Cimai	32	Orang	1.550.000.000		32	Orang	283.993.400	30	92.334.000	5	80.193.000	1	29.137.700	0	7.415.000	36	209.079.700	113%	74%	36	209.079.700	113%	13%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	Pengelolaan dan Pelaporan E-SKP	12	Bulan	1.550.000.000		12	Bulan	283.993.400	3	92.334.000	3	80.193.000	3	29.137.700	3	7.415.000	12	209.079.700	100%	74%	12	209.079.700	100%	13%	BKPSDMD
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	Sosialisasi tentang pemantauan kinerja pegawai	1	Kegiatan	1.550.000.000		1	Kegiatan	283.993.400	0	92.334.000	0	80.193.000	0	29.137.700	0	7.415.000	0	209.079.700	0%	74%	0	209.079.700	0%	13%	BKPSDMD
		PENYELESAIAN PENSIUN DAN KPP	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	160	Surat Keputusan	130.000.000		160	Surat Keputusan	21.834.040	25	4.242.000	17	2.698.400	60	4.013.500	68	1.920.000	170	12.873.900	106%	59%	170	12.873.900	106%	10%	BKPSDMD
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	64%	81%			64%	16%					
PREDIKAT KINERJA																	R	T			R	SR					
		KESATUAN BANGSA																									
		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman Masyarakat Tentang Kehidupan Politik Dan Demokrasi;	:	Persen;	2.051.108.411																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	168	Kali	950.500.000	K	Rp	42	Kali	489.850.000	11	274.995.000	81	49.950.000	56	59.850.000	7	101.550.000	155	486.345.000	369%	99%	155	486.345.000	92%	51%	SETWAN
		HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA	Jumlah hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi																									
		KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH	Jumlah bulan dalam fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah	48	Bulan	2.432.500.000			12	Bulan	480.090.000	3	185.519.500	3	178.077.500	3	15.309.000	3	93.382.337	12	472.288.337	100%	98%	12	472.288.337	25%	19%	SETWAN
		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah pembahasan raperda yang difasilitasi	77	Raperda	56.827.500.000			20	Raperda	14.476.789.300	6	3.617.555.485	5	5.319.724.023	0	1.447.287.518	8	4.046.850.795		0%	0%	0	-	0%	0%	SETWAN	
		PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	Jumlah pelaksanaan bimtek/pelatihan teknis yang difasilitasi	24	Kali	26.492.500.000			6	Kali	9.091.497.173	4	3.490.056.444	2	1.532.398.363	1	661.831.370	4	2.352.342.505		0%	0%	0	-	0%	0%	SETWAN	
		PENUNJANG KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI	Jumlah fraksi-fraksi yang difasilitasi	32	Fraksi	2.583.500.000			8	Fraksi	573.319.000	8	140.809.000	8	139.490.000	8	93.000.000	8	114.000.000	32	487.299.000	400%	85%	32	487.299.000	100%	19%	SETWAN
		PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah publikasi kegiatan DPRD Kota Cimahi	320	Kali	4.338.000.000			80	Kali	1.318.753.490	20	339.170.000	12	228.560.000	23	242.504.900	25	467.363.228	80	1.277.598.128	100%	97%	80	1.277.598.128	25%	29%	SETWAN
		PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD	Jumlah rencana kerja DPRD yang dibuat	100	Kegiatan	3.134.500.000			25	Kegiatan	668.735.000	25	668.064.241	0	422.000	0	-	0	-	25	668.486.241	100%	100%	25	668.486.241	25%	21%	SETWAN
		RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	208	Kali	40.049.917.442			52	Kali	25.176.750.000	9	9.300.606.793	42	6.456.001.254	4	5.393.708.099	47	3.028.974.020		0%	0%	0	-	0%	0%	SETWAN	
		RAPAT-RAPAT PARIPURNA	Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi	80	Kali	4.013.500.000			20	Kali	2.184.700.000	4	88.305.250	5	321.195.000	10	808.085.000	23	740.787.500	42	1.958.372.750	210%	90%	42	1.958.372.750	53%	49%	SETWAN
		RESES	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	12	Kali	35.340.000.000			3	Kali	5.433.820.000	1	4.187.626.000	0	-	-	-	1	949.260.000		0%	0%	0	-	0%	0%	SETWAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				128%	57%			32%	19%			
PREDIKAT KINERJA																				ST	R			SR	SR			
		PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu;	80;	Persen;	2.446.962.861																						
		PELAKSANAAN DESK PILKADA	persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	1	Kali	697.813.000			1	Kali	25.296.000	0	2.086.500	1	6.875.000	0	7.810.000	0	2.610.000	1	19.381.500	100%	77%	1	19.381.500	100%	3%	BAG. PEMERINTAHAN
		FASILITASI PEMILU KECAMATAN CIMAHI SELATAN	jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	2E+05	Orang	237.125.120			154514	Orang	110.681.000	0	-	2E+05	110.681.000	0	-	0	-	154.514	110.681.000	0%	100%	154,5	110.681.000	0%	47%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN CIBEBER	jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	18090	Orang	21.000.000			18090	Orang	20.275.500	0	-	18090	20.275.500	0	-	0	-	18.09	20.275.500	0%	100%	18,09	20.275.500	0%	97%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN CIBEUREUM	jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	41593	Orang	43.500.000			41593	Orang	39.079.000	0	-	41593	39.079.000	0	-	0	-	41.593	39.079.000	0%	100%	41,59	39.079.000	0%	90%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN LEUWISAJAH	jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	29847	Orang	30.000.000			29847	Orang	16.875.500	0	-	29847	16.875.500	0	-	0	-	29.847	16.875.500	0%	100%	29,85	16.875.500	0%	56%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN MELONG	jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	43221	Orang	54.000.000			43221	Orang	16.395.000	0	-	43221	16.395.000	0	-	0	-	43.221	16.395.000	0%	100%	43,22	16.395.000	0%	30%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN UTAMA	jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	21763	Orang	24.000.000			21763	Orang	18.432.000	0	-	21763	18.342.000	0	-	0	-	21.763	18.342.000	0%	100%	21,76	18.342.000	0%	76%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI PEMILU DI KECAMATAN CIMAHI TENGAH	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu	0	Persen	208.153.000			77	Persen	163.244.000	0	23.391.000	85,94	138.708.000	0	-	0	-	85	162.099.000	110%	99%	85	162.099.000	0%	78%	KEC CIMAHI TENGAH
		FASILITASI PEMILU DI KELURAHAN BAROS	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	0	Persen	37.500.000			76	Persen	35.520.000	0	6.715.000	85,46	28.351.000	0	-	0	-	85	35.066.000	112%	99%	85	35.066.000	0%	94%	KEC CIMAHI TENGAH
		FASILITASI PEMILU DI KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	81	Persen	28.500.000			79	Persen	30.586.500	0	-	86,92	30.586.500	0	-	0	-	86	30.586.500	109%	100%	86	30.586.500	106%	107%	KEC CIMAHI TENGAH
		FASILITASI PEMILU DI KELURAHAN CIMAHI	jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	0	Persen	15.000.000			77	Persen	28.655.000	0	-	82,81	28.655.000	0	-	0	-	82	28.655.000	106%	100%	82	28.655.000	0%	191%	KEC CIMAHI TENGAH
		FASILITASI PEMILU DI KELURAHAN KARANGMEKAR	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	78	Persen	25.500.000			76	Persen	28.275.480	0	-	84,15	27.869.000	0	-	0	-	84	27.869.000	111%	99%	84	27.869.000	108%	109%	KEC CIMAHI TENGAH
		FASILITASI PEMILU DI KELURAHAN PADASUKA	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	0	Persen	31.500.000			78	Persen	30.598.000	0	-	87,03	30.382.000	0	-	0	-	87	30.382.000	112%	99%	87	30.382.000	0%	96%	KEC CIMAHI TENGAH
		FASILITASI PEMILU DI KELURAHAN SETAMANAH	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	78	Persen	27.000.000			76	Persen	34.851.000	0	-	86,95	34.254.000	0	-	0	-	86	34.254.000	113%	98%	86	34.254.000	110%	127%	KEC CIMAHI TENGAH
		FASILITASI PEMILU KECAMATAN CIMAHI UTARA	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	2E+05	Orang	4.017.521.500			128250	Orang	49.127.600	0	-	1E+05	49.044.000	0	-	0	-	100.19	49.044.000	0%	100%	100,2	49.044.000	0%	1%	KEC CIMAHI UTARA
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN CIBABAT	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	51660	Orang	260.150.000			43050	Orang	18.583.000	0	-	33240	18.583.000	0	-	0	-	33.24	18.583.000	0%	100%	33,24	18.583.000	0%	7%	KEC CIMAHI UTARA
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN CIPAGERAN	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	46920	Orang	506.000.000			39100	Orang	15.814.000	0	-	30750	15.814.000	0	-	0	-	30,75	15.814.000	0%	100%	30,75	15.814.000	0%	3%	KEC CIMAHI UTARA
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN CITEUREUP	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	36660	Orang	965.600.000			30550	Orang	16.915.000	0	-	24201	16.915.000	0	-	0	-	24,201	16.915.000	0%	100%	24,2	16.915.000	0%	2%	KEC CIMAHI UTARA
		FASILITASI PEMILU KELURAHAN PASIRKALKI	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	18660	Orang	1.908.600.000			15550	Orang	18.092.000	0	1.500.000	11999	16.592.000	11999	-	0	-	23.998	18.092.000	0%	100%	24	18.092.000	0%	1%	KEC CIMAHI UTARA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				46%	98%			22%	64%			
PREDIKAT KINERJA																				SR	ST			SR	R			
		PROGRAM KEBUJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	Persentase Pelaksanaan Pekerjaan Yang Di Monev;	100;	Persen;	54.149.939.397																						
		EVALUASI DAN PELAPORAN	Jumlah bulan	12	Bulan	1.556.139.636			12	Bulan	362.000.000		41.921.000	57.471.000		66.911.850	12	155.872.000	12	322.175.850	100%	89%	12	322.175.850	100%	21%	BAG. ADBANG	
		PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA	Jumlah dokumen standar belanja	3	Dokumen	3.485.802.000			12	Dokumen	386.308.000		97.252.699	223.022.000		27.879.000	3	34.427.500	3	382.581.199	25%	99%	3	382.581.199	100%	11%	BAG. ADBANG	
		FASILITASI KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN	JUMLAH FASILITASI KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN	30	Kegiatan	6.269.722.768			30	Kegiatan	1.269.292.200	5	60.328.200	6	347.254.504	12	344.305.000	7	480.576.000	30	1.232.463.704	100%	97%	30	1.232.463.704	100%	20%	BAG. ADM. KESRA
		PELAYANAN KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN.	JUMLAH LAYANAN KEGIATAN KEAGAMAAN	38	Kali	3.307.653.911			20	Kali	486.528.000	2	53.407.904	17	316.397.744	0	61.164.120	1	52.488.650	20	483.458.418	100%	99%	20	483.458.418	53%	15%	BAG. ADM. KESRA
		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA	JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN	6957	Orang	3.930.277.994			5980	Orang	718.529.000	165	69.890.000	3730	377.416.000	1365	140.323.000	720	128.755.000	5,98	716.3							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thd Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab																						
				5			6	7		8		9			10		11		12			13		14=(13/6)x100%																			
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3	4																			15																					
		LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah keputusan dan workshop	1500	Kali	Rp	577.814.612	K	Rp	1500	Kali	Rp	195.860.970	900	K	Rp	102.856.100	215	K	Rp	26.818.000	364	K	Rp	17.993.000	1130	K	Rp	47.776.496	2,609	K	Rp	195.443.596	0%	100%	2,609	K	Rp	17.993.000	195.443.596	0%	34%	BAG. HUKUM
		LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Peraturan Walikota	50	Perwal		577.814.612			50	Perwal		195.860.970	11			102.856.100	16			26.818.000	16			17.993.000	11			47.776.496	54			195.443.596	108%	100%	54			195.443.596	108%	34%	BAG. HUKUM	
		LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Raperda	23	Raperda		577.814.612			23	Raperda		195.860.970	0			102.856.100	11			26.818.000	4			17.993.000	1			47.776.496	16			195.443.596	70%	100%	16			195.443.596	70%	34%	BAG. HUKUM	
		PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat	5	bantuan hukum		2.607.972.080			5	bantuan hukum		430.192.025	0			30.889.500	0			79.430.000	0			81.713.743	0			135.276.849	0			327.310.092	0%	76%	0			327.310.092	0%	13%	BAG. HUKUM	
		PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA	Jumlah legal memorandum	6	memorandum		2.607.972.080			6	memorandum		430.192.025	0			30.889.500	0			79.430.000	0			81.713.743	2			135.276.849	2			327.310.092	33%	76%	2			327.310.092	33%	13%	BAG. HUKUM	
		PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA	Jumlah pembahasan permasalahan hukum	20	pembahasan		2.607.972.080			20	pembahasan		430.192.025	1			30.889.500	4			79.430.000	6			81.713.743	15			135.276.849	26			327.310.092	130%	76%	26			327.310.092	130%	13%	BAG. HUKUM	
		PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA	Jumlah penanganan permasalahan hukum	1	Kasus		2.607.972.080			1	Kasus		430.192.025	1			30.889.500	0			79.430.000	1			81.713.743	0			135.276.849	2			327.310.092	200%	76%	2			327.310.092	200%	13%	BAG. HUKUM	
		PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA	Jumlah pendampingan saksi	12	pendampingan		2.607.972.080			12	pendampingan		430.192.025	10			30.889.500	8			79.430.000	17			81.713.743	23			135.276.849	58			327.310.092	483%	76%	58			327.310.092	483%	13%	BAG. HUKUM	
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah sosialisasi hukum	2	sosialisasi		1.125.632.400			2	sosialisasi		274.587.275	1			92.376.975	1			22.897.500	0			74.560.000	0			47.855.000	2			237.689.475	100%	87%	2			237.689.475	100%	21%	BAG. HUKUM	
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah cetak bahan publikasi perundang-undangan	1	paket		1.125.632.400			1	paket		274.587.275	0			92.376.975	0			22.897.500	1			74.560.000	0			47.855.000	1			237.689.475	100%	87%	1			237.689.475	100%	21%	BAG. HUKUM	
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah cetak buku perda	2	Paket		1.125.632.400			2	Paket		274.587.275	0			92.376.975	0			22.897.500	1			74.560.000	1			47.855.000	2			237.689.475	100%	87%	2			237.689.475	100%	21%	BAG. HUKUM	
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah cetak ulang buku perda	1	Paket		1.125.632.400			1	Paket		274.587.275	0			92.376.975	0			22.897.500	1			74.560.000	0			47.855.000	1			237.689.475	100%	87%	1			237.689.475	100%	21%	BAG. HUKUM	
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah himpunan produk hukum daerah	3	buku		1.125.632.400			3	buku		274.587.275	0			92.376.975	0			22.897.500	0			74.560.000	3			47.855.000	3			237.689.475	100%	87%	3			237.689.475	100%	21%	BAG. HUKUM	
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah website yang dipelihara	1	website		1.125.632.400			1	website		274.587.275	0			92.376.975	1			22.897.500	0			74.560.000	0			47.855.000	1			237.689.475	100%	87%	1			237.689.475	100%	21%	BAG. HUKUM	
		AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Jumlah dokumen AKIP, dokumen SPM, dok ev jabatan, dok roadmap reformasi birokrasi	100	Persen		2.720.815.000			100	Persen		283.261.000	57			45.077.000	0			96.315.660	80			34.667.719	100			67.319.948	237			243.380.327	237%	86%	237			243.380.327	237%	9%	BAG. ORGANISASI	
		PENATAAN KELEMBAGAAN	Jumlah dokumen kajian kelembagaan, Jumlah dokumen analisis jabatan	100	Persen		1.162.786.821			100	Persen		403.500.300	0			68.048.554	0			32.682.222	50			107.123.000				189.089.468	50			396.943.244	50%	98%	50			396.943.244	50%	34%	BAG. ORGANISASI	
		PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah dokumen pelayanan Publik, jumlah dokumen ketatalaksanaan	100	Persen		1.489.932.000			100	Persen		309.873.700	0			66.749.040	0			39.273.899	70			31.964.352	100			150.143.312	170			288.130.603	170%	93%	170			288.130.603	170%	19%	BAG. ORGANISASI	
		FASILITASI PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	Presentase Pemilu yang difasilitasi	0	Kegiatan		1.901.219.000			775	Kegiatan		320.000.000	59			88.464.789	318			14.479.000	51			72.687.550	347			127.878.661	775			303.510.000	100%	95%	775			303.510.000	0%	16%	BAG. PEMERINTAHAN	
		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	Jumlah dokumen	3	Dokumen		4.672.425.000			3	Dokumen		533.404.000	2			145.589.214	1			265.313.737	0			45.473.000	3			60.753.000	6			517.128.951	200%	97%	6			517.128.951	200%	11%	BAG. PEMERINTAHAN	
		PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah Rakor Kewilayahan	10	Kegiatan		3.011.107.821			10	Kegiatan		516.497.000	1			6.830.000	5			86.240.000	3			76.615.608	1			305.429.835	10			475.115.443	100%	92%	10			475.115.443	100%	16%	BAG. PEMERINTAHAN	
		PELAYANAN PENGADAAN	Jumlah bulan	12	Bulan		3.206.218.700			12	Bulan		373.268.663	3			97.387.663	3			111.686.225	3			82.920.662	3			73.389.385	12			365.383.935	100%	98%	12			365.383.935	100%	11%	BAG. PENGADAAN BARANG	
		PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PENGADAAN	Jumlah bulan	12	Bulan		1.703.112.000			12	Bulan		136.165.000	3			33.132.500	3			30.015.000	3			34.508.000	3			25.884.500	9			123.540.000	75%	91%	9			123.540.000	75%	7%	BAG. PENGADAAN BARANG	
		TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAPORAN PENGADAAN	Jumlah bulan	12	Bulan		1.140.491.000			12	Bulan		152.251.000	3			49.537.050	3			22.851.000	3			19.841.500	3			39.029.018	12			131.258.568	100%	86%	12			131.258.568	100%	12%	BAG. PENGADAAN BARANG	
		FASILITASI KEUANGAN PANGAN	Jumlah dokumen	1	Dokumen		50.000.000			1	Dokumen		142.110.000	0			7.496.500	1			9.820.000	1			9.912.500	1			109.101.000	3			136.330.000	300%	96%	3			136.330.000	300%	273%	BAG. PEREKONOMIAN	
		FASILITASI KOORDINASI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Cakupan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian	240	Kali		1.850.000.000			60	Kali		159.143.000	4			37.746.973	6			31.725.000	36			17.448.800	20			49.135.836	66			136.056.609	110%	85%	66			136.056.609	28%	7%	BAG. PEREKONOMIAN	
		FASILITASI KOORDINASI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Dokumen Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	6	Dokumen		1.850.000.000			1	Dokumen		159.143.000	0			37.746.973	1			31.725.000	0			17.448.800	0			49.135.836	1			136.056.609	100%	85%	1			136.056.609	100%	7%	BAG. PEREKONOMIAN	
		FASILITASI KOORDINASI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Jumlah Monitoring BUMD	1	Perusahaan		1.850.000.000			1	Perusahaan		159.143.000	1			37.746.973	0			31.725.000	0			17.448.800	0			49.135.836	1			136.056.609	100%	85%	1			136.056.609	100%	7%	BAG. PEREKONOMIAN	
		FASILITASI KOORDINASI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Program CSR/TJSL	105	0		1.850.000.000			15	0		159.143.000	1			37.746.973	1			31.725.000	0			17.448.800	1			49.135.836	3			136.056.609	20%	85%	3			136.056.609	3%	7%	BAG. PEREKONOMIAN	
		FASILITASI KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kebijakan	0	0		650.000.000			3	0		86.422.000	0			3.150.000	0			5.435.500	0			44.445.500	1			30.082.300	1			83.113.300	33%	96%	1			83.113.300	0%	13%	BAG. PEREKONOMIAN	
		PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL	Jumlah Lembaga Keuangan Yang Melaksanakan MOU	0	0		700.000.000			2	0		72.433.000	0			5.014.612	0			11.020.000	0			3.992.000	0			33.856.182	0			53.882.794	0%	74%	0			53.882.794	0%	8%	BAG. PEREKONOMIAN	
		DIALOG / AUDIENS DENGAN TOKOH MASYARAKAT	Jumlah dialog	78	dialog		749.523.000			78	dialog		212.790.000	12			44.254.850	13			48.975.000	15			27.000.000	38			83.189.000	78			203.418.850	100%	96%	78			203.418.850	100%	27%	BAG. UMUM DAN PRO	
		FASILITASI KEGIATAN HARIAN DAN HARI BESAR	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	104	Kegiatan		6.100.901.340			134	Kegiatan		2.234.407.104	39			143.028.260	23			927.665.420	14			768.513.480	58			390.267.600	134			2.229.474.760	100%	100%	134			2.229.474.760	129%	37%	BAG. UMUM DAN PRO	
		KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	Jumlah kegiatan	165	Kegiatan		6.056.391.000			100	Kegiatan		1.793.275.000	44			271.504.387	21			242.680.694	40			418.926.544	60			576.633.510	165			1.509.745.135	165%	84%	165			1.509.745.135	100%	25%	BAG. UMUM DAN PRO	
		KUNJUNGAN KERJA /INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah inspeksi	48	inspeksi		1.135.115.000			48	inspeksi		216.520.000	12			23.547.000	12			68.811.000	12			38.455.000	12			63.942.000	48			194.755.000	100%	90%	48			194.755.000	100%	17%	BAG. UMUM DAN PRO	
		PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ILUAR NEGERI	Jumlah kunjungan	25	kunjungan		1.947.289.520			25	kunjungan		230.040.000	7			32.330.500	3			42.484.104	2			29.940.202	13																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	200 pegawai 750.000.000		200 pegawai 750.000.000		200 pegawai 228.088.000		138 161.954.000		0 2.675.000		0 57.480.000		183 222.109.000		92% 97%		183 222.109.000		92% 30%		BAG. TATA USAHA			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah asn	121	Orang	545.623.663		121	Orang	37.882.000	1	- 80	25.982.000	0	- 90	- 171	25.982.000	141%	69%	171	25.982.000	141%	5%	Bapenda			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang dibina	50	ASN	200.000.000		50	ASN	62.900.000	50	- 0	62.900.000	0	- 0	- 50	62.900.000	100%	100%	50	62.900.000	100%	31%	BAPPEDA			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Persen ASN yang dibina	100	Persen	540.000.000		100	Persen	85.600.000	100	- 0	75.000.000	0	- 0	- 100	75.000.000	100%	88%	100	75.000.000	100%	14%	BKPSDMD			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	23	Orang	1.829.450.000		23	Orang	6.500.000	0	- 0	- 0	6.500.000	- 0	6.500.000	0%	100%	0	6.500.000	0%	0%	BPBD				
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	% ASN yang dibina	100	Persen	1.200.000.000		100	Persen	137.500.000	0	- 100	135.520.000	0	- 100	- 200	135.520.000	200%	99%	200	135.520.000	200%	11%	BPKAD			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur pegawai untuk ASN	60	Orang	1.316.000.000		55	Orang	144.333.200	55	- 0	142.280.000	0	- 0	- 55	142.280.000	100%	99%	55	142.280.000	92%	11%	Dinas Pangan			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Terlaksananya pembinaan pegawai untuk THL	45	Orang	1.316.000.000		40	Orang	144.333.200	40	- 75	142.280.000	0	- 0	- 115	142.280.000	288%	99%	115	142.280.000	256%	11%	Dinas Pangan			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang dibina	0	Orang	875.000.000		24	Orang	100.000.000	0	- 63	46.000.000	0	30.000.000	86,46	11.500.000	149,46	87.500.000	623%	88%	149,5	87.500.000	0%	10%	DINKES	
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang terlihat	0	Orang	875.000.000		24	Orang	100.000.000	0	- 0	46.000.000	4	30.000.000	100	11.500.000	104	87.500.000	433%	88%	104	87.500.000	0%	10%	DINKES	
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	JUMLAH ASN YANG DIBINA	50	Orang	960.000.000		46	Orang	117.730.000	0	48.582.000	48	68.124.800	0	- 0	- 48	116.706.800	104%	99%	48	116.706.800	96%	12%	DinsosPP		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	JUMLAH NON ASN YANG DIBINA	65	Orang	960.000.000		57	Orang	117.730.000	0	48.582.000	61	68.124.800	0	- 0	- 61	116.706.800	107%	99%	61	116.706.800	94%	12%	DinsosPP		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	150	Orang	1.154.549.400		30	Orang	98.995.680	0	- 30	55.395.600	30	6.500.000	0	22.500.000	60	84.395.600	200%	85%	60	84.395.600	40%	7%	Disbudparpora	
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang terlihat	150	Orang	1.154.549.400		30	Orang	98.995.680	0	- 0	55.395.600	0	6.500.000	0	22.500.000	0	84.395.600	0%	85%	0	84.395.600	0%	7%	Disbudparpora	
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah Aparatur yang dibina, jumlah aparaturn yang terlihat	12800	Orang	4.546.056.743		3200	Orang	728.817.400	0	16.790.692	2322	135.593.308	0	89.440.000		414.805.200	2322	656.629.200	73%	90%	2322	656.629.200	18%	14%	Disdik
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang dibina	62	Orang	282.910.000		60	Orang	23.100.000	0	- 60	23.100.000	60	- 60	- 180	23.100.000	300%	100%	180	23.100.000	290%	8%	DisdukCapil			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang terlihat dan terbina	12	Bulan	2.682.740.000		12	Bulan	345.849.918	3	- 3	42.285.000	3	- 3	162.480.000	12	204.765.000	100%	59%	12	204.765.000	100%	8%	DISHUB		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	45	Orang	2.784.600.000		45	Orang	59.012.930	0	- 45	16.300.000	0	-	28.880.705	45	45.180.705	100%	77%	45	45.180.705	100%	2%	Diskominfo		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah Pegawai yang dibina dan difasilitasi	2	JPT	240.000.000		27	ASN	16.900.000	0	- 0	- 0	- 29	16.896.000	29	16.896.000	107%	100%	29	16.896.000	1450%	7%	Disnaker			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah Pegawai yang dibina dan difasilitasi	27	ASN	240.000.000		27	ASN	16.900.000	0	- 0	- 0	- 29	16.896.000	29	16.896.000	107%	100%	29	16.896.000	107%	7%	Disnaker			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah Pegawai yang dibina dan difasilitasi	2	JPT	240.000.000		27	ASN	16.900.000	0	- 0	- 0	- 29	16.896.000	29	16.896.000	107%	100%	29	16.896.000	1450%	7%	Disnaker			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah Pegawai yang dibina dan difasilitasi	27	ASN	240.000.000		27	ASN	16.900.000	0	- 0	- 0	- 29	16.896.000	29	16.896.000	107%	100%	29	16.896.000	107%	7%	Disnaker			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah pegawai yang diberikan pembinaan	400		1.392.000.000		350		506.036.000	250	- 0	263.211.000	90	100.000.000	250	110.043.500	590	473.254.500	169%	94%	590	473.254.500	148%	34%	DLH	
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang dibina	68	Orang	600.000.000		68	Orang	119.650.000	68	- 0	114.900.000	0	- 0	4.000.000	68	118.900.000	100%	99%	68	118.900.000	100%	20%	DPKP		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	74	Orang	1.013.497.100		69	Orang	202.118.200	0	- 0	116.121.700	0	- 69	- 69	116.121.700	100%	57%	69	116.121.700	93%	11%	DPKUKMP			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah THL yang dilatih	120	Orang	1.013.497.100		112	Orang	202.118.200	0	- 112	116.121.700	0	- 0	- 112	116.121.700	100%	57%	112	116.121.700	93%	11%	DPKUKMP			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina (2 kali kegiatan)	112	Orang	739.200.000		112	Orang	90.200.000	0	- 0	89.666.500	3	- 3	89.666.500	3%	99%	3	89.666.500	3%	12%	DPUPR				
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah THL dinas yang dibina (2 kali kegiatan)	62	Orang	739.200.000		62	Orang	90.200.000	88	- 0	89.666.500	0	-	- 88	89.666.500	142%	99%	88	89.666.500	142%	12%	DPUPR			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	150	Orang	130.315.750		135	Orang	38.409.800	0	- 135	38.409.800	0	- 0	- 135	38.409.800	100%	100%	135	38.409.800	90%	29%	KEC CIMAHI SELATAN			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang dibina	135	Orang	532.550.000		135	Orang	46.034.000	0	- 135	46.034.000	0	- 0	- 135	46.034.000	100%	100%	135	46.034.000	100%	9%	KEC CIMAHI TENGAH			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang dibina	148	Orang	246.755.000		148	Orang	45.734.000	0	- 148	45.725.000	148	- 0	- 296	45.725.000	200%	100%	296	45.725.000	200%	19%	KEC CIMAHI UTARA			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	18	Orang	570.000.000		18	Orang	1.000.000	2	- 2	1.000.000	2	-	- 6	1.000.000	33%	100%	6	1.000.000	33%	0%	KESBANG			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang terlihat	18	Orang	570.000.000		18	Orang	1.000.000	2	- 2	1.000.000	2	-	- 6	1.000.000	33%	100%	6	1.000.000	33%	0%	KESBANG			
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	135	Orang	2.175.538.365		24	Orang	65.140.000	0	- 0	50.670.000	0	-	1.530.000	0	52.200.000	0%	80%	0	52.200.000	0%	2%	Satpol PP dan Damkar		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang terlihat	120	Orang	2.175.538.365		24	Orang	65.140.000	0	- 0	50.670.000	0	-	1.530.000	0	52.200.000	0%	80%	0	52.200.000	0%	2%	Satpol PP dan Damkar		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah Non - ASN yang dibina	70	Orang	2.175.538.365		86	Orang	65.140.000	0	- 81	50.670.000	0	-	1.530.000	81	52.200.000	94%	80%	81	52.200.000	116%	2%	Satpol PP dan Damkar		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang dibina dan terlihat	200	Orang	3.100.000.000		50	Orang	772.865.000	11	113.233.147	3	130.994.163	23	124.794.592	0	273.613.176	37	642.635.078	74%	83%	37	642.635.078	19%	21%	SETWAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																											
PREDIKAT KINERJA																				ST	T			ST	SR		
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Realisasi Anggaran;	85;	Persen;	35.003.241.479																					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen	1650	Dokumen	1.388.233.000		1650	Dokumen	288.233.000	553	36.516.550	628	62.218.500	634	47.325.450	1072	81.562.800	2887	227.623.300	175%	79%	2887	227.623.300	175%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				5			6		7		8		9		10			11		12		13			13=6+12		14=(13/5)x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
1	2	3	4	1	ISO	400.000.000			K	Rp								K	Rp									
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	ISO yang dipelihara	1	ISO	400.000.000			1	ISO	49.500.000	0	-	0	5.000.000	0	-	1	19.000.000	1	24.000.000	100%	48%	1	24.000.000	100%	6%	BAPPEDA
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	20	SOP	400.000.000			5	SOP	49.500.000	0	-	0	5.000.000	0	-	5	19.000.000	5	24.000.000	100%	48%	5	24.000.000	25%	6%	BAPPEDA
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	jumlah dokumen Laporan Keuangan	6	Dokumen	170.000.000			6	Dokumen	32.300.000	2	11.014.250	1	6.439.000	1	8.184.000	2	6.377.750	6	32.015.000	100%	99%	6	32.015.000	100%	19%	BKPSDMD
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LKIP	1	Dokumen	601.000.000			1	Dokumen	46.482.000	1	12.332.000	0	3.724.000	0	4.218.000	0	10.659.900	1	30.933.900	100%	67%	1	30.933.900	100%	5%	BKPSDMD
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LPPD	1	Dokumen	601.000.000			1	Dokumen	46.482.000	1	12.332.000	0	3.724.000	0	4.218.000	0	10.659.900	1	30.933.900	100%	67%	1	30.933.900	100%	5%	BKPSDMD
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen monev	3	Dokumen	601.000.000			3	Dokumen	46.482.000	0	12.332.000	1	3.724.000	1	4.218.000	2	10.659.900	4	30.933.900	133%	67%	4	30.933.900	133%	5%	BKPSDMD
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENJA	1	Dokumen	215.000.000			1	Dokumen	33.411.000	0	10.812.000	0	-	1	5.314.000	0	15.590.000	1	31.716.000	100%	95%	1	31.716.000	100%	15%	BKPSDMD
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENSTRA	1	Dokumen	215.000.000			0	Dokumen	33.411.000	0	10.812.000	0	-	0	5.314.000	0	15.590.000	0	31.716.000	100%	95%	0	31.716.000	0%	15%	BKPSDMD
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	jumlah SOP	1	Dokumen	200.000.000			1	Dokumen	50.000.000	0	-	0	-	0	-	1	46.347.500	1	46.347.500	100%	93%	1	46.347.500	100%	23%	BKPSDMD
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Anggaran	4	Dokumen	644.124.000			4	Dokumen	26.624.000	2	-	0	-	1	8.313.200		13.661.100	3	21.974.300	75%	83%	3	21.974.300	75%	3%	BPBD
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang	8	Dokumen	460.877.000			8	Dokumen	12.157.000	2	1.242.600	2	1.278.000	2	1.221.000		6.440.000	6	10.181.600	75%	84%	6	10.181.600	75%	2%	BPBD
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Laporan keuangan	4	Dokumen	1.059.357.000			4	Dokumen	10.155.000	1	2.472.000	1	-	1	3.165.000		-	3	5.637.000	75%	56%	3	5.637.000	75%	1%	BPBD
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen monev	7	Dokumen	921.184.000			7	Dokumen	14.744.000	3	2.894.000	1	-	1	2.337.000		4.811.000	5	10.042.000	71%	68%	5	10.042.000	71%	1%	BPBD
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENJA	1	Dokumen	1.010.673.000			1	Dokumen	102.438.000	1	40.147.000	0	2.936.000	0	1.653.000		50.311.000	1	95.047.000	100%	93%	1	95.047.000	100%	9%	BPBD
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENSTRA	1	Dokumen	1.010.673.000			0	Dokumen	102.438.000	0	40.147.000	0	2.936.000	0	1.653.000		50.311.000	0	95.047.000	100%	93%	0	95.047.000	0%	9%	BPBD
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen anggaran	8	Dokumen	170.000.000			2	Dokumen	32.700.000	1	4.000.000	0	-	0	6.110.000	1	17.626.500	2	27.736.500	100%	85%	2	27.736.500	25%	16%	BPKAD
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	jumlah dokumen laporan inventaris barang	4	Dokumen	170.000.000			1	Dokumen	18.800.000	1	8.749.000	0	-	0	7.397.000	0	-	1	16.146.000	100%	86%	1	16.146.000	25%	9%	BPKAD
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	jumlah dokumen	10	Dokumen	260.000.000			2	Dokumen	22.555.000	1	9.699.000	0	-	1	9.267.000	0	-	2	18.966.000	100%	84%	2	18.966.000	20%	7%	BPKAD
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah Dokumen LKIP	5	Dokumen	230.000.000			1	Dokumen	38.350.000	1	17.009.000	0	5.020.000	0	1.275.000	0	11.563.000	1	34.867.000	100%	91%	1	34.867.000	20%	15%	BPKAD
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah Dokumen LPPD	5	Dokumen	230.000.000			1	Dokumen	38.350.000	1	17.009.000	0	5.020.000	0	1.275.000	0	11.563.000	1	34.867.000	100%	91%	1	34.867.000	20%	15%	BPKAD
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah Dokumen Monev	5	Dokumen	230.000.000			1	Dokumen	38.350.000	0	17.009.000	0	5.020.000	1	1.275.000	0	11.563.000	1	34.867.000	100%	91%	1	34.867.000	20%	15%	BPKAD
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah Dokumen Renja	13	Dokumen	230.000.000			2	Dokumen	22.470.000	0	11.474.000	0	-	2	5.476.000	0	1.925.000	2	18.875.000	100%	84%	2	18.875.000	15%	8%	BPKAD
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah Dokumen Renstra	3	Dokumen	230.000.000			1	Dokumen	22.470.000	0	11.474.000	0	-	0	5.476.000	1	1.925.000	1	18.875.000	100%	84%	1	18.875.000	33%	8%	BPKAD
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	5	Dokumen	300.000.000			1	Dokumen	48.100.000	0	-	0	24.934.000	1	15.083.000	0	3.225.000	1	43.242.000	100%	90%	1	43.242.000	20%	14%	BPKAD
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen laporan inventaris barang	1	Dokumen	2.009.833.438			1	Dokumen	17.215.000	1	3.278.000	0	3.491.000	0	3.539.000	1	6.552.000	2	16.860.000	200%	98%	2	16.860.000	200%	1%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Dokumen laporan keuangan	2	Dokumen	57.423.750			2	Dokumen	10.138.300	1	4.122.000	0	-	1	3.320.000	0	2.480.000	2	9.922.000	100%	98%	2	9.922.000	100%	17%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	5	Dokumen	57.423.750			1	Dokumen	10.138.300	1	4.122.000	0	-	0	3.320.000	0	2.480.000	1	9.922.000	100%	98%	1	9.922.000	20%	17%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Dokumen Monev	4	Dokumen	1.348.476.250			4	Dokumen	79.297.000	1	7.989.750	1	40.895.750	1	15.833.750	1	14.050.000	4	78.769.250	100%	99%	4	78.769.250	100%	6%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen e reporting	12	Dokumen	1.348.476.250			12	Dokumen	79.297.000	3	7.989.750	3	40.895.750	3	15.833.750	3	14.050.000	12	78.769.250	100%	99%	12	78.769.250	100%	6%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen LKIP	1	Dokumen	1.348.476.250			1	Dokumen	79.297.000	1	7.989.750	0	40.895.750	0	15.833.750	0	14.050.000	1	78.769.250	100%	99%	1	78.769.250	100%	6%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen LPPD	1	Dokumen	1.348.476.250			1	Dokumen	79.297.000	1	7.989.750	0	40.895.750	0	15.833.750	0	14.050.000	1	78.769.250	100%	99%	1	78.769.250	100%	6%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Lembur ASN hari Kerja dan Libur	12	Bulan	1.348.476.250			12	Bulan	79.297.000	3	7.989.750	3	40.895.750	3	15.833.750	3	14.050.000	12	78.769.250	100%	99%	12	78.769.250	100%	6%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Lembur non ASN	12	Bulan	1.348.476.250			12	Bulan	79.297.000	3	7.989.750	3	40.895.750	3	15.833.750	3	14.050.000	12	78.769.250	100%	99%	12	78.769.250	100%	6%	Dinas Pangan
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Tenaga pendukung kegiatan (S1 2 orang)	12	Bulan	1.348.476.250			12	Bulan	79.297.000																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %			Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)			Unit SKPD Penanggung Jawab												
				5			6		7		8		9		10			11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%											
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K		Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	1	Dokumen	643.000.000	K	Rp	1	Dokumen	53.451.000	0	23.463.000	1		2.750.000	0	K	Rp	4.773.000	0	K	Rp	3.050.000	1	K	Rp	34.036.000	100%	64%	1	K	Rp	34.036.000	100%	5%	DINKES
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen LPPD	4	Dokumen	643.000.000			4	Dokumen	53.451.000	0	23.463.000	2		2.750.000	1		4.773.000	1		3.050.000	4	34.036.000	100%	64%	4		34.036.000	100%	5%	DINKES					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen movev	2	Dokumen	290.000.000			2	Dokumen	35.797.000	0	14.613.000	0		17.217.000	1		263.000	1		-	2	32.093.000	100%	90%	2		32.093.000	100%	11%	DINKES					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen Renstra	1	Unit	290.000.000			1	Unit	35.797.000	0	14.613.000	0		17.217.000	0		263.000	0		-	0	32.093.000	0%	90%	0		32.093.000	0%	11%	DINKES					
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	2	Dokumen	70.000.000			2	Dokumen	17.356.000	0	-	2		13.856.000	0		-	0		-	2	13.856.000	100%	80%	2		13.856.000	100%	20%	DINKES					
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen anggaran	8	Dokumen	230.000.000			2	Dokumen	23.340.000	0	4.805.000	0		1.680.000	1		2.844.000	1		3.067.800	2	12.396.800	100%	53%	2		12.396.800	25%	5%	DinsosPP					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen laporan inventaris barang	20	Dokumen	342.000.000			5	Dokumen	9.710.000	2	9.591.800	0		1.207.600	1	-	2.289.000	2		815.600	5	9.326.000	100%	96%	5		9.326.000	25%	3%	DinsosPP					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah laporan keuangan	8	Dokumen	230.000.000			2	Dokumen	35.340.000	1	6.109.624	0		7.623.840	1		7.623.840	0		10.927.504	2	32.284.808	100%	91%	2		32.284.808	25%	14%	DinsosPP					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen movev	20	Dokumen	800.000.000			5	Dokumen	76.508.000	2	14.327.566	2		16.695.360	0		14.320.360	1		18.352.836	5	63.696.122	100%	83%	5		63.696.122	25%	8%	DinsosPP					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN	12	Dokumen	500.000.000			3	Dokumen	115.063.000	1	55.425.600	0		680.000	0		-	2		46.300.000	3	102.405.600	100%	89%	3		102.405.600	25%	20%	DinsosPP					
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	jumlah dokumen anggaran	8	Dokumen	681.230.700			2	Dokumen	61.932.500	0	8.845.000	0		5.220.000	1		12.569.300	1		31.178.150	2	57.812.450	100%	93%	2		57.812.450	25%	8%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	16	Dokumen	71.700.000			4	Dokumen	11.145.670	0	-	0		-	3		-	1		10.345.670	4	10.345.670	100%	93%	4		10.345.670	25%	14%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	jumlah dokumen Laporan Keuangan	16	Dokumen	131.308.000			4	Dokumen	27.727.710	0	2.519.350	1		1.974.150	2		8.557.800	1		11.672.000	4	24.723.300	100%	89%	4		24.723.300	25%	19%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LKIP	4	Dokumen	570.308.000			1	Dokumen	50.752.770	0	36.852.300	0		2.918.000	0		2.778.600	1		5.567.750	1	48.116.650	100%	95%	1		48.116.650	25%	8%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LPPD	4	Dokumen	570.308.000			1	Dokumen	50.752.770	0	36.852.300	0		2.918.000	0		2.778.600	1		5.567.750	1	48.116.650	100%	95%	1		48.116.650	25%	8%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen movev	48	Dokumen	570.308.000			12	Dokumen	50.752.770	3	36.852.300	3		2.918.000	3		2.778.600	3		5.567.750	12	48.116.650	100%	95%	12		48.116.650	25%	8%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENJA	8	Dokumen	511.577.500			2	Dokumen	119.185.730	1	68.896.900	0		9.345.000	0		16.933.000	1		19.309.000	2	114.483.900	100%	96%	2		114.483.900	25%	22%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENSTRA	8	Dokumen	511.577.500			2	Dokumen	119.185.730	1	68.896.900	0		9.345.000	0		16.933.000	1		19.309.000	2	114.483.900	100%	96%	2		114.483.900	25%	22%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	jumlah SOP	4	At Coast	147.454.500			1	At Coast	26.780.200	1	22.110.400	0		2.800.000	0		180.000	0		1.036.750	1	26.127.150	100%	98%	1		26.127.150	25%	18%	Disbudparpora					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang	12	Dokumen	311.577.184			3	Dokumen	119.910.000	0	67.250.000	3		-	0		-			46.055.000	3	113.305.000	100%	94%	3		113.305.000	25%	36%	Disdik					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	8	Dokumen	208.000.000			2	Dokumen	282.104.050	1	18.937.150	1		24.305.600	1		32.778.500			177.300.182	3	253.321.432	150%	90%	3		253.321.432	38%	122%	Disdik					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah Dokumen Movev, Jumlah Dokumen LPPD, Jumlah Dokumen LKIP	24	Dokumen	329.616.480			6	Dokumen	33.000.000	0	9.311.800	2		3.668.300	2		2.989.000			13.047.700	4	29.016.800	67%	88%	4		29.016.800	17%	9%	Disdik					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah Dokumen Renstra, Jumlah Dokumen Renja	5	Dokumen	304.000.000			1	Dokumen	111.650.000	0	64.075.000	1		-	0		32.375.550			11.983.000	1	108.433.550	100%	97%	1		108.433.550	20%	36%	Disdik					
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	5	Dokumen	190.000.000			1	Dokumen	28.610.000	0	-	0		800.000	0		-			21.272.500	0	22.072.500	0%	77%	0		22.072.500	0%	12%	Disdik					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen laporan inventaris barang	10	Dokumen	46.400.000			2	Dokumen	5.000.000	1	880.000	1		1.000.000	1		840.000	2		2.080.000	5	4.800.000	250%	96%	5		4.800.000	50%	10%	DisdukCapil					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	10	Dokumen	59.500.000			2	Dokumen	10.000.000	1	4.537.500	1		-	2		3.770.000	2		-	6	8.307.500	300%	83%	6		8.307.500	60%	14%	DisdukCapil					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah Dokumen Movev, LKIP dan LPPD	30	Dokumen	217.050.000			6	Dokumen	19.640.000	3	10.073.000	4		3.600.000	5		-	6		3.617.000	18	17.290.000	300%	88%	18		17.290.000	60%	8%	DisdukCapil					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	12	Dokumen	270.000.000			2	Dokumen	34.090.000	1	24.950.000	1		3.488.500	2		500.000	2		2.851.500	6	31.790.000	300%	93%	6		31.790.000	50%	12%	DisdukCapil					
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SPP dan SOP	48	SPP/SOP	176.700.000			48	SPP/SOP	19.650.000	26	-	34		2.715.500	36		1.971.000	48		1.200.000	144	5.886.500	300%	30%	144		5.886.500	300%	3%	DisdukCapil					
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	jumlah dokumen anggaran	1	Tahun	260.000.000			1	Tahun	56.007.500	0	-	0		-	0		10.145.500	1		45.039.500	1	55.185.000	100%	99%	1		55.185.000	100%	21%	DISHUB					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	12	Bulan	480.000.000			12	Bulan	66.192.100	3	7.527.950	3		8.742.950	3		14.249.600	3		31.957.100	12	62.477.600	100%	94%	12		62.477.600	100%	13%	DISHUB					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah movev, LPPD, LKIP, Profil Dinas	12	Bulan	803.509.000			12	Bulan	106.614.450	3	7.252.500	3		20.708.750	3		54.095.645	3		20.168.950	12	102.225.845	100%	96%	12		102.225.845	100%	13%	DISHUB					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen renstra dan renja	12	Bulan	200.000.000																															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				5			6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
1	2	3	4																								
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen anggaran	8	Dokumen 18.000.000	K	Rp	2	Dokumen 4.064.200	0	380.600	0	-	0	-	2	3.673.600	2	4.054.200	100%	100%	2	K	Rp 4.054.200	25%	23%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen laporan inventaris barang	8	Dokumen 22.000.000			2	Dokumen 2.103.600	1	556.200	0	-	0	1.167.200	1	300.000	2	2.023.400	100%	96%	2		2.023.400	25%	9%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	8	Dokumen 65.000.000			2	Dokumen 2.033.600	1	491.800	0	-	1	161.800	0	1.300.000	2	1.953.600	100%	96%	2		1.953.600	25%	3%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen LKIP	4	Dokumen 311.000.000			1	Dokumen 10.881.000	1	4.614.000	0	2.480.000	0	691.200	0	2.989.800	1	10.775.000	100%	99%	1		10.775.000	25%	3%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen LPPD	4	Dokumen 311.000.000			1	Dokumen 10.881.000	1	4.614.000	0	2.480.000	0	691.200	0	2.989.800	1	10.775.000	100%	99%	1		10.775.000	25%	3%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen monev	116	Dokumen 311.000.000			29	Dokumen 10.881.000	8	4.614.000	7	2.480.000	7	691.200	7	2.989.800	29	10.775.000	100%	99%	29		10.775.000	25%	3%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen RENJA	4	Dokumen 95.000.000			1	Dokumen 15.025.750	0	12.159.750	0	-	1	1.000.000	0	1.856.000	1	15.015.750	100%	100%	1		15.015.750	25%	16%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen RENSTRA	1	Dokumen 95.000.000			0	Dokumen 15.025.750	0	12.159.750	0	-	0	1.000.000	0	1.856.000	0	15.015.750	100%	100%	0		15.015.750	0%	16%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	24	Dokumen 575.000.000			6	Dokumen 77.094.200	0	4.399.000	0	65.635.000	0	114.000	6	5.370.000	6	75.518.000	100%	98%	6		75.518.000	25%	13%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Perda Penanaman Modal dan PTSP	0	Dokumen 575.000.000			1	Dokumen 77.094.200	0	4.399.000	0	65.635.000	0	114.000	0	5.370.000	0	75.518.000	0%	98%	0		75.518.000	100%	13%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Sertifikasi ISO	4	Sertifikasi 575.000.000			1	Sertifikasi 77.094.200	0	4.399.000	1	65.635.000	0	114.000	0	5.370.000	1	75.518.000	100%	98%	1		75.518.000	25%	13%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen inventaris barang	45	Dokumen 105.100.000			9	Dokumen 7.353.000	2	3.500.000	0	-	0	-	9	3.500.000	11	7.000.000	122%	95%	11		7.000.000	24%	7%	DLH
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	10	Dokumen 89.670.000			2	Dokumen 17.559.800	0	-	0	-	0	4.176.000	2	12.042.000	2	16.218.000	100%	92%	2		16.218.000	20%	18%	DLH
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jmlah Dokumen Monev, LAKIP, LPPD	30	Dokumen 345.000.000			6	Dokumen 21.264.000	4	20.532.000	1	-	0	-	6	396.000	11	20.928.000	183%	98%	11		20.928.000	37%	6%	DLH
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah Kegiatan Forum SKPD	4	Kegiatan 477.698.000			1	Kegiatan 76.315.000	1	47.992.000	0	-	0	6.896.000	1	19.280.000	2	74.168.000	200%	97%	2		74.168.000	50%	16%	DLH
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA	25	Dokumen 477.698.000			6	Dokumen 76.315.000	3	47.992.000	0	-	1	6.896.000	6	19.280.000	10	74.168.000	167%	97%	10		74.168.000	40%	16%	DLH
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen anggaran	16	Dokumen 200.000.000			4	Dokumen 36.891.500	2	6.750.000	0	-	0	1.500.000	2	27.996.000	4	36.246.000	100%	98%	4		36.246.000	25%	18%	DPKP
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen laporan inventaris barang	8	Dokumen 100.000.000			2	Dokumen 11.105.000	2	9.841.000	0	-	0	-	0	992.000	2	10.833.000	100%	98%	2		10.833.000	25%	11%	DPKP
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	8	Dokumen 100.000.000			2	Dokumen 23.006.500	1	14.374.200	0	999.000	0	2.420.000	1	5.111.000	2	22.904.200	100%	100%	2		22.904.200	25%	23%	DPKP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen LKIP	4	Dokumen 315.000.000			1	Dokumen 99.101.240	1	16.525.604	0	24.952.560	0	17.443.698	0	35.430.569	1	94.352.431	100%	95%	1		94.352.431	25%	30%	DPKP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen LPPD	8	Dokumen 315.000.000			2	Dokumen 99.101.240	2	16.525.604	0	24.952.560	0	17.443.698	0	35.430.569	2	94.352.431	100%	95%	2		94.352.431	25%	30%	DPKP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen monev	12	Dokumen 315.000.000			3	Dokumen 99.101.240	3	16.525.604	0	24.952.560	0	17.443.698	0	35.430.569	3	94.352.431	100%	95%	3		94.352.431	25%	30%	DPKP
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen RENJA	8	Dokumen 250.000.000			2	Dokumen 123.323.500	1	98.944.400	0	9.627.000	0	-	0	5.830.000	1	114.401.400	50%	93%	1		114.401.400	13%	46%	DPKP
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen RENSTRA	12	Dokumen 250.000.000			3	Dokumen 123.323.500	1	98.944.400	0	9.627.000	0	-	0	5.830.000	1	114.401.400	33%	93%	1		114.401.400	8%	46%	DPKP
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	56	Dokumen 63.830.000			14	Dokumen 15.375.000	0	11.500.000	7	-	3	-	4	-	14	11.500.000	100%	75%	14		11.500.000	25%	18%	DPKUKMP
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	jumlah dokumen Laporan Keuangan	15	Dokumen 139.137.000			3	Dokumen 32.232.600	0	-	0	1.620.000	1	5.045.000	2	7.514.500	3	14.179.500	100%	44%	3		14.179.500	20%	10%	DPKUKMP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LKIP	4	Dokumen 1.007.569.000			1	Dokumen 275.516.400	1	32.945.200	1	18.243.600	0	12.225.600	0	118.269.600	2	181.684.000	200%	66%	2		181.684.000	50%	18%	DPKUKMP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LPPD	4	Dokumen 1.007.569.000			1	Dokumen 275.516.400	1	32.945.200	1	18.243.600	0	12.225.600	0	118.269.600	2	181.684.000	200%	66%	2		181.684.000	50%	18%	DPKUKMP
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen monev	24	Dokumen 1.007.569.000			6	Dokumen 275.516.400	1	32.945.200	2	18.243.600	3	12.225.600	2	118.269.600	8	181.684.000	133%	66%	8		181.684.000	33%	18%	DPKUKMP
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENJA	8	Dokumen 873.111.000			2	Dokumen 153.861.600	1	28.529.200	0	23.739.000	0	35.534.600	0	23.595.400	1	111.398.200	50%	72%	1		111.398.200	13%	13%	DPKUKMP
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENSTRA	2	Dokumen 873.111.000			0	Dokumen 153.861.600	0	28.529.200	0	23.739.000	0	35.534.600	0	23.595.400	0	111.398.200	100%	72%	0		111.398.200	0%	13%	DPKUKMP
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	jumlah SOP	30	Dokumen 319.220.000			15	Dokumen 64.224.400	7	26.208.025	2	7.779.875	6	7.841.600	2	7.596.550	17	49.426.050	113%	77%	17		49.426.050	57%	15%	DPKUKMP
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	4 dokumen (RKA, DPA, RKPA, DPPA)	16	Dokumen 200.000.000			4	Dokumen 17.384.640	2	9.540.400	0	-	0	4.696.400		1.598.000	2	15.834.800	50%	91%	2		15.834.800	13%	8%	DPUPR
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14 laporan (lap. penyerapan anggaran bulanan, lap. keuangan semester, lap. keuangan akhir tahun)	70	Dokumen 235.590.200			14	Dokumen 15.140.190	4	4.080.800	3	4.086.800	3	1.950.000		1.883.000	10	12.000.600	71%	79%	10		12.000.600	14%	5%	DPUPR
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	3 dokumen (LKIP, LKPJ, data SKPD untuk LPPD tingkat kota)	21	Dokumen 459.352.900			3	Dokumen 7.720.000	3	6.462.500	0	6														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4																				15						
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	1	Dokumen	288.778.400		1	Dokumen	11.092.000	0		8.592.000	0		2.500.000	0			-	0			KEC CIMAHI SELATAN					
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen anggaran	4	Dokumen	433.200.450		4	Dokumen	88.043.000	0		-	0		-	2			33.893.000	4			KEC CIMAHI TENGAH					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	2	Dokumen	183.562.300		2	Dokumen	23.906.000	1		18.777.000	1		4.656.000	0			20.000	0			KEC CIMAHI TENGAH					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen LKIP	6	Dokumen	403.506.400		1	Dokumen	64.697.000	1		42.635.500	0		16.601.500	0			-	0			KEC CIMAHI TENGAH					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen LPDP	6	Dokumen	403.506.400		1	Dokumen	64.697.000	1		42.635.500	0		16.601.500	0			-	0			KEC CIMAHI TENGAH					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen movev	37	Dokumen	403.506.400		5	Dokumen	64.697.000	2		42.635.500	1		16.601.500	1			-	1			KEC CIMAHI TENGAH					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen Renja	12	Dokumen	216.572.000		2	Dokumen	6.632.300	0		-	0		-	0			3.454.000	2			KEC CIMAHI TENGAH					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen Renstra	5	Dokumen	216.572.000		0	Dokumen	6.632.300	0		-	0		-	0			3.454.000	0			KEC CIMAHI TENGAH					
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen anggaran	4	Dokumen	136.900.000		4	Dokumen	16.884.000	1		-	0		-	1			4.203.000	1			KEC CIMAHI UTARA					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	14	Dokumen	118.700.000		14	Dokumen	35.885.500	4		10.671.000	4		8.389.500	3			8.343.500	3			KEC CIMAHI UTARA					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen movev, LPDP, LKIP dan Profil	7	Dokumen	1.010.200.000		7	Dokumen	70.422.000	3		54.708.500	1		15.713.500	1			-	2			KEC CIMAHI UTARA					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	3	Dokumen	80.450.000		3	Dokumen	6.955.000	0		-	2		6.955.000	1			-	0			KEC CIMAHI UTARA					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	2	Dokumen	46.000.000		2	Dokumen	3.180.000	2		485.000	2		713.000	2			-	-			KESBANG					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	2	Dokumen	66.000.000		2	Dokumen	2.760.000	2		443.200	2		675.000	2			1.080.000	6			KESBANG					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen LKIP, LPDP, LKJP	3	Dokumen	75.000.000		3	Dokumen	3.205.500	3		400.000	3		883.500	3			-	-			KESBANG					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen movev	8	Dokumen	75.000.000		8	Dokumen	3.205.500	8		400.000	0		883.500	8			-	-			KESBANG					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen Renja	2	Dokumen	70.000.000		2	Dokumen	2.482.500	1		-	1		600.000	1			-	-			KESBANG					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen Renstra	1	Dokumen	70.000.000		3	Dokumen	2.482.500	1		-	1		600.000	1			-	-			KESBANG					
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	5	buah	46.000.000		5	buah	3.670.200	5		573.000	5		276.000	6			-	-			KESBANG					
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	4	Dokumen	278.600.000		4	Dokumen	24.910.000	0		-	1		8.912.000	2			-	-			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	4	Dokumen	20.950.000		4	Dokumen	2.964.000	0		-	4		2.613.000	0			-	4			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen RKMMD & RKPBMMD	2	Dokumen	20.950.000		2	Dokumen	2.964.000	0		-	2		2.613.000	0			-	2			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Inventaris Barang	2	Dokumen	20.950.000		2	Dokumen	2.964.000	0		-	2		2.613.000	0			-	2			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	3	Dokumen	235.200.000		3	Dokumen	20.117.500	3		19.669.500	0		-	0			-	-			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan	5	Dokumen	235.200.000		5	Dokumen	20.117.500	5		19.669.500	0		-	0			-	5			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen LKIP	1	Dokumen	165.900.000		1	Dokumen	15.427.000	1		7.779.000	0		5.199.000	0			1.250.000	-	1		Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen LPDP	1	Dokumen	165.900.000		1	Dokumen	15.427.000	1		7.779.000	0		5.199.000	0			1.250.000	-	1		Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen movev	2	Dokumen	165.900.000		2	Dokumen	15.427.000	0		7.779.000	1		5.199.000	1			1.250.000	-	2		Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen SPM	1	Dokumen	165.900.000		1	Dokumen	15.427.000	0		7.779.000	0		5.199.000	0			1.250.000	-	0		Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka pelaksanaan Movev, Penyusunan LKIP, LPDP, dan SPM	5	Kali	165.900.000		5	Kali	15.427.000	1		7.779.000	2		5.199.000	0			1.250.000	-	3		Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen RENJA	2	Dokumen	218.950.000		2	Dokumen	38.565.000	2		30.759.000	0		4.624.000	0			-	-			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen RENSTRA	1	Dokumen	218.950.000		0	Dokumen	38.565.000	0		30.759.000	0		4.624.000	0			-	-			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah Forum SKPD	1	Kali	218.950.000		1	Kali	38.565.000	0		30.759.000	0		4.624.000	0			-	-			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Renstra/Renja	5	Kali	218.950.000		5	Kali	38.565.000	1		30.759.000	3		4.624.000	0			-	-			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	1	Dokumen	23.100.000		1	Dokumen	5.696.000	0		-	1		5.218.000	0			-	-			Satpol PP dan Damkar					
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Jumlah dokumen laporan inventaris barang	4	Dokumen	260.000.000		1	Dokumen	28.200.000	1		5.243.500	0		3.137.000	1			4.900.500	0			SETWAN					
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	4	Dokumen	360.000.000		1	Dokumen	121.850.000	1		19.793.000	0		10.064.000	1			11.381.000	0			SETWAN					
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPDP PD	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi, LPDP, LKIP	24	Dokumen	540.000.000		1	Dokumen	336.705.000	2		39.271.000	1		53.575.000	2			22.876.750	2			SETWAN					
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen renstra dan renja	5	Dokumen	460.000.000		1	Dokumen	26.823.000	0		-	0		5.645.000	2			3.550.000	0			SETWAN					
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Jumlah SOP	1	Dokumen	100.000.000		1	Dokumen	138.300.000	0		25.131.320	1		82.974.000	0			-	0			SETWAN					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							128%	87%			77%	18%	
PREDIKAT KINERJA																							ST	T			T	SR	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATIR	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi;	100;	Persen;	604.825.239.147																							
		FASILITASI PERSURATAN PIMPINAN DAERAH	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	32000	surat	4.775.000.000		32000	surat	1.007.691.000	2445		366.880.677	11459		222.965.164	7007		139.902.624	0			BAG. TATA USAHA						
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah pegawai	250	pegawai	4.450.000.000		250	pegawai	966.147.000	90		69.592.515	48		176.088.340	87		148.569.228	0			BAG. TATA USAHA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab														
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%																
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13=6+12	14=(13/5)x100%	15																									
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Jumlah Bulan	60	Bulan	380.000.000	K	Rp	12	Bulan	91.270.000	3	K	Rp	14.840.000	3	K	Rp	22.539.000	3	K	Rp	21.986.000	0	K	Rp	176.732.080	9	K	Rp	236.097.080	75%	259%	9	K	Rp	236.097.080	15%	62%	BAG. TATA USAHA
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan	12	Bulan	6.250.000.000			12	Bulan	1.316.165.000	3			291.504.835	3			305.180.266	3			247.079.569	0			176.732.080	9			1.020.496.750	75%	78%	9			1.020.496.750	75%	16%	BAG. TATA USAHA
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah paket	0	0	2.614.564.000			0	0	3.341.718.968	2			517.131.536	2			669.534.810	2			569.037.422	0			176.732.080	6			1.932.435.848	0%	58%	6			1.932.435.848	0%	74%	BAG. UMUM DAN PRO
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan	12	Bulan	10.347.621.750			12	Bulan	2.759.280.000	3			406.214.178	3			468.634.791	3			564.694.572	0			176.732.080	9			1.616.275.621	75%	59%	9			1.616.275.621	75%	16%	BAG. UMUM DAN PRO
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah paket	4	Paket	5.667.009.925			4	Paket	997.696.800	1			209.680.320	3			433.817.376	1			68.403.176	0			176.732.080	5			888.632.952	125%	89%	5			888.632.952	125%	16%	BAG. UMUM DAN PRO
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah paket	2	Paket	758.424.000			2	Paket	156.786.550	1			150.822.980	0			-	0			-	0			176.732.080	1			327.555.060	50%	209%	1			327.555.060	50%	43%	BAG. UMUM DAN PRO
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah bulan	3	Unit	518.000.000			3	Unit	138.000.000	2			88.000.000	0			-	0			-	0			176.732.080	2			264.732.080	67%	192%	2			264.732.080	67%	51%	BAG. UMUM DAN PRO
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah orang	42	Orang	6.763.681.000			42	Orang	1.105.541.416	31			329.404.116	31			220.687.696	31			236.329.260	0			176.732.080	93			963.153.152	221%	87%	93			963.153.152	221%	14%	BAG. UMUM DAN PRO
		PENYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK/PENERANGAN KANTOR	Jumlah Paket	2	Paket	1.343.377.000			2	Paket	118.089.500	1			13.338.000	0			37.556.876	0			25.791.504	0			176.732.080	1			253.418.460	50%	215%	1			253.418.460	50%	19%	BAG. UMUM DAN PRO
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah kegiatan	128	Kegiatan	14.813.198.000			128	Kegiatan	3.166.547.400	48			536.552.200	35			1.342.779.162	45			762.176.064	0			176.732.080	128			2.818.239.506	100%	89%	128			2.818.239.506	100%	19%	BAG. UMUM DAN PRO
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	Jumlah paket	4	Paket	2.111.850.000			4	Paket	269.832.104	1			94.704.500	1			21.850.000	0			-	0			176.732.080	2			293.286.580	50%	109%	2			293.286.580	50%	14%	BAG. UMUM DAN PRO
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas	0	Kali	1.446.025.474			0	Kali	302.874.218	42			19.805.000	68			108.505.773	572			116.373.036	0			176.732.080	682			421.415.889	0%	139%	682			421.415.889	0%	29%	Bapenda
		PENATAAN ARSIP DAERAH	jumlah arsip	1000	lembar	693.650.327			1000	lembar	137.184.096	1000			21.727.302	1832			40.197.832	1125			36.476.038	0			176.732.080	3957			275.133.252	396%	201%	3957			275.133.252	396%	40%	Bapenda
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	jumlah kendaraan	37	Unit	2.964.078.348			37	Unit	464.603.382	32			114.920.720	33			131.245.162	364			101.158.800	0			176.732.080	429			524.056.762	1159%	113%	429			524.056.762	1159%	18%	Bapenda
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit	0	Unit	3.742.865.685			4	Unit	70.647.000	0			-	20			34.047.000	6			3.850.000	0			176.732.080	26			214.629.080	650%	304%	26			214.629.080	0%	6%	Bapenda
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	jumlah bulan	12	Bulan	672.579.856			12	Bulan	200.091.386	3			170.988.600	3			15.549.000	3			7.250.000	0			176.732.080	9			370.519.680	75%	185%	9			370.519.680	75%	55%	Bapenda
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	jumlah gudang	1	gudang	609.375.000			1	gudang	60.500.000	1			60.500.000	0			-	0			-	0			176.732.080	1			237.232.080	100%	392%	1			237.232.080	100%	39%	Bapenda
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	jumlah bulan	12	Bulan	53.943.027			12	Bulan	7.664.432	3			1.909.424	3			2.083.008	3			-	0			176.732.080	9			180.724.512	75%	2358%	9			180.724.512	75%	335%	Bapenda
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah bulan	12	Bulan	315.092.898			12	Bulan	69.003.500	3			10.117.220	3			21.472.224	3			17.011.000	0			176.732.080	9			225.332.524	75%	327%	9			225.332.524	75%	72%	Bapenda
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	jumlah bulan	12	Bulan	255.245.603			12	Bulan	23.872.460	3			3.982.263	3			2.597.697	3			4.449.633	0			176.732.080	9			187.761.673	75%	787%	9			187.761.673	75%	74%	Bapenda
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	434.446.736			12	Bulan	68.316.500	3			6.808.000	3			19.166.500	3			12.180.000	0			176.732.080	9			214.886.580	75%	315%	9			214.886.580	75%	49%	Bapenda
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	jumlah bulan	12	Bulan	763.176.899			12	Bulan	115.182.532	3			93.718.257	3			8.204.275	3			6.511.956	0			176.732.080	9			285.166.568	75%	248%	9			285.166.568	75%	37%	Bapenda
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	jumlah set	0	Set	85.854.356			8	Set	16.143.100	1			-	3			7.891.000	2			3.836.000	0			176.732.080	6			188.459.080	75%	1167%	6			188.459.080	0%	220%	Bapenda
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas	30000	perjalanan	6.000.000.000			6000	perjalanan	500.000.000	206			109.565.640	468			127.447.094	300			129.287.015	0			176.732.080	974			543.031.829	16%	109%	974			543.031.829	3%	9%	BAPPEDA
		PENATAAN ARSIP DAERAH	jumlah dokumen arsip aktif dan inaktif	1	Dokumen	125.000.000			1	Dokumen	38.280.000	0			8.845.000	0			9.570.000	0			6.525.000	0			176.732.080	0			201.672.080	0%	527%	0			201.672.080	0%	161%	BAPPEDA
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan yang dipelihara	20	Unit	1.650.000.000			20	Unit	336.940.000	5			71.336.000	0			52.726.000	0			73.660.800	0			176.732.080	8			374.454.880	40%	111%	8			374.454.880	40%	23%	BAPPEDA
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah pengadaan kendaraan	4	Unit	1.650.000.000			4	Unit	336.940.000	0			71.336.000	0			52.726.000	0			73.660.800	0			176.732.080	0			374.454.880	0%	111%	0</						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				5				6		7			8		9		10			11		12		13			13=6+12		14=(13/5)x100%	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4																									15		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah Meja	12	Bulan	464.100.000			12	Bulan	51.000.000	3	1.295.000	3		-	3	3.543.240	0	176.732.080	9	181.570.320	75%	356%	9	181.570.320	75%	39%	BKPSDMD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	jumlah set partisi	12	Bulan	464.100.000			12	Bulan	51.000.000	3	1.295.000	3		-	3	3.543.240	0	176.732.080	9	181.570.320	75%	356%	9	181.570.320	75%	39%	BKPSDMD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit komputer	12	Bulan	696.150.000			12	Bulan	127.500.000	3	7.544.000	3		3.716.500	3	7.350.000	0	176.732.080	9	195.342.580	75%	153%	9	195.342.580	75%	28%	BKPSDMD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit printer	12	Bulan	696.150.000			12	Bulan	127.500.000	3	7.544.000	3		3.716.500	3	7.350.000	0	176.732.080	9	195.342.580	75%	153%	9	195.342.580	75%	28%	BKPSDMD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit server	12	Bulan	696.150.000			12	Bulan	127.500.000	3	7.544.000	3		3.716.500	2	7.350.000	0	176.732.080	8	195.342.580	67%	153%	8	195.342.580	67%	28%	BKPSDMD	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah Bulan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	670.000.000			12	Bulan	150.000.000	3	63.655.955	3		8.604.000	3	60.442.040	0	176.732.080	9	309.434.075	75%	206%	9	309.434.075	75%	46%	BKPSDMD	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	jumlah gudang	12	Bulan	194.922.000			12	Bulan	42.000.000	3	42.000.000	3		-	3	-	0	176.732.080	9	218.732.080	75%	521%	9	218.732.080	75%	112%	BKPSDMD	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	60.000.000			12	Bulan	12.000.000	3	2.598.000	3		2.304.000	3	2.405.000	0	176.732.080	9	184.039.080	75%	1534%	9	184.039.080	75%	307%	BKPSDMD	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	jumlah bulan jasa komunikasi	12	Bulan	194.922.000			12	Bulan	42.000.000	3	7.491.213	3		7.332.843	3	7.300.039	0	176.732.080	9	198.856.175	75%	473%	9	198.856.175	75%	102%	BKPSDMD	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	324.870.000			12	Bulan	54.489.000	3	13.308.900	3		11.632.200	3	11.298.000	0	176.732.080	9	212.971.180	75%	391%	9	212.971.180	75%	66%	BKPSDMD	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN	jumlah bulan penggantian	12	Bulan	580.125.000			12	Bulan	125.000.000	3	42.940.500	3		14.097.250	3	42.591.800	0	176.732.080	9	276.361.630	75%	221%	9	276.361.630	75%	48%	BKPSDMD	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN	jumlah bulan penyediaan media informasi	12	Bulan	580.125.000			12	Bulan	125.000.000	3	42.940.500	3		14.097.250	3	42.591.800	0	176.732.080	9	276.361.630	75%	221%	9	276.361.630	75%	48%	BKPSDMD	
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan dinas	12	Bulan	1.120.000.000			12	Bulan	352.478.360	3	123.202.000	3		46.594.500	3	16.842.500	0	176.732.080	9	363.371.080	75%	103%	9	363.371.080	75%	32%	BPBD	
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas	12	Bulan	530.504.000			12	Bulan	129.060.000	3	30.780.000	3		31.590.000	3	24.300.000	0	176.732.080	9	263.402.080	75%	204%	9	263.402.080	75%	50%	BPBD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah Kendaraan asuransi yang di bayar	19	Unit	5.905.200.000			19	Unit	215.293.600	6	51.009.600	0		26.459.137	0	27.632.398	0	176.732.080	6	281.833.215	32%	131%	6	281.833.215	32%	5%	BPBD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	19	Unit	5.905.200.000			19	Unit	215.293.600	6	51.009.600	6		26.459.137	6	27.632.398	0	176.732.080	18	281.833.215	95%	131%	18	281.833.215	95%	5%	BPBD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19	Unit	5.905.200.000			19	Unit	215.293.600	0	51.009.600	3		26.459.137	0	27.632.398	0	176.732.080	3	281.833.215	16%	131%	3	281.833.215	16%	5%	BPBD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah Pengadaan Kendaraan	19	Unit	5.905.200.000			14	Unit	215.293.600	0	51.009.600	0		26.459.137	0	27.632.398	0	176.732.080	0	281.833.215	0%	131%	0	281.833.215	0%	5%	BPBD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan kantor	12	Bulan	900.400.000			12	Bulan	162.610.000		22.654.000			16.065.000	-	7.409.000	0	176.732.080	0	208.042.080	0%	128%	0	208.042.080	0%	23%	BPBD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	13	Paket	900.400.000			3	Paket	162.610.000		22.654.000			16.065.000	-	7.409.000	0	176.732.080	0	208.042.080	0%	128%	0	208.042.080	0%	23%	BPBD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan kantor	12	Bulan	900.400.000			12	Bulan	162.610.000	3	23.860.000	3		6.950.000	3	500.000	0	176.732.080	9	208.042.080	75%	128%	9	208.042.080	75%	23%	BPBD	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	13	Paket	900.400.000			3	Paket	162.610.000	0	23.860.000	1		6.950.000	1	500.000	0	176.732.080	2	208.042.080	67%	128%	2	208.042.080	15%	23%	BPBD	
		PENGADAAN MEBELEUR	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebeulair Kantor	12	Bulan	715.420.000			12	Bulan	41.738.000	3		-	3		-	3	-	0	176.732.080	9	176.732.080	75%	423%	9	176.732.080	75%	25%	BPBD
		PENGADAAN MEBELEUR	Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor	4	Paket	715.420.000			1	Paket	41.738.000	0		-	0		-	0	-	0	176.732.080	0	176.732.080	0%	423%	0	176.732.080	0%	25%	BPBD
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah Bulan Penyediaan ATK	0	Bulan	152.802.880			12	Bulan	31.427.250	3	15.172.000	3		-	3	14.975.250	0	176.732.080	9	206.879.330	75%	658%	9	206.879.330	0%	135%	BPBD	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah Gudang dan Kantor	2	Unit	1.000.000.000			2	Unit	190.000.000	2	189.000.000	0		-	0	-	0	176.732.080	2	365.732.080	100%	192%	2	365.732.080	100%	37%	BPBD	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Bulan THL yang di asuransikan	12	Bulan	479.880.000			12	Bulan	55.800.000	3	14.586.299	3		8.745.400	3	8.745.600	0	176.732.080	9	208.809.379	75%	374%	9	208.809.379	75%	44%	BPBD	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah Bulan Jasa dan alat Kebersihan Kantor	12	Bulan	303.920.000			12	Bulan	77.053.000							0	176.732.080	0	176.732.080	0%	229%	0	176.732.080	0%	58%	BPBD		
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah Bulan Jasa Air	12	Bulan	177.600.000			12	Bulan	39.600.000	3	5.634.058	3		5.776.066	3	5.360.041	0	176.732.080	9	193.502.245	75%	489%	9	193.502.245	75%	109%	BPBD	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi	12	Bulan	177.600.000			12	Bulan	39.600.000	3	5.634.058	3		5.776.066	3	5.360.041	0	176.732.080	9	193.502.245	75%	489%	9	193.502.245	75%	109%	BPBD	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah Bulan Jasa Listrik	12	Bulan	177.600.000			12	Bulan	39.600.000	3	5.634.058	3		5.776.066	3	5.360.041	0	176.732.080	9	193.502.245	75%	489%	9	193.502.245	75%	109%	BPBD	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12	Bulan	240.000.000			12	Bulan	34.446.000	3	7.748.000	3		5.150.800	3	4.200.000	0	176.732.080	9	193.830.880	75%	563%	9	193.830.880	75%	81%	BPBD	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN	Jumlah Bulan Penggantian	12	Bulan	274.000.000			12	Bulan	38.290.000	3	23.634.800	3		2.433.000	3	3.046.000	0	176										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab							
				5			6		7		8		9		10			11			12			13		13=6+12		14=(13/5)x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	jumlah meja	64	At Coast	1.600.000.000			12	At Coast	66.000.000	0		0	59.392.300	0		0	176.732.080	0	236.124.380	0%	358%	0	236.124.380	0%	15%	BPKAD		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	jumlah set partisi	10		1.600.000.000			3		66.000.000	1		-	0	59.392.300	0		-	0	176.732.080	1	236.124.380	33%	358%	1	236.124.380	10%	15%	BPKAD
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit ac	14	0	1.400.000.000			5	0	131.000.000	0	31.672.550	0	17.760.000	0	19.954.000	0	176.732.080	0	246.118.630	0%	188%	0	246.118.630	0%	18%	BPKAD		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit infokus	5	Unit	1.400.000.000			2	Unit	131.000.000	0	31.672.550	0	17.760.000	0	19.954.000	0	176.732.080	0	246.118.630	0%	188%	0	246.118.630	0%	18%	BPKAD		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit komputer	28	0	1.400.000.000			8	0	131.000.000	0	31.672.550	0	17.760.000	0	19.954.000	0	176.732.080	0	246.118.630	0%	188%	0	246.118.630	0%	18%	BPKAD		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit pemeliharaan peralatan kantor	80	0	1.400.000.000			20	0	131.000.000	1	31.672.550	10	17.760.000	5	19.954.000	0	176.732.080	16	246.118.630	80%	188%	16	246.118.630	20%	18%	BPKAD		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit penghancur kertas	8	Unit	1.400.000.000			2	Unit	131.000.000	0	31.672.550	0	17.760.000	0	19.954.000	0	176.732.080	0	246.118.630	0%	188%	0	246.118.630	0%	18%	BPKAD		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit printer	20	0	1.400.000.000			5	0	131.000.000	0	31.672.550	0	17.760.000	0	19.954.000	0	176.732.080	0	246.118.630	0%	188%	0	246.118.630	0%	18%	BPKAD		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit sever	3	Unit	1.400.000.000			0	Unit	131.000.000	0	31.672.550	0	17.760.000	0	19.954.000	0	176.732.080	0	246.118.630	0%	188%	0	246.118.630	0%	18%	BPKAD		
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan penyediaan ATK	48	Bulan	800.000.000			12	Bulan	80.000.000	3	16.645.000	3	19.615.000	3	19.621.000	0	176.732.080	9	232.613.080	75%	291%	9	232.613.080	19%	29%	BPKAD		
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	jumlah gudang	30	Unit	1.300.000.000			6	Unit	440.000.000	0	-	1	230.000.000	1	39.480.000	0	176.732.080	2	446.212.080	33%	101%	2	446.212.080	7%	34%	BPKAD		
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah bulan jasa kebersihan	48	Bulan	55.000.000			12	Bulan	4.960.000	0	-	0	-	0	-	0	176.732.080	0	176.732.080	0%	3563%	0	176.732.080	0%	321%	BPKAD		
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi	48	Bulan	245.000.000			12	Bulan	27.000.000	3	5.270.773	3	5.376.239	3	5.232.548	0	176.732.080	9	192.611.640	75%	713%	9	192.611.640	19%	79%	BPKAD		
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	48	Bulan	1.200.000.000			12	Bulan	182.750.000	3	24.647.500	3	24.189.000	3	17.875.000	0	176.732.080	9	243.443.580	75%	133%	9	243.443.580	19%	20%	BPKAD		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	jumlah bulan penggandaan	48	Bulan	650.000.000			12	Bulan	84.700.000	3	18.227.000	3	3.220.950	3	18.735.000	0	176.732.080	9	216.915.030	75%	256%	9	216.915.030	19%	33%	BPKAD		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	jumlah bulan penyediaan media informasi	48	Bulan	650.000.000			12	Bulan	84.700.000	3	18.227.000	3	3.220.950	3	18.735.000	0	176.732.080	9	216.915.030	75%	256%	9	216.915.030	19%	33%	BPKAD		
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	11	Bulan	2.871.188.000			11	Bulan	458.321.343	2	131.133.147	3	100.869.000	3	80.483.472	0	176.732.080	8	489.217.699	73%	107%	8	489.217.699	73%	17%	Dinas Pangan		
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Pemeliharaan gedung kantor Dispangan, BBIAT dan Green House	12	Bulan	1.702.720.961			12	Bulan	457.221.265	3	152.095.000	3	35.140.000	3	35.865.000	0	176.732.080	9	399.832.080	75%	87%	9	399.832.080	75%	23%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Pemeliharaan: BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional R 4 3 unit, R2 18 unit, R3 2 unit	12	Bulan	1.848.131.000			12	Bulan	410.534.000	3	83.329.200	3	85.015.925	3	96.232.150	0	176.732.080	9	441.309.355	75%	107%	9	441.309.355	75%	24%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Pengadaan Operasional kendaraan dinas (2 unit Roda 4, Unit Lab Pangan, Pick Up operasional Pertanian) (10 Unit Kendaraan Roda 2)	1	Paket	1.848.131.000			1	Paket	410.534.000	0	83.329.200	0	85.015.925	0	96.232.150	0	176.732.080	0	441.309.355	0%	107%	0	441.309.355	0%	24%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Pengadaan Operasional kendaraan dinas (10 Unit Kendaraan Roda 2)	1	Paket	1.848.131.000			1	Paket	410.534.000	0	83.329.200	0	85.015.925	0	96.232.150	0	176.732.080	0	441.309.355	0%	107%	0	441.309.355	0%	24%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1	Paket	1.848.131.000			1	Paket	410.534.000	1	83.329.200	0	85.015.925	0	96.232.150	0	176.732.080	1	441.309.355	100%	107%	1	441.309.355	100%	24%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Terlaksananya kepengurusan surat-surat berkenaan kendaraan bermotor milik dinas	1	Tahun	1.848.131.000			1	Tahun	410.534.000	1	83.329.200	0	85.015.925	0	96.232.150	0	176.732.080	1	441.309.355	100%	107%	1	441.309.355	100%	24%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Terlaksananya pembelian suku cadang kendaraan dinas R2 14 unit, R3 2 unit R4 3 unit (112.120.000)	1	Tahun	1.848.131.000			1	Tahun	410.534.000	1	83.329.200	0	85.015.925	0	96.232.150	0	176.732.080	1	441.309.355	100%	107%	1	441.309.355	100%	24%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Infokus	1	Unit	411.496.000			1	Unit	126.772.520	0	14.590.000	0	16.610.000	1	17.219.500	0	176.732.080	1	225.151.580	100%	178%	1	225.151.580	100%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah CCTV	1	Set	411.496.000			1	Set	126.772.520	0	14.590.000	0	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	0	225.151.580	0%	178%	0	225.151.580	0%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah diesel	1	Unit	411.496.000			0	Unit	126.772.520	0	14.590.000	0	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	0	225.151.580	0%	178%	0	225.151.580	0%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah fingerprint	2	Unit	411.496.000			2	Unit	126.772.520	0	14.590.000	2	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	2	225.151.580	100%	178%	2	225.151.580	100%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah genset	1	Unit	411.496.000			0	Unit	126.772.520	0	14.590.000	0	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	0	225.151.580	0%	178%	0	225.151.580	0%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Jaringan	1	Set	411.496.000			1	Set	126.772.520	1	14.590.000	0	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	1	225.151.580	100%	178%	1	225.151.580	100%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Laptop	2	Unit	411.496.000			2	Unit	126.772.520	0	14.590.000	0	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	0	225.151.580	0%	178%	0	225.151.580	0%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah mesin potong rumput	1	Unit	411.496.000			1	Unit	126.772.520	0	14.590.000	0	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	0	225.151.580	0%	178%	0	225.151.580	0%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit ac	1	Unit	411.496.000			1	Unit	126.772.520	0	14.590.000	0	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	0	225.151.580	0%	178%	0	225.151.580	0%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit komputer	1	Unit	411.496.000			1	Unit	126.772.520	0	14.590.000	1	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	1	225.151.580	100%	178%	1	225.151.580	100%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit printer	1	Unit	411.496.000			1	Unit	126.772.520	0	14.590.000	0	16.610.000	0	17.219.500	0	176.732.080	0	225.151.580	0%	178%	0	225.151.580	0%	55%	Dinas Pangan		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				5			6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4																						15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Terlaksananya pengadaan materiail Rp. 3000 dan Rp. 6000	2650	buah	554.139.791		K	Rp			500	buah	127.366.650	215	60.900.545	435	62.171.455	0		K	Rp			K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	60	Bulan	369.000.000		12	Bulan	64.197.000	3	31.656.800	3	9.750.000	3	6.475.000	3	10.972.400	12	58.854.200	100%	92%	12		58.854.200	20%	16%	DinsosPP
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan media massa, fasilitas cetak dan penggandaan	630	Kali	1.424.598.025		150	Kali	330.474.600	0	42.023.218	0	88.039.369	0	74.460.200	0	122.338.674	0	326.861.461	0%	99%	0		326.861.461	0%	23%	Disbudparpora
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan caraka	1500	Kali	1.424.598.025		300	Kali	330.474.600	50	42.023.218	50	88.039.369	50	74.460.200	150	122.338.674	300	326.861.461	100%	99%	300		326.861.461	20%	23%	Disbudparpora
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan dinas	48	Bulan	492.720.000		12	Bulan	49.020.000	3	15.025.400	3	7.290.000	3	8.811.000	3	16.668.850	12	47.795.250	100%	98%	12		47.795.250	25%	10%	Disbudparpora
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	jumlah bulan pemeliharaan	12	Dokumen	498.613.975		3	Dokumen	53.903.710	1	8.985.000	0	8.040.000	0	6.075.000	2	25.513.900	3	48.613.900	100%	90%	3		48.613.900	25%	10%	Disbudparpora
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	73	Unit	3.001.615.000		11	Unit	271.615.000	11	82.529.625	11	50.943.000	11	37.398.000	0	62.161.500	33	233.032.125	300%	86%	33		233.032.125	45%	8%	Disbudparpora
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	jumlah kendaraan yang dipelihara	73	Unit	3.001.615.000		11	Unit	271.615.000	11	82.529.625	11	50.943.000	11	37.398.000	0	62.161.500	33	233.032.125	300%	86%	33		233.032.125	45%	8%	Disbudparpora
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	jumlah pengadaan kendaraan	22	Unit	3.001.615.000		4	Unit	271.615.000	0	82.529.625	0	50.943.000	0	37.398.000	0	62.161.500	0	233.032.125	0%	86%	0		233.032.125	0%	8%	Disbudparpora
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit ac	20	Unit	1.705.800.000		5	Unit	105.800.000	0	82.166.400	0	8.400.000	0	-	0	12.995.000	0	103.561.400	0%	98%	0		103.561.400	0%	6%	Disbudparpora
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit komputer	12	Unit	1.705.800.000		3	Unit	105.800.000	0	82.166.400	0	8.400.000	0	-	0	12.995.000	0	103.561.400	0%	98%	0		103.561.400	0%	6%	Disbudparpora
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit printer	8	Unit	1.705.800.000		2	Unit	105.800.000	0	82.166.400	0	8.400.000	0	-	0	12.995.000	0	103.561.400	0%	98%	0		103.561.400	0%	6%	Disbudparpora
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit server	4	Unit	1.705.800.000		1	Unit	105.800.000	0	82.166.400	1	8.400.000	0	-	0	12.995.000	1	103.561.400	100%	98%	1		103.561.400	25%	6%	Disbudparpora
		PENGADAAN MEBELEUR	jumlah kursi	100	Set	920.750.000		50	Set	180.000.000	0	178.934.000	0	-	0	-	0	178.934.000	0%	99%	0		178.934.000	0%	19%	Disbudparpora		
		PENGADAAN MEBELEUR	jumlah lemari	8	At Coast	920.750.000		3	At Coast	180.000.000	0	178.934.000	0	-	0	-	0	178.934.000	0%	99%	0		178.934.000	0%	19%	Disbudparpora		
		PENGADAAN MEBELEUR	jumlah meja	30	Set	920.750.000		0	Set	180.000.000	0	178.934.000	0	-	0	-	0	178.934.000	0%	99%	0		178.934.000	0%	19%	Disbudparpora		
		PENGADAAN MEBELEUR	jumlah set partisi	2	Set	920.750.000		1	Set	180.000.000	1	178.934.000	1	-	1	-	0	178.934.000	300%	99%	3		178.934.000	150%	19%	Disbudparpora		
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	jumlah bulan penyediaan ATK	60	Bulan	329.795.400		12	Bulan	73.313.490	3	22.007.000	3	660.000	3	22.172.000	3	27.377.800	12	72.216.800	100%	99%	12		72.216.800	20%	22%	Disbudparpora
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	jumlah gudang	4	At Coast	700.000.000		1	At Coast	50.000.000	1	49.830.000	0	-	0	-	0	49.830.000	100%	100%	1		49.830.000	25%	7%	Disbudparpora		
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	jumlah bulan THL yang diasuransikan	48	Bulan	69.900.000		12	Bulan	6.900.000	0	-	2	300.000	7	450.000	3	600.000	12	1.350.000	100%	20%	12		1.350.000	25%	2%	Disbudparpora
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah bulan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	169.520.500		12	Bulan	42.078.740	3	10.235.000	3	9.155.000	3	6.075.000	3	15.533.740	12	40.998.740	100%	97%	12		40.998.740	20%	24%	Disbudparpora
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	jumlah bulan jasa komunikasi	60	Bulan	268.600.000		12	Bulan	25.500.000	3	9.548.307	3	3.553.027	3	3.773.797	3	3.728.074	12	20.603.205	100%	81%	12		20.603.205	20%	8%	Disbudparpora
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	jumlah bulan jasa listrik	60	Bulan	268.600.000		12	Bulan	25.500.000	3	9.548.307	3	3.553.027	3	3.773.797	3	3.728.074	12	20.603.205	100%	81%	12		20.603.205	20%	8%	Disbudparpora
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	60	Bulan	309.860.000		12	Bulan	63.146.400	3	16.536.900	3	14.036.600	3	16.536.600	3	14.285.700	12	61.395.800	100%	97%	12		61.395.800	20%	20%	Disbudparpora
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	jumlah bulan penggandaan	60	Bulan	560.365.000		12	Bulan	82.275.000	3	6.480.000	3	30.210.000	3	4.750.000	3	36.520.000	12	77.960.000	100%	95%	12		77.960.000	20%	14%	Disbudparpora
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	jumlah bulan penyediaan media informasi	60	Bulan	560.365.000		12	Bulan	82.275.000	3	6.480.000	3	30.210.000	3	4.750.000	3	36.520.000	12	77.960.000	100%	95%	12		77.960.000	20%	14%	Disbudparpora
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	jumlah set peralatan rumah tangga	8	Set	149.734.000		2	Set	27.565.500	2	21.236.000	0	-	0	-	0	6.325.000	2	27.561.000	100%	100%	2		27.561.000	25%	18%	Disbudparpora
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan Dinas, Jumlah Perjalanan Caraka	2270	Orang	2.000.000.000		454	Orang	400.000.000	0	35.067.500	143	51.829.069	300	89.867.472		203.041.374	443	379.805.415	98%	95%	443		379.805.415	20%	19%	Disdik
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	jumlah pengadaan kendaraan, jumlah kendaraan yang dipelihara dan jumlah asuransi kendaraan yang dibayar	0	Bulan	1.769.396.000		0	Bulan	276.798.976	3	60.554.400	3	57.195.600	3	46.467.500		70.636.840	9	234.854.340	0%	85%	9		234.854.340	0%	13%	Disdik
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	Jumlah meja, jumlah kursi, jumlah lemari, jumlah set partisi	0	0	153.802.250		0	0	167.500.000	0	-	0	-	0	-		149.410.600	0	89%	0		149.410.600	0%	97%	Disdik		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit komputer, jumlah unit printer, jumlah unit server, jumlah unit AC	0	0	356.380.000		0	0	485.250.000	0	-	26	12.650.000	0	21.825.000		414.934.500	26	449.409.500	0%	93%	26		449.409.500	0%	126%	Disdik
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan penyediaan ATK	60	Bulan	1.444.859.828		12	Bulan	205.205.302	3	195.330.550	3	2.040.000	3	2.040.000		1.470.000	9	200.880.550	75%	98%	9		200.880.550	15%	14%	Disdik
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah Gudang	1	Unit	220.000.000		1	Unit	55.000.000	1	45.000.000	1	-	0	-	-	2	45.000.000	200%	82%	2		45.000.000	200%	20%	Disdik	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Bulan THL yang diasuransikan	48	Bulan	24.480.000		12	Bulan	383.120.000	3	-	3	54.210.000	3	98.700.000		90.300.000	9	243.210.000	75%	63%	9		243.210.000	19%	994%	Disdik
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	773.782.865		12	Bulan	46.189.100	3	10.468.946	3	9.923.253	3	8.775.000		13.347.200	9	42.514.399	75%	92%	9		42.514.399	15%	5%	Disdik
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi, jumlah bulan jasa listrik dan jumlah bulan jasa air	60	Bulan	490.850.040		12	Bulan	38.033.600	3	3.317.249	3	3.564.018	3	5.591.478		4.060.815	9	16.533.560	75%	43%	9		16.533.560	15%	3%	Disdik
		PENYEDIAAN MAK																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				5			6			7			8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	300	Unit	475.910.000				60	Unit	45.662.000	0		-	60	10.782.000	60		-	60	25.390.000	180	36.172.000	300%	79%	180		36.172.000	60%	8%	DisdukCapil	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	Jumlah Pengadaan	16	Paket	475.910.000				3	Paket	45.662.000	0		-	1	10.782.000	3		-	3	25.390.000	7	36.172.000	233%	79%	7		36.172.000	44%	8%	DisdukCapil	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	Jumlah set Partisi	11	Set	475.910.000				2	Set	45.662.000	0		-	0	10.782.000	0		-	0	25.390.000	0	36.172.000	0%	79%	0		36.172.000	0%	8%	DisdukCapil	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Pengadaan	16	Paket	3.307.500.000				3	Paket	424.425.000	0		3.400.000	2	173.900.000	3		3.600.000	3	211.297.900	8	392.197.900	267%	92%	8		392.197.900	50%	12%	DisdukCapil	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Komputer	75	Unit	3.307.500.000				6	Unit	424.425.000	0		3.400.000	6	173.900.000	6		3.600.000	6	211.297.900	18	392.197.900	300%	92%	18		392.197.900	24%	12%	DisdukCapil	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Printer	70	Unit	3.307.500.000				5	Unit	424.425.000	0		3.400.000	5	173.900.000	5		3.600.000	5	211.297.900	15	392.197.900	300%	92%	15		392.197.900	21%	12%	DisdukCapil	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Server	11	Unit	3.307.500.000				1	Unit	424.425.000	0		3.400.000	1	173.900.000	1		3.600.000	1	211.297.900	3	392.197.900	300%	92%	3		392.197.900	27%	12%	DisdukCapil	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah Bulan Penyediaan ATK	60	Bulan	1.735.734.000				12	Bulan	335.899.500	3		109.161.500	6	216.738.000	9		-	12	9.900.000	30	335.799.500	250%	100%	30		335.799.500	50%	19%	DisdukCapil	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah Gudang	1	Unit	313.065.000				1	Unit	65.000.000	0		-	0		-	0		-	1	65.000.000	1	65.000.000	100%	100%	1		65.000.000	100%	21%	DisdukCapil
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah Bulan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	422.331.000				12	Bulan	80.556.527	3		19.726.499	6	18.326.252	9		21.154.280	12	20.026.480	30	79.233.511	250%	98%	30		79.233.511	50%	19%	DisdukCapil	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi dan Listrik	60	Bulan	61.692.000				12	Bulan	9.600.000	3		1.411.163	6	1.592.613	9		2.053.634	12	2.748.028	30	7.805.438	250%	81%	30		7.805.438	50%	13%	DisdukCapil	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah Bulan penyediaan mamin	60	Bulan	339.650.000				12	Bulan	55.425.900	3		11.132.600	6	11.693.300	9		15.178.600	12	10.833.300	30	48.837.800	250%	88%	30		48.837.800	50%	14%	DisdukCapil	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan jasa komunikasi	60	Bulan	2.853.500.000				12	Bulan	407.311.485	3		9.950.000	6	338.586.985	9		14.065.235	12	35.723.985	30	398.326.205	250%	98%	30		398.326.205	50%	14%	DisdukCapil	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan jasa listrik	60	Bulan	2.853.500.000				12	Bulan	407.311.485	3		9.950.000	6	338.586.985	9		14.065.235	12	35.723.985	30	398.326.205	250%	98%	30		398.326.205	50%	14%	DisdukCapil	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah set Peralatan Rumah Tangga	69	Set	93.700.000				15	Set	15.000.000	15		15.000.000	15	-	15		-	15	-	60	15.000.000	400%	100%	60		15.000.000	87%	16%	DisdukCapil	
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan dinas	12	Bulan	2.183.000.000				12	Bulan	360.000.000	3		92.392.847	3	53.279.213	3		88.180.594	3	110.065.435	12	343.918.089	100%	96%	12		343.918.089	100%	16%	DISHUB	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah Kendaraan asuransi yang di bayar	55	Unit	11.920.000.000				46	Unit	1.478.505.000	22		133.576.556	0	286.693.782	0		144.307.599	11	237.075.308	33	801.653.245	72%	54%	33		801.653.245	60%	7%	DISHUB	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	55	Unit	11.920.000.000				46	Unit	1.478.505.000	46		133.576.556	46	286.693.782	46		144.307.599	0	237.075.308	138	801.653.245	300%	54%	138		801.653.245	251%	7%	DISHUB	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	55	Unit	11.920.000.000				43	Unit	1.478.505.000	5		133.576.556	0	286.693.782	5		144.307.599	0	237.075.308	10	801.653.245	23%	54%	10		801.653.245	18%	7%	DISHUB	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	Jumlah Meja, Jumlah Kursi, Jumlah Lemari	12	Bulan	1.143.250.000				12	Bulan	28.500.000	3		-	3	-	3		5.558.000	3	-	12	5.558.000	100%	20%	12		5.558.000	100%	0%	DISHUB	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit komputer, printer server, AC	12	Bulan	2.145.250.000				12	Bulan	173.850.000	3		4.454.000	3	3.571.125	3		2.956.000	3	90.768.050	12	101.749.175	100%	59%	12		101.749.175	100%	5%	DISHUB	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	301.065.000				12	Bulan	60.734.000	3		12.186.250	3	11.828.750	3		11.178.875	3	18.367.375	12	53.561.250	100%	88%	12		53.561.250	100%	18%	DISHUB	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	jumlah gudang	1	Tahun	4.550.129.320				1	Tahun	127.812.000	1		47.000.000	0	-	0		-	0	76.990.000	1	123.990.000	100%	97%	1		123.990.000	100%	3%	DISHUB	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah bulan jasa penyediaan kebersihan kantor	12	Bulan	470.432.200				12	Bulan	84.589.200	3		15.598.270	3	18.568.500	3		16.875.000	3	28.283.000	12	79.324.770	100%	94%	12		79.324.770	100%	17%	DISHUB	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah Bulan Jasa Air	12	Bulan	55.899.985.952				12	Bulan	8.184.311.150	3		1.782.893.937	3	1.854.736.441	3		1.846.563.810	3	1.859.808.447	12	7.344.002.635	100%	90%	12		7.344.002.635	100%	13%	DISHUB	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi	12	Bulan	55.899.985.952				12	Bulan	8.184.311.150	3		1.782.893.937	3	1.854.736.441	3		1.846.563.810	3	1.859.808.447	12	7.344.002.635	100%	90%	12		7.344.002.635	100%	13%	DISHUB	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah Bulan Jasa Listrik	12	Bulan	55.899.985.952				12	Bulan	8.184.311.150	3		1.782.893.937	3	1.854.736.441	3		1.846.563.810	3	1.859.808.447	12	7.344.002.635	100%	90%	12		7.344.002.635	100%	13%	DISHUB	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	248.604.800				12	Bulan	46.320.000	3		6.040.000	3	4.800.000	3		6.000.000	3	16.320.000	12	33.160.000	100%	72%	12		33.160.000	100%	13%	DISHUB	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Bulan Cetakan	12	Bulan	4.235.689.600				12	Bulan	714.044.000	3		3.195.500	3	438.572.300	3		8.265.000	3	18.277.400	12	468.310.200	100%	66%	12		468.310.200	100%	11%	DISHUB	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Bulan Penggandaan	12	Bulan	4.235.689.600				12	Bulan	714.044.000	3		3.195.500	3	438.572.300	3		8.265.000	3	18.277.400	12	468.310.200	100%	66%	12		468.310.200	100%	11%	DISHUB	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Penyediaan Media Informasi	12	Bulan	4.235.689.600				12	Bulan	714.044.000	3		3.195.500	3	438.572.300	3		8.265.000	3	18.277.400	12	468.310.200	100%	66%	12		468.310.200	100%	11%	DISHUB	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	jumlah set peralatan rumah tangga	12	Bulan	415.000.000		</																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %	Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11					12			13		13=6+12	14=(13/5)x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp		K	Rp
1	2	3	4																					15				
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah gudang	1	Gudang	146.000.000		K	Rp	2	Gudang	43.824.000	1	40.923.000	0	-	0	-	1	40.923.000	50%	93%	1		40.923.000	100%	28%	Diskominfo
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi	12	Bulan	248.004.593		12	Bulan	22.020.000	3	1.298.000	3	2.725.771	3	1.837.500		3.703.505	9	9.564.776	75%	43%	9		9.564.776	75%	4%	Diskominfo
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	736.640.405		12	Bulan	82.524.500	3	13.513.400	3	24.007.750	3	16.652.000		26.908.800	9	81.081.950	75%	98%	9		81.081.950	75%	11%	Diskominfo
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12	Bulan	189.645.500		12	Bulan	31.560.300	3	9.059.010	3	8.859.000	3	4.459.900		5.778.000	9	28.155.910	75%	89%	9		28.155.910	75%	15%	Diskominfo
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah set peralatan rumah tangga	1	Paket	41.769.000		1	Paket	8.834.000	0	937.400	1	1.192.000	0	1.273.000		5.431.500	1	8.833.900	100%	100%	1		8.833.900	100%	21%	Diskominfo
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas	36	Perjalanan Dinas	1.522.720.000		36	Perjalanan Dinas	521.147.775	40	58.691.000	69	55.303.500	24	61.391.500	173	330.158.855	306	505.544.855	850%	97%	306		505.544.855	850%	33%	Disnaker
		PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Jumlah gudang kantor	1	Unit	600.000.000		1	Unit	98.286.000	1	16.997.000	1	28.890.000	1	24.433.000	1	23.276.000	4	93.596.000	400%	95%	4		93.596.000	400%	16%	Disnaker
		PENATAAN ARSIP DAERAH	Jumlah arsip aktif dan inaktif	25	Arsip	30.000.000		25	Arsip	7.500.000	0	-	25	783.000	0	992.000	25	4.206.000	50	5.981.000	200%	80%	50		5.981.000	200%	20%	Disnaker
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah asuransi kendaraan yang dibayar	13	Unit	2.905.184.500		12	Unit	239.546.500	7	44.255.675	2	62.173.150	0	49.467.000	10	55.709.875	19	211.605.700	158%	88%	19		211.605.700	146%	7%	Disnaker
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan yang dipelihara	13	Unit	2.905.184.500		12	Unit	239.546.500	1	44.255.675	2	62.173.150	2	49.467.000	11	55.709.875	16	211.605.700	133%	88%	16		211.605.700	123%	7%	Disnaker
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah pengadaan kendaraan	4	Unit	2.905.184.500		1	Unit	239.546.500	0	44.255.675	0	62.173.150	0	49.467.000	0	55.709.875	0	211.605.700	0%	88%	0		211.605.700	0%	7%	Disnaker
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah AC	7	Unit	278.125.000		5	Unit	60.000.000	0	245.000	0	47.375.000	0	500.000	0	10.215.000	0	58.335.000	0%	97%	0		58.335.000	0%	21%	Disnaker
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah server	2	Unit	278.125.000		2	Unit	60.000.000	0	245.000	0	47.375.000	0	500.000	0	10.215.000	0	58.335.000	0%	97%	0		58.335.000	0%	21%	Disnaker
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit komputer	45	Unit	278.125.000		40	Unit	60.000.000	0	245.000	0	47.375.000	0	500.000	0	10.215.000	0	58.335.000	0%	97%	0		58.335.000	0%	21%	Disnaker
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit printer	25	Unit	278.125.000		15	Unit	60.000.000	4	245.000	0	47.375.000	0	500.000	11	10.215.000	15	58.335.000	100%	97%	15		58.335.000	60%	21%	Disnaker
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan penyediaan ATK	12	Bulan	98.005.414.500		12	Bulan	64.028.000	3	31.596.000	3	-	3	29.865.000	12	1.200.000	21	62.661.000	175%	98%	21		62.661.000	175%	0%	Disnaker
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah gudang	1	Unit	595.080.000		1	Unit	115.295.000	1	71.065.000	1	11.307.500	1	9.045.000	1	10.032.500	4	101.450.000	400%	88%	4		101.450.000	400%	17%	Disnaker
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah bulan jasa kebersihan	12	Bulan	197.029.600		12	Bulan	43.675.000	3	7.076.000	3	12.803.000	3	10.644.000	12	10.909.000	21	41.432.000	175%	95%	21		41.432.000	175%	21%	Disnaker
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa air	12	Bulan	287.550.000		12	Bulan	14.700.000	3	1.724.615	3	1.861.616	3	2.210.300	12	2.378.183	21	8.174.714	175%	56%	21		8.174.714	175%	3%	Disnaker
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi	12	Bulan	287.550.000		12	Bulan	14.700.000	3	1.724.615	3	1.861.616	3	2.210.300	12	2.378.183	21	8.174.714	175%	56%	21		8.174.714	175%	3%	Disnaker
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa listrik	12	Bulan	287.550.000		12	Bulan	14.700.000	3	1.724.615	3	1.861.616	3	2.210.300	12	2.378.183	21	8.174.714	175%	56%	21		8.174.714	175%	3%	Disnaker
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penggandaan	12	Bulan	444.184.600		12	Bulan	64.318.000	3	41.823.000	3	6.133.600	3	5.935.000	12	9.355.000	21	63.246.600	175%	98%	21		63.246.600	175%	14%	Disnaker
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12	Bulan	444.184.600		12	Bulan	64.318.000	3	41.823.000	3	6.133.600	3	5.935.000	12	9.355.000	21	63.246.600	175%	98%	21		63.246.600	175%	14%	Disnaker
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas	480	Hari	1.050.000.000		120	Hari	601.156.058	30	212.941.880	30	56.018.000	30	92.234.999	30	227.555.785	120	588.750.664	100%	98%	120		588.750.664	25%	56%	DispenmoPTSP
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan	48	Bulan	25.000.000		12	Bulan	5.000.000	3	1.500.000	3	1.750.000	3	-	3	1.559.000	12	4.809.000	100%	96%	12		4.809.000	25%	19%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah asuransi kendaraan yang dibayar	82	Unit	2.853.625.000		19	Unit	387.655.000	16	90.025.275	0	73.567.000	1	69.318.380	1	93.014.300	18	325.924.955	95%	84%	18		325.924.955	22%	11%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan penyediaan BBM dan pelumas	48	Bulan	2.853.625.000		12	Bulan	387.655.000	3	90.025.275	3	73.567.000	3	69.318.380	3	93.014.300	12	325.924.955	100%	84%	12		325.924.955	25%	11%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan tenaga supir	48	Bulan	2.853.625.000		12	Bulan	387.655.000	3	90.025.275	3	73.567.000	3	69.318.380	3	93.014.300	12	325.924.955	100%	84%	12		325.924.955	25%	11%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan yang dipelihara	82	Unit	2.853.625.000		19	Unit	387.655.000	5	90.025.275	4	73.567.000	3	69.318.380	5	93.014.300	17	325.924.955	89%	84%	17		325.924.955	21%	11%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah pengadaan kendaraan	6	Unit	2.853.625.000		3	Unit	387.655.000	0	90.025.275	0	73.567.000	0	69.318.380	0	93.014.300	0	325.924.955	0%	84%	0		325.924.955	0%	11%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah anjungan informasi mandiri	1	Unit	2.621.563.400		0	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0		73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah anti virus	4	Set	2.621.563.400		1	Set	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0		73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit AC	2	Unit	2.621.563.400		1	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0		73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit distance meter	5	Unit	2.621.563.400		1	Unit	95.900.000	0	5.980.000	1	21.965.480	0	8.695.000												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				5			6			7			8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%					
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K		Rp		
1	2	3	4																										15			
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit printer kartu	1	Unit	2.621.563.400				K	Rp		1	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0	73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit scanner	19	Unit	2.621.563.400							6	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0	73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit server	1	Unit	2.621.563.400				1	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0	73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit tablet	8	Unit	2.621.563.400				2	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0	73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit TV/Monitor	5	Unit	2.621.563.400				2	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0	73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah external harddisk	1	Unit	2.621.563.400				0	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0	73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Pemeliharaan AC	40	Unit	2.621.563.400				9	Unit	95.900.000	0	5.980.000	3	21.965.480	1	8.695.000	0	37.275.000	4	73.915.480	44%	77%	4	73.915.480	10%	3%	DispenmoPTSP			
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Pemeliharaan Billboard	80	Unit	2.621.563.400				20	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	20	37.275.000	20	73.915.480	100%	77%	20	73.915.480	25%	3%	DispenmoPTSP			
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Pemeliharaan komputer	40	Unit	2.621.563.400				10	Unit	95.900.000	0	5.980.000	2	21.965.480	0	8.695.000	4	37.275.000	6	73.915.480	60%	77%	6	73.915.480	15%	3%	DispenmoPTSP			
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Pemeliharaan mesin antrian	3	Unit	2.621.563.400				0	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0	73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP			
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Pemeliharaan printer	160	Unit	2.621.563.400				40	Unit	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	7	8.695.000	27	37.275.000	34	73.915.480	85%	77%	34	73.915.480	21%	3%	DispenmoPTSP			
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Set peralatan jaringan dan perlengkapan ruang server	2	Set	2.621.563.400				1	Set	95.900.000	0	5.980.000	0	21.965.480	0	8.695.000	0	37.275.000	0	73.915.480	0%	77%	0	73.915.480	0%	3%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan jasa komunikasi	48	Bulan	541.664.200				12	Bulan	151.430.400	3	72.144.075	3	72.961.000	3	600.000	3	1.200.000	12	146.905.075	100%	97%	12	146.905.075	25%	27%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah gudang	8	Unit	440.000.000				2	Unit	152.900.000	0	17.690.000	1	51.600.000	0	18.560.000	0	64.650.000	1	152.500.000	50%	100%	1	152.500.000	13%	35%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	684	Bulan	125.000.000				156	Bulan	24.960.000	39	3.662.222	39	3.876.816	39	4.564.512	39	5.606.016	156	17.709.566	100%	71%	156	17.709.566	23%	14%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Bulan jasa kebersihan kantor	48	Bulan	72.000.000				12	Bulan	51.000.000	3	16.185.000	3	5.400.000	3	8.640.000	3	19.120.000	12	49.345.000	100%	97%	12	49.345.000	25%	69%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa fax/internet	48	Bulan	183.000.000				12	Bulan	34.800.000	3	3.581.002	3	2.655.251	3	4.090.860	3	5.514.934	12	15.842.047	100%	46%	12	15.842.047	25%	9%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi	48	Bulan	183.000.000				12	Bulan	34.800.000	3	3.581.002	3	2.655.251	3	4.090.860	3	5.514.934	12	15.842.047	100%	46%	12	15.842.047	25%	9%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa listrik	48	Bulan	183.000.000				12	Bulan	34.800.000	3	3.581.002	3	2.655.251	3	4.090.860	3	5.514.934	12	15.842.047	100%	46%	12	15.842.047	25%	9%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	48	Bulan	576.015.000				12	Bulan	52.050.000	3	7.743.000	3	6.134.000	3	6.649.000	3	13.470.000	12	33.996.000	100%	65%	12	33.996.000	25%	6%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan langganan bahan bacaan	48	Bulan	60.000.000				12	Bulan	196.440.000	3	69.471.000	3	69.313.000	3	6.340.000	3	28.450.500	12	173.574.500	100%	88%	12	173.574.500	25%	289%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan pengadaan	48	Bulan	60.000.000				12	Bulan	196.440.000	3	69.471.000	3	69.313.000	3	6.340.000	3	28.450.500	12	173.574.500	100%	88%	12	173.574.500	25%	289%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan	48	Bulan	60.000.000				12	Bulan	196.440.000	3	69.471.000	3	69.313.000	3	6.340.000	3	28.450.500	12	173.574.500	100%	88%	12	173.574.500	25%	289%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan cinderamata	48	Bulan	60.000.000				12	Bulan	196.440.000	3	69.471.000	3	69.313.000	3	6.340.000	3	28.450.500	12	173.574.500	100%	88%	12	173.574.500	25%	289%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan media massa	48	Bulan	60.000.000				12	Bulan	196.440.000	3	69.471.000	3	69.313.000	3	6.340.000	3	28.450.500	12	173.574.500	100%	88%	12	173.574.500	25%	289%	DispenmoPTSP			
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah set peralatan rumah tangga	21	Set	18.000.000				4	Set	5.000.000	0	-	0	-	1	4.500.000	0	-	1	4.500.000	25%	90%	1	4.500.000	5%	25%	DispenmoPTSP			
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah bulan caraka	48	Bulan	1.437.000.000				12	Bulan	200.000.000	3	36.485.488	3	45.000.031	3	56.488.820	12	59.250.523	21	197.224.862	175%	99%	21	197.224.862	44%	14%	DLH			
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	48	Bulan	1.437.000.000				12	Bulan	200.000.000	3	36.485.488	3	45.000.031	3	56.488.820	12	59.250.523	21	197.224.862	175%	99%	21	197.224.862	44%	14%	DLH			
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah bulan penyediaan jasa pengamanan kantor dan rumah dinas	60	Bulan	372.427.000				12	Bulan	86.142.200	3	8.249.850	3	7.202.250	3	8.642.700	12	18.109.258	21	42.204.058	175%	49%	21	42.204.058	35%	11%	DLH			
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah gedung yang diasuransikan	1	Unit	372.427.000				1	Unit	86.142.200	0	8.249.850	0	7.202.250	0	8.642.700	1	18.109.258	1	42.204.058	100%	49%	1	42.204.058	100%	11%	DLH			
		PENATAAN ARSIP DAERAH	Jumlah arsip aktif dan inaktif	0	0	271.400.000				0		65.513.800	0	15.010.750	0	8.327.450	0	15.393.900	0	16.538.500	0	55.270.600	0%	84%	0	55.270.600	0%	20%	DLH			
		PENATAAN ARSIP DAERAH	Jumlah bulan jasa tenaga harian lepas administrasi kepegawaian dan surat menyurat	60	Bulan	271.400.000				12	Bulan	65.513.800	3	15.010.750	3	8.327.450	9	15.393.900	12	16.538.500	27	55.270.600	225%	84%	27	55.270.600	45%	20%	DLH			
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas	48	Bulan	56.471.000.000				12	Bulan	6.450.500.000	3	1.365.992.6																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4																					15												
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan telepon, sewa repeater, air dan listrik	60	Bulan	586.440.000			12	Bulan	122.515.000	3		16.349.729	3		21.315.003	3		13.701.356	12		50.168.072	21		101.534.160	175%	83%	21		101.534.160	35%	17%	DLH		
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	48	Bulan	245.000.000			12	Bulan	49.610.000	3		10.909.500	3		9.662.500	3		11.386.000	12		15.231.000	21		47.189.000	175%	95%	21		47.189.000	44%	19%	DLH		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	691.250.000			12	Bulan	113.010.000	3		73.052.500	3		9.017.500	3		8.760.000	12		7.454.000	21		98.284.000	175%	87%	21		98.284.000	35%	14%	DLH		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan media informasi	60	Bulan	691.250.000			12	Bulan	113.010.000	3		73.052.500	3		9.017.500	3		8.760.000	12		7.454.000	21		98.284.000	175%	87%	21		98.284.000	35%	14%	DLH		
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah set peralatan rumah tangga	4	Set	102.500.000			1	Set	10.762.000	1		2.762.000	0		- 0		- 1		7.942.000	2		10.704.000	200%	99%	2		10.704.000	50%	10%	DLH				
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan caraka	60	Bulan	1.306.003.040			12	Bulan	503.392.913	3		109.445.529	3		102.819.500	3		135.529.676	3		151.251.595	12		499.046.300	100%	99%	12		499.046.300	20%	38%	DPKP		
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas	60	Bulan	1.306.003.040			12	Bulan	503.392.913	3		109.445.529	3		102.819.500	3		135.529.676	3		151.251.595	12		499.046.300	100%	99%	12		499.046.300	20%	38%	DPKP		
		PENATAAN ARSIP DAERAH	Jumlah arsip aktif dan inaktif	2000	Arsip	155.806.000			0	Arsip	112.367.980	0		25.884.759	0		22.417.304	0		17.613.596	0		40.703.463	0		106.619.122	0%	95%	0		106.619.122	0%	68%	DPKP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	79	Unit	6.163.270.082			78	Unit	3.118.088.092	72		350.952.199	0		397.375.660	0		268.220.320	0		1.572.715.284	72		2.589.263.463	92%	83%	72		2.589.263.463	91%	42%	DPKP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan yang dipelihara	79	Unit	6.163.270.082			78	Unit	3.118.088.092	72		350.952.199	0		397.375.660	0		268.220.320	0		1.572.715.284	72		2.589.263.463	92%	83%	72		2.589.263.463	91%	42%	DPKP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah pengadaan kendaraan	79	Unit	6.163.270.082			5	Unit	3.118.088.092	0		350.952.199	0		397.375.660	0		268.220.320	0		1.572.715.284	0		2.589.263.463	0%	83%	0		2.589.263.463	0%	42%	DPKP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELUR KANTOR	Jumlah kursi	25	Unit	50.000.000			25	Unit	63.500.000	25		- 0		- 0		- 25		62.335.000	50		62.335.000	200%	98%	50		62.335.000	200%	125%	DPKP					
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit AC	15	Unit	90.000.000			15	Unit	79.410.740	4		9.441.621	0		13.932.552	1		10.579.148	3		41.684.148	8		75.637.469	53%	95%	8		75.637.469	53%	84%	DPKP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit komputer	15	Unit	90.000.000			15	Unit	79.410.740	2		9.441.621	0		13.932.552	3		10.579.148	5		41.684.148	10		75.637.469	67%	95%	10		75.637.469	67%	84%	DPKP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit printer	15	Unit	90.000.000			15	Unit	79.410.740	3		9.441.621	2		13.932.552	2		10.579.148	3		41.684.148	10		75.637.469	67%	95%	10		75.637.469	67%	84%	DPKP		
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah Bulan Penyediaan ATK	60	Bulan	333.873.540			12	Bulan	79.513.000	3		54.009.000	3		5.700.000	3		5.700.000	3		13.200.000	12		78.609.000	100%	99%	12		78.609.000	20%	24%	DPKP		
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah gudang	5	Unit	2.000.000.000			5	Unit	240.000.000	1		78.000.000	1		- 0		- 0		75.000.000	2		153.000.000	40%	64%	2		153.000.000	40%	8%	DPKP				
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	60	Bulan	1.921.360.000			12	Bulan	266.636.838	3		45.784.826	3		47.969.141	3		49.183.894	3		49.986.973	12		192.924.834	100%	72%	12		192.924.834	20%	13%	DPKP		
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	133.252.800			12	Bulan	39.463.620	3		9.164.365	3		8.092.376	3		5.859.945	3		15.029.945	12		38.146.631	100%	97%	12		38.146.631	20%	29%	DPKP		
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi	60	Bulan	5.967.397.800			12	Bulan	1.247.400.000	3		248.521.125	3		249.657.809	3		245.144.598	3		455.136.847	12		1.198.460.379	100%	96%	12		1.198.460.379	20%	20%	DPKP		
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa listrik	60	Bulan	5.967.397.800			12	Bulan	1.247.400.000	3		248.521.125	3		249.657.809	3		245.144.598	3		455.136.847	12		1.198.460.379	100%	96%	12		1.198.460.379	20%	20%	DPKP		
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	60	Bulan	294.053.760			12	Bulan	72.000.000	3		17.997.850	3		17.311.900	3		8.110.650	3		28.573.650	12		71.994.050	100%	100%	12		71.994.050	20%	24%	DPKP		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan pengadaan	60	Bulan	432.886.594			12	Bulan	94.606.000	3		54.007.159	3		11.261.600	3		11.275.000	3		10.686.000	12		87.229.759	100%	92%	12		87.229.759	20%	20%	DPKP		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan media informasi	60	Bulan	432.886.594			12	Bulan	94.606.000	3		54.007.159	3		11.261.600	3		11.275.000	3		10.686.000	12		87.229.759	100%	92%	12		87.229.759	20%	20%	DPKP		
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah set peralatan rumah tangga	4	Set	40.000.000			1	Set	10.000.000	1		10.000.000	0		- 0		- 0		- 1		10.000.000	100%	100%	1		10.000.000	25%	25%	DPKP					
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan caraka	156	Hari	4.771.964.300			156	Hari	500.000.000	0		47.000.036	0		187.450.869	0		149.359.483	0		99.928.121	0		483.738.509	0%	97%	0		483.738.509	0%	10%	DPKUKMP		
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas	104	Kali	4.771.964.300			104	Kali	500.000.000	10		47.000.036	24		187.450.869	49		149.359.483	115		99.928.121	198		483.738.509	190%	97%	198		483.738.509	190%	10%	DPKUKMP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	35	Unit	2.870.947.700			32	Unit	1.351.991.280	0		102.550.410	0		110.338.410	0		135.109.729	32		696.374.230	32		1.044.372.779	100%	77%	32		1.044.372.779	91%	36%	DPKUKMP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan yang dipelihara	37	Unit	2.870.947.700			34	Unit	1.351.991.280	6		102.550.410	6		110.338.410	14		135.109.729	22		696.374.230	48		1.044.372.779	141%	77%	48		1.044.372.779	130%	36%	DPKUKMP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit ac	6	Unit	3.830.962.800			6	Unit	144.100.000	0		10.885.000	0		36.000.000	0		13.450.000	4		24.785.000	4		85.120.000	67%	59%	4		85.120.000	67%	2%	DPKUKMP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit komputer	25	Unit	3.830.962.800			25	Unit	144.100.000	5		10.885.000	6		36.000.000	2		13.450.000	13		24.785.000	26		85.120.000	104%	59%	26		85.120.000	104%	2%	DPKUKMP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit printer	10	Unit	3.830.962.800			10	Unit	144.100.000	2		10.885.000	3		36.000.000	0		13.450.000	9		24.785.000	14		85.120.000	140%	59%	14		85.120.000	140%	2%	DPKUKMP		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit server	3	Unit	3.830.962.800			3	Unit	144.100.000	0		10.885.000	0		36.000.000	0		13.450.000	0		24.785.000	0		85.120.000	0%	59%	0		85.120.000	0%	2%	DPKUKMP		
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan penyediaan ATK	12	Bulan	497.036.490			12	Bulan	199.996.719	3		97.745.600	3		- 3		76.649.900	3		- 12		174.395.500	100%	87%	12		174.395.500	100%	35%	DPKUKMP				
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah gudang	1	Unit	341.400.000			1	Unit	56.243.720	0		- 0		- 0		- 1		54.388.000	1		54.388.000	100%	97%	1		54.388.000	100%	16%	DPKUKMP					
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	120	Orang	85.658.540			112	Orang	76.469.540	27		3.980.453	27		7.748.694	27		9.311.592	28		7.748.694	109		28.789.433	97%	34%	109		28.789.433	91%	17%	DPKUKMP		
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	341.680.000			12	Bulan	87.217.680	3		18.240.570	3		16.838.850	3		19.808.920	3		19.589.180	12		74.477.520	100%	85%	12		74.477.520	100%	22%	DPKUKMP		
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi	12	Bulan	755.470.000			12	Bulan	181.930.000	3		80.864.787	3		1.774.806	3		78.394.973	12		162.960.007	100%	90%	12		162.960.007	100%	90%	12		162.960.007	100%	22%	DPKUKMP
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	493.730.000			12	Bulan	118.900.000	3		8.241.000	3		13.183.000	3		19.710.000	3		21.598.000	12		62.732.000	100%	53%	12		62.732.000	100%	13%	DPKUKMP		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penggandaan	12	Bulan	391.550.000			12	Bulan	141.950.000	3		58.315.000	3		33.337.400	3		8.034.400	3		8.110.400	12		107.797.200	100%	76%	12		1					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab															
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	Jumlah bulan pelaksanaan penataan arsip dinas	12	Bulan	120.000.000				12	Bulan	187.660.000	3			71.212.144	3			29.680.000	3			35.370.000					34.450.000	9		170.712.144	75%	91%	9			170.712.144	75%	142%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan alat berat kendaraan dinas	12	Bulan	4.292.320.000				12	Bulan	1.098.885.000	3			175.737.970	3			367.187.800	3			196.217.100					256.563.200	9		995.706.070	75%	91%	9			995.706.070	75%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan alat berat kendaraan dinas	12	Bulan	4.292.320.000				12	Bulan	1.098.885.000	3			175.737.970	3			367.187.800	3			196.217.100					256.563.200	9		995.706.070	75%	91%	9			995.706.070	75%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan alat berat kendaraan dinas	12	Bulan	4.292.320.000				12	Bulan	1.098.885.000	3			175.737.970	3			367.187.800	3			196.217.100					256.563.200	9		995.706.070	75%	91%	9			995.706.070	75%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan alat berat kendaraan dinas	12	Bulan	4.292.320.000				12	Bulan	1.098.885.000	3			175.737.970	3			367.187.800	3			196.217.100					256.563.200	9		995.706.070	75%	91%	9			995.706.070	75%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan alat berat kendaraan dinas	12	Bulan	4.292.320.000				12	Bulan	1.098.885.000	3			175.737.970	3			367.187.800	3			196.217.100					256.563.200	9		995.706.070	75%	91%	9			995.706.070	75%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan alat berat kendaraan dinas	12	Bulan	4.292.320.000				12	Bulan	1.098.885.000	3			175.737.970	3			367.187.800	3			196.217.100					256.563.200	9		995.706.070	75%	91%	9			995.706.070	75%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan alat berat kendaraan dinas	12	Bulan	4.292.320.000				12	Bulan	1.098.885.000	3			175.737.970	3			367.187.800	3			196.217.100					256.563.200	9		995.706.070	75%	91%	9			995.706.070	75%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan R2 yang dipelihara	36	Unit	4.292.320.000				36	Unit	1.098.885.000	0			175.737.970	0			367.187.800	0			196.217.100					256.563.200	0		995.706.070	0%	91%	0			995.706.070	0%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan R4 yang dipelihara	10	Unit	4.292.320.000				10	Unit	1.098.885.000	0			175.737.970	0			367.187.800	0			196.217.100					256.563.200	0		995.706.070	0%	91%	0			995.706.070	0%	23%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah pengadaan kursi rapat	25	Unit	506.500.000				15	Unit	8.000.000	0		- 0			- 0											5.275.500	0		5.275.500	0%	66%	0			5.275.500	0%	1%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah pengadaan meja kerja	6	Unit	506.500.000				6	Unit	8.000.000	0		- 0			- 0											5.275.500	0		5.275.500	0%	66%	0			5.275.500	0%	1%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah pengadaan rak arsip	46	Unit	506.500.000				16	Unit	8.000.000	0		- 0			- 0											5.275.500	0		5.275.500	0%	66%	0			5.275.500	0%	1%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah AC dan jaringan telepon	10	Unit	1.301.600.000				10	Unit	443.600.000	0			270.760.000	0			49.880.000	0			4.939.000					112.195.000	0		437.774.000	0%	99%	0			437.774.000	0%	34%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah komputer, laptop, printer, scanner yang dipelihara	29	Unit	1.301.600.000				25	Unit	443.600.000	0			270.760.000	0			49.880.000	0			4.939.000					112.195.000	0		437.774.000	0%	99%	0			437.774.000	0%	34%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah pengadaan printer, scanner	27	Unit	1.301.600.000				17	Unit	443.600.000	0			270.760.000	0			49.880.000	0			4.939.000					112.195.000	0		437.774.000	0%	99%	0			437.774.000	0%	34%	DPUPR
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit pengadaan komputer dan kelengkapannya, laptop, alat ukur, peralatan kantor lainnya	40	Unit	1.301.600.000				30	Unit	443.600.000	0			270.760.000	3			49.880.000	0			4.939.000					112.195.000	3		437.774.000	10%	99%	3			437.774.000	8%	34%	DPUPR
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	Jumlah set seragam pegawai	56	Set	416.000.000				56	Set	151.800.000	0			150.282.000	0		- 0										- 0		150.282.000	0%	99%	0			150.282.000	0%	36%	DPUPR	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	Jumlah set seragam THL lapangan	128	Set	416.000.000				32	Set	151.800.000	88			150.282.000	0		- 0										- 88		150.282.000	275%	99%	88			150.282.000	69%	36%	DPUPR	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan penyediaan ATK, perangko, materai, benda pos, buku cek	12	Bulan	424.000.000				12	Bulan	67.785.500	3			22.221.000	3			1.350.000	3			15.584.500					12.708.200	9		51.863.700	75%	77%	9			51.863.700	75%	12%	DPUPR
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah bulan penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	12	Bulan	162.048.000				12	Bulan	44.160.000	3			7.108.283	3			9.119.532	3			9.119.532					9.119.532	9		34.466.879	75%	78%	9			34.466.879	75%	21%	DPUPR
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	3.161.760.000				12	Bulan	88.920.000	3			19.412.503	3			18.249.500	3			20.710.000					20.838.000	9		79.210.003	75%	89%	9			79.210.003	75%	3%	DPUPR
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi	48	Bulan	105.600.000				12	Bulan	19.200.000	3			2.162.700	3			2.144.947	3			1.996.286					2.903.336	9		9.207.269	75%	48%	9			9.207.269	19%	9%	DPUPR
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	48	Bulan	609.950.000				12	Bulan	69.400.000	3			6.750.000	3			21.065.000	3			9.750.000					24.375.000	9		61.940.000	75%	89%	9			61.940.000	19%	10%	DPUPR
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	Jumlah bulan penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan	411.930.200				12	Bulan	69.864.000	3			8.901.200	3			19.918.800	3			15.412.800					11.057.600	9		55.290.400	75%	79%	9			55.290.400	19%	13%	DPUPR
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah set peralatan rumah tangga, jumlah penyediaan bahan pokok/natura	12	Bulan	208.600.000				12	Bulan	35.687.880	3			12.697.000	3			5.115.200	3			5.437.000					6.595.700	9		29.844.900	75%	84%	9			29.844.900	75%	14%	DPUPR
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan caraka	600	Kali	1.680.700.000				100	Kali	221.377.000	77			25.467.116	66			58.480.947	56			46.495.853	46				90.809.823	245		221.253.739	245%	100%	245			221.253.739	41%	13%	INSPEKTORAT
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas	290	Kali	1.680.700.000				50	Kali	221.377.000	57			25.467.116	63			58.480.947	57			46.495.853	20				90.809.823	197		221.253.739	39								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4																					15							
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah set peralatan rumah tangga	120	Set		303.236.000	20	Set	5	15.500.000	5	14.669.000	0		-	0		-	5	14.669.000	25%	95%	5		14.669.000	4%	5%	INSPEKTORAT		
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan dinas an perjalanan caraka	6620	Kali		983.429.100	6320	Kali		93.535.000	98	24.060.000	163		23.994.000	52		5.390.000	41		28.170.000	354	81.614.000	6%	87%	354	81.614.000	5%	8%	KEC CIMAHI SELATAN
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	jumlah bulan pemeliharaan	12	Bulan		2.653.270.249	12	Bulan		477.418.000	2	66.590.000	3		185.808.500	4		69.425.000	3		142.590.500	12	464.414.000	100%	97%	12	464.414.000	100%	18%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	jumlah kendaraan yang dipelihara dan jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	12	Bulan		4.774.723.050	12	Bulan		778.330.800	3	206.342.950	3		241.151.990	3		113.175.000	3		155.351.150	12	716.021.090	100%	92%	12	716.021.090	100%	15%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit komputer, printer, server dan AC	12	Bulan		1.433.475.300	12	Bulan		17.150.000	0	-	3		12.150.000	0		-	3		2.500.000	6	14.650.000	50%	85%	6	14.650.000	50%	1%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	jumlah bulan penyedia ATK	12	Bulan		808.595.773	12	Bulan		99.445.700	6	67.066.230	0		5.760.000	3		-	3		18.818.200	12	91.644.430	100%	92%	12	91.644.430	100%	11%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	jumlah bulan THL yang diasuransikan	12	Bulan		17.240.500	12	Bulan		46.980.000	0	-	3		5.220.000	3		8.178.000	3		17.487.000	9	30.885.000	75%	66%	9	30.885.000	75%	179%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	Bulan		1.454.629.800	12	Bulan		435.006.000	2	64.915.000	4		131.788.000	3		69.975.000	3		140.723.000	12	407.401.000	100%	94%	12	407.401.000	100%	28%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	jumlaha bulan jasa komunikasi , listrik den air	12	Bulan		1.258.617.950	12	Bulan		169.211.000	3	23.899.467	3		48.947.702	3		21.785.310	3		54.528.575	12	149.161.054	100%	88%	12	149.161.054	100%	12%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan		701.314.450	12	Bulan		60.745.000	0	-	6		47.794.800	0		-	1		9.300.000	7	57.094.800	58%	94%	7	57.094.800	58%	8%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	jumlah bulan penyediaan media informasi, penggaandan	12	Bulan		980.034.250	12	Bulan		173.800.000	3	50.010.375	3		35.877.000	3		18.699.000	3		67.695.000	12	172.281.375	100%	99%	12	172.281.375	100%	18%	KEC CIMAHI SELATAN
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan caraka	720	OH		2.082.498.250	720	OH		251.697.814	168	53.945.000	168		54.458.666	168		25.700.000	168		79.287.937	672	213.391.603	93%	85%	672	213.391.603	93%	10%	KEC CIMAHI TENGAH
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas	1400	OH		2.082.498.250	1100	OH		251.697.814	202	53.945.000	138		54.458.666	51		25.700.000	233		79.287.937	624	213.391.603	57%	85%	624	213.391.603	45%	10%	KEC CIMAHI TENGAH
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan	12	Bulan		2.441.518.000	12	Bulan		648.479.000	3	148.274.500	3		169.881.900	3		158.905.000	3		155.437.000	12	632.498.400	100%	98%	12	632.498.400	100%	26%	KEC CIMAHI TENGAH
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah bulan pengamanan gedung kantor	12	Bulan		2.441.518.000	12	Bulan		648.479.000	3	148.274.500	3		169.881.900	3		158.905.000	3		155.437.000	12	632.498.400	100%	98%	12	632.498.400	100%	26%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	50	Unit		6.770.467.000	43	Unit		1.096.566.000	10	212.716.400	10		274.061.425	10		192.300.200	13		175.411.840	43	854.489.865	100%	78%	43	854.489.865	86%	13%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan yang dipelihara	83	Unit		6.770.467.000	83	Unit		1.096.566.000	21	212.716.400	21		274.061.425	21		192.300.200	20		175.411.840	83	854.489.865	100%	78%	83	854.489.865	100%	13%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	Jumlah bulan pemeliharaan	12			2.458.196.800	12			216.716.000	3	24.400.000	3		163.556.000	3		7.200.000	3		20.100.000	12	215.256.000	100%	99%	12	215.256.000	100%	9%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	Jumlah pengadaan mebelair	1	Paket		2.458.196.800	1	Paket		216.716.000	0	24.400.000	1		163.556.000	0		7.200.000	0		20.100.000	1	215.256.000	100%	99%	1	215.256.000	100%	9%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBLEUR KANTOR	Jumlah set partisi	1	Set		2.458.196.800	1	Set		216.716.000	2	24.400.000	0		163.556.000	0		7.200.000	0		20.100.000	2	215.256.000	200%	99%	2	215.256.000	200%	9%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah bulan pemeliharaan	12	Bulan		3.117.632.750	12	Bulan		78.460.000	3	1.785.000	3		31.370.000	3		15.975.000	3		28.930.000	12	78.060.000	100%	99%	12	78.060.000	100%	3%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1	Unit		3.117.632.750	1	Unit		78.460.000	0	1.785.000	1		31.370.000	0		15.975.000	0		28.930.000	1	78.060.000	100%	99%	1	78.060.000	100%	3%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan penyediaan ATK	12	Bulan		1.774.774.000	12	Bulan		267.787.000	3	39.628.000	3		219.443.800	3		2.628.000	3		2.628.000	12	264.327.800	100%	99%	12	264.327.800	100%	15%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	Bulan		2.632.202.200	12	Bulan		536.785.000	3	120.820.500	3		132.238.500	3		125.988.000	3		119.374.000	12	498.421.000	100%	93%	12	498.421.000	100%	19%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi	12	Bulan		1.686.933.200	12	Bulan		184.499.000	3	40.195.583	3		55.330.661	3		38.805.479	3		46.061.521	12	180.393.244	100%	98%	12	180.393.244	100%	11%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa listrik	12	Bulan		1.686.933.200	12	Bulan		184.499.000	3	40.195.583	3		55.330.661	3		38.805.479	3		46.061.521	12	180.393.244	100%	98%	12	180.393.244	100%	11%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan		1.719.961.150	12	Bulan		211.282.000	3	49.257.500	3		79.933.500	3		34.291.500	3		47.025.500	12	210.508.000	100%	100%	12	210.508.000	100%	12%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	Jumlah bulan penggaandan	12	Bulan		1.416.302.000	12	Bulan		218.496.000	3	71.128.000	3		45.168.000	3		33.462.000	3		42.653.000	12	192.411.000	100%	88%	12	192.411.000	100%	14%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12	Bulan		1.416.302.000	12	Bulan		218.496.000	3	71.128.000	3		45.168.000	3		33.462.000	3		42.653.000	12	192.411.000	100%	88%	12	192.411.000	100%	14%	KEC CIMAHI TENGAH
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas dan caraka	1150	OH		753.936.000	860	OH		149.020.000	199	41.820.000	158		30.170.000	169		30.610.000	294		42.730.000	820	145.330.000	95%	98%	820	145.330.000	71%	19%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah bulan pemeliharaan	12	Bulan		2.663.465.000	12	Bulan		521.283.000	3	160.132.600	3		136.127.750	3		122.058.400	3		94.080.000	12	512.398.750	100%	98%					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV												
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13			13=6+12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah kendaraan yang dipelihara	10	Unit	580.000.000		8	Unit	75.331.300	6	10.035.000	6	18.644.368	3	11.651.000		11.250.000	15	51.580.368	188%	68%	15		51.580.368	150%	9%	KESBANG
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah pengadaan kendaraan	0	Unit	580.000.000		2	Unit	75.331.300	0	10.035.000	0	18.644.368	0	11.651.000		11.250.000	0	51.580.368	0%	68%	0		51.580.368	0%	9%	KESBANG
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah kursi	38	buah	61.000.000		38	buah	13.000.000	0	- 0		- 0		-		- 0	0	0	0%	0%	0		-	0%	0%	KESBANG
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah lemari	5	buah	61.000.000		5	buah	13.000.000	0	- 0		- 0		-		- 0	0	0	0%	0%	0		-	0%	0%	KESBANG
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah meja	8	buah	61.000.000		8	buah	13.000.000	0	- 0		- 0		-		- 0	0	0	0%	0%	0		-	0%	0%	KESBANG
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah set partisi	1	Set	61.000.000		1	Set	13.000.000	0	- 0		- 0		-		- 0	0	0	0%	0%	0		-	0%	0%	KESBANG
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah pengadaan komputer	2	Unit	107.000.000		1	Unit	19.850.000	0	1.537.500	0	1.537.500	0	1.300.000		1.770.000	0	6.145.000	0%	31%	0		6.145.000	0%	6%	KESBANG
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit ac yang dipelihara	3	Unit	107.000.000		3	Unit	19.850.000	0	1.537.500	2	1.537.500	3	1.300.000		1.770.000	5	6.145.000	167%	31%	5		6.145.000	167%	6%	KESBANG
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit printer yang dipelihara	9	Unit	107.000.000		9	Unit	19.850.000	4	1.537.500	2	1.537.500	0	1.300.000		1.770.000	6	6.145.000	67%	31%	6		6.145.000	67%	6%	KESBANG
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan penyediaan ATK	2	Bulan	290.200.000		2	Bulan	63.586.450	3	59.536.450	3	1.350.000	3	450.000		960.000	9	62.296.450	450%	98%	9		62.296.450	450%	21%	KESBANG
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah gudang	1	Unit	84.000.000		1	Unit	18.000.000	1	18.000.000	1	-	1	-		- 3	18.000.000	300%	100%	3		18.000.000	300%	21%	KESBANG	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	130.500.000		12	Bulan	32.700.000	3	7.411.250	3	8.145.000	3	8.250.000		8.000.000	9	31.806.250	75%	97%	9		31.806.250	75%	24%	KESBANG
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan jasa komunikasi	12	Bulan	72.000.000		12	Bulan	7.200.000	3	1.125.500	3	861.034	3	476.394		218.769	9	2.681.697	75%	37%	9		2.681.697	75%	4%	KESBANG
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	196.500.000		12	Bulan	21.594.000	3	4.877.000	3	4.387.000	3	4.267.000		6.370.900	9	19.901.900	75%	92%	9		19.901.900	75%	10%	KESBANG
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penggandaan	12	Bulan	132.000.000		12	Bulan	24.567.000	3	6.473.500	3	5.648.000	3	5.824.000		6.162.200	9	24.107.700	75%	98%	9		24.107.700	75%	18%	KESBANG
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12	Bulan	132.000.000		12	Bulan	24.567.000	3	6.473.500	3	5.648.000	3	5.824.000		6.162.200	9	24.107.700	75%	98%	9		24.107.700	75%	18%	KESBANG
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan caraka	300	Orang/hari	2.307.453.044		300	Orang/hari	210.398.860	0	85.311.806	0	24.663.000	0	29.353.500		68.531.557	0	207.859.863	0%	99%	0		207.859.863	0%	9%	Satpol PP dan Damkar
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25	Orang/hari	2.307.453.044		25	Orang/hari	210.398.860	1	85.311.806	1	24.663.000	4	29.353.500		68.531.557	6	207.859.863	24%	99%	6		207.859.863	24%	9%	Satpol PP dan Damkar
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan dinas luar daerah (dalam provinsi)	250	Orang/hari	2.307.453.044		250	Orang/hari	210.398.860	0	85.311.806	31	24.663.000	93	29.353.500		68.531.557	124	207.859.863	50%	99%	124		207.859.863	50%	9%	Satpol PP dan Damkar
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan dinas luar daerah (luar provinsi)	165	Orang/hari	2.307.453.044		165	Orang/hari	210.398.860	0	85.311.806	0	24.663.000	0	29.353.500		68.531.557	0	207.859.863	0%	99%	0		207.859.863	0%	9%	Satpol PP dan Damkar
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor & Rumah Dinas	12	Bulan	8.855.000.000		12	Bulan	22.600.000	0	- 12	11.300.000	0	-		11.300.000	12	22.600.000	100%	100%	12		22.600.000	100%	0%	Satpol PP dan Damkar	
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah Bulan pemeliharaan gedung kantor	12	Bulan	8.855.000.000		12	Bulan	22.600.000	0	- 12	11.300.000	0	-		11.300.000	12	22.600.000	100%	100%	12		22.600.000	100%	0%	Satpol PP dan Damkar	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah bulan penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan	574.150.800		12	Bulan	128.275.000	3	11.655.000	3	13.150.000	3	12.735.000		85.207.000	9	122.747.000	75%	96%	9		122.747.000	75%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah bulan penyediaan petugas kebersihan kantor	12	Bulan	574.150.800		12	Bulan	128.275.000	2	11.655.000	3	13.150.000	3	12.735.000		85.207.000	8	122.747.000	67%	96%	8		122.747.000	67%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Pengadaan Kamera/ Video Recorder	2	Unit	574.150.800		0	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Pengadaan Komputer PC	5	Unit	574.150.800		3	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Pengadaan Laptop/ Notebook	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Pengadaan Printer	3	Unit	574.150.800		4	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Set Alat Scuba Diving	2	Unit	574.150.800		2	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Air Conditioner	5	Unit	574.150.800		5	Unit	128.275.000	0	11.655.000	4	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	4	122.747.000	80%	96%	4		122.747.000	80%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Bak media pembakaran plat besi	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Display Running Teks	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Handy Talky/Rig	6	Unit	574.150.800		16	Unit	128.275.000	0	11.655.000	8	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	8	122.747.000	50%	96%	8		122.747.000	133%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit komputer	6	Unit	574.150.800		6	Unit	128.275.000	0	11.655.000	4	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	4	122.747.000	67%	96%	4		122.747.000	67%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit Laptop/Notebook	2	Unit	574.150.800		2	Unit	128.275.000	0	11.655.000	1	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	1	122.747.000	50%	96%	1		122.747.000	50%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Mesin Pemotong Beton	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Mesin Pemotong Kayu	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000		85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0		122.747.000	0%	21%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13			13=6+12		14=(13/5)x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000	0	85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Speaker Portable	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000	0	85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Toa Wireles	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000	0	85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Unit Vertical Rescue, Webbing, Caramantle	1	Unit	574.150.800		1	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000	0	85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah UPS APC 1500 VA	2	Unit	574.150.800		2	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000	0	85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah UPS ICA	3	Unit	574.150.800		3	Unit	128.275.000	0	11.655.000	0	13.150.000	0	12.735.000	0	85.207.000	0	122.747.000	0%	96%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Jumlah bulan penyediaan Izin Frekuensi	12	Bulan	11.793.750.000		12	Bulan	1.614.105.028	0	325.504.180	0	333.897.224	0	311.384.163	0	439.977.653	0	1.410.763.220	0%	87%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Driver)	12	Bulan	11.793.750.000		12	Bulan	1.614.105.028	0	325.504.180	0	333.897.224	0	311.384.163	0	439.977.653	0	1.410.763.220	0%	87%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Operator Komputer)	12	Bulan	11.793.750.000		12	Bulan	1.614.105.028	2	325.504.180	3	333.897.224	3	311.384.163	8	439.977.653	8	1.410.763.220	67%	87%	8	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Pengelola Website/IT)	12	Bulan	11.793.750.000		12	Bulan	1.614.105.028	2	325.504.180	3	333.897.224	3	311.384.163	8	439.977.653	8	1.410.763.220	67%	87%	8	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Jumlah bulan Sewa Gedung / Kantor	12	Bulan	11.793.750.000		12	Bulan	1.614.105.028	12	325.504.180	0	333.897.224	0	311.384.163	12	439.977.653	12	1.410.763.220	100%	87%	12	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Jumlah bulan Sewa Tempat dan Alat-Alat Pendukung Komunikasi	12	Bulan	11.793.750.000		12	Bulan	1.614.105.028	12	325.504.180	0	333.897.224	0	311.384.163	12	439.977.653	12	1.410.763.220	100%	87%	12	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Jumlah Cinderamata (Boneka/Plakat)	25	Buah	11.793.750.000		0	Buah	1.614.105.028	0	325.504.180	0	333.897.224	0	311.384.163	0	439.977.653	0	1.410.763.220	0%	87%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	20	jenis	11.793.750.000		20	jenis	1.614.105.028	5	325.504.180	5	333.897.224	5	311.384.163	15	439.977.653	15	1.410.763.220	75%	87%	15	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	47	Unit	11.793.750.000		43	Unit	1.614.105.028	43	325.504.180	0	333.897.224	0	311.384.163	43	439.977.653	43	1.410.763.220	100%	87%	43	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	jumlah kendaraan yang dipelihara	63	Unit	11.793.750.000		61	Unit	1.614.105.028	43	325.504.180	0	333.897.224	26	311.384.163	69	439.977.653	69	1.410.763.220	113%	87%	69	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	jumlah orang/hari Jasa Instalatur Listrik	30	Orang/hari	11.793.750.000		30	Orang/hari	1.614.105.028	3	325.504.180	0	333.897.224	0	311.384.163	3	439.977.653	3	1.410.763.220	10%	87%	3	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	jumlah pengadaan kendaraan	2	Unit	11.793.750.000		0	Unit	1.614.105.028	0	325.504.180	0	333.897.224	0	311.384.163	0	439.977.653	0	1.410.763.220	0%	87%	0	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	jumlah Sopir yang di fasilitasi Surat Ijin Mengemudi	8	Orang	11.793.750.000		8	Orang	1.614.105.028	0	325.504.180	2	333.897.224	0	311.384.163	2	439.977.653	2	1.410.763.220	25%	87%	2	Satpol PP dan Damkar		
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah Set Atribut PDU Pemadam Kebakaran	7	Set	2.178.500.009		0	Set	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah Set Atribut PDU Satpol PP	10	Set	2.178.500.009		1	Set	15.000.000	1	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	1	15.000.000	100%	100%	1	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah set Atribut seragam PDH Satpol PP	45	Set	2.178.500.009		0	Set	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah set Atribut seragam PDL Satpol PP	110	Set	2.178.500.009		0	Set	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah stel seragam PDH Pemadam Kebakaran	35	Stel	2.178.500.009		0	Stel	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah stel seragam PDH Satpol PP	90	Stel	2.178.500.009		0	Stel	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah stel seragam PDL Pemadam Kebakaran	50	Stel	2.178.500.009		0	Stel	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah stel seragam PDL Satpol PP	180	Stel	2.178.500.009		0	Stel	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah stel seragam PDU Pemadam Kebakaran	7	Stel	2.178.500.009		1	Stel	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah Stel seragam PDU Satpol PP	10	Stel	2.178.500.009		1	Stel	15.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	9.000.000	0	15.000.000	0%	100%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	jumlah bulan penyediaan ATK	12	Bulan	412.801.775		12	Bulan	97.300.000	3	19.919.500	3	19.183.100	3	19.192.200	38.406.000	9	96.700.800	75%	99%	9	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	jumlah bulan penyediaan Material	12	Bulan	412.801.775		12	Bulan	97.300.000	3	19.919.500	3	19.183.100	0	19.192.200	38.406.000	6	96.700.800	50%	99%	6	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan Bahan Pokok/Natura	12	Bulan	391.663.272		12	Bulan	56.300.000	3	11.494.000	3	9.564.000	3	10.638.200	23.855.800	9	55.552.000	75%	99%	9	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Rapat	12	Bulan	391.663.272		12	Bulan	56.300.000	3	11.494.000	3	9.564.000	0	10.638.200	23.855.800	6	55.552.000	50%	99%	6	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Tamu	12	Bulan	391.663.272		12	Bulan	56.300.000	3	11.494.000	3	9.564.000	3	10.638.200	23.855.800	9	55.552.000	75%	99%	9	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12	Bulan	499.100.000		12	Bulan	97.375.000	3	16.215.800	3	16.277.700	3	39.467.200	16.749.800	9	88.710.500	75%	91%	9	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	jumlah bulan penyediaan media informasi	12	Bulan	499.100.000		12	Bulan	97.375.000	3	16.215.800	3	16.277.700	3	39.467.200	16.749.800	9	88.710.500	75%	91%	9	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	11	Jenis	120.500.000		11	Jenis	7.810.000	0	-	10	2.760.000	1	2.760.000	2.220.000	11	7.740.000	100%	99%	11	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga	3	Paket	120.500.000		0	Paket	7.810.000	0	-	0	2.760.000	0	2.760.000	2.220.000	0	7.740.000	0%	99%	0	Satpol PP dan Damkar			
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan untuk Rumah Tangga	3	Paket	120.500.000		0	Paket	7.810.000	0	-	0	2.760.000	0	2.760.000	2.220.000	0	7.740.000	0%	99%	0	Satpol PP dan Damkar			
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah perjalanan dinas dan perjalanan caraka	384	Kali	1.080.000.000		96	Kali	217.000.000	12	24.575.000	5	53.755.000	2	5.750.000	132.615.993	24	216.695.993	25%	100%	24	SETWAN			
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah pengadaan kendaraan, kendaraan yang dipelihara, dan kendaraan asuransi yang dibayar	30	Kendaraan	1.180.000.000		30	Kendaraan	998.305.190	28	116.760.000	28	213.809.041	28	158.196.510	28	261.738.542	112	750.504.093	373%	75%	112	SETWAN		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah Meja, Kursi, Lemari dan Set Partisi	267	Buah	605.000.000		116	Buah	700.170.000	5	178.751.000	5	124.831.000	0	137.260.000	0	225.675.000	10	666.517.000	9%	95%	10	SETWAN		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah unit komputer, unit printer, dan unit server	106	Unit	3.390.000.000		91	Unit	3.728.735.000	11	497.670.000	77	1.832.078.000	15	762.447.911	22	565.308.000	125	3.657.503.911	137%	98%	125	SETWAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab												
				5			6		7		8		9		10			11			12			13		13=6+12		14=(13/5)x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4																																
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	Jumlah set seragam pegawai	360	Set	2.100.000.000				150	Set	524.750.000	50	39.750.000	0			337.350.000	135		133.710.000	242	510.810.000	161%	97%	242		510.810.000	67%	24%	SETWAN				
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	48	Bulan	834.000.000				12	Bulan	192.000.000	3	44.950.045	3			46.938.005	3		49.232.295	3	43.988.200	12	185.108.545	100%	96%	12		185.108.545	25%	22%	SETWAN		
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah THL yang diasuransikan	60	Orang	120.000.000				60	Orang	23.500.000	57	885.060	57			6.600.000	46		-	46		14.160.960	206	21.646.020	343%	92%	206		21.646.020	343%	18%	SETWAN	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah Bulan dalam komunikasi dan listrik	48	Bulan	1.750.000.000				12	Bulan	296.000.016	3	72.779.330	3			70.840.755	3		62.577.814	3		83.791.514	12	289.989.413	100%	98%	12		289.989.413	25%	17%	SETWAN	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	48	Bulan	1.299.000.000				12	Bulan	297.000.000	3	50.625.000	3			39.825.000	3		47.535.000	3		68.400.000	12	206.385.000	100%	69%	12		206.385.000	25%	16%	SETWAN	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi dan Penggandaan	48	Bulan	1.797.000.000				12	Bulan	609.000.800	3	181.240.000	3			83.991.400	3		67.475.000	3		272.150.000	12	604.856.400	100%	99%	12		604.856.400	25%	34%	SETWAN	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah set peralatan rumah tangga	4	Set	156.000.000				1	Set	216.850.000	1	39.607.000	1			73.550.000	1		38.398.000	8		64.877.000	11	216.432.000	1100%	100%	11		216.432.000	275%	139%	SETWAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																												114%	250%				82%	33%	
PREDIKAT KINERJA																												ST	ST				T	SR	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI	Level APIP Sesuai Standar Kompetensi Menuju Level APIPIACM (Internal Audit Capability Model) Berkelanjutan;	3;	Angka;	20.106.135.048																													
		KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME	Jumlah APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan substantif	2	Indeks	464.400.000				2	Indeks	27.440.000	0	3.720.000	0			2.100.000	0		5.160.000	2		15.340.000	2	26.320.000	100%	96%	2		26.320.000	100%	6%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL BERKALA EVALUASI LKIP	Jumlah PD yang di evaluasi	100	Persen	437.620.000				100	Persen	8.550.000	50	-	0			8.550.000	0		-	0		-	50	8.550.000	50%	100%	50		8.550.000	50%	2%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN	Jumlah PD yang dilakukan TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota	100	Persen	232.000.000				100	Persen	34.200.000	0	-	0			-	0		15.200.000	73		18.290.000	73	33.490.000	73%	98%	73		33.490.000	73%	14%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA MONEV BANRPROV JABAR	Jumlah monev PD yang mendapat bantuan provinsi jabar	25	Persen	450.000.000				13	Persen	15.800.000	0	2.000.000	0			-	0		-	28,85		9.900.000	28,85	11.900.000	222%	75%	28,85		11.900.000	115%	3%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA MONITORING DAN EVALUASI	Jumlah PD yang di monitoring dan evaluasi	75	Persen	472.800.000				75	Persen	33.600.000	21	600.000	0			8.100.000	16,33		15.000.000	37,33		3.300.000	74,66	27.000.000	100%	80%	74,66		27.000.000	100%	6%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PEMERIKSAAN REGULER	Jumlah PD Pemeriksaan internal	30	Persen	1.250.000.000				30	Persen	147.800.000	0	-	0			43.000.000	0		12.900.000	13,7		88.550.000	13,7	144.450.000	46%	98%	13,7		144.450.000	46%	12%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PEMERIKSAAN TERENTUTU	Jumlah PD pemeriksaa tertentu	10	Persen	249.350.000				10	Persen	3.200.000	0	-	0			-	0		-	0		-	0	0	0%	0%	0		-	0%	0%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PENANGANAN KASUS PENGADUAN	Jumlah PD yang ditangani kasus pengaduan masyarakat	50	Persen	300.000.000				100	Persen	6.100.000	50	300.000	0			-	0		375.000	0		-	50	675.000	50%	11%	50		675.000	100%	0%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI	Jumlah PD yang melakukan rencana aksi	100	Persen	356.000.000				100	Persen	6.750.000	25	375.000	25			1.725.000	25		2.000.000	25		1.000.000	100	5.100.000	100%	76%	100		5.100.000	100%	1%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PRANATA PENGAWASAN	Jumlah pranata	21	Dokumen	105.000.000				3	Dokumen	20.000.000	0	-	0			-	0		-	3		19.300.000	3	19.300.000	100%	97%	3		19.300.000	14%	18%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA REVU LKPD	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).	100	Persen	437.620.000				100	Persen	600.000	100	-	0			600.000	0		-	0		-	100	600.000	100%	100%	100		600.000	100%	0%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA REVU RKA	Jumlah OPD yang di reviu	100	Persen	484.777.800				100	Persen	18.400.000	100	-	0			-	0		-	0		-	100	0	100%	0%	100		-	100%	0%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA SABER PUNGLI	Jumlah PD yang mengimplementasikan rencana aksi saber pungli, sosialisasi, dan monev	100	Persen	821.000.000				100	Persen	248.800.000	0	53.500.000	0			43.500.000	0		48.700.000	100		102.225.000	100	247.925.000	100%	100%	100		247.925.000	100%	30%	INSPEKTORAT	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA TLHP	Jumlah PD yang dilakukan TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota	100	Persen	328.000.000				100	Persen	38.000.000	12,5	7.500.000	34,8			11.100.000	12,9		10.000.000	12,8		9.400.000	73	38.000.000	73%	100%	73		38.000.000	73%	12%	INSPEKTORAT	
		PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Jumlah APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	Indeks	1.974.000.000				3	Indeks	189.710.000	0	6.000.000	0			46.770.000	0		13.093.500	2		115.555.000	2	181.418.500	67%	96%	2		181.418.500	67%	9%	INSPEKTORAT	
		PEMBINAAN PEGAWAI	Jumlah APIP yang mengikuti pembinaan pegawai	3	Indeks	229.852.000				3	Indeks	23.000.000	0	-	0			22.355.000	0		-	2		-	2	22.355.000	67%	97%	2		22.355.000	67%	10%	INSPEKTORAT	
		PENYELENGGARAAN MATURITAS SPIP	Jumlah PD yang mengimplementasikan SPIP	3	Indeks	776.000.000				3	Indeks	100.100.000	0	25.100.000	0			14.350.000	0		-	2.902		54.700.000	2,902	94.150.000	97%	94%	2,902		94.150.000	97%	12%	INSPEKTORAT	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																												85%	77%				77%	8%	
PREDIKAT KINERJA																												T	T				T	SR	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (FUNGSI PENUNJANG URUSAN)																																	
		PROGRAM KELITBANGAN UTAMA DAN PENDUKUNG	Persentase Kajian Penelitiandan Pengembangan Yang Digunakan Sebagai Bahan Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi;	80;	Persen;	2.128.899.857																													
		KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan	1	Dokumen	653.509.105				1	Dokumen	138.190.000	0	48.480.000	0			46.704.000	0		17.000.000	1		25.877.000	1	138.061.000	100%	100%	1		138.061.000	100%	21%	BAPPEDA	
		KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah dokumen hasil kerjasama	4	Dokumen	653.509.105				2	Dokumen	138.190.000	0	48.480.000	6			46.704.000	6		17.000.000	0		25.877.000	12	138.061.000	600%	100%	12		138.061.000	300%	21%	BAPPEDA	
		PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah data	6	Dokumen	400.000.000				1	Dokumen	265.085.000	0	12.050.000	0			86.930.000	0		59.400.000	1		106.200.000	1	264.580.000	100%	100%	1		264.580.000	17%	66%	BAPPEDA	
		PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	Jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	0	Dokumen	1.075.390.752				0	Dokumen	250.493.300	0	27.525.000	1			85.620.000	0		38.725.000	1		98.425.000	2	250.295.000	0%	100%	2		250.295.000	0%	23%	BAPPEDA	
		PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	Jumlah dokumen perekayasaan teknologi dan inovasi	4	Dokumen	1.075.390.752				1	Dokumen	250.493.300	0	27.525.000	0			85.620.000	0		38.725.000	1		98.425.000	1	250.295.000	100%	100%	1		250.295.000	25%	23%	BAPPEDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	7	Ujicoba 1.075.390.752	K	Rp	1	Ujicoba 250.493.300	0	Rp 27.525.000	1	Rp 85.620.000	0	Rp 38.725.000	0	Rp 98.425.000	1	K 250.295.000	100%	100%	1	Rp 250.295.000	K 14%	23%	BAPPEDA	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																											
PREDIKAT KINERJA																											
ST																											
ST																											
S																											
SR																											
		PERENCANAAN																									
		PROGRAM FORMULASI DOKUMEN, KOORDINASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN	Persentase Penyusunan Dan Pelaksanaan Perencanaan Yang Dimonitoring Dan Evaluasi ;	100;	Persen;	14.547.385.044																					
		EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN MONEV	2	Dokumen	1.025.000.000		2	Dokumen	323.679.800	1	28.600.000	0	28.108.000	1	51.106.000	2	168.827.800	4	276.641.800	200%	85%	4	276.641.800	200%	27%	BAPPEDA
		FASILITASI KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESEKINANJANGAN	Jumlah bulan koordinasi	12	Bulan	400.000.000		12	Bulan	46.450.000	3	450.000	3	8.500.000	3	-	3	15.325.000	12	24.275.000	100%	52%	12	24.275.000	100%	6%	BAPPEDA
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN TATA RUANG	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	5	Dokumen	1.500.000.000		6	Dokumen	31.900.000	1	4.924.000	1	8.423.200	1	5.485.000	3	9.970.000	6	28.802.200	100%	90%	6	28.802.200	120%	2%	BAPPEDA
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	0	Dokumen	1.186.710.400		5	Dokumen	118.870.000	1	15.835.000	3	23.750.000	2	17.183.000	1	54.502.000	7	111.270.000	140%	94%	7	111.270.000	0%	9%	BAPPEDA
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	0	Dokumen	1.325.000.000		6	Dokumen	205.130.390	1	17.751.600	1	33.915.600	2	27.057.000	2	107.952.750	6	186.676.950	100%	91%	6	186.676.950	0%	14%	BAPPEDA
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN INVESTASI	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Produksi dan Investasi	6	Dokumen	1.325.000.000		6	Dokumen	182.900.000	1	26.576.600	1	32.211.450	2	33.392.350	2	68.143.561	6	160.323.961	100%	88%	6	160.323.961	100%	12%	BAPPEDA
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Dokumen	1.575.000.000		9	Dokumen	166.645.000	1	19.935.000	1	21.162.000	2	12.925.000	4	47.675.000	8	101.697.000	89%	61%	8	101.697.000	100%	6%	BAPPEDA
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	0	Dokumen	1.450.000.000		5	Dokumen	184.070.000	1	15.400.000	3	35.050.000	2	29.340.000	1	92.762.000	7	172.552.000	140%	94%	7	172.552.000	0%	12%	BAPPEDA
		PELAKSANAAN MUSRENBANG (RPJP, RPJMD, RKPD)	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	6	Musrenban g	1.883.367.437		5	Musrenban g	468.400.000	5	466.100.000	0	-	0	-	0	-	5	466.100.000	100%	100%	5	466.100.000	83%	25%	BAPPEDA
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PERENCANAAN DAERAH BERBASIS IT	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	1	Sistem	1.400.000.000		1	Sistem	296.200.000	1	56.570.000	1	65.000.000	1	28.000.000	1	89.480.000	4	239.050.000	400%	81%	4	239.050.000	400%	17%	BAPPEDA
		PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)	Jumlah Fungsional Perencana	20	JFP	200.000.000		20	JFP	52.000.000	0	-	0	-	2	2.375.000	18	35.231.313	20	37.606.313	100%	72%	20	37.606.313	100%	19%	BAPPEDA
		PENGKAJIAN, KOORDINASI DAN PERUMUSAN RTRW DAERAH	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah	5	Dokumen	950.000.000		1	Dokumen	356.640.000	0	6.850.000	0	231.342.000	0	14.730.000	1	70.333.000	1	323.255.000	100%	91%	1	323.255.000	20%	34%	BAPPEDA
		PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	JUMLAH DOKUMEN DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	0	0	625.000.000		1		90.700.000	0	15.925.000	0	9.300.000	0	14.200.000	1	47.595.000	1	87.020.000	100%	96%	1	87.020.000	0%	14%	BAPPEDA
		PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS KADER PERENCANA	Jumlah kader perencanaan	150	Kader Perencana an	1.000.000.000		312	Kader Perencana an	161.742.500	0	0	0	0	304	158.592.500	304	158.592.500	304	158.592.500	97%	98%	304	158.592.500	203%	16%	BAPPEDA
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJP, RPJMD, RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	7	Dokumen	1.585.674.644		6	Dokumen	277.838.000	1	41.550.000	0	55.190.000	5	28.250.000	0	134.808.000	6	259.798.000	100%	94%	6	259.798.000	86%	16%	BAPPEDA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																											
PREDIKAT KINERJA																											
ST																											
T																											
ST																											
SR																											
		URUSAN PILIHAN																									
		PARIWISATA																									
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik;(2).Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman);(3).Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus);	3;(2).700;(3).5680;	Angka;(2).Wisataw an;(3).Wisa tawan;	78.267.264.100																					
		PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	Jumlah Pelaksanaan Pameran	15	Kali	2.154.540.000		3	Kali	128.503.000	0	3.120.000	0	14.240.000	2	98.498.378	1	11.700.000	3	127.558.378	100%	99%	3	127.558.378	20%	6%	Disbudparpora
		PELATIHAN PEMANDU WISATA	Jumlah Pemandu yang Tersertifikasi	80	Orang	621.947.500		20	Orang	94.000.000	20	94.000.000	0	-	0	-	0	-	20	94.000.000	100%	100%	20	94.000.000	25%	15%	Disbudparpora
		PELATIHAN PEMANDU WISATA	Jumlah SDM yang Sudah Dilatih	45	Orang	621.947.500		0	Orang	94.000.000	0	94.000.000	0	-	0	-	0	-	0	94.000.000	0%	100%	0	94.000.000	0%	15%	Disbudparpora
		PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE	Jumlah Bahan Promosi Yang Dihasilkan	4	Paket	950.000.000		1	Paket	82.045.000	0	17.995.000	0	14.670.000	0	760.000	1	31.640.000	1	65.065.000	100%	79%	1	65.065.000	25%	7%	Disbudparpora
		PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA	Jumlah Kerjasama Promosi Pariwisata	4	Kali	1.250.000.000		1	Kali	389.561.000	0	-	0	-	0	-	1	384.661.000	1	384.661.000	100%	99%	1	384.661.000	25%	31%	Disbudparpora
		PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN	Jumlah Paket Wisata Unggulan	2	Paket	500.000.000		1	Paket	241.550.000	0	-	1	210.195.500	0	15.360.000	0	7.215.000	1	232.770.500	100%	96%	1	232.770.500	50%	47%	Disbudparpora
		PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN	Jumlah Objek Wisata Yang Dikembangkan	2	Lokasi	500.000.000		1	Lokasi	205.700.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	159.720.000	1	3.300.000	1	184.020.000	100%	89%	1	184.020.000	50%	37%	Disbudparpora
		PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	Jumlah Duta Wisata yang Terpilih	96	Orang	1.950.000.000		24	Orang	201.325.000	0	43.110.000	0	-	4	18.325.000	20	110.260.183	24	171.695.183	100%	85%	24	171.695.183	25%	9%	Disbudparpora
		PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	Jumlah SDM Aparatur Yang Dilatih Kepariwisata	35	Orang	1.950.000.000		8	Orang	201.325.000	0	43.110.000	0	-	0	18.325.000	8	110.260.183	8	171.695.183	100%	85%	8	171.695.183	23%	9%	Disbudparpora

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13			13=6+12		14=(13/5)x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	390	Orang	950.000.000		90	Orang	121.285.000	0		0	0	0	90	117.455.000	90	117.455.000	100%	97%	90	117.455.000	23%	12%	Disbudparpora	
		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA	Jumlah Pelaku Industri Pariwisata Yang Dilatih	3	Paket	140.776.600		1	Paket	46.820.000	1	45.420.000	1	700.000	1	350.000	0	- 3	46.470.000	300%	99%	3	46.470.000	100%	33%	Disbudparpora	
		PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Aplikasi Web yang di Operasikan	4	Lokasi	68.000.000.000		1	Lokasi	14.944.000	0	- 0	- 0	- 1	14.944.000	1	14.944.000	100%	100%	1	14.944.000	25%	0%	Disbudparpora			
		PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PARIWISATA	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibangun	50	Kelompok	950.000.000		5	Kelompok	57.750.000	0	- 0	- 0	12.510.000	5	41.950.000	5	54.460.000	100%	94%	5	54.460.000	10%	6%	Disbudparpora		
		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Terdaftar																								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		108%	94%			31%	17%				
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST			SR	SR				
		PERDAGANGAN																									
		PROGRAM KERJASAMA PENINGKATAN POTENSI SUMBER DAYA PERDAGANGAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang;(2).Prosentase Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Paham Aturan / Tata Tertib;	6;(2).3 0;	Kelompok ;(2).Perse n;	2.163.880.000																					
		PEMBINAAN KELOMPOK PEDAGANG INFORMAL	Jumlah Kelompok Pedagang Informal Yang Dibina	5	Kelompok	2.163.880.000		4	Kelompok	64.234.600	1	24.980.000	0	978.000	2	- 1	36.810.000	4	62.768.000	100%	98%	4	62.768.000	80%	3%	DPKUKMP	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100%	94%			42%	17%				
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST			SR	SR				
		PROGRAM PEMBENTUKAN SENTRA JASA/PERDAGANGAN	Jumlah Sentra Jasa Dan Perdagangan: Dokumen kajian	2;	Angka;	842.000.000																					
		KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA JASA/ PERDAGANGAN	Dokumen kajian	3	Dokumen	142.000.000		1	Dokumen	66.588.400	0	- 0	- 0	- 1	56.145.000	1	56.145.000	100%	84%	1	56.145.000	33%	40%	DPKUKMP			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100%	95%			43%	16%				
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST			SR	SR				
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	Prosentase Kenaikan Omset Pedagang Selama Mengikuti Pameran Promosi;	25;	Persen;	2.163.880.000																					
		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	Jumlah UKM/ IKM Yang Dikutsertakan Dalam Event Pameran Promosi Tingkat Lokal, Regional Dan Nasional	125	UKM/ IKM	2.163.880.000		53	UKM/ IKM	154.715.000	0	1.800.000	8	25.590.000	12	52.913.000	22	61.383.075	42	141.686.075	79%	92%	42	141.686.075	34%	7%	DPKUKMP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		79%	93%			44%	17%				
PREDIKAT KINERJA																		T	ST			SR	SR				
		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM;(2).Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi;(3).Tertatannya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional;(4).Tertatannya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	24;(2). 70;(3). 100;(4).100;	Persen;(2) .Persen;(3).Persen;(4).Persen;	85.527.222.075																					
		OPERASIONAL UPTD PASAR KOTA CIMAH	Pembiayaan Kegiatan Operasional UPTD Pasar Kota Cimahi	4	Pasar Rakyat	7.057.122.186		4	Pasar Rakyat	3.794.375.123	1	807.293.845	1	1.031.503.798	1	781.040.654	1	835.215.408	4	3.455.053.705	100%	91%	4	3.455.053.705	100%	49%	DPKUKMP
		PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT	Penataan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar	4	Pasar Rakyat	16.801.171.103		1	Pasar Rakyat	2.570.038.858	0	36.767.600	0	52.399.000	0	206.323.100	1	1.900.938.200	1	2.196.427.900	100%	85%	1	2.196.427.900	25%	13%	DPKUKMP
		PENGELAAAN PERGUDANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG	Jumlah pengelolaan Pergudangan Yang Teridentifikasi	58	Unit Gudang	123.338.069		10	Unit Gudang	10.953.200	0	- 0	1.170.000	0	- 0	- 0	1.170.000	0	1.170.000	0%	11%	0	1.170.000	0%	1%	DPKUKMP	
		PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PASAR MODERN DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	Rekomendasi IUTM Dalam Pengendalian Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Pasar Rakyat	98	Rekomendasi	232.263.019		68	Rekomendasi	27.096.500	0	2.341.500	0	1.962.900	2	2.010.000	7	14.192.100	9	20.506.500	13%	76%	9	20.506.500	9%	9%	DPKUKMP
		PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	Terpromosikannya Produk Yang Berpotensi Ekspor	65	Produk	426.667.136		35	Produk	211.112.540	0	9.250.660	0	25.977.000	20	35.388.900	7	136.396.960	27	207.013.520	77%	98%	27	207.013.520	42%	49%	DPKUKMP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		58%	72%			35%	24%				
PREDIKAT KINERJA																		R	S			SR	SR				
		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi;	0;	Barang;	15.026.703.400																					
		OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH	Terlaksananya Tera Ulang Terhadap UTPP Dalam Transaksi Perdagangan Dalam Mendukung Terciptanya Pasar Terlibt Ukur	1250	UTTP	14.704.564.938		650	UTTP	676.580.400	271	114.682.460	250	273.434.360	595	86.467.432	699	69.823.728	1815	544.407.980	279%	80%	1815	544.407.980	145%	4%	DPKUKMP
		PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	Terpantarnya Barang Kebutuhan Pokok Di Masyarakat	4	Pasar Rakyat	322.138.462		4	Pasar Rakyat	177.366.900	0	1.350.000	1	60.729.800	3	11.544.000	2	53.856.400	6	127.480.200	150%	72%	6	127.480.200	150%	40%	DPKUKMP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		215%	76%			148%	22%				
PREDIKAT KINERJA																		ST	T			ST	SR				
		PERINDUSTRIAN																									
		PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	Jumlah Sentra Industri Pengolahan;	5;	Angka;	1.481.000.002																					
		KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	Dokumen kajian	4	Dokumen	200.000.000		2	Dokumen	98.868.580	0	- 0	- 0	- 1	73.837.800	1	73.837.800	50%	75%	1	73.837.800	25%	37%	DPKUKMP			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		50%	75%			25%	37%				
PREDIKAT KINERJA																		SR	S			SR	SR				
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu;	750;	IKM;	25.014.715.392																					
		FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA	Jumlah IKM Yang Difasilitasi	760	IKM	2.340.000.000		120	IKM	379.417.790	66	21.033.800	203	204.773.600	0	144.850.000	0	- 269	370.657.400	224%	98%	269	370.657.400	35%	16%	DPKUKMP	
		PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLUSTER INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	Jumlah Pelaku IKM Klaster Non Makanan dan Minuman yang mendapatkan pelatihan	920	IKM	1.980.000.000		160	IKM	659.378.200	100	32.753.175	40	126.882.725	80	243.031.575	12	186.785.125	232	589.452.600	145%	89%	232	589.452.600	25%	30%	DPKUKMP
		PEMBINAAN KETERKAITAN INDUSTRI INDUSTRI HULU HINGGA KE HILIR	Terselenggaranya pertemuan antara IKM dengan Perusahaan Swasta	4	Kali	850.000.000		1	Kali	145.757.200	0	- 1	106.120.400	0	- 0	14.451.800	1	120.572.200	100%	83%	1	120.572.200	25%	14%	DPKUKMP		
		PEMBINAAN KEMAMPUAN, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah Pelaku IKM Klaster Makanan dan Minuman yang mendapat pelatihan	840	IKM	1.810.000.000		140	IKM	276.907.850	116	104.526.440	0	6.843.200	65	57.277.400	65	63.784.000	246	232.431.040	176%	84%	246	232.431.040	29%	13%	DPKUKMP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4	12	Bulan	17.234.715.392		12	Bulan	4.128.343.380	3	659.735.371	3	1.029.976.996	3	827.377.191	3	1.191.788.676	12	3.708.878.234	100%	90%	12	3.708.878.234	100%	22%	DPKUKMP					
		PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah modul yang dikembangkan	4	Modul	300.000.000		4	Modul	96.250.000	0	2.100.000	3	65.469.000	1	6.200.000	0	3.250.000	4	77.019.000	100%	80%	4	77.019.000	100%	26%	DPKUKMP					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																										141%	87%			52%	20%	
PREDIKAT KINERJA																										ST	T			R	SR	
		PERTANIAN																														
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Persentase Kelompok Tani, Peternak, Dan Pembudidaya Ikan Yang Mendapatkan Pelatihan Yang Terstandarisasi	57;	Persen;	2.199.023.875																										
		PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	Jml. Kelompok tani yang menerapkan metode teknik pertanian, pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk, penggunaan alsintan	17	Kelompok	2.199.023.875		0	Kelompok	291.206.000	0	71.486.000	0	73.116.000	0	43.928.600	0	93.150.000	0	281.680.600	100%	97%	0	281.680.600	0%	13%	Dinas Pangan					
		PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	Jumlah kelompok tani yg mengikuti/mendapatkan pelatihan (Pelatihan IT)	200	Orang	2.199.023.875		50	Orang	291.206.000	0	71.486.000	0	73.116.000	0	43.928.600	0	93.150.000	0	281.680.600	0%	97%	0	281.680.600	0%	13%	Dinas Pangan					
		PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	Jumlah kelompok tani yg mengikuti/mendapatkan pelatihan (Pelatihan Kewirausahaan dan penguatan kelembagaan)	200	Orang	2.199.023.875		50	Orang	291.206.000	0	71.486.000	30	73.116.000	0	43.928.600	0	93.150.000	30	281.680.600	60%	97%	30	281.680.600	15%	13%	Dinas Pangan					
		PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	Jumlah pembudidaya ikan yg mengikuti/mendapatkan pelatihan (Pelatihan IT)	80	Orang	2.199.023.875		20	Orang	291.206.000	0	71.486.000	0	73.116.000	0	43.928.600	0	93.150.000	0	281.680.600	0%	97%	0	281.680.600	0%	13%	Dinas Pangan					
		PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	Jumlah pembudidaya ikan yg mengikuti/mendapatkan pelatihan (Pelatihan Kewirausahaan dan penguatan kelembagaan)	80	Orang	2.199.023.875		20	Orang	291.206.000	0	71.486.000	30	73.116.000	0	43.928.600	0	93.150.000	30	281.680.600	150%	97%	30	281.680.600	38%	13%	Dinas Pangan					
		PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	Jumlah peternak yg mengikuti/mendapatkan pelatihan (Pelatihan IT)	80	Orang	2.199.023.875		20	Orang	291.206.000	0	71.486.000	0	73.116.000	0	43.928.600	0	93.150.000	0	281.680.600	0%	97%	0	281.680.600	0%	13%	Dinas Pangan					
		PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	Jumlah peternak yg mengikuti/mendapatkan pelatihan (Pelatihan Kewirausahaan dan penguatan kelembagaan)	80	Orang	2.199.023.875		20	Orang	291.206.000	0	71.486.000	30	73.116.000	0	43.928.600	0	93.150.000	30	281.680.600	150%	97%	30	281.680.600	38%	13%	Dinas Pangan					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																										66%	97%			13%	13%	
PREDIKAT KINERJA																										R	ST			SR	SR	
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUK PERTANIAN/PETERNAKAN/PERIK NAN	Persentase Keikutsertaan Dalam Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah;	100;	Persen;	1.491.122.068																										
		PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	Keikutsertaan dalam pameran (HKP Tk. Provinsi)	1	Kali	728.679.875		1	Kali	48.005.500	0	-	0	11.455.500	1	35.400.000	0	1.050.000	1	47.905.500	100%	100%	1	47.905.500	100%	7%	Dinas Pangan					
		PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	Keikutsertaan dalam pameran (HPS tk Prov dan Nasional)	2	0	728.679.875		2	0	48.005.500	0	-	0	11.455.500	0	35.400.000	0	1.050.000	0	47.905.500	0%	100%	0	47.905.500	0%	7%	Dinas Pangan					
		PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	Keikutsertaan dalam pameran (Jambore)	1	Kali	728.679.875		0	Kali	48.005.500	0	-	0	11.455.500	0	35.400.000	0	1.050.000	0	47.905.500	100%	100%	0	47.905.500	0%	7%	Dinas Pangan					
		PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	Keikutsertaan dalam pameran (Penas)	1	Kali	728.679.875		0	Kali	48.005.500	0	-	0	11.455.500	0	35.400.000	0	1.050.000	0	47.905.500	100%	100%	0	47.905.500	0%	7%	Dinas Pangan					
		PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH	Jumlah pelaksanaan promosi produk peternakan	1	Kali	305.501.636		1	Kali	24.584.500	0	-	0	3.599.997	1	20.000.000	0	-	1	23.599.997	100%	96%	1	23.599.997	100%	8%	Dinas Pangan					
		TEMU USAHA PERIKANAN	Kesepakatan kerjasama	5	kesepakata n	447.432.289		2	kesepakata n	23.080.500	0	-	0	-	0	-	2	23.061.000	2	23.061.000	100%	100%	2	23.061.000	40%	5%	Dinas Pangan					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																										83%	99%			40%	7%	
PREDIKAT KINERJA																										T	ST			SR	SR	
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN /PETERNAKAN SERTA PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Rasio Jumlah Ternak Sakit Yg Ditangani Terhadap Jumlahpopulasi Ternak Yg Terjangkit Penyakit;	1,1;	Rasio;	11.668.476.200																										
		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah ternak yang diperiksa	3000	Ekor	525.782.105		3000	Ekor	133.658.990	0	680.000	0	28.467.400	3860	88.781.200	0	500.000	3860	118.428.600	129%	89%	3860	118.428.600	129%	23%	Dinas Pangan					
		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah ternak yang terjangkit penyakit endemik yang diminusahkan (hewan penyebar rabies)	100	Ekor	525.782.105		100	Ekor	133.658.990	0	680.000	0	28.467.400	0	88.781.200	0	500.000	0	118.428.600	0%	89%	0	118.428.600	0%	23%	Dinas Pangan					
		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah ternak yang terjangkit penyakit endemik yang diminusahkan (unggas)	500	Ekor	525.782.105		500	Ekor	133.658.990	0	680.000	0	28.467.400	0	88.781.200	0	500.000	0	118.428.600	0%	89%	0	118.428.600	0%	23%	Dinas Pangan					
		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tahap pembentukan RPH/RPU	0	Opera sional	525.782.105		0	RPH/RPU	133.658.990	0	680.000	0	28.467.400	0	88.781.200	0	500.000	0	118.428.600	100%	89%	0	118.428.600	100%	23%	Dinas Pangan					
		PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN TERNAK	Jumlah benih yang dihasilkan	0	Ekor	293.662.598		0	Ekor	73.810.000	0	58.479.740	0	-	0	14.000.000	0	500.000	0	72.979.740	100%	99%	0	72.979.740	100%	25%	Dinas Pangan					
		PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN TERNAK	Jumlah hewan yang divaksinasi (ekor)(flu burung)	600	Ekor	293.662.598		600	Ekor	73.810.000	177	58.479.740	86	-	337	14.000.000	0	500.000	600	72.979.740	100%	99%	600	72.979.740	100%	25%	Dinas Pangan					
		PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN TERNAK	Jumlah hewan yang divaksinasi (ekor)(rabies)	600	Ekor	293.662.598		600	Ekor	73.810.000	234	58.479.740	253	-	112	14.000.000	0	500.000	599	72.979.740	100%	99%	599	72.979.740	100%	25%	Dinas Pangan					
		PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN TERNAK	Jumlah induk yang dihasilkan	0	Ekor	293.662.598		0	Ekor	73.810.000	0	58.479.740	0	-	0	14.000.000	0	500.000	0	72.979.740	100%	99%	0	72.979.740	100%	25%	Dinas Pangan					
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	Jumlah kelompok tani yang tercatat berlembaga	22	Kelompok	1.056.305.844		9	Kelompok	144.402.000	6	49.526.000	0	50.540.000	0	18.210.000	0	22.410.000	6	140.686.000	67%	97%	6	140.686.000	27%	13%	Dinas Pangan					
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	Jumlah pembudidaya ikan yang menerapkan metode bioflok dan booster	10	Pembudida ya	1.056.305.844		7	Pembudida ya	144.402.000	3	49.526.000	3	50.540.000	0	18.210.000	5	22.410.000	11	140.686.000	157%	97%	11	140.686.000	110%	13%	Dinas Pangan					
		PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	Jumlah ternak yang ditangani/diobati	7000	Ekor	1.995.244.373		5500	Ekor	601.800.410	2336	110.804.500	2048	245.417.000	2095	118.672.075	2330	93.248.000	8809	568.141.575	160%	94%	8809	568.141.575	126%	28%	Dinas Pangan					
		PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN	Jumlah komoditas yang dikembangkan	3	komoditas	220.209.253		3	komoditas	31.299.000	0	2.500.000	0	3.150.000	0	15.900.000	1	1.000.000	1	22.550.000	33%	72%	1	22.550.000	33%	10%	Dinas Pangan					
		PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN	Jumlah masalah ternak yang teridentifikasi	3	Kasus	220.209.253		3	Kasus	31.299.000	0	2.500.000	0	3.150.000	0	15.900.000	1	1.000.000	1	22.550.000	33%	72%	1	22.550.000	33%	10%	Dinas Pangan					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	3	komoditas	278.342.688	3	komoditas	177.086.000	3	47.845.500	0	72.444.000	0	18.575.000	0	28.440.000	3	167.304.500	100%	94%	3	167.304.500	100%	60%	Dinas Pangan			
		PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	Jumlah komoditas yang dikembangkan	70	Persen	278.342.688	70	Persen	177.086.000	10,71	47.845.500	34,29	72.444.000	15,2	18.575.000	0	28.440.000	2,52917	167.304.500	4%	94%	2,529	167.304.500	4%	60%	Dinas Pangan			
		PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL	Jml. jenis ikan konsumsi yang dikembangkan	4	Kali	4.595.634.626	4	Kali	481.738.900	2	81.328.500	0	102.555.000	0	91.176.000	0	117.954.500	2	393.014.000	50%	82%	2	393.014.000	50%	9%	Dinas Pangan			
		PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN HIAS	Jumlah benih yang dihasilkan	8000	Ekor	1.058.320.220	1000	Ekor	337.675.000	250	78.572.000	250	109.786.000	250	29.042.000	300	60.294.000	1050	277.694.000	105%	82%	1050	277.694.000	13%	26%	Dinas Pangan			
		PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN HIAS	Jumlah induk yang dihasilkan	80	Pasang	1.058.320.220	10	Pasang	337.675.000	0	78.572.000	0	109.786.000	10	29.042.000	2	60.294.000	12	277.694.000	120%	82%	12	277.694.000	15%	26%	Dinas Pangan			
		PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat (kg/kapitahun)	15	kg/kapitahun	606.224.863	13	kg/kapitahun	106.070.000	0	-	0	-	31	105.609.500	31,16	-	62,16	105.609.500	478%	100%	62,16	105.609.500	414%	17%	Dinas Pangan			
		PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERIKANAN/PENYULUH PERTANIAN	Jml. aparatur perikanan yang mengikuti penyuluhan	5	Orang	250.595.976	5	Orang	49.670.000	0	120.000	1	27.275.000	1	22.275.000	7	-	9	49.670.000	180%	100%	9	49.670.000	180%	20%	Dinas Pangan			
		PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Jml. kelompok tani yang menerapkan metode teknik bertanam, pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk, penggunaan alsintan	25	Kelompok	783.358.400	20	Kelompok	251.198.000	8	-	12	-	0	19.400.000	20	10.000.000	40	29.400.000	200%	12%	40	29.400.000	160%	4%	Dinas Pangan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							110%	87%			90%	23%	
PREDIKAT KINERJA																							ST	T			T	SR	
		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR KESEHATAN																											
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional:	100;	Persen;	91.115.600.000																							
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIBEBER	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cibeber	100	Persen	3.561.336.000	100	Persen	969.533.810	21,89	168.818.400	8,47	166.252.214	6,46	108.447.400	5,79	327.875.184	42,61	771.393.198	43%	80%	42,61	771.393.198	43%	22%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIBEUREUM	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cibeureum	100	Persen	6.550.272.000	100	Persen	2.107.248.352	16,14	350.350.470	5,49	349.470.860	3,19	256.163.860	2,31	637.809.240	27,13	1.593.794.430	27%	76%	27,13	1.593.794.430	27%	24%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIGUGUR TENGAH	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cigugur Tengah	100	Persen	6.704.136.000	100	Persen	1.630.856.051	7,41	163.919.847	6,93	234.592.990	5,96	154.152.940	3,15	682.089.680	23,45	1.234.755.457	23%	76%	23,45	1.234.755.457	23%	18%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cimahi Selatan	100	Persen	6.184.296.000	100	Persen	1.640.483.027	16,75	176.227.000	11,61	256.551.500	24,12	208.219.640	5,92	740.397.940	58,4	1.381.396.080	58%	84%	58,4	1.381.396.080	58%	22%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cimahi Tengah	100	Persen	7.621.704.000	100	Persen	1.836.890.204	7,71	253.113.138	8,85	305.928.900	3,48	252.602.548	4,43	851.757.025	24,47	1.663.401.611	24%	91%	24,47	1.663.401.611	24%	22%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI UTARA	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara	100	Persen	7.267.752.000	100	Persen	2.571.286.683	6,45	199.458.560	3,15	314.562.780	4,01	212.984.600	3,3	1.139.898.186	16,91	1.866.904.126	17%	73%	16,91	1.866.904.126	17%	26%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIPAGERAN	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran	100	Persen	6.166.728.000	100	Persen	1.798.913.417	4,36	188.595.530	3,05	377.960.280	3,79	185.698.940	3,24	619.659.680	14,44	1.371.914.430	14%	76%	14,44	1.371.914.430	14%	22%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CITEUREUP	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Citeureup	100	Persen	4.915.080.000	100	Persen	1.296.034.103	21,57	190.887.505	16,14	215.385.880	2,12	140.730.400	13,65	603.175.280	53,48	1.150.179.065	53%	89%	53,48	1.150.179.065	53%	23%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	25	Persen	400.000.000	10	Persen	162.020.000	5,62	28.124.630	2,75	108.403.792	4,19	500.000	1,71	4.467.400	14,27	141.495.822	143%	87%	14,27	141.495.822	57%	35%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS LEUWIGAJAH	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Leuwigajah	100	Persen	3.965.616.000	100	Persen	1.242.066.428	24,26	182.231.180	14,5	163.298.180	21,63	120.952.245	19,03	485.692.910	79,42	952.174.515	79%	77%	79,42	952.174.515	79%	24%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS MELONG ASIH	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Melong Asih	100	Persen	5.696.568.000	100	Persen	1.666.011.783	18,24	158.987.100	6,77	212.332.100	4,77	223.772.341	9,77	748.762.575	39,55	1.343.854.116	40%	81%	39,55	1.343.854.116	40%	24%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS MELONG TENGAH	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Melong Tengah	100	Persen	3.281.400.000	100	Persen	908.819.960	3,08	103.536.260	2,18	138.669.700	20,8	128.932.300	7,97	391.276.920	34,03	762.415.180	34%	84%	34,03	762.415.180	34%	23%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS PADASUKA	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Padasuka	100	Persen	6.878.664.000	100	Persen	1.930.720.438	5,92	187.808.140	4,44	323.538.040	4,76	175.409.140	4,2	904.201.488	19,32	1.590.956.808	19%	82%	19,32	1.590.956.808	19%	23%	DINKES			
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS PASIRKALIKI	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki	100	Persen	2.922.048.000	100	Persen	641.320.592	32,24	87.003.620	13,35	96.239.580	16,57	64.127.320	21,06	294.089.601	83,22	541.460.121	83%	84%	83,22	541.460.121	83%	19%	DINKES			
		PEMBIAYAAN KESEHATAN KOTA CIMAHI	Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	100	Persen	16.800.000.000	100	Persen	11.122.011.100	0	1.711.583.340	0	1.102.631.074	0	52.378.000	41,07	7.918.750.858	41,07	10.785.343.272	41%	97%	41,07	10.785.343.272	41%	64%	DINKES			
		PEMBIAYAAN KESEHATAN KOTA CIMAHI	Persentase pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda)	100	Persen	16.800.000.000	100	Persen	11.122.011.100	37,93	1.711.583.340	25,64	1.102.631.074	35,76	52.378.000	39,52	7.918.750.858	138,85	10.785.343.272	139%	97%	138,9	10.785.343.272	139%	64%	DINKES			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							52%	83%			47%	29%	
PREDIKAT KINERJA																							R	T			SR	SR	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Dengan Strata Madva:	92,31;	Persen;	24.060.000.000																							
		AKREDITASI PUSKESMAS	Jumlah Puskesmas re-akreditasi	13	PKM	2.508.000.000	3	PKM	1.232.649.000	0	163.351.300	0	230.975.000	0	121.125.000	3	612.072.145	3	1.127.523.445	100%	91%	3	1.127.523.445	23%	45%	DINKES			
		AKREDITASI PUSKESMAS	Jumlah puskesmas yang ter-Akreditasi	10	PKM	2.508.000.000	3	PKM	1.232.649.000	0	163.351.300	0	230.975.000	0	121.125.000	3	612.072.145	3	1.127.523.445	100%	91%	3	1.127.523.445	30%	45%	DINKES			
		EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya	3	Unit	1.975.000.000	2	Unit	446.323.075	0	22.840.620	0	48.365.000	0	48.152.000	2	227.206.031	2	346.563.651	100%	78%	2	346.563.651	67%	18%	DINKES			
		PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan	0	Persen	3.455.000.000	100	Persen	999.067.000	50	15.417.000	50	508.381.000	0	432.700.000	0	12.150.000	100	968.648.000	100%	97%	100	968.648.000	100%	28%	DINKES			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)			Unit SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													I		II		III		IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			13=6+12			14=(13/5)x100%			15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	</

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	100	Persen	242.000.000		100	Persen	60.000.000	0	2.490.000	50	29.207.000	0	1.050.000	50	25.103.000	100	57.850.000	100%	96%	100	57.850.000	100%	24%	DINKES
		PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN / MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	Persentase peserta penyuluhan keamanan pangan yang lulus dan mendapatkan sertifikat	100	Persen	242.000.000		100	Persen	60.000.000	20	2.490.000	30	29.207.000	41	1.050.000	9	25.103.000	100	57.850.000	100%	96%	100	57.850.000	100%	24%	DINKES
		PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN / MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100	Persen	242.000.000		100	Persen	60.000.000	20	2.490.000	30	29.207.000	41	1.050.000	9	25.103.000	100	57.850.000	100%	96%	100	57.850.000	100%	24%	DINKES
		PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	Jumlah kantin /warung sekolah (PKJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	48	Unit	203.000.000		42	Unit	50.000.000	10	1.375.000	10	5.776.000	3	18.606.200	23	22.556.800	46	48.314.000	110%	97%	46	48.314.000	96%	24%	DINKES
		PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapat pembinaan dan pengawasan	48	Unit	203.000.000		42	Unit	50.000.000	6	1.375.000	6	5.776.000	15	18.606.200	42	22.556.800	69	48.314.000	164%	97%	69	48.314.000	144%	24%	DINKES
		PENINGKATAN SURVEILANCE EPIDEMIOLOGI PENANGGULANGAN WABAH	Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun	4	Orang	730.000.000		4	Orang	152.657.000	3	21.353.500	1	52.776.000	0	32.600.000	0	40.483.000	4	147.212.500	100%	96%	4	147.212.500	100%	20%	DINKES
		PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	15	Unit	880.000.000		8	Unit	115.260.000	1	-	1	41.956.400	1	73.271.600	2	-	5	115.228.000	63%	100%	5	115.228.000	33%	13%	DINKES
		PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	90	Persen	880.000.000		80	Persen	115.260.000	0	-	94,55	41.956.400	0	73.271.600	0	-	94,55	115.228.000	118%	100%	94,55	115.228.000	105%	13%	DINKES
		PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	75	Persen	3.830.000.000		60	Persen	814.600.000	0	182.111.000	0	170.264.000	0	71.945.000	50,93	288.502.900	50,93	712.822.900	85%	88%	50,93	712.822.900	68%	19%	DINKES
		PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan mandiri	80	Persen	3.830.000.000		50	Persen	814.600.000	0	182.111.000	50	170.264.000	50	71.945.000	31,73	288.502.900	131,73	712.822.900	263%	88%	131,7	712.822.900	165%	19%	DINKES
		PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase rumah sehat	68	Persen	1.380.000.000		65	Persen	79.170.000	0	8.320.000	0	23.300.000	0	24.491.000	68	8.600.000	68	64.711.000	105%	82%	68	64.711.000	100%	5%	DINKES
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					110%	88%			178%	14%	
PREDIKAT KINERJA																					ST	T			ST	SR	
		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT																									
		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA	Peresentase Korban Bencana Yang Di Evakuasi ;	100;	Persen;	13.624.739.125																					
		FASILITASI DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM	Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana	50	Rumah	2.437.000.000		40	Rumah	266.352.500	0	14.143.000	0	13.953.000	0	41.520.693		179.675.500	0	249.292.193	0%	94%	0	249.292.193	0%	10%	BPBD
		MITIGASI BENCANA	Dokumen kajian	4	Dokumen	1.445.000.000		1	Dokumen	265.149.218	0	-	1	36.252.218	0	191.585.000		35.590.000	1	263.427.218	100%	99%	1	263.427.218	25%	18%	BPBD
		PELATIHAN PENAKSIRAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	250	Orang	963.999.149		50	Orang	165.176.600	50	159.776.600	0	1.464.000	0	-	-	50	161.240.600	100%	98%	50	161.240.600	20%	17%	BPBD	
		PELATIHAN SIMULASI PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Jumlah titik simulasi (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perkantoran)	30	Titik	900.000.000		3	Titik	155.614.320	0	-	0	-	3	149.187.500		5.050.000	3	154.237.500	100%	99%	3	154.237.500	10%	17%	BPBD
		PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN POTENSI BENCANA	Jumlah titik rawan bencana di kelurahan yang terpantau	15	Kelurahan	1.330.000.000		15	Kelurahan	379.950.826	3	72.390.326	4	239.725.500	4	6.670.000		43.865.000	11	362.650.826	73%	95%	11	362.650.826	73%	27%	BPBD
		PENGELOLAAN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA	Jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang didistribusikan	440	Kejadian	859.230.000		90	Kejadian	859.433.560	27	232.810.745	24	182.615.000	64	180.670.000		260.930.388	115	857.026.133	128%	100%	115	857.026.133	26%	100%	BPBD
		PENINGKATAN KAPASITAS TANGGAP DARURAT BENCANA	Jumlah pelatihan	20	Orang	1.521.764.000		20	Orang	235.530.905	0	17.697.483	0	12.769.800	20	13.105.000		184.755.200	20	228.327.483	100%	97%	20	228.327.483	100%	15%	BPBD
		PENINGKATAN KAPASITAS TANGGAP DARURAT BENCANA	Jumlah paket perlengkapan tanggap darurat bencana	4	Paket	1.521.764.000		1	Paket	235.530.905	0	17.697.483	0	12.769.800	0	13.105.000		184.755.200	0	228.327.483	0%	97%	0	228.327.483	0%	15%	BPBD
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					75%	97%			32%	27%	
PREDIKAT KINERJA																					S	ST			SR	SR	
		PROGRAM KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Persentase Wilayah Yang Terpantau;	100;	Persen;	6.474.171.476																					
		PEMANTAUAN DAN PENGAMANAN WILAYAH	Persentase daerah yang terpantau	100	Persen	2.496.150.000		100	Persen	382.340.000	25	94.140.000	25	93.050.000	25	94.950.000		100.150.000	75	382.290.000	75%	100%	75	382.290.000	75%	15%	KESBANG
		PENINGKATAN KOORDINASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah kegiatan koordinasi	12	Kali	3.533.000.000		12	Kali	1.549.600.000	3	287.175.000	3	287.175.000	3	276.950.000		639.554.400	9	1.490.854.400	75%	96%	9	1.490.854.400	75%	42%	KESBANG
		PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT	Jumlah masyarakat yang terbina	600	Orang	445.000.000		450	Orang	104.100.000	0	-	0	-	0	-		100.610.000	0	100.610.000	0%	97%	0	100.610.000	0%	23%	KESBANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					50%	98%			50%	27%	
PREDIKAT KINERJA																					SR	ST			SR	SR	
		PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;	100;	Persen;	29.660.307.805																					
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	115	Lokasi	282.436.200		115	Lokasi	127.700.000	31	28.807.000	21	36.384.000	30	21.374.000	33	38.801.000	115	125.366.000	100%	98%	115	125.366.000	100%	44%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBEBER	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	20	Lokasi	716.747.100		20	Lokasi	208.133.800	3	48.150.000	3	55.050.000	3	43.650.000	5	55.050.000	14	201.900.000	70%	97%	14	201.900.000	70%	28%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBEUREUM	Jumlah Petugas Linmas yang mendapatkan pembinaan	29	Lokasi	1.183.950.300		29	Lokasi	382.590.000	12	82.620.000	6	108.612.000	6	94.446.000	5	96.912.000	29	382.590.000	100%	100%	29	382.590.000	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LEUWIGAJAH	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	20	Lokasi	1.035.928.400		20	Lokasi	301.830.000	4	71.550.000	0	74.775.000	8	71.100.000	8	79.545.000	20	296.970.000	100%	98%	20	296.970.000	100%	29%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MELONG	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	36	Lokasi	1.686.250.200		36	Lokasi	472.315.500	9	112.170.000	9	133.890.000	9	105.330.000	9	120.210.000	36	471.600.000	100%	100%	36	471.600.000	100%	28%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN UTAMA	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	16	Lokasi	921.653.900		16	Lokasi	270.888.000	3	54.000.000	3	81.124.000	4	57.672.000	6	78.092.000	16	270.888.000	100%	100%	16	270.888.000	100%	29%	KEC CIMAHI SELATAN
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI TENGAH	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	110	RW	560.456.000		110	RW	121.749.000	110	28.346.500	110	35.771.500	110	25.970.500	110	30.027.500	440	120.116.000	400%	99%	440	120.116.000	400%	21%	KEC CIMAHI TENGAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				5			6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	25	RW	785.714.000	25	RW	225.374.000	25	56.218.000	25	55.918.000	25	56.711.000	25	56.475.000	100	225.322.000	400%	100%	100	225.322.000	400%	29%	KEC CIMAHI TENGAH	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN BAROS	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	19	RW	820.036.000	19	RW	249.893.000	19	56.100.000	19	62.230.000	19	62.493.000	19	62.500.000	76	243.323.000	400%	97%	76	243.323.000	400%	30%	KEC CIMAHI TENGAH	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	10	RW	411.983.000	10	RW	122.770.000	10	29.730.000	10	30.542.500	10	31.132.000	10	31.365.500	40	122.770.000	400%	100%	40	122.770.000	400%	30%	KEC CIMAHI TENGAH	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CIMAHI	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	17	RW	652.627.000	17	RW	171.323.000	17	42.650.000	17	50.350.000	17	38.800.000	17	38.800.000	68	170.600.000	400%	100%	68	170.600.000	400%	26%	KEC CIMAHI TENGAH	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN KARANGMEKAR	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	21	RW	1.103.162.000	21	RW	323.050.000	21	80.762.500	21	80.762.500	21	80.762.500	21	80.762.500	84	323.050.000	400%	100%	84	323.050.000	400%	29%	KEC CIMAHI TENGAH	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN PADASUKA	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	18	RW	696.663.000	18	RW	202.760.000	18	50.945.500	18	49.752.000	18	47.592.000	18	47.646.500	72	195.936.000	400%	97%	72	195.936.000	400%	28%	KEC CIMAHI TENGAH	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SETAMANAH	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	87	RW	384.169.000	87	RW	77.889.000	87	20.940.000	87	16.725.000	87	20.070.000	87	20.154.000	348	77.889.000	400%	100%	348	77.889.000	400%	20%	KEC CIMAHI UTARA	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI UTARA	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	25	RW	1.299.715.500	25	RW	349.788.000	25	87.540.750	25	87.345.000	25	87.557.250	25	87.345.000	100	349.788.000	400%	100%	100	349.788.000	400%	27%	KEC CIMAHI UTARA	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CIBABAT	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	29	RW	1.210.078.000	29	RW	368.475.000	29	92.700.000	29	89.655.000	29	92.790.000	29	92.025.000	116	367.170.000	400%	100%	116	367.170.000	400%	30%	KEC CIMAHI UTARA	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CITEUREUP	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	19	RW	1.032.106.000	19	RW	313.147.000	19	79.207.000	19	78.760.000	19	78.760.000	19	75.880.000	76	312.607.000	400%	100%	76	312.607.000	400%	30%	KEC CIMAHI UTARA	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN PASIRKALIKI	Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling	14	RW	746.046.000	14	RW	216.717.000	14	54.273.000	14	54.270.000	14	54.564.000	14	53.070.000	56	216.177.000	400%	100%	56	216.177.000	400%	29%	KEC CIMAHI UTARA	
		FASILITASI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1) Terlaksananya Peringatan HUT Linmas	1	Kali	543.600.000	1	Kali	88.480.000	1	10.750.000	0	50.660.000	0	24.000.000		-	1	85.410.000	100%	97%	1	85.410.000	100%	16%	Satpol PP dan Damkar	
		FASILITASI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2) Jumlah Pelibatan Linmas Dalam Peringatan HBHT	2	Kali	543.600.000	2	Kali	88.480.000	0	10.750.000	1	50.660.000	1	24.000.000		-	2	85.410.000	100%	97%	2	85.410.000	100%	16%	Satpol PP dan Damkar	
		FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGAMANAN PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PENGAMANAN PEMILIHAN LEGISLATIF	1) Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif	1	Kali	52.500.000	1	Kali	113.810.000	0	45.616.000	1	38.552.000	0	-		-	1	84.168.000	100%	74%	1	84.168.000	100%	160%	Satpol PP dan Damkar	
		FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGAMANAN PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PENGAMANAN PEMILIHAN LEGISLATIF	2) Jumlah Penerbitan Alat Peraga Kampanye Pra Pelaksanaan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif	3	Kali	52.500.000	3	Kali	113.810.000	2	45.616.000	1	38.552.000	0	-		-	3	84.168.000	100%	74%	3	84.168.000	100%	160%	Satpol PP dan Damkar	
		FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGAMANAN PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PENGAMANAN PEMILIHAN LEGISLATIF	3) Jumlah Penerbitan Alat Peraga (Masa Tenang) Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif	3	Kali	52.500.000	3	Kali	113.810.000	0	45.616.000	3	38.552.000	0	-		-	3	84.168.000	100%	74%	3	84.168.000	100%	160%	Satpol PP dan Damkar	
		PEMBINAAN LINMAS	1) Jumlah Pendataan Anggota Linmas	1	Kali	656.600.000	0	Kali	149.616.000	0	36.291.000	0	113.325.000	0	-		-	0	149.616.000	100%	100%	0	149.616.000	0%	23%	Satpol PP dan Damkar	
		PEMBINAAN LINMAS	2) Jumlah Lomba PBB	1	Kali	656.600.000	1	Kali	149.616.000	0	36.291.000	1	113.325.000	0	-		-	1	149.616.000	100%	100%	1	149.616.000	100%	23%	Satpol PP dan Damkar	
		PEMBINAAN LINMAS	3) Jumlah Pelatihan Anggota Linmas	1	Kali	656.600.000	1	Kali	149.616.000	0	36.291.000	0	113.325.000	0	-		-	0	149.616.000	0%	100%	0	149.616.000	0%	23%	Satpol PP dan Damkar	
		PEMBINAAN LINMAS	4) Jumlah pembinaan anggota linmas	15	Kali	656.600.000	10	Kali	149.616.000	3	36.291.000	3	113.325.000	0	-		-	6	149.616.000	60%	100%	6	149.616.000	40%	23%	Satpol PP dan Damkar	
		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	1) Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan	12	Kali	1.972.771.242	10	Kali	494.542.000	3	94.191.000	2	70.064.000	5	148.219.000		168.948.000	10	481.422.000	100%	97%	10	481.422.000	83%	24%	Satpol PP dan Damkar	
		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	2) Jumlah Gerakan Disiplin Daerah	6	Kali	1.972.771.242	3	Kali	494.542.000	1	94.191.000	1	70.064.000	1	148.219.000		168.948.000	3	481.422.000	100%	97%	3	481.422.000	50%	24%	Satpol PP dan Damkar	
		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	3) Jumlah Peningkatan Kapasitas CPNS dan Petugas Penegakan Perda	1	Kali	1.972.771.242	1	Kali	494.542.000	0	94.191.000	0	70.064.000	0	148.219.000		168.948.000	0	481.422.000	0%	97%	0	481.422.000	0%	24%	Satpol PP dan Damkar	
		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	4) Jumlah Penegakan Perda Dan Peraturan Walikota	4	Kali	1.972.771.242	3	Kali	494.542.000	0	94.191.000	0	70.064.000	0	148.219.000		168.948.000	0	481.422.000	0%	97%	0	481.422.000	0%	24%	Satpol PP dan Damkar	
		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	5) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan	12	Bulan	1.972.771.242	12	Bulan	494.542.000	2	94.191.000	3	70.064.000	0	148.219.000		168.948.000	5	481.422.000	42%	97%	5	481.422.000	42%	24%	Satpol PP dan Damkar	
		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	6) Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional	1	Paket	1.972.771.242	0	Paket	494.542.000	0	94.191.000	0	70.064.000	0	148.219.000		168.948.000	0	481.422.000	100%	97%	0	481.422.000	0%	24%	Satpol PP dan Damkar	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	1) Jumlah Bulan Pelaksanaan Piket/Penjagaan Aset Vital Daerah	12	Bulan	9.544.588.227	12	Bulan	3.011.435.000	2	431.770.782	3	950.126.600	3	579.423.000		831.407.750	8	2.792.728.132	67%	93%	8	2.792.728.132	67%	29%	Satpol PP dan Damkar	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	10) Jumlah Hari Pengawalan Walikota/ Wakil Walikota	12	Hari	9.544.588.227	240	Hari	3.011.435.000	0	431.770.782	0	950.126.600	0	579.423.000		831.407.750	0	2.792.728.132	0%	93%	0	2.792.728.132	0%	29%	Satpol PP dan Damkar	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	11) Jumlah Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diamankan	1	Kali	9.544.588.227	0	Kali	3.011.435.000	0	431.770.782	0	950.126.600	0	579.423.000		831.407.750	0	2.792.728.132	100%	93%	0	2.792.728.132	0%	29%	Satpol PP dan Damkar	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	12) Jumlah Pemilu (Pilkada) yang diamankan	1	Kali	9.544.588.227	0	Kali	3.011.435.000	0	431.770.782	0	950.126.600	0	579.423.000		831.407.750	0	2.792.728.132	100%	93%	0	2.792.728.132	0%	29%	Satpol PP dan Damkar	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	13) Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Alat Peraga Kampanye Pemilu (Pilkada)	1	Kali	9.544.588.227	0	Kali	3.011.435.000	0	431.770.782	0	950.126.600	0	579.423.000		831.407.750	0	2.792.728.132	100%	93%	0	2.792.728.132	0%	29%	Satpol PP dan Damkar	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	14) Jumlah Bulan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	12	Bulan	9.544.588.227	12	Bulan	3.011.435.000	2	431.770.782	0	950.126.600	2	579.423.000		831.407.750	4	2.792.728.132	33%	93%	4	2.792.728.132	33%	29%	Satpol PP dan Damkar	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	15) Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional	1	Paket	9.544.588.227	0	Paket	3.011.435.000	1	431.770.782	0	950.126.600	0	579.423.000		831.407.750	1	2.792.728.132	100%	93%	1	2.792.728.132	100%	29%	Satpol PP dan Damkar	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%		15		
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	2) Jumlah Unjuk Rasa yang diamankan	12	Kali	9.544.588.227		12	Kali	3.011.435.000	1	431.770.782	2	950.126.600	2	579.423.000		831.407.750	5	2.792.728.132	42%	93%	5		2.792.728.132	42%	29%	Satpol PP dan Damkar
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	3) Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Bangunan Liar	5	Kali	9.544.588.227		4	Kali	3.011.435.000	1	431.770.782	2	950.126.600	0	579.423.000		831.407.750	3	2.792.728.132	75%	93%	3		2.792.728.132	60%	29%	Satpol PP dan Damkar
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	4) Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Pedangang Kaki Lima	10	Kali	9.544.588.227		24	Kali	3.011.435.000	5	431.770.782	4	950.126.600	8	579.423.000		831.407.750	17	2.792.728.132	71%	93%	17		2.792.728.132	170%	29%	Satpol PP dan Damkar
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	5) Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Penyakit Masyarakat	1	Kali	9.544.588.227		2	Kali	3.011.435.000	0	431.770.782	0	950.126.600	0	579.423.000		831.407.750	0	2.792.728.132	0%	93%	0		2.792.728.132	0%	29%	Satpol PP dan Damkar
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	6) Jumlah HBHT yang diamankan	6	Kali	9.544.588.227		6	Kali	3.011.435.000	0	431.770.782	0	950.126.600	2	579.423.000		831.407.750	2	2.792.728.132	33%	93%	2		2.792.728.132	33%	29%	Satpol PP dan Damkar
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	7) Jumlah Daerah Rawan PKL yang diawasi	6	Titik	9.544.588.227		6	Titik	3.011.435.000	0	431.770.782	0	950.126.600	6	579.423.000		831.407.750	6	2.792.728.132	100%	93%	6		2.792.728.132	100%	29%	Satpol PP dan Damkar
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	8) Jumlah Pelaksanaan Penurunan Spanduk/Balopo	10	Kali	9.544.588.227		12	Kali	3.011.435.000	2	431.770.782	6	950.126.600	7	579.423.000		831.407.750	15	2.792.728.132	125%	93%	15		2.792.728.132	150%	29%	Satpol PP dan Damkar
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	9) Jumlah Hari Pengamanan Walikota/ Wakil Walikota	12	Hari	9.544.588.227		40	Hari	3.011.435.000	10	431.770.782	0	950.126.600	3	579.423.000		831.407.750	13	2.792.728.132	33%	93%	13		2.792.728.132	108%	29%	Satpol PP dan Damkar
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1) Jumlah Pendataan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trambum	12	Kali	1.360.526.736		3	Kali	445.767.000	4	195.687.000	2	90.868.000	0	82.754.000		63.950.000	6	433.259.000	200%	97%	6		433.259.000	50%	32%	Satpol PP dan Damkar
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2) Jumlah Pembinaan Pelanggaran Perda	15	Kali	1.360.526.736		13	Kali	445.767.000	3	195.687.000	2	90.868.000	6	82.754.000		63.950.000	11	433.259.000	85%	97%	11		433.259.000	73%	32%	Satpol PP dan Damkar
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3) Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Pelanggaran Perda	12	Kali	1.360.526.736		6	Kali	445.767.000	2	195.687.000	2	90.868.000	2	82.754.000		63.950.000	6	433.259.000	100%	97%	6		433.259.000	50%	32%	Satpol PP dan Damkar
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4) Jumlah Papan Himbauan	10	Unit	1.360.526.736		3	Unit	445.767.000	0	195.687.000	0	90.868.000	0	82.754.000		63.950.000	0	433.259.000	0%	97%	0		433.259.000	0%	32%	Satpol PP dan Damkar
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5) Jumlah Penyuluhan Ketentraman dan Keteriban	8	Kali	1.360.526.736		2	Kali	445.767.000	1	195.687.000	0	90.868.000	0	82.754.000		63.950.000	1	433.259.000	50%	97%	1		433.259.000	13%	32%	Satpol PP dan Damkar
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6) Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)	12	Bulan	1.360.526.736		12	Bulan	445.767.000	2	195.687.000	3	90.868.000	3	82.754.000		63.950.000	8	433.259.000	67%	97%	8		433.259.000	67%	32%	Satpol PP dan Damkar
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				147%	96%			135%	35%			
PREDIKAT KINERJA																				ST	ST			ST	SR			
		PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran;	100;	Persen;	17.727.628.639																						
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang di isi	40	Tabung	6.009.943.139		40	Tabung	202.600.000	40	134.844.996	0	21.896.996	0	21.896.996		21.896.996	40	200.535.984	100%	99%	40		200.535.984	100%	3%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Jumlah Bulan Penyediaan Cairan Kimia AFFF	12	Bulan	6.009.943.139		12	Bulan	202.600.000	3	134.844.996	3	21.896.996	3	21.896.996		21.896.996	9	200.535.984	75%	99%	9		200.535.984	75%	3%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Jumlah pengadaan kendaraan pemadaman kebakaran layak pakai	1	Unit	6.009.943.139		0	Unit	202.600.000	0	134.844.996	0	21.896.996	0	21.896.996		21.896.996	0	200.535.984	100%	99%	0		200.535.984	0%	3%	Satpol PP dan Damkar
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Jumlah pengadaan peralatan/perengkapan pemadaman kebakaran layak pakai	2	Paket	6.009.943.139		1	Paket	202.600.000	1	134.844.996	0	21.896.996	0	21.896.996		21.896.996	1	200.535.984	100%	99%	1		200.535.984	50%	3%	Satpol PP dan Damkar
		PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	Jumlah RW/RT yang terawasterkendali	360	RW/RT	7.437.902.000		360	RW/RT	1.865.863.000	360	342.393.780	360	545.181.750	360	389.671.250		588.538.500	1080	1.865.785.280	300%	100%	1080		1.865.785.280	300%	25%	Satpol PP dan Damkar
		PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Jumlah masyarakat yang paham terhadap bahaya bencana Kebakaran	500	Orang	4.279.783.500		500	Orang	519.802.523	320	125.297.255	1317	138.879.500	884	103.482.500		152.034.400	2521	519.693.655	504%	100%	2521		519.693.655	504%	12%	Satpol PP dan Damkar
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				197%	99%			172%	8%			
PREDIKAT KINERJA																				ST	ST			ST	SR			
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																										
		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Kapasitas Jalan Se-Kota Cimahi;	108,373;	Meter;	143.954.451.383																						
		PEMBANGUNAN JALAN	Panjang pembangunan jalan	108,1	Kilometer	112.056.456.283		1,3	Kilometer	50.785.080.000	0	9.616.500	0	313.564.750	0	36.667.950	0	401.219.855	0	761.069.055	0%	1%	0		761.069.055	0%	1%	DPUPR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				0%	1%			0%	1%			
PREDIKAT KINERJA																				SR	SR			SR	SR			
		PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap;	95;	Persen;	144.984.391.838																						
		INSPEKSI KONDISI JALAN	Jumlah ruas jalan yang diinspeksi	108	Ruas	778.800.000		108	Ruas	398.731.800	0	9.548.500	108	318.665.000	0	6.190.000	108	23.389.500	216	357.793.000	200%	90%	216		357.793.000	200%	46%	DPUPR
		INSPEKSI KONDISI JEMBATAN	Jumlah jembatan yang diinspeksi	29	Lokasi	200.000.000		28	Lokasi	55.256.700	0	781.700	0	1.720.000	0	640.000	28	50.448.000	28	53.589.700	100%	97%	28		53.589.700	97%	27%	DPUPR
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	Panjang drainase jalan	177,5	Kilometer	139.622.091.838		172,47	Kilometer	49.466.762.968	161,3	644.989.944	0	4.507.702.500	0	10.904.354.950	176,28	29.655.537.372	337.619	45.712.584.766	196%	92%	337,6		45.712.584.766	190%	33%	DPUPR
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	Panjang jalan kota dalam kondisi mantap	108,1	Kilometer	139.622.091.838		107,47	Kilometer	49.466.762.968	100,5	644.989.944	0	4.507.702.500	0	10.904.354.950	105,49	29.655.537.372	206.033	45.712.584.766	192%	92%	206		45.712.584.766	191%	33%	DPUPR
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	Panjang trotoar jalan	48,91	Kilometer	139.622.091.838		45,91	Kilometer	49.466.762.968	0	644.989.944	0	4.507.702.500	0	10.904.354.950	52,436	29.655.537.372	52.436	45.712.584.766	114%	92%	52,44		45.712.584.766	107%	33%	DPUPR
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	Panjang jembatan kota dalam kondisi mantap	3117	Meter	4.383.500.000		2717,4	Meter	1.023.789.000	2713	47.226.250	0	79.440.350	0	266.329.700	2717,4	559.837.300	5430,8	952.833.600	200%	93%	5431		952.833.600	174%	22%	DPUPR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				167%	93%			160%	32%			
PREDIKAT KINERJA																				ST	ST			ST	SR			
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase Bangunan Berizin;	34,9;	Persen;	7.797.480.407																						
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG	Jumlah bulan pelaksanaan movev	60	Bulan	1.950.000.000		12	Bulan	480.566.960	3	144.885.200	3	25.488.859	3	22.388.548		213.689.523	9	406.452.130	75%	85%	9		406.452.130	15%	21%	DPUPR
		PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	Jumlah dokumen audit tata ruang	5	Dokumen	4.562.259.907		1	Dokumen	823.671.030	0	26.207.300	0	70.860.600	0	47.055.300		464.093.244	0	608.216.444	0%	74%	0		608.216.444	0%	13%	DPUPR
		PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	Jumlah pemantauan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang	250	Titik	4.562.259.907		50	Titik	823.671.030	12	26.207.300	12	70.860.600	12	47.055.300		464.093.244	36	608.216.444	72%	74%	36		608.216.444	14%	13%	DPUPR
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG	Jumlah bangunan yang berizin dan tidak berizin	100	Izin	100.000.000		100	Izin	13.067.500	25	-	25	13.047.500	0	-	0	-	50	13.047.500	50%	100%	50		13.047.500	50%	13%	KEC CIMAHI SELATAN
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang	4	Dokumen	100.000.000		4	Dokumen	17.651.000	1	13.581.000	1	4.070.000	1	-	1	-										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %	Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab																
				I	II	III	IV	8	9	10	11	12	13				14=(13/5)x100%																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(13/5)x100%	15																					
		REHABILITASI BANGUNAN/GEDUNG	Jumlah bangunan/gedung yang direhabilitasi	10	K Rp	K Rp	2	K Rp	240.000	2	K Rp	236.523.200	0	K Rp	216.446.000	2	K Rp	9.866.750	2	K Rp	463.075.950	100%	96%	2	K Rp	463.075.950	11%	23%	DPUPR						
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		60%	85%			12%	14%														
														PREDIKAT KINERJA		R	T			SR	SR														
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang:	100;	Persen;	5.455.970.627																													
		PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG	Jumlah dokumen kebijakan	19	Dokumen	5.043.544.627		2	Dokumen	980.078.210	0		23.278.500	0		388.064.650	2		37.254.534			458.725.000	2		907.322.684	100%	93%	2		907.322.684	11%	18%	DPUPR		
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		100%	93%			11%	18%														
														PREDIKAT KINERJA		ST	ST			SR	SR														
		PENDIDIKAN																																	
		PROGRAM PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;(2);Angka Partisipasi Murni (APM) SD;(3);Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD: 103,0 4;(2); 7,08;(3); 31,87		Angka;(2); Angka;(3);	114.528.600.000																													
		BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI (SPP)	Jumlah Bantuan SDP untuk Peserta Didik Jenjang SD/MI	4E+05	per tahun	4.026.500.000		1700	per tahun	213.280.000	0		110.051.939	0		10.124.999	0		8.505.000			46.726.200	0		175.408.138	0%	82%	0		175.408.138	100%	4%	Disdik		
		BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI (SPP)	Jumlah Bantuan SPP untuk Peserta Didik Jenjang SD/MI	4E+05	per tahun	15.486.600.000		11200	per tahun	116.420.000	0		- 0			12.754.200	0		7.764.091			90.354.000	0		110.872.291	0%	95%	0		110.872.291	0%	1%	Disdik		
		BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP/MTS (SPP)	Jumlah Bantuan SPP untuk Peserta Didik Jenjang SMP/MTS	Rp.78 0.000	per tahun	14.091.000.000		5200	per tahun	276.830.000	0		- 0			- 0			-			148.493.000	0		148.493.000	0%	54%	0		148.493.000	100%	1%	Disdik		
		OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JENJANG SD	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana SD yang terbangun dan terehab	100 ruang	Rehab	2.320.456.533		4 RKB, 5	Rehab	7.971.515.852	0		6.865.000	7		305.601.000	0		1.339.548.567			5.778.301.941	7		7.430.316.508	100%	93%	7		7.430.316.508	100%	320%	Disdik		
		Optimalisasi sarana dan Prasarana jenjang SMP	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana SMP yang terbangun dan terehab	4	Paket	1.226.289.371		1	Paket	5.870.496.414	0		8.400.000	0		9.173.000	1		726.745.000			4.483.554.450	1		5.227.872.450	100%	89%	1		5.227.872.450	25%	426%	Disdik		
		PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH JENJANG SD	Jumlah Prasarana Sekolah dalam Kondisi baik	125	Sekolah	7.159.370.239		1	Sekolah	3.442.988.000	0		- 0			4.062.300	0		-			3.211.638.700	0		3.215.701.000	0%	93%	0		3.215.701.000	0%	45%	Disdik		
		PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH JENJANG SMP	Jumlah Prasarana SMP Kondisi Baik	36	Sekolah	2.400.000.000		1	Sekolah	1.500.000.000	0		1.000.000	0		- 0			55.165.000			1.228.392.496	0		1.284.557.496	0%	86%	0		1.284.557.496	0%	54%	Disdik		
		PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY JENJANG SD	Jumlah prasarana SD yang terbangun	34	Jamban	2.860.000.000		6	Jamban	499.715.000	0		- 0			- 6			3.915.000			489.692.000	6		493.607.000	100%	99%	6		493.607.000	18%	19%	Disdik		
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary jenjang SMP	Jumlah prasarana SMP yang terbangun	50	Paket	4.330.000.000		16	Paket	123.474.000	1		1.000.000	2		4.830.000	2		63.547.000			- 5		69.377.000	31%	56%	5		69.377.000	10%	2%	Disdik			
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SMP	Jumlah prasarana SMP yang terbangun	4	Paket	2.900.000.000		1	Paket	46.714.000	0		3.814.000	2		36.261.000	0		-			- 2		40.075.000	200%	86%	2		40.075.000	50%	1%	Disdik			
		PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA, DAN FASILITAS PARKIR JENJANG SD	Jumlah prasarana SD yang terbangun	20 Paket Paving	Paket	5.102.860.649		3 Paket	Paket	499.755.000	0		- 0			- 3			-			489.851.000	3		489.851.000	100%	98%	3		489.851.000	100%	10%	Disdik		
		PEMBINAAN SMP TERBUKA	Jumlah guru pamong SMP Terbuka	10	Orang	696.150.000		9	Orang	212.960.000	9		11.890.900	9		87.750.900	9		52.140.000			51.270.000	27		203.050.000	300%	95%	27		203.050.000	770%	29%	Disdik		
		PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU SD/MI/SDLB	Jumlah RKB SD yang terbangun	14	RKB	2.049.809.300		1	RKB	33.897.800	0		- 1			33.144.800	0		-			- 1		33.144.800	100%	98%	1		33.144.800	7%	2%	Disdik			
		Penambahan ruang kelas baru SMP	Jumlah RKB SMP yang terbangun	13	Unit	1.600.000.000		2	Unit	400.000.000	0		300.000	0		2.830.000	0		32.945.000			317.976.618	0		354.051.618	0%	89%	0		354.051.618	0%	22%	Disdik		
		PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH JENJANG SD	Jumlah paket bantuan mebeleur untuk SD Negeri dan Swasta	143	Paket	818.668.571		20	Paket	700.000.000	20		4.560.000	0		- 0			-			670.831.700	20		675.391.700	100%	96%	20		675.391.700	14%	82%	Disdik		
		PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH JENJANG SMP	Jumlah Paket Bantuan mebeleur untuk SMP Negeri dan Swasta	111	Paket Mebelier Sekolah	1.147.484.600		17	Paket Mebelier Sekolah	278.230.000	0		850.000	0		- 0			-			- 0		247.316.000	0		247.316.000	0%	89%	0		247.316.000	0%	22%	Disdik
		PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD	Jumlah lembaga penyelenggara Program Paket A	26	Sekolah	637.690.859		23	Sekolah	127.551.825	23		20.150.000	23		68.938.000	23		15.300.000			15.300.000	69		119.688.000	300%	94%	69		119.688.000	265%	19%	Disdik		
		PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	Jumlah lembaga penyelenggara Program Paket B	27	Lembaga	1.316.872.703		24	Lembaga	251.530.050	24		13.041.000	24		110.660.000	24		40.500.000			40.500.000	72		204.701.000	300%	81%	72		204.701.000	267%	16%	Disdik		
		PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMA	Jumlah lembaga penyelenggara Program Paket C	28	Lembaga	3.606.007.625		35	Lembaga	615.017.350	35		49.215.360	35		330.576.000	35		115.500.000			115.500.000	105		610.791.600	300%	75%	105		610.791.600	375%	17%	Disdik		
		PERLUASAN AKSES PROGRAM INKLUSIF JENJANG SD	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan SD inklusif	125	Sekolah	759.045.662		25 Sekol	Sekolah	71.540.000	125		- 125			- 125			13.165.000			48.875.000	375		62.040.000	100%	87%	375		62.040.000	300%	8%	Disdik		
		PERLUASAN AKSES PROGRAM INKLUSIF JENJANG SMP	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan SMP inklusif	36	Sekolah	301.665.000		24	Sekolah	75.886.000	24		- 24			- 24			73.276.000			- 72		73.276.000	300%	97%	72		73.276.000	200%	24%	Disdik			
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Belajar dan Ruang Penunjang Belajar jenjang SMP yang terehab	Jumlah Ruang Belajar dan Ruang Penunjang Belajar jenjang SMP yang terehab	8	Paket	720.240.000		2	Paket	240.000.000	0		3.814.000	2		19.910.000	0		203.838.000			- 2		227.562.000	100%	95%	2		227.562.000	25%	32%	Disdik			
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		115%	88%			101%	52%														
														PREDIKAT KINERJA		ST	T			ST	R														
		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	Persentase PAUD Terakreditasi;(2);Persentase TK Terakreditasi;(3);Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	44,25;(2);46,43;(3); 85;	Persen;(2); Persen;(3)Persen;	38.361.500.000																													
		OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal yang terbangun	0	0	2.085.910.540		3	0	457.346.000	0		- 2			- 1		104.642.300			346.706.008	3		451.348.308	100%	99%	3		451.348.308	100%	22%	Disdik			
		PENYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR	Jumlah bantuan buku bacaan di Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	28	Paket	867.509.970		27	Paket	100.000.000	0		- 27			98.526.400	0		-			- 27		98.526.400	100%	99%	27		98.526.400	96%	11%	Disdik			
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT	Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakak yang berprestasi	15	Persen	474.008.869		11,25	Persen	50.000.000	0		22.998.000	0		27.000.000	0		-			- 0		49.998.000	0%	100%	0		49.998.000	0%	11%	Disdik			
		PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL	Jumlah Warga Belajar kesetaraan yang mendapatkan BOP	690	Orang	3.282.014.816		130	Orang	629.963.679	130		75.209.000	130		72.427.615	130		210.244.500			237.709.100	390		595.590.215	300%	95%	390		595.590.215	57%	18%	Disdik		
		PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN	Jumlah pengelola kursus dan PKBM yang memiliki kompetensi manajemen kelembagaan	80	Orang	983.751.649		80	Orang	100.000.000	0		- 0			- 80			96.999.800			96.999.800	80		96.999.800	100%	97%	80		96.999.800	100%	10%	Disdik		
		PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR, DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah lembaga PAUD Terakreditasi PAUD	70	Lembaga PAUD	1.640.117.802		60	Lembaga PAUD	60.335.936	0		- 0			- 60			59.455.600			59.455.600	60		59.455.600	100%	99%	60		59.455.600	86%	4%	Disdik		
		PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah pelaksanaan kegiatan PAUD	8	Kegiatan	5.987.509.181		8	Kegiatan	1.046.656.292	0		64.934.900	6		301.428.650	1		315.669.700			165.495.000	7		847.528.250	88%	81%	7		847.528.250	88%	14%	Disdik		
		PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEKAGAMAAN	jumlah warga belajar KUM yang terfasilitasi	1150	Orang	640.934.552		250	Orang	150.000.000	0		- 0			- 250			-			123.760.000	250		123.760.000	100%	83%	250		123.760.000	22%	19%	Disdik		
		PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP	Jumlah warga belajar yang memperoleh pendidikan kecakapan hidup	1000	Orang	2.074.650.000		100	Orang	150.000.000	0		- 100			109.097.000	0		39.593.000			- 100		148.690.000	100%	99%	100		148.690.000	10%	7%	Disdik			
		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL	Jumlah sarana dan prasarana yang diberikan Pada PKBM dan SKB	23	Paket	4.059.428.776		4	Paket	6.631.000	0		- 4			6.630.000	0		-			- 4		6.630.000	100%	100%	4		6.630.000	17%	0%	Disdik			
		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	Jumlah guru ngaji yang terfasilitasi	1500	Orang	14.744.119.707		1500	Orang	3.708.000.000	0		2.686.000	1500		1.265.263.200	0		1.339.000.000			1.077.600.000	1500		3.684.549.200	100%	99%	1500		3.684.549.200	100%	25%	Disdik		
		PERLUASAN AKSES PROGRAM INKLUSIF JENJANG PAUD	Perluasan Akses Program inklusif Itidano PAUD	10,07	Persen	484.894.138		5,03	Persen	61.443.450	0		- 100			61.433.450	0		-			- 100		61.433.450	1988%	100%	100		61.433.450	993%	13%	Disdik			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %	Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				5		6		7		8		9		10				11		12			13		14=(13/5)x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13=6+12	14=(13/5)x100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15					
		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diserahkan ke SMP Negeri dan Swasta	0	0	6.530.596.088		629	0	3.366.494.480	629	435.376.700	0	2.928.915.000	0	629	3.364.291.700	100%	100%	629	3.364.291.700	100%	52%	Disdik			
		PENGAWASAN PELAKSANAAN APBS JENJANG SD	Jumlah SD yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk proses pembelajaran yang efektif	122	SD	818.013.426		122	SD	140.555.000	0	-	0	-	0	125.175.000	0	125.175.000	0%	89%	0	125.175.000	0%	15%	Disdik		
		PENGAWASAN PELAKSANAAN APBS JENJANG SMP	Jumlah SMP yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk proses pembelajaran yang efektif	34	SMP	83.131.937		34	SMP	79.183.000	0	29.791.000	0	11.825.000	0	-	20.360.000	0	61.976.000	0%	78%	0	61.976.000	0%	75%	Disdik	
		PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PAUD DAN DIKMAS	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yang telah mengikuti peningkatan kompetensi	100	Persen	1.230.669.383		31	Persen	163.773.800	0	26.034.000	0	-	0	45.609.800	79.175.000	0	150.818.800	0%	92%	0	150.818.800	0%	12%	Disdik	
		PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SD	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang telah mengikuti peningkatan kompetensi	100	Persen	2.550.855.184		49	Persen	1.274.006.450	0	36.393.800	0	10.874.999	0	404.070.000	675.964.525	0	1.127.303.324	0%	88%	0	1.127.303.324	0%	44%	Disdik	
		PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SMP	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang telah mengikuti peningkatan kompetensi	100	Persen	2.044.181.038		84	Persen	428.762.000	0	13.013.900	0	61.848.000	0	206.161.800	99.604.000	0	380.627.700	0%	89%	0	380.627.700	0%	19%	Disdik	
		PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KARAKTER BANGSA SD	Jumlah Kegiatan Penegakan Disiplin peserta didik	0	0	5.518.782.253		4 Kegiat	0	163.493.000	0	-	0	-	4	3.316.000	113.605.000	4	116.921.000	100%	72%	4	116.921.000	100%	2%	Disdik	
		PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KARAKTER BANGSA SMP	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karakter Jenjang SMP	0	0	2.745.264.465		4 Kegiat	0	358.018.000	0	86.673.000	3	97.205.000	0	18.450.000	88.595.000	3	290.923.000	100%	81%	3	290.923.000	100%	11%	Disdik	
		PENYELENGGARAAN AKREDITASI JENJANG SMP	Jumlah SMP yang terakreditasi A	26	SMP	235.868.739		23	SMP	76.634.000	0	-	0	-	0	59.154.000	5.000.000	0	64.154.000	0%	84%	0	64.154.000	0%	27%	Disdik	
		PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR	Jumlah SD yang terakreditasi A	95	SD	355.586.437		66	SD	69.890.000	0	-	0	-	0	7.527.800	31.660.600	0	39.188.400	0%	56%	0	39.188.400	0%	11%	Disdik	
		REVITALISASI KKG SD	Jumlah KKG yang mengikuti kegiatan SNP di Gugus	29	KKG	883.084.714		29	KKG	107.410.000	0	-	0	-	29	-	106.010.000	29	106.010.000	100%	99%	29	106.010.000	100%	12%	Disdik	
		UJIAN NASIONAL JENJANG SMP	Jumlah siswa kelas 9 SMP/MTs yang lulus UN	49610	siswa	991.720.836		9100	siswa	200.000.000	0	75.319.500	9100	87.150.500	0	-	-	9100	162.470.000	100%	81%	9100	162.470.000	18%	16%	Disdik	
		UJIAN SEKOLAH/MADRASAH JENJANG SD	Jumlah siswa kelas 6 SD yang lulus US	0	Siswa	2.052.804.723		9380	Siswa	349.395.000	9380	20.315.000	9380	240.623.125	0	-	-	18760	260.938.125	200%	75%	18760	260.938.125	100%	13%	Disdik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100%	89%			77%	17%				
PREDIKAT KINERJA																		ST	T			T	SR				
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Tidak Layak Huni ;	0,26;	Persen;	339.560.820.000																					
		FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	Jumlah Rumah	1675	Unit	43.700.555.800		335	Unit	7.876.561.000	0	360.492.950	130	1.942.659.355	0	137.353.450	1470	5.344.419.233	1600	7.784.924.988	478%	99%	1600	7.784.924.988	96%	18%	DPKP
		FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi	28	Lokasi	23.800.000.000		30	Lokasi	9.055.348.516	0	470.007.707	31	6.703.133.816	0	601.465.960	0	1.204.471.448	31	8.979.078.931	103%	99%	31	8.979.078.931	111%	38%	DPKP
		PEMBANGUNAN DEKORASI KOTA BARU	Titik Dekorasi Kota Baru	80	Titik	12.667.464.000		80	Titik	3.379.430.950	1	1.479.760.000	4	206.099.450	6	592.847.000	5	1.042.953.500	16	3.321.659.950	20%	98%	16	3.321.659.950	20%	26%	DPKP
		PEMBANGUNAN TAMAN BARU	Luas Taman Baru	1,5	Hektar	70.331.800.000		0,5	Hektar	4.471.177.411	0	3.142.306.374	0,08	15.828.712	0	505.821.832	0	761.853.672	0,08	4.425.810.590	16%	99%	0,08	4.425.810.590	177%	6%	DPKP
		PEMELIHARAAN DEKORASI KOTA	Titik Dekorasi Kota	500	Titik	5.797.610.000		240	Titik	933.145.000	15	607.642.000	120	13.577.400	60	7.162.000	60	295.887.000	255	924.268.400	106%	99%	255	924.268.400	51%	16%	DPKP
		PEMELIHARAAN TAMAN	Luas Taman yang dipelihara	9,70	Hektar	18.476.900.000		8,2	Hektar	3.180.379.537	8,2	798.432.005	0	940.258.262	0	652.486.404	8,2	719.989.198	16,4	3.111.165.869	200%	98%	16,4	3.111.165.869	3871%	17%	DPKP
		PENETAPAN KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN	Jumlah DED Penanganan Kumuh	12	Dokumen	2.558.358.700		3	Dokumen	291.225.200	0	13.823.500	0	57.243.700	0	47.368.300	0	155.293.800	0	273.729.300	0%	94%	0	273.729.300	0%	11%	DPKP
		PENGADAAN PEMAKAMAN	Jumlah Makam yang disediakan	4	Lokasi	16.874.000.000		1	Lokasi	638.060.000	0	81.562.500	0	19.476.400	0	2.500.000	0	487.617.500	0	591.156.400	0%	93%	0	591.156.400	0%	4%	DPKP
		PENGLOLAAN PEMAKAMAN	Jumlah Makam yang terkelola	12	Lokasi	1.814.000.000		9	Lokasi	556.124.920	8	127.688.504	0	141.382.736	0	109.534.890	0	158.580.512	8	537.186.642	89%	97%	8	537.186.642	67%	30%	DPKP
		PENGLOLAAN RUSUNAWA	Persentase tingkat hunian RUSUNAWA	100	Persen	76.880.507.200		100	Persen	3.217.173.201	98	806.718.689	0	784.786.979	0	507.496.062	98	1.014.937.708	196	3.113.939.438	196%	97%	196	3.113.939.438	196%	4%	DPKP
		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERUMAHAN	Jumlah Perwal Rapat	13000	Orang	1.263.381.300		2600	Orang	18.327.800	450	4.950.000	130	8.523.200	0	-	0	-	580	13.473.200	22%	74%	580	13.473.200	4%	1%	DPKP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		112%	95%			418%	15%				
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST			ST	SR				
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUNGAI DAN PENGENDALI BANJIR	Persentase Kapasitas Pengendali Banjir Terhadap Kapasitas Pengendali Banjir Yang Ideal;	100;	Persen;	477.387.731.422																					
		PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	volume saluran sungai yang dinormalisasi	59000	meter kubik	11.000.000.000		59000	meter kubik	1.772.930.000	11655	738.583.600	23310	2.862.000	45,46	202.823.400	0	746.287.257	35010,5	1.690.556.257	59%	95%	35010	1.690.556.257	59%	15%	DPKP
		PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	Jumlah embung yang baru & terpelihara	34	Unit	426.387.731.000		7	Unit	294.172.200	0	49.340.500	5	975.600	5	151.717.850	0	75.716.900	10	277.750.850	143%	94%	10	277.750.850	29%	0%	DPKP
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI	luasan sempadan sungai, koordinasi penegakan perda	3000	Meter Persegi	40.000.000.000		35887	Meter Persegi	4.373.732.578	8965	558.915.116	17930	1.254.547.628	26,9	531.871.537	8965	1.598.203.548	35886,9	3.943.537.829	100%	90%	35887	3.943.537.829	1196%	10%	DPKP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		101%	93%			428%	8%				
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST			ST	SR				
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AIR BERSIH	Total Kapasitas SR Air Bersih;	33736 ;	SR;	143.396.282.220																					
		PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM	Jumlah sarana pengolahan air bersih yang terbangun/ yang teroptimalisasi	24520	SR	130.396.282.221		1600	SR	8.419.974.776	0	22.656.374	0	636.219.178	160	377.489.130	1435	6.710.191.859	1595	7.746.556.541	100%	92%	1595	7.746.556.541	7%	6%	DPKP
		PENGLOLAAN PELAYANAN AIR BERSIH	Jumlah SR yang terpelihara dan terlayani air bersih	7319	SR	10.000.000.000		2819	SR	1.898.390.528	2849	461.251.457	0	407.583.381	0	374.764.442	0	580.219.724	2849	1.823.819.004	101%	96%	2849	1.823.819.004	39%	18%	DPKP
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM	Jumlah Dokumen dan Kegiatan Perencanaasi Pembangunan	68	Dokumen	3.000.000.000		20	Dokumen	645.250.000	1	107.062.500	2	214.152.000	1	3.931.000	0	259.504.400	4	584.649.900	20%	91%	4	584.649.900	6%	19%	DPKP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		74%	93%			17%	15%				
PREDIKAT KINERJA																		S	ST			SR	SR				
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Persentase Peningkatan Kapasitas IPAL Komunal;	17,07;	Persen;	104.897.564.375																					
		PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA AIR LIMBAH	Jumlah sarana pengolahan air limbah yang terbangun/ yang teroptimalisasi	105	Paket	88.197.564.375		30	Paket	12.801.456.635	0	154.636.344	0	189.177.262	2	880.520.506	4	10.382.961.849	6	11.607.295.961	20%	91%	6	11.607.295.961	6%	13%	DPKP
		PENGLOLAAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	SR, SPAL	24	SPAL	10.250.000.000		12	SPAL	1.663.147.872	11	315.889.009	0	398.375.858	0	240.071.020	11	499.698.467	22	1.454.034.354	183%	87%	22	1.454.034.354	92%	14%	DPKP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		13+6+12		14=(13/5)x100%		15	
		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga;(2).Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;(3).Penyelenggaraan Penataan Administrasi Kependudukan;(4).Validitas Database Pelayanan Kependudukan	99,9(2).99,5(3)-;(4).0,85;	Persen;(2) Persen;(3) Bulan;(4) Persen;	20.725.045.004																				
		IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHARAAN)	Jumlah pemeliharaan konektivitas jaringan SIAK	95	Kali	1.250.000.000	19	Kali	396.683.498	0	35.667.748	2	40.754.978	7	193.567.920	19	122.111.120	28	392.101.766	147%	99%	28	392.101.766	29%	31%	DisdukCapil
		PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SISTEM KONEKSI (INTERPHASE TAHAP AWAL) NIK	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam pemanfaatan data	11	PKS	484.358.000	2	PKS	31.279.000	0	9.456.000	9	4.000.000	9	3.750.000	11	2.810.000	29	20.016.000	1450%	64%	29	20.016.000	264%	4%	DisdukCapil
		PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN	Jumlah data penduduk yang telah dimutakhirkan	0	Data	507.970.000	25000	Data	179.970.000	0	30.733.000	1500	28.539.500	10464	58.605.500	23049	53.065.000	35013	170.943.000	140%	95%	35013	170.943.000	100%	34%	DisdukCapil
		PENGENDALIAN PENDUDUK NON PERMANEN	Jumlah pengendalian penduduk ke tiap kelurahan	14	Kali	1.229.895.000	3	Kali	275.451.600	0	48.931.498	3	115.387.756	3	53.439.840	3	51.082.740	9	268.841.834	300%	98%	9	268.841.834	64%	22%	DisdukCapil
		PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	jumlah buku agregat dan profil yang dicetak	1500	Buku	1.006.130.000	300	Buku	264.635.650	100	12.294.500	100	207.813.150	300	35.914.000	300	4.058.000	800	260.079.650	267%	98%	800	260.079.650	53%	26%	DisdukCapil
		PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN TEKNIKIS UNTUK PETUGAS REGISTRAR/VETIFIKATOR DAN PETUGAS OPERATOR SE-KOTA CIMAHI	132	Orang	536.905.000	45	Orang	59.420.000	0	-	0	-	45	59.336.000	45	50.000	90	59.386.000	200%	100%	90	59.386.000	68%	11%	DisdukCapil
		PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENCATATAN SIPIL	Jumlah pelayanan dokumen Pencatatan sipil	87000	Dokumen	2.139.330.000	15000	Dokumen	445.320.350	6.082	108.397.346	9.394	91.980.632	13432	117.661.280	15000	118.143.580	43908	436.182.838	293%	98%	43908	436.182.838	50%	20%	DisdukCapil
		PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk	9E+05	Dokumen	1.167.796.000	160000	Dokumen	169.972.000	75.000	121.518.000	83.000	34.590.000	1E+05	3.000.000	160000	10.500.000	439306	169.608.000	275%	100%	4E+05	169.608.000	48%	15%	DisdukCapil
		PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT	Jumlah modul dalam perancangan website dinas	12	Modul	1.404.922.000	2	Modul	250.804.900	0	77.364.249	0	44.492.626	2	80.156.640	2	39.844.740	4	241.858.255	200%	96%	4	241.858.255	33%	17%	DisdukCapil
		SOSIALIASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	3000	Orang	1.072.413.000	500	Orang	123.787.168	0	46.847.750	400	46.292.626	500	8.906.640	500	20.806.740	1400	122.853.756	280%	99%	1400	122.853.756	47%	11%	DisdukCapil
		SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan	10	Kali	278.460.000	2	Kali	60.000.000	0	-	1	29.711.000	1	-	2	29.711.000	4	59.422.000	200%	99%	4	59.422.000	40%	21%	DisdukCapil
		PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan	1E+05	Dokumen	1.650.730.200	75000	Dokumen	630.120.900	9852	119.400.550	7058	167.649.000	10457	94.050.000	18146	208.806.300	45513	589.905.850	61%	94%	45513	589.905.850	38%	36%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT	Jumlah pemohon yang terlayani	800	KK	681.394.684	650	KK	16.837.400	0	-	0	-	0	-	650	16.550.000	650	16.550.000	100%	98%	650	16.550.000	81%	2%	KEC CIMAHI SELATAN
		SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI SELATAN	Nilai Mutu Hasil Survei	A	Indeks	106.000.000	A	Indeks	6.537.000	0	-	0	-	B	2.397.955	84	3.987.000	75%	6.384.955	100%	98%	0,75	6.384.955	100%	6%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan	25000	Dokumen	2.560.330.000	25000	Dokumen	636.199.000	2476	150.061.000	5028	145.054.500	8167	157.362.000	4074	145.979.000	19745	598.456.500	79%	94%	19745	598.456.500	79%	23%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT	Jumlah pemohon yang terlayani	25000	Orang	550.862.000	25000	Orang	204.255.500	2476	36.912.043	5028	84.710.057	8167	41.603.132	5090	32.235.028	20761	195.460.260	83%	96%	20761	195.460.260	83%	35%	KEC CIMAHI TENGAH
		SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI TENGAH	Jumlah SKM yang dilaksanakan	2	Kali	138.335.500	2	Kali	5.188.000	0	-	0	-	0	-	1	5.026.500	1	5.026.500	50%	97%	1	5.026.500	50%	4%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan	31058	Dokumen	1.260.854.000	25058	Dokumen	295.779.200	6264	72.105.750	6469	72.852.250	9116	75.199.250	10851	71.301.950	32700	291.459.200	130%	99%	32700	291.459.200	105%	23%	KEC CIMAHI UTARA
		PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT	Jumlah Pemohon yang Terlayani	39931	Orang	896.161.500	33931	Orang	707.507.300	2557	192.988.100	13234	155.361.000	23351	194.315.000	21013	155.123.200	60155	697.787.300	177%	99%	60155	697.787.300	151%	78%	KEC CIMAHI UTARA
		SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI UTARA	Nilai Mutu Hasil Survei	A	Indeks	106.500.000	A	Indeks	55.912.225	A	25.211.375	A	9.042.700	A	11.109.375	A	8.990.000	100%	54.353.450	100%	97%	1	54.353.450	100%	51%	KEC CIMAHI UTARA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		232%	96%			79%	24%			
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST			T	SR			
		KEARSIPAN																								
		PROGRAM SISTEM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KARSIPAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	15;	Persen;	6.858.695.016																				
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	Nilai LAKE Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan	91	Persen	643.695.016	61	Persen	188.250	0	166.500	0	-	0	-	-	0	166.500	0%	88%	0	166.500	0%	0%	Diskominfo	
		PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KARSIPAN	Nilai LAKE aspek Kotaan Peraturan Perundang-Undangan	91	Persen	600.000.000	71	Persen	86.222.560	0	-	0	10.346.000	0	-	-	0	74.432.000	0%	86%	0	74.432.000	0%	12%	Diskominfo	
		PENGEMBANGAN SDM KARSIPAN	Nilai LAKE aspek SDM Kearsipan	81	Persen	400.000.000	66	Persen	73.831.000	0	-	0	-	0	34.409.400		18.580.283	0	52.989.683	0%	72%	0	52.989.683	0%	13%	Diskominfo
		PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KARSIPAN	Nilai LAKE Aspek Program Kearsipan	86	Persen	1.100.000.000	56	Persen	92.394.000	0	18.730.000	0	48.840.000	0	-	-	0	67.570.000	0%	73%	0	67.570.000	0%	6%	Diskominfo	
		PENYELENGGARAAN PENGOLOLAAN ARSIP STATIS	Nilai LAKE aspek Pengelolaan Arsip Statis	91	Persen	1.940.000.000	61	Persen	165.826.049	0	95.706.846	0	13.322.703	0	5.805.000		8.910.000	0	123.744.549	0%	75%	0	123.744.549	0%	6%	Diskominfo
		PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN ARSIP INAKTIF	Nilai LAKE Aspek Pengolahan Arsip Inaktif	91	Persen	2.175.000.000	61	Persen	294.975.200	0	4.836.000	0	108.900.000	0	-	-	177.606.000	0	291.342.000	0%	99%	0	291.342.000	0%	13%	Diskominfo
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		0%	82%			0%	9%			
PREDIKAT KINERJA																		SR	T			SR	SR			
		KEBUDAYAAN																								
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Yang Dilestarikan	61;	Persen;	16.039.645.000																				
		FASILITASI PENYELENGGARAAN GELAR SENI BUDAYA	Jumlah Gelar Seni yang Dilaksanakan	15	Kegiatan	7.140.840.000	5	Kegiatan	1.133.921.000	1	143.710.000	1	426.423.600	1	436.356.000	0	110.000.000	3	1.116.489.600	60%	98%	3	1.116.489.600	20%	16%	Disbudparpora
		MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN	Jumlah MOU Kemitraan dengan Lembaga Negara dan Swasta	8	Dokumen	510.000.000	2	Dokumen	84.685.000	0	-	2	57.830.000	0	-	0	9.820.000	2	67.650.000	100%	80%	2	67.650.000	25%	13%	Disbudparpora
		PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	Jumlah Kebudayaan yang Dilestarikan	28	At Coast	1.500.000.000	2	At Coast	80.627.500	0	-	0	-	2	80.627.500	0	-	2	80.627.500	100%	100%	2	80.627.500	7%	5%	Disbudparpora
		PEMBINAAN ORGANISASI KEBUDAYAAN DI KOTA CIMAHI	Jumlah Organisasi Kebudayaan yang Dibina	13	Kelompok	1.160.000.000	2	Kelompok	70.510.000	0	-	0	-	2	64.510.000	0	-	2	64.510.000	100%	91%	2	64.510.000	15%	6%	Disbudparpora
		PENYELENGGARAAN MISI KESENIAN KE LUAR DAERAH	Jumlah Pengiriman Duta Seni	12	At Coast	2.127.000.000	10	At Coast	300.000.000	2	25.655.000	1	35.805.000	2	160.955.000	5	55.275.000	10	277.690.000	100%	93%	10	277.690.000	83%	13%	Disbudparpora

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab									
				5		6		7		8		9			10		11		12			13		14=(13/5)x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(13/5)x100%		15						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																								92%	92%			30%	11%	
PREDIKAT KINERJA																								ST	ST			SR	SR	
		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																												
		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif:	100;	Persen;	11.898.096.600																								
		PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA	Jumlah Lomba Kegiatan Kepemudaan	5	Kali	2.919.973.300		4	Kali	132.331.200	0	-	0	-	2	122.791.200	2	122.791.200	50%	93%	2	122.791.200	40%	4%	Disbudparpora					
		PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	Jumlah Pemuda yang Dilatih Kewirausahaan	550	Orang	424.962.500		100	Orang	49.812.500	0	-	0	48.312.500	60	-	40	-	100	48.312.500	100%	97%	100	48.312.500	18%	11%	Disbudparpora			
		PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	120	Kelompok	6.260.923.000		20	Kelompok	1.036.571.300	1	114.598.200	1	118.933.300	13	514.324.800	5	275.489.348	20	1.023.345.648	100%	99%	20	1.023.345.648	17%	16%	Disbudparpora			
		PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Orang yang Mewakili 5 Bidang Kepeloporan	21	Orang	441.961.000		4	Orang	71.861.000	0	-	2	71.861.000	2	-	0	-	4	71.861.000	100%	100%	4	71.861.000	19%	16%	Disbudparpora			
		PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN GENERASI MUDA	Jumlah Peserta Penyuluhan	1650	Orang	1.259.243.400		300	Orang	79.310.400	0	-	300	78.245.400	0	-	0	-	300	78.245.400	100%	99%	300	78.245.400	18%	6%	Disbudparpora			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																								90%	97%			22%	11%	
PREDIKAT KINERJA																								T	ST			SR	SR	
		PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA	Persentase Sumberdaya Manusia Yano Terbina (atlit):	18.18;	Persen;	11.671.187.500																								
		PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN YANG BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI	Jumlah Insan Olahraga yang Mendapat Penghargaan	425	Orang	743.250.000		50	Orang	93.525.000	0	-	0	-	43	87.075.000	43	87.075.000	86%	93%	43	87.075.000	10%	12%	Disbudparpora					
		PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT	Jumlah Atlet yang Dibina	600	Orang	1.139.192.500		40	Orang	226.467.500	0	-	0	-	50	225.067.500	50	225.067.500	125%	99%	50	225.067.500	8%	20%	Disbudparpora					
		PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA DAN PENYANDANG CACAT	Peserta Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat	2700	Orang	503.750.000		400	Orang	136.377.000	0	-	400	66.786.500	200	-	0	69.556.500	600	136.343.000	150%	100%	600	136.343.000	22%	27%	Disbudparpora			
		PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	Jumlah Peserta yang Mengikuti Olahraga Rekreasi	610	Orang	478.000.000		120	Orang	89.642.000	0	-	30	19.450.000	30	-	60	63.692.000	120	83.142.000	100%	93%	120	83.142.000	20%	17%	Disbudparpora			
		PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	Jumlah Peserta yang Terlibat dalam Olahraga Rekreasi	2350	Orang	1.636.500.000		450	Orang	351.000.000	0	-	400	102.536.750	200	95.157.040	200	146.283.250	800	343.977.040	178%	98%	800	343.977.040	34%	21%	Disbudparpora			
		PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	Jumlah Pelatih dan Instruktur yang Mengikuti Pelatihan	360	Orang	300.000.000		40	Orang	58.450.000	40	58.450.000	0	-	40	-	0	-	80	58.450.000	200%	100%	80	58.450.000	22%	19%	Disbudparpora			
		PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	Jumlah Event Olahraga	2	Kali	4.401.468.750		1	Kali	873.892.700	1	69.547.709	1	144.974.000	1	578.387.200	0	73.839.602	3	866.748.511	300%	99%	3	866.748.511	150%	20%	Disbudparpora			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																								163%	97%			38%	19%	
PREDIKAT KINERJA																								ST	ST			SR	SR	
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																												
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah;	70;	Persen;	33.304.893.340																								
		OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	Level Pengoperasian Pusat Data	4	Level	4.718.362.000		1	Level	545.506.000	0	115.366.000	0	87.916.692	0	171.520.000	0	92.350.000	0	467.152.692	0%	86%	0	467.152.692	0%	10%	Diskominfo			
		OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	Prosentase cakupan layanan TIK	50	Persen	4.718.362.000			Persen	545.506.000	0	115.366.000	0	87.916.692	0	171.520.000	0	92.350.000	0	467.152.692	100%	86%	0	467.152.692	0%	10%	Diskominfo			
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	100	Persen	9.075.242.500		83	Persen	1.395.812.092	83	244.254.000	83	37.084.692	83	465.807.400	588.829.500	249	1.335.975.592	300%	96%	249	1.335.975.592	249%	15%	Diskominfo				
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Jumlah peserta lomba IT kreatif dan pelatihan IT Kreatif	150	Orang	1.316.084.363		125	Orang	190.256.000	0	19.863.999	35	72.600.975	100	56.970.025	38.791.070	135	188.226.069	108%	99%	135	188.226.069	90%	14%	Diskominfo				
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Jumlah peserta pembinaan/rakor TIK	150	Orang	1.078.080.000		150	Orang	263.938.700	0	3.240.000	0	20.053.800	0	26.648.400	205.833.214	0	255.775.414	0%	97%	0	255.775.414	0%	24%	Diskominfo				
		PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	prosentase dokumen analisis berita media cetak/media penyiaran/media on line	100	Persen	1.534.599.386		100	Persen	316.324.000	100	19.224.296	100	153.945.093	100	29.099.650	90.931.840	300	293.200.879	300%	93%	300	293.200.879	300%	19%	Diskominfo				
		PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	Jumlah aplikasi terintegrasi	28	Aplikasi	3.704.774.000			Aplikasi	223.511.250	0	25.831.000	0	52.042.623	0	23.613.135	117.108.163	0	218.594.921	100%	98%	0	218.594.921	0%	6%	Diskominfo				
		PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	Level Integrasi Sistem Aplikasi	4	Level	3.704.774.000		1	Level	223.511.250	0	25.831.000	0	52.042.623	0	23.613.135	117.108.163	0	218.594.921	0%	98%	0	218.594.921	0%	6%	Diskominfo				
		PENINGKATAN PELAYANAN KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH	Level Pelayanan Pengaduan Publik	4	Level	1.845.895.014		1	Level	224.983.095	0	44.089.636	0	60.114.975	0	42.559.458	39.108.587	0	185.872.656	0%	83%	0	185.872.656	0%	10%	Diskominfo				
		PENINGKATAN PELAYANAN KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH	Prosentase pengaduan masyarakat dan permintaan informasi yang diindaklanjuti	100	Persen	1.845.895.014			Persen	224.983.095	0	44.089.636	0	60.114.975	100	42.559.458	39.108.587	100	185.872.656	100%	83%	100	185.872.656	100%	10%	Diskominfo				
		PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah berita/artikel/publikasi pembangunan daerah melalui media massa	5115	Artikel	3.720.231.644		4665	Artikel	1.360.672.000	1210	170.163.197	1480	415.582.967	514	477.959.082	232.610.292	3204	1.296.315.538	69%	95%	3204	1.296.315.538	63%	35%	Diskominfo				
		PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah iklan/diplay/mesnakh release/talkshow/siaran dalam rangka penyeleenggaraan pemerintahan daerah	1010	Kali	3.685.331.133		935	Kali	568.059.000	159	100.554.982	128	172.267.322	138	147.850.992	121.511.124	425	542.184.420	45%	95%	425	542.184.420	42%	15%	Diskominfo				
		PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT	Jumlah informasi yang bersifat penyuluhan	150	Informasi	878.971.007		113	Informasi	200.758.400	10	10.115.346	25	29.329.686	10	22.900.000	55.237.000	45	117.582.032	40%	59%	45	117.582.032	30%	13%	Diskominfo				
		PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Jumlah dokumen pegembangan kebijakan infrastruktur TIK	3	Dokumen	654.965.800		2	Dokumen	2.203.000	0	453.000	0	1.750.000	0	-	-	0	2.203.000	0%	100%	0	2.203.000	0%	0%	Diskominfo				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																								83%	90%			62%	13%	
PREDIKAT KINERJA																								T	T			R	SR	
		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																												
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	3247;	UKM;	4.636.468.282																								
		FASILITAS PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI DAN BISNIS	jumlah peserta pelatihan WUB	140	Tenani/Ora ng	1.464.613.348		110	Tenani/Ora ng	172.253.100	0	8.703.600	35	77.460.060	0	52.214.780	10	20.111.480	45	158.489.920	41%	92%	45	158.489.920	32%	11%	DPKUKMP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	0	WUB	1.464.613.348			2	WUB	172.253.100	0	8.703.600	0	77.460.060	0	52.214.780	2	20.111.480	2	158.489.920	100%	92%	2	158.489.920	100%	11%	DPKUKMP
		FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI DAN BISNIS	jumlah WUB	2880	UMKM	1.526.794.961			720	UMKM	397.019.580	360	105.325.600	360	106.190.060	0	56.214.780	180	125.380.800	900	393.111.240	125%	99%	900	393.111.240	31%	26%	DPKUKMP
		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	jumlah UKM yang mendapat fasilitas zon	40	UMKM	1.526.794.961			10	UMKM	397.019.580	5	105.325.600	5	106.190.060	0	56.214.780	10	125.380.800	20	393.111.240	200%	99%	20	393.111.240	50%	26%	DPKUKMP
		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	jumlah UKM yang mendapat fasilitas labelling	1600	UMKM	1.526.794.961			400	UMKM	397.019.580	0	105.325.600	260	106.190.060	0	56.214.780	100	125.380.800	360	393.111.240	90%	99%	360	393.111.240	23%	26%	DPKUKMP
		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	jumlah UKM yang mengikuti akselerasi	80	UMKM	492.213.348			20	UMKM	80.304.000	0	-	0	-	0	-	20	80.055.000	20	80.055.000	100%	100%	20	80.055.000	25%	16%	DPKUKMP
		FASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Jumlah UKM yang bermitra dengan industri/usaha besar																									
		PEMETAAN DAN PENDATAAN UKM	Monev pendampingan UKM	9	Kali	394.685.022			2	Kali	156.593.900	1	7.072.000	1	95.310.000	0	49.740.000	1	1.869.900	3	153.991.900	150%	98%	3	153.991.900	33%	39%	DPKUKMP
		PEMETAAN DAN PENDATAAN UKM	Tersedianya data/profil UKM	5	Dokumen	394.685.022			1	Dokumen	156.593.900	0	7.072.000	0	95.310.000	0	49.740.000	1	1.869.900	1	153.991.900	100%	98%	1	153.991.900	20%	39%	DPKUKMP
		PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	jumlah UKM pemula yang mengikuti pelatihan	2000	UMKM	758.161.602			400	UMKM	237.620.000	0	-	45	85.569.900	0	150.450.000	0	-	45	236.019.900	11%	99%	45	236.019.900	2%	31%	DPKUKMP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				102%	97%			35%	25%			
PREDIKAT KINERJA																				ST	ST			SR	SR			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	115;	Angka;	3.843.353.520																						
		PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	Coaching klinik koperasi	120	KOPERASI I	1.987.496.856			30	KOPERASI	566.818.800	0	15.696.000	30	44.950.400	0	399.472.500	0	88.288.200	30	548.407.100	100%	97%	30	548.407.100	25%	28%	DPKUKMP
		PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	Fasilitasi pembentukan badan usaha koperasi	6	KOPERASI I	1.987.496.856			0	KOPERASI	566.818.800	0	15.696.000	0	44.950.400	0	399.472.500	0	88.288.200	0	548.407.100	100%	97%	0	548.407.100	0%	28%	DPKUKMP
		PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	Jumlah Koperasi yang dilatih	120	KOPERASI I	1.987.496.856			30	KOPERASI	566.818.800	30	15.696.000	30	44.950.400	0	399.472.500	0	88.288.200	60	548.407.100	200%	97%	60	548.407.100	50%	28%	DPKUKMP
		PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi	120	KOPERASI I	1.987.496.856			30	KOPERASI	566.818.800	0	15.696.000	30	44.950.400	0	399.472.500	0	88.288.200	30	548.407.100	100%	97%	30	548.407.100	25%	28%	DPKUKMP
		PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	Jumlah Peserta (masyarakat) sosialisasi perkeropasan	400	Orang	1.987.496.856			100	Orang	566.818.800	0	15.696.000	100	44.950.400	0	399.472.500	40	88.288.200	140	548.407.100	140%	97%	140	548.407.100	35%	28%	DPKUKMP
		PEMETAAN DAN PENDATAAN KOPERASI	Kajian terkait koperasi	4	Dokumen	827.333.013			1	Dokumen	161.552.700	0	16.638.900	0	35.740.000	0	25.273.800	1	82.159.900	1	159.812.600	100%	99%	1	159.812.600	25%	19%	DPKUKMP
		PEMETAAN DAN PENDATAAN KOPERASI	Pendataan koperasi	500	KOPERASI I	827.333.013			100	KOPERASI	161.552.700	100	16.638.900	100	35.740.000	0	25.273.800	100	82.159.900	300	159.812.600	300%	99%	300	159.812.600	60%	19%	DPKUKMP
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI KOPERASI	jumlah Koperasi yang dilatih	40	KOPERASI I	213.166.125			10	KOPERASI	205.728.100	0	1.080.000	10	10.710.000	0	1.980.000	10	183.874.200	20	197.644.200	200%	96%	20	197.644.200	50%	93%	DPKUKMP
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI KOPERASI	Pembuatan Aplikasi	1	Aplikasi	213.166.125			1	Aplikasi	205.728.100	0	1.080.000	0	10.710.000	0	1.980.000	0	183.874.200	0	197.644.200	0%	96%	0	197.644.200	0%	93%	DPKUKMP
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI KOPERASI	Penambahan Modul Aplikasi	3	Modul	213.166.125			0	Modul	205.728.100	0	1.080.000	0	10.710.000	0	1.980.000	0	183.874.200	0	197.644.200	100%	96%	0	197.644.200	0%	93%	DPKUKMP
		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA KOPERASI	Jumlah MoU kerjasama usaha koperasi	5	MoU	272.547.101			2	MoU	25.464.200	0	-	0	-	0	-	2	23.604.200	2	23.604.200	100%	93%	2	23.604.200	40%	9%	DPKUKMP
		PENINGKATAN POLA USAHA KOPERASI	jumlah koperasi yang memiliki pola usaha baru	40	KOPERASI I	542.810.425			5	KOPERASI	207.139.200	0	-	0	63.623.000	5	64.691.900	5	45.765.000	10	174.079.900	200%	84%	10	174.079.900	25%	32%	DPKUKMP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				137%	96%			28%	41%			
PREDIKAT KINERJA																				ST	ST			SR	SR			
		LINGKUNGAN HIDUP																										
		PROGRAM PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH	Timbulan Sampah yang Ditangani;	90,75;	Persen;	246.256.000.000																						
		PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	60	Bulan	36.851.540.285			12		10.263.934.500	3	1.097.400.046	3	2.387.596.830	3	4.151.345.215	12	2.440.593.715	21	10.076.935.806	175%	98%	21	10.076.935.806	35%	27%	DLH
		PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	65%	Persen	36.851.540.285			80%		10.263.934.500	0	1.097.400.046	0	2.387.596.830	0	4.151.345.215	0	2.440.593.715	0	10.076.935.806	0%	98%	0	10.076.935.806	0%	27%	DLH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				88%	98%			18%	27%			
PREDIKAT KINERJA																				T	ST			SR	SR			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Akses Dan Sumber Informasi Mengenai Status Lingkungan Hidup Yang Valid Di Kota Cimahi;	100;	Persen;	3.557.915.726																						
		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup	1		945.000.000			1		175.906.400	0	72.172.000	0	35.760.700	1	55.921.456	1	4.925.500	2	168.779.656	200%	96%	2	168.779.656	200%	18%	DLH
		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	Sistem Informasi Lingkungan	1		945.000.000			0		175.906.400	1	72.172.000	0	35.760.700	0	55.921.456	0	4.925.500	1	168.779.656	100%	96%	1	168.779.656	100%	18%	DLH
		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Instrumen Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1		1.850.000.000			1		232.284.600	0	45.179.000	0	81.423.500	1	21.991.500	1	75.899.170	2	224.493.170	200%	97%	2	224.493.170	200%	12%	DLH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				167%	96%			167%	16%			
PREDIKAT KINERJA																				ST	ST			ST	SR			
		PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	Persentase Ruang Terbuka Hijau;	12,14;	Persen;	111.328.000.000																						
		PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU	Dokumen Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya Hutan Kota	1	0	34.261.700.000			0		358.628.270	0	3.475.500	0	3.242.950	0	65.324.000	0	111.939.600	0	183.982.050	100%	51%	0	183.982.050	0%	1%	DLH
		PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU	Dokumen Perencanaan Tapak Batas dan Pembentukan Hutan Adat Crendeu dan Hutan Kota Eks TPA Leuwijaiah	4	0	34.261.700.000			2	dokum	358.628.270	0	3.475.500	0	3.242.950	0	65.324.000	0	111.939.600	0	183.982.050	100%	51%	0	183.982.050	0%	1%	DLH
		PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Penanaman Hutan Kota	5	Paket	34.261.700.000			1	Paket	358.628.270	0	3.475.500	0	3.242.950	0	65.324.000	1	111.939.600	1	183.982.050	100%	51%	1	183.982.050	20%	1%	DLH
		PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU	Jumlah Pengadaan Tanaman MPTS (Multi Purpose Timber System)	5	Paket	34.261.700.000			1	Paket	358.628.270	0	3.475.500	0	3.242.950	0	65.324.000	1	111.939.600	1	183.982.050	100%	51%	1	183.982.050	20%	1%	DLH
		PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU	Penambahan Luas RTH	11,37	Persen	34.261.700.000			11,22	Persen	358.628.270	0	3.475.500	0	3.242.950	0	65.324.000	0	111.939.600	0	183.982.050	0%	51%	0	183.982.050	0%	1%	DLH
		PEMELIHARAAN RTH	Jumlah pengadaan tanaman untuk penyulaman	5	Paket	1.013.880.000			1	Paket	217.681.480	0	74.936.000	0	3.078.500	1	50.278.000	1	43.738.800	2	172.031.300	200%	79%	2	172.031.300	40%	17%	DLH
		PEMELIHARAAN RTH	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan	4	Paket	1.013.880.000			1	Paket	217.681.480	0	74.936.000	0	3.078.500	0	50.278.000	1	43.738.800	1	172.031.300	100%	79%	1	172.031.300	25%	17%	DLH
		PEMELIHARAAN RTH	Luas RTH publik yang terpelihara	11,37	Persen	1.013.880																						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13=6+12	14=(13/5)x100%	15											
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perusahaan yang Melakukan Self Monitoring;	100;	Persen;	20.303.263.624																				
		KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPIURA	Nilai Perolehan Adipura untuk Kota Besar	75		990.388.900	74,25		79.200.000	0	-	0		3.359.421	0	5.800.000	0	9.159.421	0%	12%	0	9.159.421	0%	1%	DLH	
		KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	Jumlah ijin lingkungan	297	Ijin Lingkunga n	3.011.834.000	50	Ijin Lingkungan	470.999.400	21	59.152.800	7	205.504.600	10	55.157.550	61	56.114.550	99	375.929.500	198%	80%	99	375.929.500	33%	12%	DLH
		KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	Komis Penilai AMDAL	1	0	3.011.834.000	0		470.999.400	0	59.152.800	0	205.504.600	0	55.157.550	0	56.114.550	0	375.929.500	100%	80%	0	375.929.500	0%	12%	DLH
		KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	Rekomendasi Lingkungan	2055	Rekomend asi Lingkunga n	3.011.834.000	350	Rekomend asi Lingkungan	470.999.400	92	59.152.800	0	205.504.600	111	55.157.550	257	56.114.550	460	375.929.500	131%	80%	460	375.929.500	22%	12%	DLH
		KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Lingkungan	1	0	3.011.834.000	0		470.999.400	1	59.152.800	0	205.504.600	0	55.157.550	0	56.114.550	1	375.929.500	100%	80%	1	375.929.500	100%	12%	DLH
		KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	Sosialisasi Ijin Lingkungan	13	Kegiatan	3.011.834.000	2	Kegiatan	470.999.400	0	59.152.800	0	205.504.600	1	55.157.550	1	56.114.550	2	375.929.500	100%	80%	2	375.929.500	15%	12%	DLH
		PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pelaku Usaha yang telah melakukan perbaikan atas poin-poin sanksi administratif	45	0	2.338.845.000	40		182.743.240	6	26.495.200	3	99.385.700	4	21.672.150	21	17.468.550	34	165.021.600	85%	90%	34	165.021.600	76%	7%	DLH
		PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan	10	0	2.338.845.000	15		182.743.240	4	26.495.200	3	99.385.700	2	21.672.150	13	17.468.550	22	165.021.600	147%	90%	22	165.021.600	220%	7%	DLH
		PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pelaku Usaha yang telah mengimplementasikan UU 32 /2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang berlaku	200	Pelaku Usaha	2.956.975.000	150	Pelaku Usaha	650.597.200	0	43.901.950	25	240.647.250	25	110.723.150	183	200.692.700	233	595.965.050	155%	92%	233	595.965.050	117%	20%	DLH
		PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	Jumlah Dokumen, Kajian Pengelolaan B3 dan Limbah B3	7	Dokumen	1.852.218.300	3	Dokumen	50.190.000	0	847.500	0	827.500	0	2.285.000	0	36.157.750	0	40.117.750	0%	80%	0	40.117.750	0%	2%	DLH
		PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LimbahB3	4	Sosialisasi	1.852.218.300		Sosialisasi	50.190.000	0	847.500	0	827.500	0	2.285.000	1	36.157.750	1	40.117.750	100%	80%	1	40.117.750	25%	2%	DLH
		PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	Sarana dan Prasarana Pengelolaan B3 dan Limbah B3	3	0	1.852.218.300			50.190.000	0	847.500	0	827.500	0	2.285.000	0	36.157.750	0	40.117.750	100%	80%	0	40.117.750	0%	2%	DLH
		PENGEMBANGAN PRODUKSI RAMAH LINGKUNGAN	Jumlah UMKM yang diberikan pengenalan dan pembinaan produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan	100	UMKM	736.813.000	100	UMKM	50.567.800	0	-	0	1.592.800	0	1.350.000	50	40.642.500	50	43.585.300	50%	86%	50	43.585.300	50%	6%	DLH
		PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	Dokumen Inventarisasi Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GRK	5	Dokumen	2.425.000.000	1	Dokumen	174.838.400	0	70.855.100	0	200.000	1	5.070.000	1	92.329.000	2	168.454.100	200%	96%	2	168.454.100	40%	7%	DLH
		PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam seluruh aspek pengelolaan lingkungan hidup	1410	Orang	2.714.613.412	282	Orang	531.178.000	91	40.042.137	0	200.061.000	0	78.650.000	500	7.980.765	591	326.733.902	210%	62%	591	326.733.902	42%	12%	DLH
		PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	Jumlah RW yang berpartisipasi dalam seluruh aspek pengelolaan lingkungan hidup	15	RW	2.714.613.412	15	RW	531.178.000	0	40.042.137	0	200.061.000	0	78.650.000	35	7.980.765	35	326.733.902	233%	62%	35	326.733.902	233%	12%	DLH
		PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	Jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam seluruh aspek pengelolaan lingkungan hidup	200	Sekolah	2.714.613.412	200	Sekolah	531.178.000	0	40.042.137	0	200.061.000	10	78.650.000	10	7.980.765	20	326.733.902	10%	62%	20	326.733.902	10%	12%	DLH
		PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan	30	Pelaku Usaha	936.534.400	25	Pelaku Usaha	104.047.040	0	4.000.000	0	1.600.000	0	10.967.040	24	75.438.000	24	92.005.040	96%	88%	24	92.005.040	80%	10%	DLH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															112%	77%					59%	9%				
PREDIKAT KINERJA															ST	T					R	SR				
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AIR PERMUKAAN	Persentase Peningkatan Kualitas Air Permukaan;	40;	Persen;	16.455.723.285																				
		PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	Jumlah Dokumen yang mendukung perbaikan Kualitas Air dan Tanah	40		6.000.000.000	7		562.329.900	1	94.449.900	0	40.263.800	3	226.893.300	4	90.736.200	8	452.343.200	114%	80%	8	452.343.200	20%	8%	DLH
		PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN LABORATORIUM	Pelayanan Pengujian	7250	sampel	8.000.000.000	1000	sampel	1.172.088.300	382	309.189.962	443	430.412.305	315	227.771.150	1583	189.963.000	2723	1.157.336.417	272%	99%	2723	1.157.336.417	38%	14%	DLH
		PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN LABORATORIUM	Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi	50	0	8.000.000.000	10		1.172.088.300	0	309.189.962	0	430.412.305	18	227.771.150	16	189.963.000	34	1.157.336.417	340%	99%	34	1.157.336.417	68%	14%	DLH
		PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN LABORATORIUM	Registrasi Laboratorium Lingkungan	1		8.000.000.000	1		1.172.088.300	0	309.189.962	0	430.412.305	0	227.771.150	0	189.963.000	0	1.157.336.417	0%	99%	0	1.157.336.417	0%	14%	DLH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															182%	94%					31%	13%				
PREDIKAT KINERJA															ST	ST					SR	SR				
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS UDARA	Persentase Peningkatan Kualitas Udara Ambien:	107;	Persen;	6.250.000.000																				
		PEMANTAUAN KUALITAS UDARA	Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Udara Perkotaan (EKUP)	5	Dokumen	6.250.000.000	1	Dokumen	286.743.000	0	2.934.233	0	42.079.000	1	210.960.100	1	8.250.000	2	264.223.333	200%	92%	2	264.223.333	40%	4%	DLH
		PEMANTAUAN KUALITAS UDARA	Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Udara	46	Indeks	6.250.000.000	42	Indeks	286.743.000	0	2.934.233	0	42.079.000	72,64	210.960.100	70,23	8.250.000	142,87	264.223.333	340%	92%	142,9	264.223.333	311%	4%	DLH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															270%	92%					175%	4%				
PREDIKAT KINERJA															ST	ST					ST	SR				
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AI AM	Persentase Kelurahan Yang Sudah Pro Klim;	20;	Persen;	53.945.666.300																				
		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM	Jumlah dokumen Pengelolaan Kehati	1	Dokumen	20.184.671.000	1	Dokumen	1.151.433.420	0	84.830.750	0	132.234.600	0	173.850.500	0	540.271.800	0	931.187.650	0%	81%	0	931.187.650	0%	5%	DLH
		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM	Jumlah Pengadaan Bibit tanaman	5	Paket	20.184.671.000	1	Paket	1.151.433.420	0	84.830.750	0	132.234.600	0	173.850.500	0	540.271.800	0	931.187.650	0%	81%	0	931.187.650	0%	5%	DLH
		PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR	Jumlah Dokumen Status/Kondisi Muka Air Tanah di Kota Cimahi	2	Paket	21.038.517.500	0	Paket	983.754.200	0	9.693.500	0	589.536.400	0	143.099.700	0	52.567.900	0	794.897.500	100%	81%	0	794.897.500	0%	4%	DLH
		PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR	Jumlah Material Biopori	2500	Unit	21.038.517.500	500	Unit	983.754.200	0	9.693.500	0	589.536.400	717	143.099.700	717	52.567.900	1434	794.897.500	287%	81%	1434	794.897.500	57%	4%	DLH
		PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR	Jumlah Pengadaan Tanaman untuk Konservasi	5	Paket	21.038.517.500	1	Paket	983.754.200	0	9.693.500	0	589.536.400	1	143.099.700	1	52.567.900	2	794.897.500	200%	81%	2	794.897.500	40%	4%	DLH
		PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR	JUMLAH SUMUR RESAPAN YANG DIBANGUN	880	Unit	21.038.517.500	42	Unit	983.754.200	0	9.693.500	42	589.536.400	0	143.099.700	42	52.567.900	84	794.897.500	200%	81%	84	794.897.500	10%	4%	DLH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															131%	81%					18%	4%				
PREDIKAT KINERJA															ST	T					SR	SR				
		PANGAN		10,3;	Persen;	5.581.588.523																				
		PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES	Tingkat Stabilitas Harga Beras Dan Bahan Pangan Pokok Lainnya;	10,3;	Persen;	5.581.588.523																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				5				6			7			8		9		10		11		12		13		14=(13/5)x100%	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	1	Dokumen	218.240.658	1	Dokumen	53.674.000	0	-	0	-	0	-	1	52.620.000	1	52.620.000	100%	98%	1	52.620.000	100%	24%	Dinas Pangan	
		ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN	Jml. dokumen hasil analisis	10	Kali	188.759.538	2	Kali	30.903.600	0	1.500.000	0	2.700.000	1	5.600.000	1	18.250.000	2	28.050.000	100%	91%	2	28.050.000	20%	15%	Dinas Pangan	
		OPERASIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN	Rapat plenotahun	31	KWT	202.556.906	23	KWT	72.825.000	3	17.638.000	3	11.600.000	6	19.749.000	0	23.335.000	12	72.322.000	52%	99%	12	72.322.000	39%	36%	Dinas Pangan	
		MANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENINGKATAN PENGEMBANGAN PANGAN	Jumlah KWT yang memanfaatkan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan keluarga	10	Dokumen	1.421.463.162	2	Dokumen	71.509.900	0	15.490.400	2	16.428.000	0	14.675.000	0	16.291.500	2	62.884.900	100%	88%	2	62.884.900	20%	4%	Dinas Pangan	
		PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN MASYARAKAT	Analisis hasil pemantauan harga dan pasokan pangan semesteran (juni dan des)	10	kalibulan	1.421.463.162	10	kalibulan	71.509.900	2	15.490.400	3	16.428.000	3	14.675.000	2	16.291.500	10	62.884.900	100%	88%	10	62.884.900	100%	4%	Dinas Pangan	
		PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN MASYARAKAT	Pemantauan harga dan pasokan pangan pada feb - nov	1	TTI	1.421.463.162	0	TTI	71.509.900	1	15.490.400	0	16.428.000	0	14.675.000	0	16.291.500	1	62.884.900	100%	88%	1	62.884.900	100%	4%	Dinas Pangan	
		PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN MASYARAKAT	Pengembangan lembaga pangan masyarakat (LPM)	6	LPM	1.421.463.162	1	LPM	71.509.900	1	15.490.400	0	16.428.000	0	14.675.000	0	16.291.500	1	62.884.900	100%	88%	1	62.884.900	17%	4%	Dinas Pangan	
		PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	Cadangan pangan pemerintah (beras)	18	Ton	552.765.308	12	Ton	2.750.000	0	-	0	2.750.000	0	-	0	-	0	2.750.000	0%	100%	0	2.750.000	0%	0%	Dinas Pangan	
		PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Frekuensi pengujian sample bahan pangan segar	12	kalibulan	527.514.168	2	kalibulan	65.089.000	3	8.545.500	3	3.134.750	3	33.800.000	0	14.714.250	9	60.194.500	450%	92%	9	60.194.500	75%	11%	Dinas Pangan	
		PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah sample pangan segar yang diuji	30	sample	527.514.168	5	sample	65.089.000	15	8.545.500	15	3.134.750	15	33.800.000	0	14.714.250	45	60.194.500	900%	92%	45	60.194.500	150%	11%	Dinas Pangan	
		PEMINGKATAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	Jml. peta situasi kerawanan pangan	5	Dokumen	660.658.383	1	Dokumen	140.800.000	0	3.250.000	0	36.150.000	0	21.950.000	1	52.490.000	1	113.840.000	100%	81%	1	113.840.000	20%	17%	Dinas Pangan	
		PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	Jumlah instrumen pendukung perencanaan kebijakan ketahanan pangan	5	Dokumen	660.658.383	1	Dokumen	140.800.000	0	3.250.000	0	36.150.000	1	21.950.000	0	52.490.000	1	113.840.000	100%	81%	1	113.840.000	20%	17%	Dinas Pangan	
		PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	Surveilans/pengawasan terus menerus status gizi masyarakat yg diakibatkan oleh pangan	5	Kali	660.658.383	1	Kali	140.800.000	0	3.250.000	1	36.150.000	0	21.950.000	0	52.490.000	1	113.840.000	100%	81%	1	113.840.000	20%	17%	Dinas Pangan	
		PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	Tertanganinya kasus kerawanan pangan dan gizi	5	lumpsum	660.658.383	1	lumpsum	140.800.000	0	3.250.000	1	36.150.000	0	21.950.000	0	52.490.000	1	113.840.000	100%	81%	1	113.840.000	20%	17%	Dinas Pangan	
		PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	Partisipasi dalam lomba cipta menu B2SA Tk. Prov Jabar	6	Kegiatan	1.561.629.230	1	Kegiatan	209.692.000	0	14.300.000	0	106.333.750	1	47.329.000	0	39.644.000	1	207.606.750	100%	99%	1	207.606.750	17%	13%	Dinas Pangan	
		PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	Partisipasi dalam peringatan HPS Tk. Prov dan Tk. Nasional	12	Kali	1.561.629.230	2	Kali	209.692.000	0	14.300.000	0	106.333.750	0	47.329.000	2	39.644.000	2	207.606.750	100%	99%	2	207.606.750	17%	13%	Dinas Pangan	
		PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	Penyelenggaraan lomba cipta menu B2SA Tk. Kota Cimahi	6	Kegiatan	1.561.629.230	1	Kegiatan	209.692.000	0	14.300.000	1	106.333.750	0	47.329.000	0	39.644.000	1	207.606.750	100%	99%	1	207.606.750	17%	13%	Dinas Pangan	
		PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	Penyelenggaraan pelatihan diversifikasi pangan	12	Kali	1.561.629.230	2	Kali	209.692.000	0	14.300.000	0	106.333.750	0	47.329.000	2	39.644.000	2	207.606.750	100%	99%	2	207.606.750	17%	13%	Dinas Pangan	
		PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	Promosi percepatan pengankaragaman konsumsi pangan (P2KP)	15	Kelompok	1.561.629.230	15	Kelompok	209.692.000	0	14.300.000	0	106.333.750	0	47.329.000	6	39.644.000	6	207.606.750	40%	99%	6	207.606.750	40%	13%	Dinas Pangan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				150%	92%			42%	13%		
PREDIKAT KINERJA																				ST	ST			SR	SR		
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tingkat Keswdayaan Masyarakat ;	50;	Persen;	142.958.661.039																					
		PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN																									
		FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah lokasi yang ditangani BBGRM dan BSMSS	2	Lokasi	2.362.426.000	2	Lokasi	584.607.000	0	239.836.700	0	51.775.556	1	48.690.400	1	156.925.800	2	497.228.456	100%	85%	2	497.228.456	100%	21%	BAG. PEMERINTAHAN	
		PEMBINAAN ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah RW yang dibina	312	RW	1.820.023.000	312	RW	25.000.000	0	1.000.000	312	9.091.000	0	1.824.000	0	8.977.200	312	20.892.200	100%	84%	312	20.892.200	100%	1%	BAG. PEMERINTAHAN	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN	Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang	90	Persen	240.519.651	80	Persen	54.881.500	200	53.596.500	0	1.185.000	0	-	0	-	200	54.781.500	250%	100%	200	54.781.500	222%	23%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN CIBEER	Jumlah Stokeholder dalam penentuan usulan	150	Orang	294.985.171	150	Orang	65.290.050	150	46.926.550	0	-	0	-	0	15.750.000	150	62.676.550	100%	96%	150	62.676.550	100%	21%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN CIBEUREUM	Jumlah Stokeholder dalam penentuan usulan	150	Orang	301.869.561	150	Orang	68.887.200	150	55.012.200	0	-	0	-	0	13.875.000	150	68.887.200	100%	100%	150	68.887.200	100%	23%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN LEUWIGAJAH	Jumlah Stokeholder dalam penentuan usulan	160	Orang	255.671.012	160	Orang	41.320.000	160	38.820.000	0	-	0	-	0	2.500.000	160	41.320.000	100%	100%	160	41.320.000	100%	16%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN MELONG	Jumlah Stokeholder dalam penentuan usulan	250	Orang	440.475.165	250	Orang	100.212.550	250	78.612.550	0	-	0	-	0	21.600.000	250	100.212.550	100%	100%	250	100.212.550	100%	23%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN UTAMA	Jumlah Stokeholder dalam penentuan usulan	210	Orang	214.215.777	210	Orang	42.375.000	210	39.540.000	0	420.000	0	-	0	2.415.000	210	42.375.000	100%	100%	210	42.375.000	100%	20%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN	Jumlah partisipasi masyarakat	1.275	Volume	646.518.750	1.275	Volume	75.671.800	0	-	725	71.371.800	0	-	0	-	725	71.371.800	57%	94%	725	71.371.800	57%	11%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN CIBEER	Jumlah partisipasi masyarakat	750	Orang	356.981.900	750	Orang	40.962.000	0	-	300	36.000.000	150	-	0	-	450	36.000.000	60%	88%	450	36.000.000	60%	10%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN CIBEUREUM	Jumlah partisipasi masyarakat	850	Orang	499.512.100	850	Orang	54.008.000	0	-	300	35.483.000	200	15.000.000	0	-	500	50.483.000	59%	93%	500	50.483.000	59%	10%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN LEUWIGAJAH	Jumlah partisipasi masyarakat	900	Orang	458.396.850	900	Orang	43.205.000	0	-	500	41.005.000	0	2.100.000	0	-	500	43.105.000	56%	100%	500	43.105.000	56%	9%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN MELONG	Jumlah partisipasi masyarakat	2200	Orang	602.814.700	2.197	Orang	76.556.000	0	-	900	75.821.000	510	-	0	-	1410	75.821.000	64%	99%	1410	75.821.000	64%	13%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN UTAMA	Jumlah partisipasi masyarakat	585	Orang	456.658.950	585	Orang	36.204.500	0	-	300	36.186.500	150	-	0	-	450	36.186.500	77%	100%	450	36.186.500	77%	8%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan Peningkatan SDM	12	Kegiatan	927.836.395	12	Kegiatan	198.392.650	2	63.485.050	3	57.880.750	3	14.600.000	3	60.460.900	11	196.426.700	92%	99%	11	196.426.700	92%	21%	KEC CIMAHI SELATAN	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIBEER	Jumlah																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab														
				5			6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%													
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp												
1	2	3	4	12	Kali	262.055.600	K	Rp	12	Kali	55.131.500	K	Rp	6	Rp	33.149.650	K	Rp	3	Rp	5.600.000	K	Rp	3	Rp	10.765.600	12	K	Rp	55.115.250	100%	100%	12	K	Rp	55.115.250	100%	21%	KEC CIMAHI SELATAN
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI SELATAN	Jumlah laporan	#####	Volume	4.593.515.719			#####	Volume	1.465.700.000	0	-	8E+07	1.121.300.000	7E+07	152.570.000	1E+07	190.365.000	1,6E+08	1.464.235.000	147%	100%	2E+08	1.464.235.000	127%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBEBER	Jumlah Swadaya Masyarakat	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBEUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan	#####	Orang	9.515.139.704			#####	Orang	3.036.950.000	0	70.125.000	1E+08	1.001.252.620	1E+08	1.732.786.847	0	229.880.000	2,2E+08	3.034.044.467	100%	100%	2E+08	3.034.044.467	100%	32%	KEC CIMAHI SELATAN											
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIBUUREUM	Jumlah Stakeholder dalam penentuan usulan																																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4																					15			
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN CITEUREUP	Jumlah Partisipasi Masyarakat	1650	Orang	307.775.000		1200	Orang	7.209.000	0	-	250	7.209.000	0	-	0	-	250	7.209.000	21%	100%	250	7.209.000	15%	2%	KEC CIMAHI UTARA
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN PASIRKALIKI	Jumlah Partisipasi Masyarakat	1100	Orang	325.805.000		800	Orang	11.553.000	0	-	400	9.477.000	0	2.076.000	0	-	400	11.553.000	50%	100%	400	11.553.000	36%	4%	KEC CIMAHI UTARA
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN KECAMATAN CIMAHI UTARA	Jumlah Partisipasi Masyarakat	2750	Orang	782.245.500		2000	Orang	144.048.600	0	-	1736	78.958.500	0	64.490.000	0	-	1736	143.448.500	87%	100%	1736	143.448.500	63%	18%	KEC CIMAHI UTARA
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN KELURAHAN CIBABAT	Jumlah Partisipasi Masyarakat	1550	Orang	293.317.500		1100	Orang	7.871.000	0	-	120	7.871.000	0	-	0	-	120	7.871.000	11%	100%	120	7.871.000	8%	3%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KECAMATAN CIMAHI UTARA	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	38	Kegiatan	1.023.100.000		38	Kegiatan	173.691.300	9	50.580.200	12	59.359.400	11	29.391.700	6	34.360.000	38	173.691.300	100%	100%	38	173.691.300	100%	17%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIBABAT	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	38	Kegiatan	4.560.300.000		38	Kegiatan	983.980.700	17	241.989.700	2	247.754.500	8	241.315.500	11	247.897.000	38	978.956.700	100%	99%	38	978.956.700	100%	21%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIPAGERAN	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	38	Kegiatan	4.912.500.000		38	Kegiatan	1.100.657.500	17	245.525.000	2	304.229.100	10	292.573.899	9	248.750.500	38	1.091.078.499	100%	99%	38	1.091.078.499	100%	22%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CITEUREUP	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	38	Kegiatan	3.489.200.000		38	Kegiatan	823.955.200	17	210.867.900	3	215.319.000	9	202.418.300	9	189.030.000	38	817.635.200	100%	99%	38	817.635.200	100%	23%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN PASIRKALIKI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	38	Kegiatan	2.773.300.000		38	Kegiatan	610.738.087	17	144.644.497	2	145.112.490	7	157.415.700	12	147.772.800	38	594.945.487	100%	97%	38	594.945.487	100%	21%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIBABAT	Jumlah Swadaya Masyarakat	3E+08	Rupiah	9.565.175.000		2E+08	Rupiah	2.631.800.200	8E+06	78.388.950	1E+08	1.002.988.985	7E+07	710.931.738	7E+07	718.165.325	2,5E+08	2.510.474.998	122%	95%	3E+08	2.510.474.998	92%	26%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI UTARA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	371.977.000		4	Dokumen	98.614.250	1	21.212.750	1	26.210.000	1	7.100.000	1	13.450.000	4	67.972.750	100%	69%	4	67.972.750	100%	18%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIPAGERAN	Jumlah Swadaya Masyarakat	3E+08	Rupiah	11.040.013.000		2E+08	Rupiah	3.020.642.783	6E+06	58.670.000	2E+08	2.295.274.783	4E+07	379.270.000	3E+07	275.432.000	3E+08	3.008.646.783	126%	100%	3E+08	3.008.646.783	95%	27%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CITEUREUP	Jumlah Swadaya Masyarakat	2E+08	Rupiah	7.233.700.000		2E+08	Rupiah	1.985.342.880	3E+07	272.019.930	1E+08	1.348.032.650	1E+07	138.220.000	2E+07	203.137.000	2E+08	1.961.409.580	126%	99%	2E+08	1.961.409.580	95%	27%	KEC CIMAHI UTARA
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PASIRKALIKI	Jumlah Swadaya Masyarakat	2E+08	Rupiah	5.412.435.000		1E+08	Rupiah	1.496.950.300	8E+06	84.396.500	1E+08	1.189.987.250	2E+07	171.745.000	4E+06	41.587.000	1,5E+08	1.487.715.750	128%	99%	1E+08	1.487.715.750	96%	27%	KEC CIMAHI UTARA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				149%	95%			131%	19%		
PREDIKAT KINERJA																				ST	ST			ST	SR		
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																									
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen;	20;	Persen;	4.544.454.346																					
		PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	Jumlah fasilitas Hari Kartini dan Hari Ibu	10	Kegiatan	2.328.371.293		2	Kegiatan	301.385.000	0	85.350.000	1	78.227.000	0	1.350.000	1	116.484.000	2	281.411.000	100%	93%	2	281.411.000	20%	12%	DinsosPP
		PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	Jumlah fasilitas PEKKA	15	Kegiatan	2.328.371.293		3	Kegiatan	301.385.000	0	85.350.000	0	78.227.000	3	1.350.000	0	116.484.000	3	281.411.000	100%	93%	3	281.411.000	20%	12%	DinsosPP
		PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	Pembinaan GOW & KPPI	8	Kegiatan	2.328.371.293		2	Kegiatan	301.385.000	1	85.350.000	1	78.227.000	0	1.350.000	0	116.484.000	2	281.411.000	100%	93%	2	281.411.000	25%	12%	DinsosPP
		PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PRPG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PRPG	6	PD	1.163.733.750		3	PD	101.926.000	0	3.913.000	0	12.443.500	0	-	3	50.895.000	3	67.251.500	100%	66%	3	67.251.500	50%	6%	DinsosPP
		PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah Ibu Rumah Tangga Terbina	500	Orang	1.052.349.303		100	Orang	223.518.500	0	16.916.000	0	72.200.000	0	41.060.000	100	69.183.500	100	199.359.500	100%	89%	100	199.359.500	20%	19%	DinsosPP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				100%	87%			27%	12%		
PREDIKAT KINERJA																				ST	T			SR	SR		
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar;	70;	Persen;	4.560.000.000																					
		FASILITASI HARI ANAK NASIONAL DAN PEMBINAAN FORUM ANAK	Fasilitasi Hari Anak Nasional	12	Kegiatan	1.465.442.500		3	Kegiatan	123.861.900	0	3.627.000	0	2.460.000	3	98.465.564	0	-	3	104.552.564	100%	84%	3	104.552.564	25%	7%	DinsosPP
		FASILITASI HARI ANAK NASIONAL DAN PEMBINAAN FORUM ANAK	Jumlah anggota forum anak yang meningkat kapasitasnya	580	Orang	1.465.442.500		80	Orang	123.861.900	0	3.627.000	0	2.460.000	0	98.465.564	80	-	80	104.552.564	100%	84%	80	104.552.564	14%	7%	DinsosPP
		FASILITASI HARI ANAK NASIONAL DAN PEMBINAAN FORUM ANAK	Jumlah Forum Anak Terbina	19	Forum	1.465.442.500		19	Forum	123.861.900	0	3.627.000	0	2.460.000	0	98.465.564	19	-	19	104.552.564	100%	84%	19	104.552.564	100%	7%	DinsosPP
		FASILITASI P2TP2A	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan P2TP2A	60	Bulan	689.620.000		12	Bulan	67.168.900	3	8.230.000	3	7.245.000	3	7.680.000	3	23.660.500	12	46.815.500	100%	70%	12	46.815.500	20%	7%	DinsosPP
		FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN	Jumlah peserta tersosialisasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	2150	Orang	592.912.500		500	Orang	81.870.000	0	900.000	160	38.916.000	320	24.920.000	0	11.198.000	480	75.934.000	96%	93%	480	75.934.000	22%	13%	DinsosPP
		PEMBINAAN POSYANDU	Jumlah fasilitasi pembinaan posyandu	6	Kegiatan	360.000.000		3	Kegiatan	184.320.000	1	25.823.000	0	11.377.000	1	10.300.000	1	109.955.000	3	157.455.000	100%	85%	3	157.455.000	50%	44%	DinsosPP
		PENDUKUNG KOTA LAYAK ANAK	Jumlah PATBM Kelurahan Terbentuk	15	Kelompok	1.452.025.000		5	Kelompok	163.324.400	5	11.680.000	0	8.260.000	0	28.869.272	5	107.830.000	10	156.639.272	200%	96%	10	156.639.272	67%	11%	DinsosPP
		PENDUKUNG KOTA LAYAK ANAK	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya tentang hak-hak anak	500	Orang	1.452.025.000		100	Orang	163.324.400	0	11.680.000	0	8.260.000	0	28.869.272	100	107.830.000	100	156.639.272	100%	96%	100	156.639.272	20%	11%	DinsosPP
		PENDUKUNG KOTA LAYAK ANAK	Jumlah sarana prasarana pendukung kota layak anak	10	Unit	1.452.025.000		5	Unit	163.324.400	0	11.680.000	0	8.260.000	0	28.869.272	0	107.830.000	0	156.639.272	0%	96%	0	156.639.272	0%	11%	DinsosPP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				100%	88%			35%	13%		
PREDIKAT KINERJA																				ST	T			SR	SR		
		PENANAMAN MODAL																									
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Yang Melapor Ke LKPM;	225;	Perusaha an;	21.449.897.157																					
		FASILITASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pemberian fasilitasi	16	Fasilitasi	625.000.000		4	Fasilitasi	30.852.000	0	0	0	0	0	1	30.852.000	1	30.852.000	25%	100%	1	30.852.000	6%	5%	DispenmoPTSP	
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	Jumlah izin yang dimonitoring	700	Izin	745.000.000		700	Izin	39.875.000	0	0	0	0	0	700	39.560.000	700	39.560.000	100%	99%	700	39.560.000	100%	5%	DispenmoPTSP	
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	Jumlah regulasi yang di-review	4	Dokumen	745.000.000		1	Dokumen	39.875.000	0	0	0	0	0	1	39.560.000	1	39.560.000	100%	99%	1	39.560.000	25%	5%	DispenmoPTSP	
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	Pemetaan izin pembangunan tematik	4	Peta	745.000.000		1	Peta	39.875.000	0	0	0	0	0	1	39.560.000	1	39.560.000	100%	99%	1	39.560.000	25%	5%	DispenmoPTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4																					15					
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	Jumlah review izin perekonomian	4	Dokumen	735.000.000			1	Dokumen	92.590.000	0	8.235.000	0	10.991.000	0	56.510.000	1	89.636.000	100%	97%	1		89.636.000	25%	12%	DispenmoPTSP		
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	Pemetaan izin usaha (peta)	4	Peta	735.000.000			1	Peta	92.590.000	0	8.235.000	0	10.991.000	0	56.510.000	1	89.636.000	100%	97%	1		89.636.000	25%	12%	DispenmoPTSP		
		PEMBUATAN MEDIA INFORMASI PERIZINAN	Jumlah konten media informasi	8	Konten	930.000.000			1	Konten	53.405.000	0	2.900.000	0	5.945.000	0	10.030.000	1	45.425.000	100%	85%	1		45.425.000	13%	5%	DispenmoPTSP		
		PENDATAAN DAN PELAPORAN PERUSAHAAN NON-SPIPISE	Jumlah dokumen pelaporan perusahaan Non-SPIPISE	4	Dokumen	110.000.000			1	Dokumen	12.750.000	0	-	0	-	0	12.750.000	1	12.750.000	100%	100%	1		12.750.000	25%	12%	DispenmoPTSP		
		PENGARSIPAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	Jumlah berkas izin pembangunan yang diakh media/ditaksi (berkas)	1050	Berkas	690.000.000			200	Berkas	59.103.000	200	55.895.000	0	3.208.000	0	-	200	59.103.000	100%	100%	200		59.103.000	19%	9%	DispenmoPTSP		
		PENGARSIPAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	Jumlah Arsip	2	Dokumen	690.000.000			2	Dokumen	53.698.000	0	-	1	42.380.000	0	3.658.000	1	6.776.000	2	52.814.000	100%	98%	2		52.814.000	100%	8%	DispenmoPTSP
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah dashboard perizinan	4	Modul	2.023.000.000			1	Modul	251.810.000	0	18.440.000	0	94.684.000	0	55.487.000	0	25.400.000	0	194.011.000	0%	77%	0		194.011.000	0%	10%	DispenmoPTSP
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah konten dan fitur yang tersedia di dalam website	20	Modul	2.023.000.000			5	Modul	251.810.000	0	18.440.000	5	94.684.000	0	55.487.000	0	25.400.000	5	194.011.000	100%	77%	5		194.011.000	25%	10%	DispenmoPTSP
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah modul database yang masuk dalam sistem informasi manajemen	20	Modul	2.023.000.000			5	Modul	251.810.000	0	18.440.000	3	94.684.000	2	55.487.000	0	25.400.000	5	194.011.000	100%	77%	5		194.011.000	25%	10%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Jumlah penanganan perusahaan melalui task force	4	Kali	2.250.000.000			0	Kali	323.580.000	0	117.695.000	0	106.186.500	0	16.460.000	0	70.460.200	0	310.801.700	100%	96%	0		310.801.700	0%	14%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen pelaporan perusahaan Non SPIPISE	1	Dokumen	2.250.000.000			0	Dokumen	323.580.000	0	117.695.000	0	106.186.500	0	16.460.000	0	70.460.200	0	310.801.700	100%	96%	0		310.801.700	0%	14%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	8	Dokumen	2.250.000.000			2	Dokumen	323.580.000	0	117.695.000	0	106.186.500	0	16.460.000	1	70.460.200	1	310.801.700	50%	96%	1		310.801.700	13%	14%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen perusahaan wajib LKPM yang terdada	4	Dokumen	2.250.000.000			1	Dokumen	323.580.000	0	117.695.000	0	106.186.500	0	16.460.000	1	70.460.200	1	310.801.700	100%	96%	1		310.801.700	25%	14%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Jumlah peserta pelatihan	80	Orang	2.250.000.000			20	Orang	323.580.000	50	117.695.000	0	106.186.500	50	16.460.000	0	70.460.200	100	310.801.700	500%	96%	100		310.801.700	125%	14%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Jumlah peserta sosialisasi dan pendampingan LKPM	400	Orang	2.250.000.000			100	Orang	323.580.000	30	117.695.000	85	106.186.500	30	16.460.000	85	70.460.200	230	310.801.700	230%	96%	230		310.801.700	58%	14%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Pemeringkatan 3 PMA dan PMDN terbaik di Kota Cimahi	24	Perusaha	2.250.000.000			6	Perusaha	323.580.000	0	117.695.000	0	106.186.500	0	16.460.000	0	70.460.200	0	310.801.700	0%	96%	0		310.801.700	0%	14%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	Gambar	190	Dokumen	1.310.000.000			40	Dokumen	218.892.000	12	36.732.000	18	27.645.000	3	36.705.000	7	104.195.000	40	205.277.000	100%	94%	40		205.277.000	21%	16%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	Jumlah pelayanan keliling/gerai	60	Kali	1.150.000.000			15	Kali	142.684.000	0	7.886.000	0	55.596.000	15	3.800.000	0	71.568.000	15	138.850.000	100%	97%	15		138.850.000	25%	12%	DispenmoPTSP
		PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	Jumlah pemohon izin yang dilayani dengan sistem antar jemput (pemohon)	320	Orang	1.150.000.000			80	Orang	142.684.000	0	7.886.000	20	55.596.000	30	3.800.000	30	71.568.000	80	138.850.000	100%	97%	80		138.850.000	25%	12%	DispenmoPTSP
		PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN PEMBANGUNAN	Jumlah SOP	60	SOP	490.000.000			15	SOP	56.320.000	0	3.080.000	0	2.057.000	12	49.195.000	0	-	12	54.332.000	80%	96%	12		54.332.000	20%	11%	DispenmoPTSP
		PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN PEREKONOMIAN	Jumlah SOP	25	SOP	490.000.000			5	SOP	85.891.000	0	6.620.000	5	55.405.000	0	4.500.000	0	18.650.000	5	85.175.000	100%	99%	5		85.175.000	20%	17%	DispenmoPTSP
		PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	Jumlah pameran investasi yang diikuti dan atau diselenggarakan	29	Pameran	2.867.652.750			3	Pameran	147.477.500	0	-	1	9.590.000	0	-	1	37.590.500	2	47.180.500	67%	32%	2		47.180.500	7%	2%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI UNGGULAN DAERAH	Jumlah dokumen FS Investasi	5	Dokumen	1.400.000.000			1	Dokumen	150.000.000	0	121.239.500	1	26.600.000	0	-	0	-	1	147.839.500	100%	99%	1		147.839.500	20%	11%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI UNGGULAN DAERAH	Jumlah Dokumen Rencana Investasi	1	Dokumen	1.400.000.000				Dokumen	150.000.000	0	121.239.500	0	26.600.000	0	-	0	-	0	147.839.500	100%	99%	0		147.839.500	0%	11%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN DOKUMEN PENGOLAHAN HASIL SURVEY KRR	Jumlah dokumen pengolahan hasil survey	7	Dokumen	290.000.000			1	Dokumen	64.201.000	0	14.615.000	0	10.640.000	0	11.780.000	1	23.206.000	1	60.241.000	100%	94%	1		60.241.000	14%	21%	DispenmoPTSP
		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	Jumlah naskah akademis/raperda/aperwal/perda/per wal perizinan perekonomian	4	Dokumen	675.000.000			1	Dokumen	70.072.000	0	44.375.000	1	17.740.000	0	2.902.000	0	4.500.000	1	69.517.000	100%	99%	1		69.517.000	25%	10%	DispenmoPTSP
		SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan peraturan perizinan pembangunan	1100	Orang	770.000.000			200	Orang	49.190.000	140	49.190.000	0	-	0	-	0	-	140	49.190.000	70%	100%	140		49.190.000	13%	6%	DispenmoPTSP
		SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	Jumlah tayangan pada media cetak, elektronik dan sosial media (kali)	120	Kali	665.000.000			30	Kali	38.250.000	0	8.235.000	0	5.400.000	15	8.640.000	15	13.125.000	30	35.400.000	100%	93%	30		35.400.000	25%	5%	DispenmoPTSP
		PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Izin	200	Izin	164.948.398			125	Izin	28.790.700	31	5.999.250	25	21.652.200	28	-	34	900.000	118	28.551.450	94%	99%	118		28.551.450	59%	17%	KEC CIMAHI SELATAN
		PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin	700	Buah	428.272.000			400	Buah	78.662.500	54	16.816.000	51	23.262.000	78	20.781.750	67	13.315.750	250	74.175.500	63%	94%	250		74.175.500	36%	17%	KEC CIMAHI TENGAH
		PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin	350	Izin	276.024.000			350	Izin	42.850.000	96	11.704.500	24	11.792.500	128	9.625.000	47	9.728.000	295	42.850.000	84%	100%	295		42.850.000	84%	16%	KEC CIMAHI UTARA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					102%	93%			29%	11%			
PREDIKTAI KINERJA																					ST	ST			SR	SR			
		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
		PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Rasio Akseptor KB;	79;	Persen;	19.745.850.300																							
		ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN REMAJA YANG TERBINA	57	Kelompok	2.010.000.000			41	Kelompok	210.280.650	5	57.433.250	0	5.800.000	41	135.776.200	0	2.080.000	46	201.089.450	112%	96%	46		201.089.450	81%	10%	DinsosPP
		FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB	Jumlah kampung KB terbentuk	12	kampung	475.182.708			2	kampung	62.305.000	0	-	0	23.005.000	0	-	2	24.937.000	2	47.942.000	100%	77%	2		47.942.000	17%	10%	DinsosPP
		PELAYANAN KB MEDIS OPERASI DILAYANI	JUMLAH AKSEPTOR MEDIS OPERASI DILAYANI	1275	akseptor	1.300.000.000			120	akseptor	234.725.200	55	62.953.000	0	220.000	56	69.398.000	0	57.979.200	111	190.550.200	93%	81%	111		190.550.200	9%	15%	DinsosPP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PELAYANAN KIE	Fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan	11	Sekolah 6.433.000.391			4	Sekolah 1.200.458.400	0	64.992.200	0	272.488.000	4	239.906.000	0	609.726.000	4	1.187.112.200	100%	99%	4		1.187.112.200	36%	18%	DinsosPP
		PELAYANAN KIE	Jumlah Calon Akseptor yang Telah Mendapatkan informasi dan Edukasi	14142	Orang 6.433.000.391			1000	Orang 1.200.458.400	180	64.992.200	300	272.488.000	240	239.906.000	280	609.726.000	1000	1.187.112.200	100%	99%	1000		1.187.112.200	7%	18%	DinsosPP
		PELAYANAN KIE	Jumlah Dokumen Data Mikro Keluarga	5	Dokumen 6.433.000.391			1	Dokumen 1.200.458.400	0	64.992.200	0	272.488.000	0	239.906.000	1	609.726.000	1	1.187.112.200	100%	99%	1		1.187.112.200	20%	18%	DinsosPP
		PELAYANAN KIE	JUMLAH DOKUMEN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN	1	Dokumen 6.433.000.391			1	Dokumen 1.200.458.400	0	64.992.200	0	272.488.000	0	239.906.000	0	609.726.000	0	1.187.112.200	0%	99%	0		1.187.112.200	0%	18%	DinsosPP
		PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB	Rasio Akseptor MKJP	35,89	Persen 2.864.479.701			34,83	Persen 499.850.000	0	87.405.500	0	97.390.000	0	150.742.400	32,04	132.412.500	32,04	467.950.400	92%	94%	32,04		467.950.400	89%	16%	DinsosPP
		PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah Fasilitas Pembinaan Keluarga Berencana	25	Kegiatan 3.495.005.000			5	Kegiatan 510.036.000	1	40.565.000	2	235.981.000	1	72.593.000	1	97.237.081	5	446.376.081	100%	88%	5		446.376.081	20%	13%	DinsosPP
		PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA KIE KB	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana KIE KB	5	Paket 955.768.600			1	Paket 701.389.000	0,25	12.839.849	0,25	77.860.000	0,25	-	1	365.676.000	1,05208	456.375.849	105%	65%	1,052		456.375.849	21%	48%	DinsosPP
		PROMOSI PELAYANAN KHIBA	Jumlah Fasilitas Hari Keluarga Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	15	Kegiatan 2.212.413.900			3	Kegiatan 340.923.150	0	14.381.550	1	33.000.000	2	213.724.664	0	49.405.000	3	310.511.214	100%	91%	3		310.511.214	20%	14%	DinsosPP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					91%	90%			29%	18%	
PREDIKAT KINERJA																					ST	T			SR	SR	
		PERHUBUNGAN																									
		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS	Persentase Fasilitas Lalu Lintas Yang Layak;	100;	Persen;	84.315.000.000																					
		PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM	Jumlah PJU,PJL dan PJG yang dilakukan pemeliharaan	4650	Titik 16.749.100.000			4650	Titik 3.379.546.000	588	1.496.688.410	703	961.910.050	129	201.724.650	930	463.887.450	2350	3.124.210.560	51%	92%	2350		3.124.210.560	51%	19%	DISHUB
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	Jumlah rambu lalu lintas yang dilakukan pemasangan	196	Unit 5.641.100.000			196	Unit 840.270.000	0	2.939.000	51	232.806.000	72	2.562.000	36	499.884.700	159	738.191.700	81%	88%	159		738.191.700	81%	13%	DISHUB
		PENGADAAN MARKA JALAN	Jumlah panjang jalan yang terpasang marka jalan	9400	Meter 10.388.500.000			2880	Meter 1.463.456.000	0	2.199.300	0	138.825.300	4450	802.577.200	0	249.679.515	4450	1.193.281.315	155%	82%	4450		1.193.281.315	47%	11%	DISHUB
		PENGADAAN MARKA JALAN	Jumlah speed bumper yang terpasang pada ruas jalan kota	200	Unit 10.388.500.000			100	Unit 1.463.456.000	0	2.199.300	150	138.825.300	0	802.577.200	0	249.679.515	150	1.193.281.315	150%	82%	150		1.193.281.315	75%	11%	DISHUB
		PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang	600	Meter 816.500.000			150	Meter 75.050.000	0	-	0	201.000	0	739.000	52	68.918.000	52	69.858.000	35%	93%	52		69.858.000	9%	9%	DISHUB
		PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM	jumlah PJU, PJL dan PJG yang terpasang	14548	Titik 49.144.800.000			3637	Titik 6.577.894.350	0	1.750.682.920	1106	3.847.284.700	0	174.226.700	0	358.293.750	1106	6.130.488.070	30%	93%	1106		6.130.488.070	8%	12%	DISHUB
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Jumlah dokumen pembahasan kajian ANDAL Lalu Lintas	24	Dokumen 1.575.000.000			24	Dokumen 69.600.000	2	2.360.000	1	1.180.000	3	53.067.000	6	5.880.000	12	62.487.000	50%	90%	12		62.487.000	50%	4%	DISHUB
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Jumlah dokumen traffic counting hari raya	1	Dokumen 1.575.000.000			1	Dokumen 69.600.000	0	2.360.000	1	1.180.000	0	53.067.000	0	5.880.000	1	62.487.000	100%	90%	1		62.487.000	100%	4%	DISHUB
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Jumlah perhitungan traffic counting pada ruas jalan kota	15	ruas jalan 1.575.000.000			10	ruas jalan 69.600.000	0	2.360.000	0	1.180.000	0	53.067.000	0	5.880.000	0	62.487.000	0%	90%	0		62.487.000	0%	4%	DISHUB
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					72%	89%			47%	10%	
PREDIKAT KINERJA																					S	T			SR	SR	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase Penurunan Titik Kemacetan;	30;	Persen;	12.180.394.519																					
		PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERPARKIRAN	Jumlah kegiatan penegakan ketertiban parkir yang terlaksana	6	Kali 2.960.000.000			6	Kali 252.202.000	4	30.523.000	2	23.632.000	4	94.110.000	8	71.111.000	18	219.376.000	300%	87%	18		219.376.000	300%	7%	DISHUB
		PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERPARKIRAN	Jumlah monitoring parkir	12	Kali 2.960.000.000			12	Kali 252.202.000	0	30.523.000	1	23.632.000	3	94.110.000	3	71.111.000	7	219.376.000	58%	87%	7		219.376.000	58%	7%	DISHUB
		PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERPARKIRAN	Jumlah pengadaaan dan pemeliharaan rambu papan tarif dan marka parkir	1	Paket 2.960.000.000			1	Paket 252.202.000	0	30.523.000	0	23.632.000	0	94.110.000	1	71.111.000	1	219.376.000	100%	87%	1		219.376.000	100%	7%	DISHUB
		PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERPARKIRAN	Jumlah pengadaaan dan penataan lahan parkir	1	Paket 2.960.000.000			0	Paket 252.202.000	0	30.523.000	0	23.632.000	0	94.110.000	0	71.111.000	0	219.376.000	100%	87%	0		219.376.000	0%	7%	DISHUB
		PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERPARKIRAN	Jumlah sosialisasi bagi para juru parkir	1	Kali 2.960.000.000			1	Kali 252.202.000	0	30.523.000	0	23.632.000	1	94.110.000	0	71.111.000	1	219.376.000	100%	87%	1		219.376.000	100%	7%	DISHUB
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMANTAU KESELAMATAN	jumlah cctv	1	Paket 1.529.000.000			1	Paket 176.000.000	0	1.000.000	0	145.000	0	69.940.000	1	76.009.833	1	147.094.833	100%	84%	1		147.094.833	100%	10%	DISHUB
		PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DIJALAN RAYA	operasi penegakan hukum di terminal	10	Kali 1.175.000.000			10	Kali 340.551.000	2	101.333.500	0	79.881.000	4	79.587.750	2	52.269.500	8	313.071.750	80%	92%	8		313.071.750	80%	27%	DISHUB
		PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DIJALAN RAYA	Terlaksananya operasi penegakan hukum gabungan	12	Kali 1.175.000.000			12	Kali 340.551.000	3	101.333.500	4	79.881.000	3	79.587.750	2	52.269.500	12	313.071.750	100%	92%	12		313.071.750	100%	27%	DISHUB
		PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG	Jumlah pelaksanaan inspeksi angkutan (rampcheck)	6	Kali 835.000.000			6	Kali 162.390.000	0	53.589.000	1	28.873.500	2	17.723.000	3	52.040.850	6	152.226.350	100%	94%	6		152.226.350	100%	18%	DISHUB
		PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG	jumlah sopir/juru mudl/awak kendaraan angkutan umum yang mengikuti cek kesehatan	300	Orang 835.000.000			300	Orang 162.390.000	0	53.589.000	50	28.873.500	50	17.723.000	50	52.040.850	150	152.226.350	50%	94%	150		152.226.350	50%	18%	DISHUB
		PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG	Jumlah sosialisasi angkutan umum dan barang	3	Kali 835.000.000			3	Kali 162.390.000	1	53.589.000	0	28.873.500	0	17.723.000	0	52.040.850	1	152.226.350	33%	94%	1		152.226.350	33%	18%	DISHUB
		PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN	jumlah dokumen	2	Dokumen 736.394.519			7	Dokumen 57.094.500	0	-	1	-	0	47.514.000	0	2.735.500	1	50.249.500	14%	88%	1		50.249.500	50%	7%	DISHUB
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN PRASARANA BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	jumlah waktu rehabilitasi / pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor	12	Bulan 1.010.000.000			12	Bulan 246.200.000	3	32.048.176	3	82.564.400	3	51.600.000	3	70.125.000	12	236.337.576	100%	96%	12		236.337.576	100%	23%	DISHUB
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	jumlah alat dan pendukung pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara	11	Unit 835.000.000			11	Unit 202.800.000	0	997.500	0	94.699.900	0	11.997.500	10	75.012.000	10	182.706.900	91%	90%	10		182.706.900	91%	22%	DISHUB
		REKAYASA LALU LINTAS	Jumlah kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas	4	Kegiatan 940.000.000			8	Kegiatan 424.998.000	0	35.799.880	2	121.494.000	1	57.894.000	2	84.124.000	5	299.311.880	63%	70%	5		299.311.880.			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				5			6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12			14=(13/5)x100%	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4																						15		
		SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu-lintas	10	Kali	1.125.000.000		10	Kali	398.004.000	0	86.599.000	1	44.682.000	5	91.786.000	4	77.194.000	10	300.261.000	100%	75%	10	300.261.000	100%	27%	DISHUB
		UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG	Jumlah dokumen laporan bulanan pengujian kendaraan bermotor	25	Dokumen	950.000.000		25	Dokumen	275.000.000	6	43.580.176	6	66.050.000	6	58.841.000	7	92.689.500	25	261.160.676	100%	95%	25	261.160.676	100%	27%	DISHUB
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			94%	86%			94%	19%			
PREDIKAT KINERJA																			ST	T			ST	SR			
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA ANGKUTAN	Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum;	75;	Persen;	17.835.160.682																					
		KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Jumlah Forum LLAJ	10	Kali	1.000.000.000		10	Kali	166.857.000	1	12.781.000	2	5.730.000	2	24.800.000	2	11.010.000	7	54.321.000	70%	33%	7	54.321.000	70%	5%	DISHUB
		KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Jumlah lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)	1	Kali	1.000.000.000		1	Kali	166.857.000	0	12.781.000	0	5.730.000	0	24.800.000	0	11.010.000	0	54.321.000	0%	33%	0	54.321.000	0%	5%	DISHUB
		KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Jumlah pekan keselamatan berlalu lintas	1	Kali	1.000.000.000		1	Kali	166.857.000	0	12.781.000	0	5.730.000	1	24.800.000	0	11.010.000	1	54.321.000	100%	33%	1	54.321.000	100%	5%	DISHUB
		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN HALTE/SHELTER	Jumlah halte/shelter yang terpelihara	22	Unit	1.375.160.682		13	Unit	156.360.682	0	11.426.500	0	106.862.250	2	18.331.000	2	16.075.000	4	152.694.750	31%	98%	4	152.694.750	18%	11%	DISHUB
		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN HALTE/SHELTER	jumlah pembangunan halte/shelter	2	Unit	1.375.160.682		2	Unit	156.360.682	0	11.426.500	2	106.862.250	0	18.331.000	0	16.075.000	2	152.694.750	100%	98%	2	152.694.750	100%	11%	DISHUB
		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN HALTE/SHELTER	Jumlah pembangunan halte/shelter stik antar-jemput angkutan pelajar gratis	5	Unit	1.375.160.682			Unit	156.360.682	0	11.426.500	0	106.862.250	0	18.331.000	0	16.075.000	0	152.694.750	100%	98%	0	152.694.750	0%	11%	DISHUB
		PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DI JALAN RAYA	Jumlah waktu sewa Terminal Pasar Antri, dan pengelolaan Terminal Pasar Antri, Terminal Cimindi, Terminal Pasar Atas	12	Bulan	3.524.000.000		12	Bulan	947.100.000	3	148.635.960	3	224.821.500	3	220.342.614	3	288.880.500	12	882.680.574	100%	93%	12	882.680.574	100%	25%	DISHUB
		PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN	Jumlah peserta mudik gratis	750	Orang	1.977.000.000		750	Orang	425.260.000	0	15.715.632	750	263.008.000	0	69.926.000	0	27.308.500	750	375.958.132	100%	88%	750	375.958.132	100%	19%	DISHUB
		PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN	Penyediaan bus untuk antisipasi mogok angkutan umum	4	Unit	1.977.000.000		4	Unit	425.260.000	0	15.715.632	0	263.008.000	0	69.926.000	0	27.308.500	0	375.958.132	0%	88%	0	375.958.132	0%	19%	DISHUB
		PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN	Terlaksananya sosialisasi regulasi pelayanan angkutan dan pengembangan Trayek Perkotaan	12	Bulan	1.977.000.000		12	Bulan	425.260.000	3	15.715.632	3	263.008.000	3	69.926.000	3	27.308.500	12	375.958.132	100%	88%	12	375.958.132	100%	19%	DISHUB
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN	Terpeliharanya terminal angkutan darat tipe C	3	Unit	650.000.000		2	Unit	100.000.000	0	-	0	2.998.650	0	5.600.000	1	85.486.965	1	94.085.615	50%	94%	1	94.085.615	33%	14%	DISHUB
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			68%	77%			57%	13%			
PREDIKAT KINERJA																			S	T			R	SR			
		PERPUSTAKAAN																									
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif;(2).Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota;	75;(2). 78,9;	Persen;(2) .Angka;	3.590.000.000																					
		MONITORING DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	6	Unit	108.482.428		4	Unit	56.661.000	1	861.000	0	4.800.000	2	12.000.000		9.600.000	3	27.261.000	75%	48%	3	27.261.000	50%	25%	Diskominfo
		OPERASIONAL PERPUSTAKAAN UMUM KOTA CIMAHI	Jumlah pengunjung perpustakaan umum kota	#####	Orang	717.792.064		23.800	Orang	218.250.000	7101	33.631.000	5305	69.432.000	5806	37.333.500		73.748.750	18212	214.145.250	77%	98%	18212	214.145.250	76%	30%	Diskominfo
		PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koordinasi pengembangan perpustakaan	5	Kali	144.643.237		5	Kali	26.965.600	0	-	0	-	4	-		20.390.000	4	20.390.000	80%	76%	4	20.390.000	80%	14%	Diskominfo
		PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA	Jumlah aktivitas berbasis pustaka	3	Aktivitas	271.206.069		3	Aktivitas	55.152.500	0	6.500.000	2	27.780.000	1	-		20.652.500	3	54.932.500	100%	100%	3	54.932.500	100%	20%	Diskominfo
		PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLA PERPUSTAKAAN	Jumlah pengelola perpustakaan daerah terlatih	400	Orang	361.608.093		50	Orang	17.000.000	0	-	0	-	0	-		17.000.000	0	17.000.000	0%	100%	0	17.000.000	0%	5%	Diskominfo
		PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	Jumlah koleksi bahan bacaan perpustakaan kota	26958	Buah	911.252.393		23958	Buah	163.702.400	23291	3.000.000	0	3.000.000	846	63.050.000		93.642.850	24137	162.692.850	101%	99%	24137	162.692.850	90%	18%	Diskominfo
		PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	Jumlah penerima bantuan perpustakaan	30	Paket	271.206.069		5	Paket	108.452.600	0	-	5	59.924.150	0	47.813.700		-	5	107.737.850	100%	99%	5	107.737.850	17%	40%	Diskominfo
		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	Jumlah penambahan sarana dan prasarana perpustakaan umum kota	30	Unit	261.251.138		2	Unit	13.220.000	0	750.000	1	10.970.000	0	500.000		1.000.000	1	13.220.000	50%	100%	1	13.220.000	3%	5%	Diskominfo
		SOSIALISASI/PENYULUHAN TENTANG PENGEMBANGAN MINAT BACA	Jumlah aktivitas penyuluhan ttg minat baca yang efektif	1	Kali	361.608.093		1	Kali	23.000.000	0	-	0	-	-	-		23.000.000	0	23.000.000	0%	100%	0	23.000.000	0%	6%	Diskominfo
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			65%	91%			46%	18%			
PREDIKAT KINERJA																			R	ST			SR	SR			
		PERSANDIAN																									
		PROGRAM PEYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Yang Aman;	5;	Persen;	2.674.279.847																					
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Prosentase Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi yang telah tertangani	100	Persen	1.645.142.000		100	Persen	109.756.000	100	2.533.000	100	44.960.997	100	20.350.000		14.192.000	300	82.035.997	300%	75%	300	82.035.997	300%	5%	Diskominfo
		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KOTA	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	100	Persen	473.749.848		40	Persen	27.113.000	0	4.529.000	0	8.800.000		-		10.495.000	0	23.824.000	0%	88%	0	23.824.000	0%	5%	Diskominfo
		PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah daerah	100	Persen	555.388.000		40	Persen	41.260.000	8	4.180.000	10	18.499.500		1.900.000		13.041.000	18	37.620.500	45%	91%	18	37.620.500	18%	7%	Diskominfo
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			115%	85%			106%	6%			
PREDIKAT KINERJA																			ST	T			ST	SR			
		PERTANAHAN																									
		PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	Persentase Penegasan Batas Daerah Yang Telah Diidentifikasi;	100;	Persen;	99.139.509.615																					
		FASILITASI KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi	4	Kali	1.899.213.065		4	Kali	130.000.000	2	5.001.000	0	3.378.000	2	78.193.934	0	13.282.000	4	99.854.934	100%	77%	4	99.854.934	100%	5%	BAG. PEMERINTAHAN
		PENATAAN BATAS WILAYAH	Persentase penegasan batas daerah yang telah diidentifikasi	3	Kegiatan	382.522.000		3	Kegiatan	264.840.000	0	6.960.000	1	175.050.000	1	14.179.500	1	64.606.200	3	260.795.700	100%	98%	3	260.795.700	100%	68%	BAG. PEMERINTAHAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			100%	88%			100%	37%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 %		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Thn Pelaks RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		13=6+12		14=(13/5)x100%												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4															PREDIKAT KINERJA		K	Rp	K	Rp	ST	T			K	Rp	ST		SR				
		STATISTIK	Persentase Ketersediaan Data Statistik Daerah;	80;	Persen;	4.004.717.566																														
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	80	Kali	492.619.966	20	Kali	29.359.400	3	1.052.900	4	11.740.000		750.000		494.200	7	14.037.100	35%	48%	7				14.037.100	9%	3%				Diskominfo				
		KOORDINASI PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Jumlah SDM pengelola data/informasi/statistik terbita	575	Orang	492.655.000	100	Orang	23.670.230	0	- 0	- 0	-				10.630.600	0	10.630.600	0%	45%	0				10.630.600	0%	2%				Diskominfo				
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PENGELOLA DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Jumlah publikasi data statistik daerah	20	Kali	3.019.442.600	3	Kali	365.049.735	0	11.221.292	0	34.135.396	0	63.971.863		186.186.711	0	295.515.262	0%	81%	0				295.515.262	0%	10%				Diskominfo				
		PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK KOTA CIMAHI																																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																												12%	58%					3%	5%	
PREDIKAT KINERJA																												SR	R					SR	SR	
		TENAGA KERJA	Persentase Kenaikan UMK;	9,89;	Persen;	4.228.312.539																														
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH	Persentase penyelesaian kasus pada tingkat Perjanjian Bersama	85	Persen	1.070.312.539	70	Persen	165.953.500	0	15.574.000	50	65.020.000	40,91	17.660.000	73,91	36.155.600	164,82	134.409.600	235%	81%	164,8				134.409.600	194%	13%				Disnaker				
		FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA	Persentase Kelikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perusahaan	60	Persen	187.000.000	46	Persen	65.990.000	0	5.400.000	0	11.340.000	50,37	9.045.000	39	31.897.200	89,37	57.682.200	194%	87%	89,37				57.682.200	149%	31%				Disnaker				
		FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	Persentase Kelikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja	86	Persen	187.000.000	80	Persen	65.990.000	0	5.400.000	0	11.340.000	89,67	9.045.000	86	31.897.200	175,67	57.682.200	220%	87%	175,7				57.682.200	204%	31%				Disnaker				
		OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan	144	kesepakata n	1.991.000.000	36	kesepakata n	400.741.000	2	30.325.000	4	61.295.000	1	23.387.500	10	229.780.000	17	344.787.500	47%	86%	17				344.787.500	12%	17%				Disnaker				
		PENYUSUNAN KAJIAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK KOTA CIMAHI	Dokumen Kajian KHL	5	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	50.000.000	1	49.500.000	0	- 0	- 1	-	- 2	49.500.000	200%	99%	2					49.500.000	40%	25%				Disnaker					
		SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi	730	perusahaa n	780.000.000	250	perusahaa n	200.000.000	65	77.040.000	95	31.978.000	0	39.060.000	260	27.990.600	420	176.068.600	168%	88%	420				176.068.600	58%	23%				Disnaker				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																												138%	91%					36%	22%	
PREDIKAT KINERJA																												ST	ST					SR	SR	
		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Angka Kesempatan Kerja (Orang);	319.159;	Jiwa;	10.779.551.189																														
		BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI KEMANDIRIAN DAN KREATIFITAS PENCARI KERJA	Jumlah pencari kerja terdaftar yang mengikuti Bimtek	850	Orang	1.770.000.000	150	Orang	168.435.675	120	165.933.175	0	- 0	-	- 120	- 240	165.933.175	160%	99%	240					165.933.175	28%	9%				Disnaker					
		FASILITASI PENYALURAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI	Jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	8480	Orang	1.221.200.000	2030	Orang	97.635.000	266	- 1111	52.250.000	280	41.400.000	2898	- 4555	93.650.000	224%	96%	4555					93.650.000	54%	8%				Disnaker					
		KERJA SAMA PENEMPATAN TENAGA KERJA DENGAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang mengadakan kerja sama	70	Perusahaa n	210.000.000	10	Perusahaa n	19.692.000	4	15.492.000	0	4.000.000	0	- 10	- 14	19.492.000	140%	99%	14					19.492.000	20%	9%				Disnaker					
		MONITORING DAN EVALUASI KETENAGAKERJAAN	Terlaksananya Movev ketenagakerjaan	4	Kali	100.000.000	1	Kali	18.500.000	0	6.925.000	1	5.702.400	0	2.972.800	1	- 2	15.600.200	200%	84%	2					15.600.200	50%	16%				Disnaker				
		PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	Jumlah media penyebarluasan informasi tenaga kerja	1020	Orang	4.590.000.000	240	Orang	796.137.000	0	11.070.000	80	371.188.500	145	374.599.400	225	18.090.000	450	774.947.900	188%	97%	450				774.947.900	44%	17%				Disnaker				
		PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	Jumlah media penyebarluasan informasi tenaga kerja	6	Media	724.839.000	5	Media	178.287.200	5	30.715.000	5	34.220.000	5	27.135.000	5	79.119.200	20	171.189.200	400%	96%	20				171.189.200	333%	24%				Disnaker				
		PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	Terfasilitasinya sebagian pencari kerja di Kota Cimahi	1000	Orang	724.839.000	0	Orang	178.287.200	537	30.715.000	702	34.220.000	1220	27.135.000	0	79.119.200	2459	171.189.200	100%	96%	2459				171.189.200	246%	24%				Disnaker				
		SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja terdaftar yang disertifikasi	145	Orang	725.000.000	25	Orang	56.200.000	0	- 10	6.200.000	0	49.640.000	10	- 20	55.840.000	80%	99%	20					55.840.000	14%	8%				Disnaker					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																												186%	96%					99%	14%	
PREDIKAT KINERJA																												ST	ST					SR	SR	
Ra									100%	991.045.469.007		125.290.200.103		171.580.151.910		145.919.849.571		288.624.275.364		731.414.476.948																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																												96%	74%							
PREDIKAT KINERJA																												S	S							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya):																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya):																																				

CIMAHI, 7 FEBRUARI 2020
KEPALA BAPPEDA
KOTA CIMAHI

Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md St, SE, M.Kes.
NIP. 19630416 198603 1 009

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Penyusunan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Kota Cimahi merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi tidak terlepas dari arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari dampak Covid-19. Pariwisata dan perdagangan merupakan sektor yang mengalami penurunan kinerja. Total wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 16,1 juta pengunjung pada 2019 (naik 1,88% yoy dari 15,8 juta pada 2018). Share wisman asal Tiongkok pada 2019 sebesar 12,9% (2,07 juta), terbanyak kedua setelah Malaysia (18,5% atau 3 juta). Setelah Covid-19 merebak, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia turun 7,62% mtm pada Januari 2020. Covid-19 juga berdampak terhadap sektor perdagangan Indonesia. Ekspor Indonesia ke Tiongkok turun -12,07% mtm menjadi USD2,24 miliar pada Januari 2020, terutama ekspor migas yang kontraksi 41% mtm dan nonmigas yang turun 9,15% mtm (Sumber: BPS).

Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan guna mengatasi dampak Covid-19. Pemerintah Indonesia telah menempuh sejumlah langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan memberikan stimulus fiskal untuk memitigasi dampak Covid-19. Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,50% pada Maret 2020. Bank

Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan antara lain dengan memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan Covid-19 dan potensi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, OJK, maupun otoritas terkait lainnya guna menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Berbagai dampak negatif yang dipicu oleh Covid-19 akan menurunkan kinerja ekonomi dunia pada 2020. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 sebesar 2,5% yoy, turun dibandingkan pertumbuhan 2019 sebesar 2,9% yoy. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh membaik pada 2021 menjadi 3,7%, seiring prakiraan teratasnya penyebaran Covid-19. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia merevisi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 dan 2021 masingmasing menjadi 4,2% - 4,6% yoy dan 5,2- 5,6%.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia 2020 tersebut berpotensi lebih rendah apabila wabah Covid-19 makin menyebar sehingga memicu penerapan kebijakan restriksi atau social distancing yang lebih ketat oleh berbagai negara, dan tekanan pasar keuangan global berlanjut akibat ketidakpastian yang tinggi. Prospek ekonomi ke depan akan dipengaruhi oleh upaya berbagai negara dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Respons kebijakan setidaknya dapat diarahkan untuk memitigasi risiko pada empat aspek, yaitu manusia, perusahaan, dan ekonomi serta sistem keuangan. Terkait aspek manusia, kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat sumber daya di sektor kesehatan, dan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak. Pada aspek perusahaan, kebijakan perlu diarahkan untuk mengurangi tekanan keuangan yang dialami oleh perusahaan, yaitu dengan mengurangi atau menunda pembayaran pajak dari sektor ekonomi yang terdampak, dan meningkatkan ketersediaan likuiditas

serta kredit kepada perusahaan yang terdampak. Terkait ekonomi dan sistem keuangan, kebijakan perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas melalui penyediaan likuiditas kepada perbankan, menempuh kebijakan moneter yang optimal guna merespons tekanan pasar keuangan, dan menerapkan kebijakan untuk mendorong investasi publik.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar 2,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2019 yang mencapai 4,11% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2020 tersebut juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 2,97% (yoy). Tertahannya laju pertumbuhan, terjadi pada seluruh komponen pengeluaran dan sebagian besar komponen lapangan usaha utama, kecuali sektor konstruksi yang terpantau stabil.

Perlambatan konsumsi RT terjadi seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak COVID-19 dengan tingginya kasus PHK dan dirumahkannya tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi terdampak sejak triwulan I 2020. Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh di bawah kemampuan normalnya, seiring dengan menurunnya investasi fisik, terutama bangunan dan barang. Ekspor berkontraksi karena menurunnya volume perdagangan dunia akibat pelemahan permintaan global menyusul kebijakan social distancing dan travel warning untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara impor mengalami kontraksi lebih dalam seiring dengan perlambatan kinerja ekonomi Tiongkok sebagai negara pemasok utama bahan baku industri di Jawa Barat.

Perlambatan kinerja industri pengolahan dipengaruhi oleh penurunan permintaan ekspor oleh negara mitra dagang searah dengan kondisi perekonomian global yang terkoreksi ke bawah pada triwulan I 2020. Hal ini telah berdampak pada menurunnya kinerja rantai pasok global akibat COVID-19. Tekanan terhadap kinerja perdagangan diperparah dengan terjadinya penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan, di samping keterbatasan mobilitas masyarakat

sebagai konsekuensi kebijakan penanganan penyebaran COVID-19. Sementara itu, kinerja konstruksi yang masih stabil seiring dengan masih berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur di Jawa Barat pada awal tahun 2020, seperti Tol Cisumdawu dan Pelabuhan Patimban.

Realisasi belanja fiskal di Jawa Barat pada triwulan I 2020 adalah Rp19,03 triliun atau 10,5% terhadap total anggaran belanja tahun 2020. Jika dibandingkan dengan triwulan I 2019, terdapat kenaikan kinerja serapan anggaran untuk gabungan belanja fiskal di Jawa Barat. Persentase realisasi belanja terhadap pagu anggaran tertinggi adalah belanja APBN di Jawa Barat, yakni sebesar Rp6,95 triliun atau 14,76%. Kemudian disusul oleh realisasi belanja APBD 27 kabupaten/kota sebesar Rp9,94 triliun atau 10,39%, meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Sementara realisasi belanja terendah merupakan APBD Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebesar Rp2,14 triliun atau 4,65% dari total anggaran, dan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019. Respon kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dalam bentuk ekspansi fiskal diperkirakan terlihat pada triwulan II 2020, terutama terkait dengan realisasi anggaran untuk jaring pengaman sosial (bansos) dan pengadaan alat kesehatan.

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2020 sebesar 3,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,21% (yoy), meskipun masih dalam rentang sasaran inflasi 2020. Berdasarkan data historis, inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2020 merupakan yang terendah kedua selama 3 (tiga) tahun terakhir. Faktor pendorong inflasi pada triwulan ini antara lain berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama subkelompok Makanan dan subkelompok Rokok dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Sumbangan inflasi dari kelompok ini disebabkan oleh faktor pergeseran periode tanam, faktor cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan hasil panen kurang optimal, serta kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok.

Stabilitas keuangan Jawa Barat triwulan I 2020 masih dalam kondisi yang baik. Intermediasi perbankan terpantau relatif terjaga yang tercermin, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan kredit dan peningkatan dana

pihak ketiga (DPK). Loan to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan I 2020 mencapai 89,09% lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 91,50%. Penurunan rasio LDR disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang meningkat lebih tinggi ditengah perlambatan penyaluran kredit bank yang berlokasi di Jawa Barat. Disisi lain, risiko kredit yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) menunjukkan sedikit peningkatan, namun masih dalam level yang aman dan terjaga.

Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)[1] di Jawa Barat pada triwulan I 2020 tercatat sebesar Rp60,24 triliun atau meningkat 9,43% (yoy). Peningkatan nilai nominal transaksi retail melalui kliring di Jawa Barat didorong oleh perbaikan pelayanan sesuai dengan ketentuan terbaru terkait SKNBI yang mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan batas maksimum transaksi menjadi Rp1 miliar. Berbanding terbalik dengan perkembangan transaksi kliring, nominal transaksi menggunakan RTGS tercatat mengalami perlambatan pada triwulan I 2020. Pertumbuhan transaksi menggunakan RTGS pada triwulan I 2020 terkontraksi sebesar -0,41% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2019 yang tumbuh 4,97% (yoy) searah dengan perlambatan ekonomi yang terjadi.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat berdasarkan data BPS per Februari 2020 tercatat mengalami perbaikan. Namun demikian, hal ini belum memotret dampak pandemi COVID-19 pada Maret 2020 yang mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat triwulan I 2020. Perbaikan kesejahteraan tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat yang menurun dari 7,73% pada Februari 2019 menjadi 7,69% pada Februari 2020. Perbaikan ini dipengaruhi oleh naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 65,70% pada Februari 2019 menjadi 65,97% pada Februari 2020, di mana peningkatan terjadi pada TPAK laki-laki sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan. Sementara itu, kualitas ketenagakerjaan di Jawa Barat mengalami perbaikan ditandai dengan peningkatan persentase tenaga kerja khususnya tenaga kerja berpendidikan menengah. Di sisi lain pangsa tenaga kerja formal meningkat sedangkan pangsa tenaga kerja informal menurun.

Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada kisaran 1,2%-1,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2019, dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan domestik. Perlambatan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh perlambatan pada seluruh komponen pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor utama melambat sejalan dengan menurunnya kondisi perekonomian global sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kinerja sektor informasi dan komunikasi diperkirakan meningkat signifikan seiring dengan tingginya permintaan untuk mengakomodasi new life style yang lebih digital seiring adanya kebijakan work from home dan learn from home selama periode pandemi COVID-19.

Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2020 diperkirakan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$ (yoy) bahkan berpotensi berada pada rentang bawah target. Inflasi cenderung mendekati rentang bawah target sehubungan dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dan penurunan permintaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Beberapa faktor pendorong inflasi antara lain administered price, seperti kenaikan cukai hasil tembakau, kenaikan harga komoditas pangan tertentu akibat kendala pasokan, kenaikan permintaan pada komoditas kelompok kesehatan serta kenaikan komoditas pendidikan yang tetap menjadi prioritas masyarakat di tengah pandemi. Sedangkan faktor penahan inflasi lebih disebabkan oleh turunnya harga komoditas dunia, khususnya minyak bumi, dan pembatasan aktivitas yang berdampak pada penurunan permintaan komoditas angkutan.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Cimahi

3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2019

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya

keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi tidak terlepas dari arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan Analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelerasan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Konstelasi arah pembangunan nasional, menuntut Kota Cimahi untuk bisa terlibat aktif dalam menyelaraskan prospek pembangunan yang senada dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Dilihat dari akses potensi dan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi, ada beberapa tantangan dan prospek bagi perekonomian Kota Cimahi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Cimahi. Adapun tantangan dan prospek tersebut diantaranya adalah :

- a) Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Cimahi sehingga sektor ini tetap harus dikembangkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi tetap meningkat;
- b) Ada sektor potensial lain dalam perekonomian Kota Cimahi selain sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Pendidikan. Ketiga sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang sudah jauh di atas pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- c) Aktivitas penanaman modal atau investasi di Kota Cimahi berjalan dengan cukup baik terlihat dari banyaknya potensi investasi yang ada di Kota Cimahi. Potensi-potensi tersebut antara lain ada di Bidang Infrastruktur Publik dan Infrastruktur Pendukung. Pengembangan sektor pertanian dan kawasan wisata juga menjadi peluang dalam pengembangan investasi di Kota Cimahi.

Berdasarkan kondisi dan tantangan perekonomian Kota Cimahi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi saat ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Sektor Industri Pengolahan yang masih memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Cimahi tetap dikembangkan. Adapun Industri yang dikembangkan di Kota Cimahi adalah Industri Pengolahan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Kewirausahaan yang berdasarkan potensi lokal melalui pembentukan Sentra Industri Pengolahan. Pengembangan IKM dan Kewirausahaan tersebut selanjutnya akan menjadi fokus arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi ke depan terutama dalam penciptaan kegiatan ekonomi yang kreatif dan memberikan nilai tambah;

Kedua, Sektor Perdagangan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua bagi perekonomian Kota Cimahi akan dikembangkan melalui pembentukan Sentra Perdagangan;

Ketiga, Beberapa sektor yang memiliki laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan ekonomi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Pendidikan akan menjadi perhatian untuk terus dikembangkan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi;

Keempat, peningkatan daya saing angkatan kerja dan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi menjadi arah kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Keempat, arah kebijakan tersebut di atas adalah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Adapun perkiraan untuk target dari Indikator Makro Ekonomi untuk

Tahun 2019-2020 berdasarkan hasil proyeksi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Melihat konstelasi arah kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh Kota Cimahi maka diperlukan target indikator makro ekonomi Kota Cimahi yang menjadi sasaran pencapaian arah pembangunan Kota Cimahi.

Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2018 – 2020

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%)	5,64	5,66	5,69
Laju Inflasi (%)	3,18	3,10	3,00
Indeks Gini	0,40	0,40	0,39
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	8,26	7,52	6,78
Angka Kemiskinan (%)	5,80	5,60	5,50

Sumber : **RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022**

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2014 - 2018 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi maupun sisi permintaan akhir.

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Kota Cimahi
Tahun 2014 – 2018

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,97	(4,70)	(2,23)	0,82	1,86
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,92	4,00	4,31	4,13	5,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,70	2,64	6,91	2,82	5,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	0,94	5,78	6,52	5,16
F	Konstruksi	4,19	4,42	4,87	7,02	7,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,66	5,28	5,67	4,32	3,95

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*	2018**
H	Transportasi dan Pergudangan	5,56	5,46	8,50	5,20	5,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	5,88	4,68	6,42	6,57
J	Informasi dan Komunikasi	18,49	17,59	14,21	11,80	9,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	10,05	8,12	6,81	7,13
L	Real Estate	4,70	4,68	5,78	7,28	8,44
M,N	Jasa Perusahaan	6,51	7,59	7,72	8,13	8,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,44)	3,06	2,84	4,01	1,35
P	Jasa Pendidikan	20,53	8,44	8,23	8,37	5,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,40	11,52	8,57	7,57	7,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,85	4,45	4,34	7,46	5,68
Produk Domestik Regional Bruto		5,49	5,43	5,63	5,43	5,68

Sumber: BPS Kota Cimahi 2019

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Tabel 2.2.
PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018
Kota Cimahi

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	2014	2015	2016	2017	2018
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	12.958.838.2	13.459.896.5	14.150.217.4	14.815.382.4	15.490.704.5
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	43.890.16	40.355.97	43.067.89	45.587.08	47.776.9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	958.065.13	980.935	983.750.26	1.189.704.15	1.312.668.53
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.908.664.93	6.190.589.3	6.469.495.13	6.804.491.05	7.323.966.78
Perubahan Inventori	723.158.62	609.773.11	629.654.63	632.509.55	654.253.66
Net Ekspor Barang dan Jasa	3.637.376.87	3405.108.84	3.394.030.11	3.580.543.92	3.790.919.39
Jumlah	16.955.240.1	17.876.441.1	18.882.155.2	19.907.130.3	21.038.451

Sumber: BPS Kota Cimahi, 2019

Tabel 2.3.
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Kota Cimahi

	2014	2015	2016	2017	2018
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Kota Cimahi	10.681	11.012	11.141	11.353	11.921
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Jawa Barat	9.447	9.778	10.035	10.285	10.790

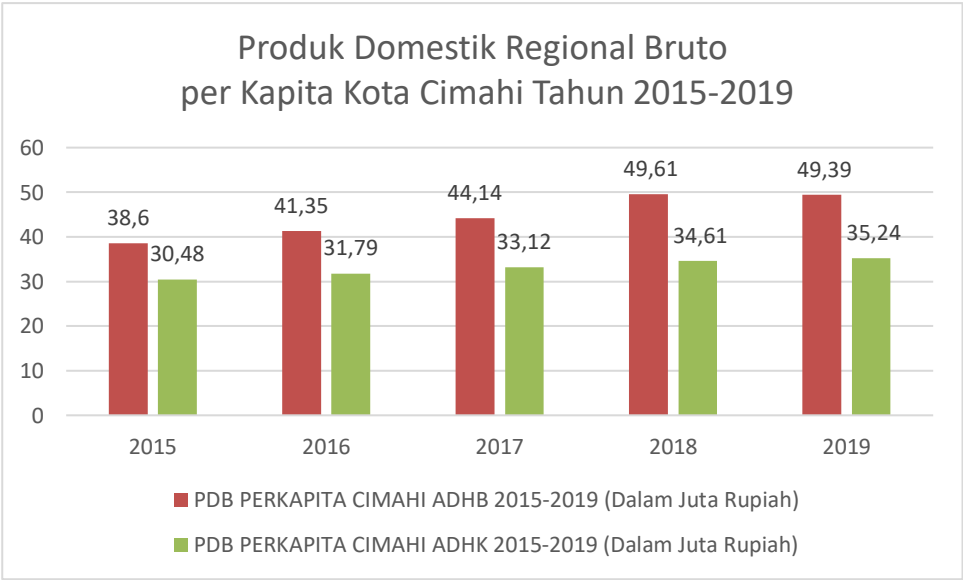
Sumber: BPS Tahun 2019, diolah

2.2.1. PDRB Perkapita

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya memperoleh data pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar wilayah kota. Angka pendapatan per kapita dengan asumsi tersebut di atas diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Secara umum perkembangan PDRB perkapita Kota Cimahi memiliki trend yang selalu meningkat yang berarti adanya perbaikan dari tahun sebelumnya. Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Cimahi Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Gambar 2.1
PDRB Perkapita Kota Cimahi Tahun 2015-2019



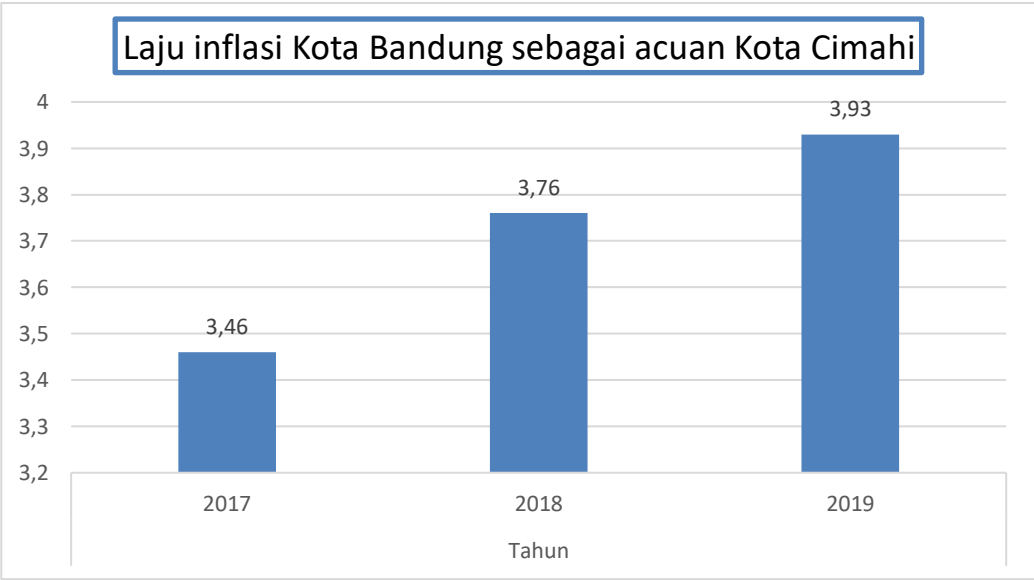
Sumber : Bappeda dalam olahan

1. Inflasi

Nilai inflasi di Kota Cimahi mengacu kepada kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Adapun inflasi

di Kota Bandung pada Triwulan III 2019 berdasarkan data Bank Indonesia (2019) adalah sebesar 3,93 persen (yoy), sedangkan tekanan inflasi pada tahun 2020 diperkirakan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$ (yoy) bahkan berpotensi berada pada rentang bawah target. Inflasi cenderung mendekati rentang bawah target sehubungan dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dan penurunan permintaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Beberapa faktor pendorong inflasi antara lain administered price, seperti kenaikan cukai hasil tembakau, kenaikan harga komoditas pangan tertentu akibat kendala pasokan, kenaikan permintaan pada komoditas kelompok kesehatan serta kenaikan komoditas pendidikan yang tetap menjadi prioritas masyarakat di tengah pandemi. Sedangkan faktor penahan inflasi lebih disebabkan oleh turunnya harga komoditas dunia, khususnya minyak bumi, dan pembatasan aktivitas yang berdampak pada penurunan permintaan komoditas angkutan.

Gambar 2.2



2. Investasi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya ditentukan oleh nilai investasi. *Trend* pertumbuhan realisasi investasi di Kota Cimahi fluktuatif pada tahun 2013 hingga 2017. Potensi yang dimiliki baik sektor unggulan maupun fondasi iklim investasi seperti mekanisme investasi perlu dikembangkan. Belum optimalnya investasi disebabkan kurang kondusifitas iklim investasinya. Terdapat 14 peraturan daerah yang mendukung iklim usaha tetapi

belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang investasi.

Tabel 3.3.

Realisasi Investasi berdasarkan LKPM Kota Cimahi Tahun 2015-2017

URAIAN	2015	2016	2017
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	36	38	125
Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rp3.910.652.102.380,00	Rp7.213.669.420.186,55	Rp8.953.319.609.542,00

Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2018

3. Tenaga Kerja

Besarnya jumlah penduduk Kota Cimahi menyumbang jumlah angkatan kerja yang cukup besar. Kota Cimahi telah mencapai Bonus Demografi dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai prosentase lebih dari 70% dari jumlah penduduk keseluruhan. Selama periode 3 (tiga) tahun terakhir jumlah angkatan kerja mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,65 persen, jumlah penduduk bekerja meningkat rata-rata sebesar 8,46 persen dan jumlah pengangguran menurun secara rata-rata sebesar 8,19 persen. Sedangkan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat berdasarkan data BPS per Februari 2020 tercatat mengalami perbaikan. Namun demikian, hal ini belum memotret dampak pandemi COVID-19 pada Maret 2020 yang mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat triwulan I 2020. Perbaikan kesejahteraan tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat yang menurun dari 7,73% pada Februari 2019 menjadi 7,69% pada Februari 2020. Perbaikan ini dipengaruhi oleh naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 65,70% pada Februari 2019 menjadi 65,97% pada Februari 2020, di mana peningkatan terjadi pada TPAK laki-laki sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan. Sementara itu, kualitas ketenagakerjaan di Jawa Barat mengalami perbaikan ditandai dengan peningkatan persentase tenaga kerja khususnya tenaga kerja berpendidikan menengah. Di sisi lain pangsa tenaga kerja formal meningkat sedangkan pangsa tenaga kerja informal menurun.

Tabel 3.4.
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan
	2013	2015	2017	
Jumlah Angkatan Kerja	261.235	282.539	297.050	6,65
Jumlah Penduduk Bekerja	231.379	257.105	272.017	8,46
Jumlah Pengangguran Terbuka	29.856	25.434	25.033	(8,19)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	61,32	64,09	65,33	2,01
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	11,43	9,00	8,43	(1,50)

Sumber : BPS Kota Cimahi 2018 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi selama periode Tahun 2013 -2017 secara rata-rata mengalami perlambatan. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang juga mengalami pengurangan sehingga penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum terlalu signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 sebesar 8,43% hanya mengalami penurunan kurang dari 1% dari tahun sebelumnya sehingga jumlah pengangguran di Kota Cimahi yang sampai tahun 2017 berjumlah 25.033 orang masih masuk dalam kategori cukup tinggi karena masih berada di atas rata-rata tingkat pengangguran provinsi Jawa Barat. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi ditandai juga oleh besarnya nilai TPAK, yaitu sebesar 65,33% pada tahun 2017. Hal ini artinya ada sebanyak 65,33 persen dari penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja.

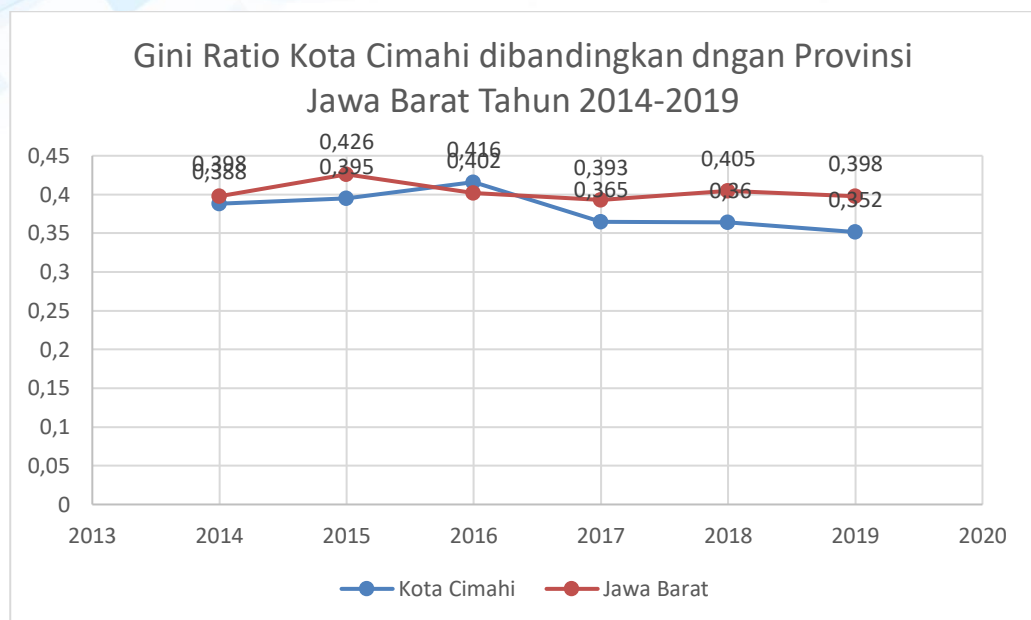
Rendahnya etos kerja dan ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja menjadi alasan lain tidak terserapnya tenaga kerja oleh perusahaan. Selain itu, banyak tenaga kerja yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai sertifikat keahlian sehingga kalah dengan tenaga kerja dari daerah lain yang bersertifikat. Rendahnya angka serapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh rendahnya daya saing tenaga kerja Kota Cimahi sehingga banyak tenaga kerja berasal dari daerah lain. Regulasi yang ada tidak bisa mengatur prosentasi minimal penyerapan tenaga kerja penduduk Kota Cimahi.

4. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dalam bagian ini dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data pada grafik di bawah terlihat bahwa Indeks Gini yang merepresentasikan ketimpangan dalam pendapatan antar golongan pendapatan di Kota Cimahi awalnya memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2017 Indeks Gini Kota Cimahi mulai menurun di angka 0,37, dan diproyeksikan angka gini ratio pada tahun 2019 adalah 0,35 angka ini lebih rendah dari Jawa Barat dimana berdasarkan data BPS (2019) ketimpangan Jawa Barat di daerah Perkotaan dan Pedesaan pada bulan September 2019 adalah sebesar 0,398. yang menunjukkan adanya perbaikan dalam hal pemerataan pendapatan di Kota Cimahi. Penurunan ini terutama didorong oleh aliran dana bantuan social dari Pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan untuk program dan kegiatan yang ditujukan untuk subsidi kepada masyarakat berpendapatan rendah. Dengan melihat angka ini, pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Cimahi berada pada tingkat ketimpangan sedang.

Tahun	Indeks Gini	
	Kota Cimahi	Jawa Barat
2014	0.388	0.398
2015	0.395	0.426
2016	0.416	0.402
2017	0.365	0.393
2018	0.36	0.405
2019	0.352	0.398

Gambar 2.3
Indeks Gini Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi (BPS, 2019), dan Bappeda dalam Olahan (2019)

Gini ratio Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan relevan dengan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pada tiga tahun terakhir terjadi penurunan ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi, dan secara posisi sudah berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat.

Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan pendapatan menengah. Data Tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,363 di Tahun 2019. Dengan kecenderungan penurunan indeks gini ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Meskipun demikian, pemerintah daerah harus tetap mewaspadai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, antara lain pengangguran yang ditandai dengan TPT di Cimahi yang meningkat pada Tahun 2019 dan adanya pandemi virus corona yang tidak hanya menyangkut masalah kesehatan namun telah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Pandemi virus corona yang menyebar ke hampir seluruh negara telah menyebabkan kematian, pembatasan aktivitas masyarakat, masalah pengangguran dan masalah perekonomian lainnya, sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada awal Maret 2019.

3.1.3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2021

Dari kondisi-kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa tantangan dan prospek bagi perekonomian

Kota Cimahi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Cimahi. Adapun tantangan dan prospek tersebut diantaranya adalah :

1. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Cimahi sehingga sektor ini tetap harus dikembangkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi tetap meningkat;
2. Ada sektor potensial lain dalam perekonomian Kota Cimahi selain sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Pendidikan. Ketiga sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang sudah jauh di atas pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Aktivitas penanaman modal atau investasi di Kota Cimahi berjalan dengan cukup baik terlihat dari banyaknya potensi investasi yang ada di Kota Cimahi. Potensi-potensi tersebut antara lain ada di Bidang Infrastruktur Publik dan Infrastruktur Pendukung. Pengembangan sektor pertanian dan kawasan wisata juga menjadi peluang dalam pengembangan investasi di Kota Cimahi.
4. Pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi corona, Fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Pandemi COVID-19 mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan refocusing dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tahun 2020.

Peningkatan daya saing angkatan dan tenaga kerja lokal berkaitan dengan peningkatan kompetensi baik dari segi pendidikan maupun keahlian. Peningkatan kompetensi angkatan kerja dan tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi.

3.1.3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2021

Berdasarkan kondisi dan tantangan perekonomian Kota Cimahi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi saat ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Sektor Industri Pengolahan yang masih memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Cimahi tetap dikembangkan. Adapun Industri yang dikembangkan di Kota Cimahi adalah Industri Pengolahan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Kewirausahaan yang berdasarkan potensi lokal melalui pembentukan Sentra Industri Pengolahan. Pengembangan IKM dan Kewirausahaan tersebut selanjutnya akan menjadi fokus arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi ke depan terutama dalam penciptaan kegiatan ekonomi yang kreatif dan memberikan nilai tambah;

Kedua, Sektor Perdagangan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua bagi perekonomian Kota Cimahi akan dikembangkan melalui pembentukan Sentra Perdagangan;

Ketiga, Beberapa sektor yang memiliki laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan ekonomi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Pendidikan akan menjadi perhatian untuk terus dikembangkan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi;

Keempat, peningkatan daya saing angkatan kerja dan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi menjadi arah kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Kelima, Pemulihan Sosial ekonomi pasca pandemi covid 19

Keempat arah kebijakan tersebut dia atas adalah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Adapun perkiraan untuk target dari Indikator Makro Ekonomi untuk Tahun 2019-2020 berdasarkan hasil proyeksi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2018 – 2020

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%)	5,64	5,66	5,69
Laju Inflasi (%)	3,18	3,10	3,00
Indeks Gini	0,40	0,40	0,39
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	8,26	7,52	6,78
Angka Kemiskinan (%)	5,80	5,60	5,50

Sumber : RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kota Cimahi didasarkan pada asumsi dasar kebijakan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya. Asumsi dasar kebijakan keuangan daerah terdiri dari Asumsi dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Asumsi Lain-lain. Sedangkan kinerja keuangan daerah terdiri dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah.

3.2.1. Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1.1 Asumsi Dasar dalam APBN

Mencermati perkembangan perekonomian global dan domestik selama lima tahun terakhir, perekonomian nasional ke depan diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan optimisme dalam jangka menengah. Kinerja ekonomi makro cenderung membaik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi meningkat yang didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor, dan inflasi yang relative rendah.

Dari sisi perekonomian global, walaupun perekonomian AS menunjukkan perbaikan, perekonomian dunia masih dibayangi risiko ketidak pastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Risiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia. Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain : (i) adanya *supply constraints* karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai memerlukan terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii) masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii) permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu diatasi melalui kebijakan afirmasi dalam mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan pangan serta penciptaan lapangan kerja; dan (iv) isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan *skill gap* antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan.

Pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan Pemerintah daerah akan semakin memperkuat koordinasi kebijakan sebagai bentuk komitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan tersebut diantaranya dengan melanjutkan pelaksanaan program-program perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional, menjamin kelancaran distribusi antar wilayah serta mendorong terjaganya pasokan barang serta monitoring pergerakan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Di sisi permintaan, Pemerintah akan selalu berupaya menjaga tingkat konsumsi masyarakat, diantaranya melalui kebijakan stabilisasi harga dan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Dalam jangka menengah, inflasi telah ditetapkan dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian ini dilakukan sesuai dengan koridor inflation targeting *framework* agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang

relative rendah. Melalui serangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan inflasi dalam jangka menengah dapat bergerak stabil dan menurun pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar $3,0 \pm 1,0$ persen.

Pasar keuangan global sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh kebijakan moneter di negara maju dan selanjutnya berdampak pada pasar keuangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Melihat kecenderungan normalisasi kebijakan moneter yang masih akan dilakukan AS ke depan, pasar keuangan domestik diperkirakan berpotensi menghadapi risiko tekanan, termasuk terhadap pasarsurat berharga negara.

Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan antara lain yaitu stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga dengan baik dengan laju inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Di sisi lain, kondisi fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang terus dijalankan Pemerintah akan memperkuat fundamental perekonomian domestik agar semakin kondusif, sehingga diharapkan mampu menjaga permintaan terhadap surat berharga negara, termasuk SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2020-2022 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,4-5,4 persen.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam jangka menengah akan dipengaruhi dari faktor fundamental permintaan dan penawaran di pasar keuangan dan faktor non fundamental seperti sentimen dan psikologis pasar. Penawaran akan valuta asing dalam jangka menengah akan bersumber antara lain dari pendapatan valuta asing dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun portofolio), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Sementara dari sisi permintaan, kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi (antara lain mesin-mesin dan bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri), serta pembayaran utang dalam denominasi valuta asing, akan menentukan besarnya permintaan akan valuta asing terutama dolar AS.

Pergerakan harga minyak mentah dunia jangka menengah diperkirakan akan secara bertahap mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian dunia. Namun demikian, adanya potensi kenaikan cadangan minyak AS, penggunaan energial alternatif, seperti *shale gas* dan *biofuel*, serta produksi minyak negara-negara Non OPEC dapat menjadi faktor penahan peningkatan harga

minyak mentah dunia. Namun demikian, faktor-faktor lain yang cukup berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus diwaspadai, seperti perkembangan geopolitik internasional serta gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tentunya akan mengikuti harga minyak dunia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dalam jangka menengah 2020-2022, ICP diperkirakan akan bergerak padakisaran harga US\$65-75 per barel.

Secara alamiah, dalam jangka menengah *lifting* minyak akan mengalami penurunan terutama dikarenakan kapasitas sumur yang semakin menua dan belum optimalnya upaya eksplorasi lapangan minyak yang baru. *Lifting* minyak bumi dalam jangka menengah diperkirakan berada pada kisaran 589-840 ribu bph. Pemerintah akan berupaya menahan penurunan alamiah (*natural declining*) dengan upaya teknis antara lain : (1) mempertahankan program kerja utama hulu minyak (pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur); (2) mempertahankan kegiatan eksplorasi (studi, survei, dan pengeboran); dan (3) mendorong komersialisasi teknologi produksi yang tepat guna (misalnya : mengefisienkan kegiatan EOR). Dalam kaitannya dengan peningkatan daya tarik investasi, Pemerintah akan memperkuat skema kontrak bagi hasil *Gross Split* dan dukungan insentif fiskal serta dukungan lainnya dalam bentuk regulasi. Sementara itu, *lifting* gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan relatif stabil dan berpotensi untuk dapat ditingkatkan pada kisaran 1,19-1,30 juta bsmph. Untuk mendukung pencapaian *lifting* gas bumi pada jangka menengah tersebut, Pemerintah telah menyiapkan beberapa proyek strategis yang menjadi andalan peningkatan produksi gas bumi, antara lain : (1) Lapangan Jangkrik; (2) Blok Muara Bakau; (3) lapangan laut dalam di Selat Makassar yang terdiri atas lima lapangan, yaitu Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha, dan Gadang; serta (4) Lapangan Jambaran Tiung Biru. Pemerintah terus berupaya agar *lifting* gas bumi tersebut dapat tercapai sehingga dapat mengkompensasi turunnya *lifting* minyak, antara lain melalui upaya optimalisasi, pengembangan lapangan baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi kegiatan eksplorasi, serta mendorong investasi di sektor gas.

Tabel 3.7.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2019 – 2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,3	5,5-6,2	5,5-6,4	5,8-6,5
Inflasi (%yoy)	3,5	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,3	4,4-5,4	4,4-5,3	4,4-5,3
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400	14.200-14.500	14.200-14.500	14.200-14.500
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/bare l)	70	65-75	65-75	65-75
Lifting Minyak Mentah (ribu bare l per hari)	750	695-840	651-802	589-800
Lifting Gas (ribu bare l setara minyak per hari)	1.250	1.191-1.300	1.226-1.300	1.250-1.300

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.2 Lain-lain Asumsi

Perekonomian Kota Cimahi akan sangat terkait dengan kondisi perekonomian pada tingkat nasional dan global, oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi harus diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional, dan Regional Jawa Barat terutama pada kebijakan kewilayahan.

Pendekatan pembangunan ekonomi di Kota Cimahi harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi perekonomian lokal, dari hasil analisis stuktur ekonomi Kota Cimahi diperoleh beberapa gambaran sebagai berikut : (1) sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan, namun kedua sektor tersebut menunjukkan trend yang menurun secara presisten; dan (2) Sektor potensial yang terlihat dari nilai pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan dan asuransi dan jasa keuangan.

Menurunnya sektor-sektor unggulan ini mengharuskan Kota Cimahi untuk mengembangkan potensi lain diantaranya melalui pengembangan IKM serta perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan untuk menjawab kebutuhan lokal dijawab dengan dengan menggunakan sebuah pendekatan yang memadukan pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan memperhatikan aspek spasial. Pemaduan antara sektor ekonomi dan lokasi menyebabkan pengembangan perekonomian dilaksanakan dengan menggunakan konsep pengembangan IKM dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, Dampak dari pembangunan ekonomi dengan memperhatikan sektor dan lokasi perkembangannya akan memberikan implikasi bahwa pembangunan perekonomian harus dipandang dari sudut potensi-potensi yang ada di daerah.

Pada tahun ini dilakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020, disebabkan adanya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan salah satu amanat pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah sebagai implementasi dari beberapa peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh beberapa Kementerian/Lembaga untuk menerbitkan peraturan pelaksanaannya, antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- l. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Bila Pendapatan berdasarkan hasil Penyesuaian APBD Tahun 2020 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada APBD Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 3,7 persen. Sisi Belanja juga mengalami kenaikan pada Penyesuaian APBD Tahun 2020 sebesar 1,4 persen dari target pada APBD Tahun 2020. Bila Penyesuaian Belanja pada APBD 2020 dibandingkan dengan Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019 maka terjadi kenaikan sebesar 5,7 persen.

Dengan menggunakan baseline Penyesuaian APBD tahun 2020, maka disusun proyeksi APBD sampai dengan 2022. Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2022, Pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,39%. Dari penurunan 5,39% tersebut terdapat beberapa kelompok Pendapatan yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Komponen yang mengalami kenaikan yaitu kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,88%. Sementara kelompok pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Dana Perimbangan yakni sebesar 2,35%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 20,95%.

Pada sisi Belanja, rata-rata pertumbuhan periode tahun 2015-2019 sebesar 8,9%. Dengan pertimbangan realisasi belanja periode tersebut, maka disusun APBD Tahun 2020. Namun dengan adanya kondisi luar biasa akibat pandemi COVID-19 maka dilakukan penyesuaian berupa *refocussing* maupun realokasi anggaran pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengimbangi kebijakan penghitungan kembali pendapatan sebagaimana arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyebabkan proyeksi Belanja Daerah tahun 2020-2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar 5,97%.

Upaya untuk pemutusan dan pencegahan penyebaran Covid-19 antara lain dengan pembatasan sosial (*social distancing*), pelarangan/pembatasan perjalanan, pembatasan/penutupan perbatasan antardaerah di beberapa daerah di Indonesia, penutupan sekolah, kantor (*work from home*), dan tempat ibadah, telah menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi

penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasokan terganggu. Kondisi menyebabkan memburuknya perekonomian, kondisi sosial, dan pembangunan secara umum.

Dengan pertimbangan kondisi tersebut, maka skenario keuangan sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 diupayakan dengan memprioritaskan belanja untuk:

- a. Penerapan pelayanan dasar.
- b. Percepatan penanganan wabah COVID-19; percepatan penanganan dampak pandemi; dan pemulihan pasca pandemi. Alokasi belanja mulai Tahun 2020 sampai dengan 2022 diarahkan untuk eskalasi belanja bidang kesehatan, peningkatan belanja dan cakupan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan dukungan terhadap dunia usaha termasuk UMKM.
- c. Mendukung pencapaian visi, misi dan prioritas wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022.
- d. Program-program yang mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah Kota Cimahi berasal dari 3 (tiga) komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sampai dengan Tahun 2019, kontribusi terbesar pada Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 59,87 persen disusul oleh PAD sebesar 25,45 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan Kota Cimahi masih bergantung pada dana dari pusat.

Capaian target pendapatan daerah tahun 2019 sebesar 96,90 persen dengan capaian target tertinggi berasal dari PAD, yaitu sebesar 102,50 persen. Meskipun realisasi pendapatan tahun 2019 cukup tinggi namun capaiannya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018. PAD mengalami penurunan sebesar 12,75 persen. Dan mengalami penurunan sebesar 3,99 persen dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan paling besar yaitu sebesar 14,55 persen.

Tabel 3.8.
Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Cimahi Tahun 2015 - 2019

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
4	PENDAPATAN	1.186.804.131.668	1.218.994.660.218	1.481.647.893.979	1.316.230.476.122	1.429.423.973.103	5,4%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	268.816.074.332	286.049.615.484	383.911.991.301	335.016.530.127	379.683.622.773	10,3%
4.1.01	Pajak daerah	112.124.306.126	112.060.908.223	165.391.683.082	134.770.330.583	163.137.074.872	12,5%
4.1.02	Retribusi daerah	9.865.337.459	9.750.932.968	10.239.610.285	12.220.530.827	15.856.395.921	13,2%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.446.400.000	8.819.200.000	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	6,0%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	139.380.030.747	155.418.574.293	199.024.697.934	178.634.468.717	191.392.551.980	9,1%
4.2	Pendapatan Transfer	768.273.983.336	930.501.044.734	1.044.376.882.403	930.736.509.052	1.019.292.270.330	8,0%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	628.232.060.766	788.781.903.794	876.165.791.232	792.525.064.842	840.578.443.727	8,3%
4.2.01.01	Dana perimbangan	628.232.060.766	783.781.903.794	820.783.188.232	788.025.064.842	798.486.304.727	6,7%
	- Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	45.907.112.766	68.092.972.794	77.600.947.922	66.808.176.054	60.483.901.742	9,7%
	- DAU	548.703.908.000	586.582.418.000	576.278.051.000	576.278.051.000	596.026.304.000	2,1%
	- DAK	33.621.040.000	129.106.513.000	166.904.189.310	144.938.837.788	141.976.098.985	74,5%
4.2.01.02	Dana insentif daerah		5.000.000.000	55.382.603.000	4.500.000.000	42.092.139.000	583,7%
4.2.01.03	Dana otonomi khusus						
4.2.01.04	Dana keistimewaan						
4.2.01.05	Dana desa						
4.2.02	Transfer antardaerah	140.041.922.570	141.719.140.940	168.211.091.171	138.211.444.210	178.713.826.603	7,8%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	103.608.830.930	107.318.950.820	117.325.163.171	128.044.295.494	129.853.567.820	5,9%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	36.433.091.640	34.400.190.120	50.885.928.000	10.167.148.716	48.860.258.783	85,7%



RANCANGAN AKHIR **RKPD** KOTA CIMAHI TAHUN 2021

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	149.714.074.000	2.444.000.000	53.359.020.275	50.477.436.943	30.448.080.000	485,0%
4.3.01	Hibah	-	2.444.000.000	2.488.000.000	2.192.000.000	1.764.000.000	
4.3.02	Dana darurat	-	-	-	-	-	
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	146.009.580.000	-	-		-	
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	3.704.494.000	-	50.871.020.275	48.285.436.943	28.684.080.000	

Berdasarkan kondisi di atas, perumusan arah kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya agar capaian target pendapatan daerah bisa optimal. Arah kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber PAD yang masih memungkinkan untuk dioptimalkan agar ketergantungan terhadap dana dari pusat bisa berkurang;
2. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang PAD sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada terutama peraturan tentang pajak dan retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset- aset daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah;
4. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Dari arah kebijakan pendapatan di atas, dihitung proyeksi target dari pendapatan daerah adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 - 2022

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	
4	PENDAPATAN	1.460.263.737.005	1.303.553.305.688	1.319.964.079.733	-5,39%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	413.275.043.058	343.089.425.114	358.820.474.574	4,88%
4.1.01	Pajak daerah	210.856.941.890	147.354.700.773	161.699.013.989	11,51%
4.1.02	Retribusi daerah	19.591.393.672	11.921.324.223	13.388.543.461	13,30%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	9.314.940.000	9.334.580.000	-0,30%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173.435.507.496	174.498.460.118	174.398.337.125	-0,55%
4.2	Pendapatan Transfer	1.046.988.693.947	911.806.600.574	912.486.325.159	-10,51%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	899.308.329.000	779.913.859.000	779.913.859.000	-4,13%
4.2.01.01	Dana perimbangan	820.677.634.000	743.439.939.000	743.439.939.000	-2,35%
4.2.01.02	Dana insentif daerah	78.630.695.000	36.473.920.000	36.473.920.000	-23,96%
4.2.01.03	Dana otonomi khusus				
4.2.01.04	Dana keistimewaan				
4.2.01.05	Dana desa				
4.2.02	Transfer antardaerah	147.680.364.947	131.892.741.574	132.572.466.159	-28,16%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	147.680.364.947	131.892.741.574	132.572.466.159	-5,09%
4.2.02.02	Bantuan keuangan		-	-	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		48.657.280.000	48.657.280.000	
4.3.01	Hibah		-	-	
4.3.02	Dana darurat		-	-	
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-	-	
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS		48.657.280.000	48.657.280.000	

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja dalam APBD dibagi menjadi dua yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komposisi komponen Belanja Daerah Tahun 2019 masih didominasi oleh komponen Belanja Langsung sebesar 60,19 persen dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 58,89 persen. Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 mencapai 88,02 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2017, realisasi belanja tahun 2019 secara umum mengalami penurunan sebesar 1,27% dimana yang mengalami penurunan ada pada komponen Belanja Tidak langsung yaitu sebesar 4,41 persen, sedangkan realisasi untuk komponen Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen. Hal ini dapat dianggap positif karena meningkatnya Belanja Langsung mengindikasikan meningkatnya belanja untuk pembangunan karena Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.10.
Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 – 2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
5	BELANJA	1.074.961.450.668	1.358.743.658.898	1.339.382.098.733	1.489.072.968.877	1.478.740.639.329	8,9%
5.1	Belanja Tidak Langsung	526.116.891.003	607.627.563.859	501.702.378.675	592.738.168.300	607.051.965.713	4,7%
5.1.1	Belanja Pegawai	522.500.128.253	553.346.545.361	483.803.464.386	570.330.482.845	586.641.708.141	3,5%
5.1.2	Belanja Bunga	748.094.650	893.522.830	1.519.531.175	518.723.151	463.851.804	3,3%
5.1.4	Belanja Hibah	2.200.000.000	52.345.818.800	13.947.887.750	16.159.150.000	15.355.225.000	554,2%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	160.000.000	-	344.250.000	3.227.128.000	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten Kota dan Pemerintah desa	618.668.100	723.393.018	1.112.117.364	926.912.304	1.133.383.686	19,1%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	178.916.425	1.319.378.000	4.458.650.000	230.669.082	260,2%
5.2	Belanja Langsung	548.844.559.665	751.134.063.142	837.679.720.058	896.334.800.577	871.688.673.616	13,2%
5.2.1	Belanja Pegawai	79.014.364.196	95.107.639.784	113.042.912.108	88.719.622.895	81.151.842.059	2,3%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.047.103.053	380.857.789.689	454.312.088.607	531.594.947.618	532.918.364.932	17,1%
5.2.3	Belanja Modal	180.783.092.416	275.139.538.669	270.324.719.343	276.020.230.064	257.618.466.625	11,5%
	SURPLUS/DEFISIT	111.842.681.000	139.749.990.679	142.265.795.246	-172.842.492.754	-49.316.666.226	-66,6%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	226.705.454.887	345.974.183.692	197.050.112.792	339.184.615.618	161.850.442.343	7,4%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	226.705.454.887	346.829.691.912	206.225.060.012	340.040.123.838	166.342.122.863	6,6%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	226.925.244.765	338.510.252.912	206.225.060.012	340.040.123.838	166.342.122.863	6,0%
6.1.2	Pinjaman Daerah	768.908.592	-	-	-	-	-
6.1.3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	8.319.439.000	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	988.698.470	855.508.220	9.174.947.220	855.508.220	4.491.680.520	323,3%



RANCANGAN AKHIR RKPD KOTA CIMAHI TAHUN 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
6.2.1	Penyertaan Modal	-	-	-	-	3.499.999.500	-
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	988.698.470	855.508.220	9.174.947.220	855.508.220	991.681.020	221,1%

Sumber : TAPD Kota Cimahi (diolah)

Melihat dari realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Komponen Belanja langsung yang terkait langsung dengan pembangunan tetap dipertahankan lebih besar daripada komponen Belanja Tidak Langsung.

Kode Akun	Uraian	APBD	Penyesuaian APBD	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2020	2021	2022	
4	PENDAPATAN	1.460.263.737.005	1.481.834.265.923	1.303.553.305.688	1.319.964.079.733	-5,39%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	413.275.043.058	326.222.172.597	343.089.425.114	358.820.474.574	4,88%
4.1.1	Pajak Daerah	210.856.941.890	130.064.307.889	147.354.700.773	161.699.013.989	11,51%
4.1.2	Retribusi Daerah	19.591.393.672	10.431.157.212	11.921.324.223	13.388.543.461	13,30%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	9.391.200.000	9.314.940.000	9.334.580.000	-0,30%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	173.435.507.496	176.335.507.496	174.498.460.118	174.398.337.125	-0,55%
4.2	Dana Perimbangan	820.677.634.000	780.032.249.379	743.439.939.000	743.439.939.000	-2,35%
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	59.459.407.000	106.756.503.379	70.164.193.000	70.164.193.000	-17,14%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	600.104.380.000	542.550.698.000	542.550.698.000	542.550.698.000	0,00%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	161.113.847.000	130.725.048.000	130.725.048.000	130.725.048.000	0,00%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	226.311.059.947	375.579.843.947	217.023.941.574	217.703.666.159	-20,95%
4.3.1	Pendapatan Hibah		-	-	-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	147.680.364.947	147.680.364.947	131.892.741.574	132.572.466.159	-5,09%
4.3.4	Dana Penyesuaian		-	-	-	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi		157.858.884.000			
4.3.6	Dana BOS		-	48.657.280.000	48.657.280.000	
4.3.7	Dana Insentif Daerah	78.630.695.000	70.040.595.000	36.473.920.000	36.473.920.000	-23,96%
5	BELANJA	1.541.975.799.737	1.563.546.328.654	1.565.016.140.968	1.376.557.457.160	-5,97%
5.1	Belanja Tidak Langsung	710.945.562.232	844.154.457.015	774.650.390.189	702.398.123.542	-8,78%
5.1.1	Belanja Pegawai	687.484.193.570	630.336.268.755	646.094.675.474	662.247.042.361	2,50%
5.1.2	Belanja Bunga	1.000.000.000	1.000.000.000	19.800.000.000	18.791.666.667	937,45%
5.1.4	Belanja Hibah	18.750.326.480	17.798.326.480	16.721.460.029	16.721.460.029	-3,03%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial			64.068.687.200	-	



RANCANGAN AKHIR RKPD KOTA CIMAHI TAHUN 2021

Kode Akun	Uraian	APBD	Penyesuaian APBD	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2020	2021	2022	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa		-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten Kota dan Pemerintah desa		-	926.912.304	926.912.304	-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.711.042.182	195.019.861.780	27.038.655.182	3.711.042.182	
5.2	Belanja Langsung	831.030.237.505	719.391.871.639	790.365.750.780	674.159.333.618	-2,42%
5.2.1	Belanja Pegawai	84.437.210.909	166.704.799.072	162.537.179.095	158.473.749.618	-2,50%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	534.145.749.028	340.239.794.999	327.981.364.893	415.673.882.962	11,57%
5.2.3	Belanja Modal	212.447.277.568	212.447.277.568	299.847.206.792	100.011.701.038	-12,75%
	SURPLUS/DEFISIT	-81.712.062.732	-81.712.062.731	-261.462.835.280	-56.593.377.427	70,81%

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi pembiayaan daerah Tahun 2019 secara umum telah mencapai target, terutama dari penerimaan pembiayaan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 penerimaan pembiayaan meningkat sebesar 54,56%. Karena penerimaan pembiayaan daerah Kota Cimahi hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) maka peningkatan penerimaan pembiayaan juga diafrtikan sebagai peningkatan dari SILPA. Dilihat dari sisi pelaksanaan anggaran adanya peningkatan SILPA yang cukup besar dipandang tidak baik karena menggambarkan adanya anggaran yang tidak terserap secara optimal di luar adanya efektifitas penggunaan anggaran.

Melihat pada realisasi kinerja pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah hanya mencakup pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Agar pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada SILPA maka peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan peningkatan sumber lain pembiayaan salah satunya dengan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Kebijakan lain yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang akan mempengaruhi proyeksi APBD tahun-tahun mendatang yaitu melakukan pinjaman sebesar Rp180.000.000.000,- ke Bank BJB untuk keperluan pembelian lahan dalam rangka pengembangan RSUD Cibabat. Rencana tersebut merupakan kebutuhan atas dasar pertimbangan peningkatan kualitas pelayanan sehingga kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dipenuhi. Nilai pinjaman tersebut diperoleh dengan perkiraan kebutuhan lahan seluas 20.000 meter² dan harga per meter² yaitu Rp9.000.000,-. Berdasarkan hasil analisis Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD), pokok pinjaman serta bunga pinjaman menjadi beban Tahun 2021 sampai dengan sampai Tahun 2030 (10 tahun). Dengan kondisi tersebut menyebabkan belanja pada Tahun 2021 cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Atas dasar arah kebijakan tersebut maka proyeksi target pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 – 2022

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	
6	PEMBIAYAAN	81.712.062.732	261.462.835.280	56.593.377.427	70,81%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	86.641.871.069	261.462.835.280	76.593.377.427	65,53%
6.1.01	SILPA	86.641.871.069	81.462.835.280	76.593.377.427	-5,98%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	180.000.000.000	-	
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.929.808.337	-	20.000.000.000	
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337	-	20.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	2.500.000.000	-	-	
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	

Sumber: hasil analisis, 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD dan prioritas pembangunan daerah yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Bagian ini akan menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan dari tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Keterhubungan dokumen-dokumen tersebut akan berlaku sebagai arahan dalam pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2021.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Empat pilar yang terkandung dalam RPJMN ke-4 Tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan nasional yaitu : (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang maju dan kokoh; (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Tema pembangunan yang diusung dalam RPJMN ke-4 ini adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”.

Ada tujuh agenda pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :
- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah;
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
- Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :
- a. Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
 - b. Memajukan kebudayaan;
 - c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
 - e. Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :
 - a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
 - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Meningkatkan Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut :

1. **Jabar Juara Lahir Batin** : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

- baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri;
2. **Inovasi** : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan;
 3. **Kolaborasi** : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi :

Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas : Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berikut ini Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
		2. Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk
		3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
		5. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
		6. Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan
		7. Menurunnya Tingkat Pengangguran
		8. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal
		9. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
		2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusatpusat perekonomian
		3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
		4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan
	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
		2. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik
		3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan
		2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
		4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya good governance dan whole of government	1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel
		2. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

4.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

“Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis Dan Berbudaya”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Maju

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

2. **Agamis**

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketentuan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

3. **Berbudaya**

Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang

menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut, maka misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Berikut ini misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi tahun 2017-2022.

Tabel 4.2
Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Cimahi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Tahun 2021
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
MISI 1 :								
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul								
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	74,1	74,72	74,15	74,81	74,89	74,96
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,47	82,69	82,49	82,91	82,99	83,08
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25	1,12	1,2	1,07	1,04	1,02
MISI 2 :								
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik								
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	B	B	BB	B	B	B
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	75	68	77	72	72	72
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	78	80,99	80	80,75	81,56	82,37
MISI 3 :								
Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan								
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	5,64	5,68	5,66	6,84	2	2,01
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,4	0,364	0,4	36,30%	0,39	0,39
		Indeks Williamson	0,34	-	0,33	-	0,32	-
	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,77	4,94	5,61	4,39	8,35	7,8
TPT		8,26	7,93	7,52	8,08	15,05	14,12	
MISI 4 :								
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan								
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	D	C	D	C	C	C
Meningkatkan kualitas permukiman	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98	95	100	96,06	95,1	95,57

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Tahun 2021
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	76,75	82,66	83,41	75,98	69,9	70,25
	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,31	0,14	0,23	0,07	0,08	0,07
	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air bersih	70,52	69,34	72,02	70,35	63,32	63,63
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Rasio luas kawasan kumuh	3,96	1,88	3,78	3,16	3,48	3,47
Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas resiko sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	32,25	32,67	33,3	46,8	49,14	51,6
MISI 5 :								
Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan								
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80	95,1	80	100	97,2	98,3
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,63	77,21	73,75	n/a	78,83	79,65
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,3	92,36	92,5	92,2	92,7	92,85

Sumber : RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

4.2.1. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah Peningkatan Daya Saing Kota Melalui Pemerataan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditunjang dengan Kemantapan Infrastruktur, dan berdasarkan hasil analisa permasalahan pembangunan Kota Cimahi serta Isu Strategis yang disusun pada bab sebelumnya dapat terlihat bahwa ada kesesuaian antara permasalahan dan isu strategis di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Isu strategis diperoleh melalui hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal yang meliputi (1) Isu strategis Kota Cimahi Tahun 2017-2022; (2) Capaian pembangunan tahun/periode sebelumnya dan permasalahan pembangunan ; (3) Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Tahun 2020; (4) Isu Strategis Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020; (5) Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*); dan (6) Kondisi Global. Lima Belas isu strategis pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah :

1. Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Penanggulangan Pengangguran;
4. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan;
5. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertansportasi;
7. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
9. Optimalisasi Kualitas Pendidikan;
10. Optimalisasi Kualitas Kesehatan;
11. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
12. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;
13. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk;
14. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
15. Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Cimahi, tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2021 adalah :

“Mempercepat pemulihan Sosial dan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas”

Selain itu, prioritas pembangunan ini harus diselaraskan dengan Prioritas Wali Kota yang tertuang dalam janji politik dan tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yaitu : (1) 1.000 Lapangan Kerja; (2) Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan; (3) Gratis Raskin; (4) Santunan Kematian Masyarakat Ber-KTP; (5) Gratis Ijin Usaha Khusus UMKM, Kemudahan Birokrasi; (6) Tambahan Insentif RT/RW; (7) Alokasi Anggaran Rp.100.000.000,- disetiap RW Per-Tahun; (8) Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance di Setiap Kelurahan; (9) Tambahan Penghasilan Guru; (10) Tambahan Insentive Guru Ngaji; (11) Tambahan Fasilitas dan Insentive Guru PAUD; (12) Bebas SPP; (13) Keringanan DSP SMU/SMK; (14) Kesejahteraan Buruh; (15) Kestabilan Keberlangsungan Industri; (16) Kemudahan Birokrasi; (17) Pembangunan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri; (18) Pengembangan Pasar Tradisional; (19) Optimalisasi Sarana Olahraga; (20) Pembangunan "Imah Seni Budaya" Cimahi; dan (21) Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka Publik.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2021 yang ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Prioritas pembangunan dilakukan untuk mengentaskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Cimahi. Adapun **prioritas pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021**, yaitu :

1. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif terutama percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19;
3. Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi;
4. Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
5. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan;
6. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan;
7. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata;
8. Peningkatan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah terutama untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19;
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
10. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
11. Penguatan dan pemaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas; dan
12. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD Kota Cimahi Tahun 2021) dan capaian kinerja yang direncanakan di dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 terdapat pada tabel berikut :



Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2021

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

MISI 1 :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2021
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	74,25
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,53
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,1

MISI 2 :
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2021
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	A
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	82
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	84

MISI 3 :
Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2021
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	0,0572
		Indeks Gini	0,39
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Williamson	0,31
		Angka Kemiskinan	0,051
	Menurunnya kemiskinan	TPT	6,05%

MISI 4 :
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2021
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS)	D
Meningkatkan kualitas permukiman	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	100%
	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	92,81%
	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,08%
	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air bersih	86,49%
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Rasio luas kawasan kumuh	1,29%
Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kelas Resiko Sedang
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	34,66

MISI 5 :
Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Capaian Tahun 2021
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80%
	Meningkatnyapengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,5
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,85

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,64%	5,79%
1.1.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah)	26.829.041	38.417.484
1.1.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah)	19.945.299	24.927.253
1.1.4	Laju Pertumbuhan Investasi	n/a	2,42%
1.1.5	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	5,68%	5,79%
1.1.6	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,81%	5,85%
1.1.7	PDRB per kapita (juta rupiah)	43,65	54,55
1.1.8	Indeks Gini	0,41	0,39
1.1.9	Pengeluran Per Kapita Disesuaikan (Juta Rp/Tahun)	11.204	11.862
1.1.10	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	0,17%	0,17%
1.1.11	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) per kecamatan	0,35	0,31
1.1.12	Kontribusi PDRB Per Kecamatan terhadap PDRB Kota	CS:58,76% CT:25.36% CU:15.88%	CS:55% CT:27% CU:18%
1.1.13	Angka Kemiskinan	5,92%	5,141%
1.1.14	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,0%	6,05%
1.1.15	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	0,76%	2,51%
1.1.16	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49%	7,40%
1.1.17	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	6,67%
1.1.18	Jumlah KK yang terverifikasi dan tervalidasi untuk menerima BPNT	18724	18724
1.1.19	Persentase PAD terhadap pendapatan	22,32%	34,16%
1.1.20	SAKIP	CC	A
1.1.21	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.1.22	Indeks Profesionalitas ASN	75%	82%
1.1.23	Survey Kepuasan Masyarakat	76	84
1.1.24	Persentase Prolegda yang disahkan	89%	95%
1.1.25	Nilai LAKIP	60,68 (B)	85 (A)
1.1.26	Persentase Penyelesaian atau penanganan permasalahan hukum	100%	100%
1.1.27	Level APIP sesuai standar kompetensi menuju level APIP/IACM (Internal Audit Capability Model) berkelanjutan	Level 1	Level 3
1.1.28	Nilai Maturitas SPIP	1.2	3
1.1.29	Persentase Kenaikan PAD dari Sektor Pariwisata	15%	19%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
2.1	Pendidikan		
2.1.1	Indeks Pendidikan	74	74
2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	10,98	11,4
2.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101,69	102,77
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	95,73	96,81

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4
2.1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	96,38	97,46
2.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	88,73	89,81
2.1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	75,29	76,37
2.1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	78,24	79,32
2.1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	76	77,08
2.1.10	Persentase TK terakreditasi	Akreditasi TK A (1,79%)	37,50%
2.1.11	Persentase PAUD terakreditasi	Akreditasi PAUD B (3,10%)	35,40%
2.1.12	Angka Melek Huruf (AMH)	99,980	99,988
2.1.13	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	PKBM 28, LKP 52, yang terakrditaSI pkbm 7, lkp 1 (10%)	73%
2.1.14	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah SD	215	235
2.1.15	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK yang memenuhi standar kompetensi	75	80
2.1.16	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	SD (rata-rata UKG 52)	80
2.1.17	Persentase SD yang terakreditasi A	SD akreditasi A (50 sekolah dari 125/ 40%)	70,40%
2.1.18	Persentase SD yang terakreditasi B	SD akreditasi B (57,6%)	29,60%
2.1.19	Persentase angka kelulusan SD	100%	100%
2.1.20	Nilai Rata-rata UN SMP	216	271
2.1.21	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	SMP (rata-rata UKG 55,5)	80
2.1.22	Persentase SMP yang terakreditasi A	SMP akreditasi A 22 dari 36 (61%)	80,56%
2.1.23	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi B	SMP akreditasi B (27,78%)	16,67%
2.1.24	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi C	SMP akreditasi C (2,78%)	2,78%
2.1.25	Persentase angka kelulusan SMP	100%	100%
2.1.26	% siswa kelas II paham literasi	N.A	85%
2.1.27	Tingkat capaian kota layak anak	500 (Pratama)	575
2.1.28	Peningkatan Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Madya
2.1.29	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	0	5
2.1.30	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	91,82	100
2.1.31	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,09	100
2.1.32	Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	32,60%	35
2.1.33	Persentase Ibu hamil KEK	2,41 %	< 10 %
2.1.34	persentase stunting pada Batuta	12,04%	< 12,04%
2.1.35	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100
2.1.36	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	52,66	70
2.1.37	Cakupan pembinaan Sekolah ber-PHBS	100	100
2.1.38	Cakupan RW Siaga Aktif yang meningkat stratanya	37,18	63
2.1.39	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	NA	11
2.1.40	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat bermain anak	NA	11
2.1.41	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100 % (100 unit)	100%
2.1.42	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	81,99	85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4
2.1.43	Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	70,5	72
2.1.44	Persentase rumah sehat	63,96%	67
2.1.45	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	109,89	100
2.1.46	Angka Bebas Jentik (ABJ)	81,17	≥95%
2.1.47	Penemuan Kasus AFP ≥ 2 per 100.000 pddk < 15 tahun	6,15	≥ 2/100000
2.1.48	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100
2.1.49	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,6	94
2.1.50	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	3,08	100
2.1.51	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	7,88	100
2.1.52	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	15,62	100
2.1.53	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	72,63	100
2.1.54	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	6 pos	12
2.1.55	Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans) di Kelurahan	0	15
2.1.56	Terjaminnya perlindungan kesehatan bagi 40 % PBI JKN Kota Cimahi	95,91%	100
2.1.57	Persentase kepesertaan ke FKTP Puskesmas Kota Cimahi	57,37%	61,75%
2.1.58	1. Pelayanan Gawat Darurat (Jumlah Pasien)	46.429	50.256
2.1.59	2. Pelayanan Rawat Jalan (Jumlah Pasien)	180.890	195.802
2.1.60	3. Pelayanan Rawat Inap (Jumlah Pasien)	28.994	31.384
2.1.61	4. Pelayanan Bedah Sentral (Jumlah Tindakan)	4.137	4.478
2.1.62	5. Pelayanan Persalinan (Jumlah Pasien)	2.352	2.546
2.1.63	6. Pelayanan ICU (Jumlah Pasien)	649	702
2.1.64	7. Pelayanan Radiologi (Jumlah Tindakan)	23.119	25.025
2.1.65	8. Pelayanan Lab Klinik (Jumlah Tindakan)	387.876	459.448
2.1.66	9. Pelayanan Lab PA (Jumlah Tindakan)	2.065	2.236
2.1.67	10. Pelayanan Farmasi (Jumlah Resep)	227.493	263.352
2.1.68	11. Pelayanan UTD RS ((Jumlah Labu Darah)	13.300	14.396
2.1.69	12, Pelayanan Hemodialisa (Jumlah Tindakan)	7.549	16.128
2.1.70	13. Pelayanan Rehabilitasi Medis (Jumlah Pasien)	19.552	21.164
3.1	Kesehatan		
3.1.1	Indeks Kesehatan	82,45	82,53
3.1.2	AKI	113,98	100
3.1.3	AKB	6,17	6,9
3.1.4	Angka Kesakitan	41,9	40,3
3.1.5	Indek Keluarga Sehat	NA	41,5
3.1.6	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	88%	95%
3.1.7	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	92,31
3.1.8	Kepuasan pelanggan Pelayanan Kesehatan Dasar	73,25%	75,00%
3.1.9	Prevalensi kurang gizi	6,91	< 10 %

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4
4.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
4.1.1	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	17%	83%
4.1.2	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	D	D
4.1.3	Rasio volume kapasitas (VCR)	0,84	0,73
4.1.4	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	105.193 m	108.073
4.1.5	Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	2,660 m	3.634
4.1.6	% kondisi jalan dan jembatan yang mantap	92,4%	94,5%
4.1.7	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	1,51%	0,52%
4.1.8	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,53	74,70
4.1.9	Persentase luas taman terhadap luas kota	0,191%	0,241%
4.1.10	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	58,82%	94,12%
4.1.11	Persentase bangunan berizin	29,60%	33,40%
4.2	Penataan Ruang		
4.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
4.3.1	Persentase pengelolaan sampah	87%	100%
4.3.2	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	76,50%	95,56%
4.3.3	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,38%	0,08%
4.3.4	Persentase cakupan pelayanan air bersih	68,42%	76,94%
4.3.5	Rasio Luas Kawasan Kumuh	4,39%	1,29%
4.4	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
4.4.1	Persentase penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54%	79%
4.4.2	Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%
4.4.3	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
4.4.4	Waktu Tanggap Bencana	15 menit	15 menit
4.4.5	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	100%	100%
4.4.6	Persentase luasan banjir terhadap luas kota	1,04%	0,28%
4.4.7	dokumen kajian mitigasi bencana	0	0
4.4.8	jumlah kejadian bencana yang ditangani	130 kejadian	65
C	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
4.5	Tenaga Kerja		
4.5.1	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616 orang	309,563
4.6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,23%	92,85%
4.6.2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100%	100%
4.6.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,38%	74,50%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4
4.6.4	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,30%	31%
4.6.5	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	24%	20%
4.6.6	Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	45,94%	47,25%
4.6.7	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70%	100%
4.7	Pangan		
4.7.1	Pola Pangan Harapan (PPH)	82,1	84,1
4.7.2	PPH ketersediaan	96,2	97
4.7.3	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	11	14
4.7.4	Penguatan cadangan pangan	0	16 ton
4.8	Pertanahan		
4.8.1	Penyelesaian izin lokasi	100%	100%
4.9	Lingkungan Hidup		
4.9.1	Indeks Kualitas Udara	39,24	45
4.9.2	Indeks Kualitas Air	38,8	40,8
4.9.3	Indeks Tutupan Lahan /Vegetasi	34,15	34,90
4.9.4	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15%	12,04%
4.9.5	Tersusunnya RPPLH Kota	0	1
4.10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
4.10.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	95.2%	99%
4.10.2	Cakupan penerbitan akte kelahiran	69%	85%
4.10.3	Cakupan penerbitan akte kematian	58.1%	80%
4.10.4	Cakupan penerbitan kartu keluarga	95.2%	99%
4.11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
4.11.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,31%	1,10%
4.11.2	Total Fertility Rate (TFR)	1,98	1,97
4.11.3	Rasio Akseptor KB	78,51%	78,90%
4.11.4	Persentase lembaga yang berdaya	100%	100%
4.11.5	Tingkat keswadayaan masyarakat	NA	45%
4.12	Perhubungan		
4.12.1	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	65%	72%
4.12.2	Persentase Angkutan yang Layak jalan	51,5%	90,3%
4.12.3	Persentase titik kemacetan	72%	70%
4.12.4	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	11,94%	62,4%
4.12.5	Persentase tersedianya halte dan terminal	57,69%	88,46%
4.13	Komunikasi dan Informatika		
4.13.1	Cakupan pengembangan e-Government daerah	10%	50%
4.13.2	Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40%	60%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4
4.14	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
4.14.1	Prosentase kenaikan omset IKM/UKM selama mengikuti pameran promosi	5%	21%
4.14.2	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional	23 IKM/UKM	119 IKM/UKM
4.14.3	Jumlah wirausaha baru	15 WUB	55 WUB
4.14.4	Jumlah Koperasi aktif	90	110
4.14.5	Jumlah IKM yang memenuhi standar mutu	120 IKM	920 IKM
4.14.6	Regulasi kebijakan pengembangan industri kota	0	1
4.15	Penanaman Modal		
4.15.1	jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	5
4.15.2	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	125	205
4.15.3	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rp 8.953.319.609.542	Rp 9.170.150.000.000
4.16	Kepemudaan dan Olah Raga		
4.16.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50%	85%
4.16.2	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18%	56,36%
4.16.3	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	49,14%	88,45%
4.16.4	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	3,03%	51,5%
4.16.5	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	0%	100%
4.17	Statistik		
4.17.1	Persentase ketersediaan data statistik daerah	NA	65%
4.18	Persandian		
4.18.1	Persentase informasi yang aman	NA	3%
4.19	Kebudayaan		
4.19.1	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	52%
4.20	Perpustakaan		
4.20.1	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78,6	78,8
4.20.2	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	60	70
4.21	Kearsipan		
4.21.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	NA	15%
D	LAYANAN URUSAN PILIHAN		
4.22	Pariwisata		
4.22.1	Rasio Destinasi Wisata Baru		-
4.22.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		-
4.22.3	Jumlah destinasi wisata yang dikelola dengan baik	0	2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4
4.22.4	jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	546	670
4.22.5	jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	3526	5160
4.23	Pertanian		
4.23.1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	305 ton	305 ton
4.23.2	Produksi Hasil Peternakan (Daging dan Susu)	Daging : 100 ton/tahun; Susu : 750 l/tahun	Daging : 105 ton/tahun; Susu : 900 l/tahun
4.23.3	Produksi hasil tanaman padi(ton)	1674,13	1680,84
4.23.4	Produktivitas hasil tanaman padi(ton/Ha)	6,5	6,7
4.26	Perdagangan		
4.26.1	Cakupan Bina Kelompok pedagang	N/A	5 kelompok
4.26.2	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	17,73%	17,80%
4.26.3	Jumlah sentra jasa dan perdagangan	0	1
4.27	Perindustrian		
4.27.1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	45,71%	45,80%
4.27.2	Persentase kenaikan UMK	8,71%	9,49%
4.27.3	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2	4
E	PENUNJANG URUSAN		
4.30	Perencanaan Pembangunan		
4.30.1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%
4.30.2	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%
4.31	Keuangan		
4.31.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
4.31.2	Persentase SILPA	32,21%	12,05%
4.31.3	Persentase SILPA terhadap APBD	n.a	7,73%
4.31.4	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung	69,97%	55,94%
4.31.5	Persentase dokumen anggaran yang tepat waktu	70%	80%
4.31.6	Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu	90%	98%
4.31.7	Persentase kelengkapan dokumen milik daerah	90%	98%
4.31.8	Persentase peningkatan pajak daerah	5-10%	7-11%
4.31.9	Realisasi target Pendapatan Daerah Total	89,00%	91%
4.32	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
4.32.1	Persentase ASN yang kompeten	75%	78%
4.32.2	Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan yang sama	30%	22%
4.32.3	persentase pelanggaran disiplin	10%	6%
4.33	Penelitian dan pengembangan		
4.33.1	Persentase kajian, penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan	NA	75%
	Sistem Inovasi Daerah		

BAB VII PENUTUP

Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dan merupakan Rencana Pembangunan Tahun ke 4 (empat) dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rencana pembangunan haruslah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk mencapai sasaran program-program yang telah direncanakan di dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2020, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, serta memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021. RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI** **RKPD
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2020**